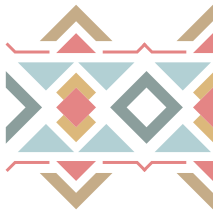




LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN III- 2017

LAPORAN TRIWULANAN
TRIWULAN III - 2017



Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Phone. (021) 29600000
fax. (021) 386 6032

Kata Pengantar



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbingan-Nya, OJK dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengemban tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen keuangan.

Pemulihan perekonomian global pada triwulan III-2017 melanjutkan pemulihan meskipun diwarnai ketidakpastian yang ditunjukkan melalui indikator ekonomi negara maju maupun berkembang yang menunjukkan perkembangan positif, namun belum pada level yang solid. Di tengah peningkatan risiko geopolitik, perekonomian Amerika Serikat tercatat mengalami pemulihan yang cukup solid tercermin dari perbaikan angka pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan tingkat inflasi, dan peningkatan *Personal Consumption Expenditures*. Kinerja Perekonomian Zona Euro

juga mencatatkan perkembangan positif seiring dengan kebijakan moneter yang akomodatif tercermin dari penurunan tingkat pengangguran yang mencapai rekor terendah serta stabilnya tingkat inflasi. Di kawasan Asia, perekonomian Jepang menunjukkan perbaikan tercermin dari beberapa indikator di antaranya tingkat inflasi mencapai tingkat tertinggi dan meningkatnya kinerja ekspor. Sementara itu, pemulihan perekonomian Tiongkok menunjukkan tanda-tanda pemulihan tercermin dari pertumbuhan ekspor dan impor yang menunjukkan kecenderungan meningkat sehingga neraca perdagangan menunjukkan tren positif.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global yang semakin baik, stabilitas makroekonomi domestik sepanjang triwulan III-2017 dalam kondisi terjaga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%. Meningkatnya pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya



Kata Pengantar

kinerja investasi dan ekspor, disertai kinerja konsumsi yang relatif terjaga. Persepsi risiko dan prospek perekonomian Indonesia terpantau membaik seiring masih terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri. Selain itu, dari sisi kinerja perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus sebesar USD3,21 miliar yang didorong oleh surplus dari neraca perdagangan nonmigas yang meningkat signifikan.

Kinerja Industri Jasa Keuangan dalam negeri secara umum masih terjaga. Intermediasi lembaga jasa keuangan terpantau menunjukkan perbaikan walaupun belum sesuai dengan yang diharapkan sebagai akibat dari masih belum solidnya kondisi sektor riil. Industri Perbankan mencatat perkembangan positif dengan kenaikan total aset, kredit dan dana pihak ketiga Bank Umum masing-masing sebesar 1,77% (*qtq*), 1,17% (*qtq*) dan 1,92% (*qtq*). Sementara itu, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) juga menunjukkan pertumbuhan positif tercermin dari total aset industri IKNB dan piutang pembiayaan yang disalurkan berada dalam tren peningkatan sebesar masing-masing 3,99% (*qtq*) dan 1,12% (*qtq*). Pada Industri Pasar Modal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

kembali mengalami penguatan ke level 5.900,85 atau meningkat sebesar 1,22% (*qtq*), dengan *net sell* nonresiden sebesar Rp28,1 triliun. Sejalan dengan kinerja di pasar saham, pasar surat utang juga melanjutkan tren penguatan dengan penurunan *yield* SBN rata-rata sebesar 42 bps dengan *net buy* nonresiden sebesar Rp48,8 triliun. Kinerja Reksa Dana juga cukup menggembirakan ditandai oleh pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana yang meningkat 8,15% (*qtq*).

Pada bidang pengaturan, OJK menerbitkan 10 Peraturan OJK (POJK) baru untuk memperkuat sektor jasa keuangan. POJK yang diterbitkan terdiri dari dua POJK yang mengatur sektor Perbankan, enam POJK yang mengatur sektor Pasar Modal serta dua POJK yang mengatur sektor IKNB. OJK juga melakukan konversi peraturan yang berasal dari lembaga sebelumnya sebanyak 14 POJK. Pada bidang pengawasan, beberapa kegiatan strategis dilakukan dalam rangka pengembangan fungsi pengawasan di sektor jasa keuangan, antara lain: *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT), penyusunan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) 2017, serta Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu di Makassar dan Bali.

Pada bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan antara lain melalui implementasi Sistem Informasi PELAKU (SIPELAKU) di tiga daerah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Solo, dan Tegal, pelaksanaan *Outreach* Program Keuangan Syariah, Peluncuran *e-Book* "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan" tingkat SMA serta Buku Seri Literasi Keuangan Segmen Profesional dan Pensiunan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen, OJK melakukan beberapa kegiatan strategis antara lain, *update list* investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam *Investor Alert Portal* (IAP), serta melakukan beberapa program sosialisasi dengan tema "Bijak Berinvestasi"

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, OJK berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dan pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SIMFOSIA). OJK juga mengembangkan sarana infrastruktur untuk mendukung pengawasan

sektor jasa keuangan dan pengelolaan manajemen internal, melalui pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR) serta Sistem Informasi Pengelolaan Pekerjaan (SIPEKA).

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai strategis institusi. OJK berupaya memperbaiki kinerjanya secara terus menerus dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan anggota Komite Stabilitas Sektor Jasa Keuangan dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, dalam rangka mewujudkan industri keuangan nasional yang stabil, kontributif dan inklusif.

**Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan**



Wimboh Santoso

DAFTAR ISI

iii	KATA PENGANTAR
vi	DAFTAR ISI
viii	DAFTAR TABEL
x	DAFTAR GRAFIK
xii	DAFTAR GAMBAR
xiii	RINGKASAN EKSEKUTIF
1	BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN
3	1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
3	1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
5	1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
7	1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
8	1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
8	1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional
12	1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
13	1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
15	1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
17	1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
17	1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
20	1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek
21	1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi
23	1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
26	1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
28	1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
29	1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS
30	1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
32	1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan
35	1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
36	1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
37	1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
39	1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
40	1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro
40	1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK
40	1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)
41	1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan <i>Guideline</i> (JARING)
42	1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)
42	1.5.4 Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil
42	1.5.5 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)
42	1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
43	1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
43	1.5.8 Asuransi Nelayan
43	1.5.9 Asuransi Kerangka Kapal
43	1.5.10 Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif
45	BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN
47	2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
47	2.1.1 Pengaturan Bank
49	2.1.2 Pengaturan Pasar Modal
50	2.1.3 Pengaturan IKNB
53	2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN
53	2.2.1 Pengawasan Terintegrasi
53	2.2.2 Pengawasan Perbankan
58	2.2.3 Pengawasan Pasar Modal
65	2.2.4 Pengawasan IKNB
76	2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1	Pengembangan Pengawasan Terintegrasi	76
2.3.2	Pengembangan Industri Perbankan	77
2.3.3	Pengembangan Industri Pasar Modal	78
2.3.4	Pengembangan IKNB	80
2.4	STABILITAS SISTEM KEUANGAN	81
2.4.1	Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan	81
2.4.2	Respons Kebijakan	83
2.5	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	84
2.5.1	Inklusi Keuangan	84
2.5.2	Literasi dan Edukasi Keuangan	85
2.5.3	Perlindungan Konsumen	88
2.5.4	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan	92
2.5.5	<i>Market Conduct</i>	94
2.6	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN	95
2.6.1	Koordinasi dengan Instansi Terkait	96
2.6.2	Penanganan Perkara	96
2.6.3	Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)	96
2.6.4	Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Tim Kerja SWID	96
2.6.5	Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi	96
2.7	PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	96
2.7.1	Pelaksanaan <i>Mutual Evaluation Review</i> (pre-MER) Indonesia tahun 2017	96
2.7.2	Penyusunan Laporan <i>Sectoral Risk Assessment</i> (SRA)	98
2.7.3	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester I-2017	99
2.7.4	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	99
2.8	HUBUNGAN KELEMBAGAAN	100
2.8.1	Kerja sama Domestik	100
2.8.2	Kerja sama Internasional	101
2.9	HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER	102
BAB III.	TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	103
3.1	TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH	105
3.1.1	Perkembangan Perbankan Syariah	105
3.1.2	Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah	107
3.1.3	Perkembangan IKNB Syariah	110
3.2	PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	112
3.2.1	Pengaturan Perbankan Syariah	112
3.2.2	Pengaturan Pasar Modal Syariah	113
3.2.3	Pengaturan IKNB Syariah	113
3.3	PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	113
3.3.1	Pengawasan Perbankan Syariah	113
3.3.2	Pengawasan Pasar Modal Syariah	114
3.3.3	Pengawasan IKNB Syariah	115
3.4	PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH	115
3.4.1	Pengembangan Perbankan Syariah	115
3.4.2	Pengembangan Pasar Modal Syariah	119
3.4.3	Pengembangan IKNB Syariah	120
BAB IV.	MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI	121
4.1	MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK	123
4.1.1	Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja	123
4.1.2	Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK	124
4.2	AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS	125
4.3	RAPAT DEWAN KOMISIONER	126
4.4	KOMUNIKASI	128
4.4.1	Komunikasi Informasi OJK	128
4.4.2	Kunjungan Instansi	129

130		4.4.3 OJK TV
130	4.5	KEUANGAN
130		4.5.1 Anggaran dan Penggunaan
131		4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan
131	4.6	SISTEM INFORMASI
131		4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok
132		4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi
133	4.7	LOGISTIK
133		4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat
133		4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK
133		4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik
133	4.8	SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI
133		4.8.1 Pengembangan Organisasi
134		4.8.2 Kebijakan Sumber Daya Manusia
135		4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
136	4.9	OJK INSTITUTE
136		4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)
137		4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi
137		4.9.3 Program Pendidikan Formal
137		4.9.4 Program Pengenalan Calon Pegawai
137		4.9.5 Program Penugasan
138		4.9.6 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan
138		4.9.7 Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti
138		4.9.8 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK
138	4.10	MANAJEMEN PERUBAHAN
138		4.10.1 Program Budaya
139		4.10.2 <i>Monitoring</i> Program Budaya
140		4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan
141		Akronim

DAFTAR TABEL

5	Tabel I - 1	Proyeksi IMF dalam <i>World Economic Outlook</i> Oktober 2017
9	Tabel I - 2	Kondisi Umum Perbankan Konvensional
9	Tabel I - 3	Tingkat Konsentrasi Aset BUK
11	Tabel I - 4	Kondisi Umum BPR
13	Tabel I - 5	Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan
14	Tabel I - 6	Konsentrasi Penyaluran UMKM
14	Tabel I - 7	Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)
15	Tabel I - 8	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)
19	Tabel I - 9	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham
19	Tabel I - 10	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (laporan CTP PLTE)
20	Tabel I - 11	Jumlah Perusahaan Efek
20	Tabel I - 12	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat
20	Tabel I - 13	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
20	Tabel I - 14	Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek
20	Tabel I - 15	Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas
21	Tabel I - 16	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
21	Tabel I - 17	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya
22	Tabel I - 18	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif
22	Tabel I - 19	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin
23	Tabel I - 20	Perkembangan Jumlah dan Nilai Emisi
23	Tabel I - 21	Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan III-2017 (dalam jutaan rupiah)
24	Tabel I - 22	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

Tabel I - 23	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	24
Tabel I - 24	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	24
Tabel I - 25	Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang	25
Tabel I - 26	Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri	26
Tabel I - 27	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	26
Tabel I - 28	Perusahaan Berdasarkan Hasil Pemeringkat Efek	27
Tabel I - 29	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	28
Tabel I - 30	Pendidikan Profesi Lanjutan Akuntan Triwulan III-2017	28
Tabel I - 31	Pendidikan Profesi Lanjutan Konsultan Hukum Triwulan III-2017	28
Tabel I - 32	Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Triwulan III-2017	28
Tabel I - 33	Total Aset IKNB Konvensional (dalam triliun rupiah)	28
Tabel I - 34	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam triliun rupiah)	29
Tabel I - 35	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS	30
Tabel I - 36	Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS	30
Tabel I - 37	RBC Industri Asuransi	30
Tabel I - 38	Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)	31
Tabel I - 39	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)	31
Tabel I - 40	Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah)	31
Tabel I - 41	Jumlah Dana Pensiun	32
Tabel I - 42	Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan	33
Tabel I - 43	Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)	33
Tabel I - 44	NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi	34
Tabel I - 45	Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah)	35
Tabel I - 46	Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (dalam miliar rupiah)	36
Tabel I - 47	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam miliar rupiah)	39
Tabel I - 48	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	40
Tabel I - 49	Jumlah LKM	40
Tabel I - 50	Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (miliar Rupiah)	40
Tabel I - 51	Realisasi Laku Pandai Triwulan II-2017	40
Tabel I - 52	NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)	42
Tabel I - 53	Jumlah Kapal yang Terlindungi Asuransi Penyingkiran Kapal	43
Tabel II - 1	Pemeriksaan Bank Umum	54
Tabel II - 2	Pemeriksaan Khusus Bank	54
Tabel II - 3	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan	54
Tabel II - 4	<i>Track Record</i> Tindak Tipibank	55
Tabel II - 5	Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	55
Tabel II - 6	Pemberian Keterangan Ahli/Saksi	55
Tabel II - 7	Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUK*	56
Tabel II - 8	Jaringan Kantor Bank Umum	57
Tabel II - 9	FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum	57
Tabel II - 10	Perizinan BPR	57
Tabel II - 11	Daftar Hasil <i>Fit and Proper Test New Entry</i> BPR	58
Tabel II - 12	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	61
Tabel II - 13	Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik	61
Tabel II - 14	Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	65
Tabel II - 15	Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun	66
Tabel II - 16	Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan	67
Tabel II - 17	Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan	67
Tabel II - 18	Pendampingan Langsung Penyusunan Laporan Keuangan LKM selama Triwulan III-2017	68
Tabel II - 19	Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha LKM Triwulan III-2017	68
Tabel II - 20	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan III-2017	69
Tabel II - 21	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan triwulan III-2017	70
Tabel II - 22	Pemberian Izin Usaha IKNB Triwulan III-2017	70
Tabel II - 23	Perusahaan yang diberikan Penyataan Terdaftar	70
Tabel II - 24	Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB	71
Tabel II - 25	Pencabutan Izin Usaha IKNB	71

71	Tabel II - 26	Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Konvensional
72	Tabel II - 27	Rekapitulasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan IKNB
72	Tabel II - 28	Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB
73	Tabel II - 29	Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB
73	Tabel II - 30	Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB
73	Tabel II - 31	Rekapitulasi Pelaporan Produk
74	Tabel II - 32	Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB
74	Tabel II - 33	Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB sampai dengan triwulan III-2017
74	Tabel II - 34	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB
75	Tabel II - 35	Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB
75	Tabel II - 36	Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB
76	Tabel II - 37	Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB
76	Tabel II - 38	Pendaftaran Profesi yang melaksanakan kegiatan di IKNB
76	Tabel II - 39	Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan (PKK)
76	Tabel II - 40	Jumlah Perusahaan Penunjang Berdasarkan Jenis Usaha
90	Tabel II - 41	Penerimaan Layanan per <i>Business Unit</i>
99	Tabel II - 42	Pelaksanaan <i>Workshop</i> Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko
100	Tabel II - 43	Hubungan Kerja Sama Domestik OJK
106	Tabel III - 1	Indikator Perbankan Syariah
108	Tabel III - 2	Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)
108	Tabel III - 3	Perkembangan Indeks Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)
108	Tabel III - 4	Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
109	Tabel III - 5	Perkembangan Reksa Dana Syariah
109	Tabel III - 6	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara <i>Outstanding</i>
110	Tabel III - 7	Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)
111	Tabel III - 8	Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)
111	Tabel III - 9	Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)
116	Tabel III - 10	Paper Pemenang FREKS XVI Kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus
116	Tabel III - 11	Paper Pemenang FREKS XVI Kategori Muda dan Madya
117	Tabel III - 12	Penelitian oleh Penerima <i>IB Research Grant Program 2017</i>
129	Tabel IV - 1	Judul Siaran Pers Triwulan III-2017
129	Tabel IV - 2	Jumpa Pers Triwulan III-2017
130	Tabel IV - 3	Kunjungan Institusi Triwulan III-2017
133	Tabel IV - 4	Kantor Regional dan Kantor OJK yang Telah Menempati Gedung Sendiri

DAFTAR GRAFIK

3	Grafik I - 1	Tingkat Pengangguran dan Inflasi Amerika Serikat
4	Grafik I - 2	Tingkat Pengangguran Zona Euro
4	Grafik I - 3	Tingkat Inflasi Zona Euro
4	Grafik I - 4	Tingkat Inflasi dan Ekspor Jepang
4	Grafik I - 5	Tingkat Inflasi Tiongkok
5	Grafik I - 6	Kinerja Eksternal Tiongkok
5	Grafik I - 7	Perkembangan Harga Komoditas Dunia
6	Grafik I - 8	Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan PDB Indonesia
6	Grafik I - 9	Tingkat Inflasi Indonesia
6	Grafik I - 10	Neraca Perdagangan Indonesia
7	Grafik I - 11	Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia
7	Grafik I - 12	Tingkat PMI Manufaktur Indonesia
7	Grafik I - 13	Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional
8	Grafik I - 14	Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional
8	Grafik I - 15	<i>Net Buy/Sell</i> Nonresiden di Pasar Saham
8	Grafik I - 16	Perkembangan <i>Yield</i> dan <i>Net Buy/Sell</i> Nonresiden di SBN
9	Grafik I - 17	Perkembangan Aset BUK

Grafik I - 18	Tren Pertumbuhan DPK	10
Grafik I - 19	Tren Pertumbuhan Kredit (<i>qtq</i>)	10
Grafik I - 20	Tren Pertumbuhan Kredit (<i>yoy</i>)	10
Grafik I - 21	Tren NPL (%)	11
Grafik I - 22	Tren Rentabilitas dan Efisiensi	11
Grafik I - 23	Tren Aset BPR	12
Grafik I - 24	Tren Pertumbuhan DPK (<i>qtq</i>)	12
Grafik I - 25	Tren Pertumbuhan DPK (<i>yoy</i>)	12
Grafik I - 26	ROA dan BOPO BPR	13
Grafik I - 27	Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah	14
Grafik I - 28	Pertumbuhan Kredit Menurut Sektor Ekonomi (<i>yoy</i>)	16
Grafik I - 29	NPL <i>Gross</i> Sektor Ekonomi	17
Grafik I - 30	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>qtq</i>)	18
Grafik I - 31	Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (<i>ytd</i>)	18
Grafik I - 32	Perkembangan Indeks Industri (<i>qtq</i>)	18
Grafik I - 33	Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian	18
Grafik I - 34	Perkembangan IHSG dan Net Asing	19
Grafik I - 35	Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)	19
Grafik I - 36	Rencana Penggunaan Dana	25
Grafik I - 37	<i>Market Share</i> BAE Berdasarkan Jumlah Klien	26
Grafik I - 38	<i>Market Share Company Rating</i> Triwulan III-2017	27
Grafik I - 39	Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan III-2017	29
Grafik I - 40	Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun	31
Grafik I - 41	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun rupiah)	32
Grafik I - 42	Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun rupiah)	33
Grafik I - 43	Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)	35
Grafik I - 44	Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam triliun Rupiah)	35
Grafik I - 45	Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam triliun Rupiah)	36
Grafik I - 46	Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)	36
Grafik I - 47	Pertumbuhan Aset LJKK (dalam triliun Rupiah)	37
Grafik I - 48	Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam triliun Rupiah)	37
Grafik I - 49	<i>Outstanding</i> Penjaminan (dalam triliun Rupiah)	37
Grafik I - 50	Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)	37
Grafik I - 51	Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)	38
Grafik I - 52	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun Rupiah)	38
Grafik I - 53	Aset dan <i>Outstanding</i> Penyaluran Pinjaman Pergadaian (dalam triliun Rupiah)	38
Grafik I - 54	Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)	38
Grafik I - 55	Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)	39
Grafik I - 56	Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)	39
Grafik I - 57	Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)	39
Grafik I - 58	Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai	40
Grafik I - 59	Wilayah Penyebaran Nasabah BSA	41
Grafik I - 60	Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING	42
Grafik II - 1	Profil Konglomerasi Keuangan	53
Grafik II - 2	Penyebaran Jaringan Kantor BPR	58
Grafik II - 3	Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan	81
Grafik II - 4	Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan	81
Grafik II - 5	Perkembangan LDR Perbankan	81
Grafik II - 6	<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) Perbankan	82
Grafik II - 7	<i>Risk-Based Capital</i> (CAR) Industri Perasuransian	82
Grafik II - 8	<i>Gearing Ratio</i> Perusahaan Pembiayaan	82
Grafik II - 9	Rasio <i>NPL</i> Perbankan dan <i>NPF</i> Perusahaan Pembiayaan	83
Grafik II - 10	Layanan Per Sektor (Triwulan III-2017)	89
Grafik II - 11	Tingkat Penyelesaian Layanan (akumulasi 2013- Triwulan III-2017)	89
Grafik II - 12	Layanan Per Sektor (akumulasi 2013- Triwulan III-2017)	90
Grafik II - 13	Kanal Layanan	90

91	Grafik II - 14	Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja
93	Grafik II - 15	Penyelesaian sengketa LAPS semester 1-2017
95	Grafik II - 16	Persentase Iklan Per Sektor
95	Grafik II - 17	Kategori Pelanggaran
108	Grafik III - 1	Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
109	Grafik III - 2	Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
110	Grafik III - 3	Jumlah Entitas IKNB Syariah
124	Grafik IV - 1	Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
125	Grafik IV - 2	Komposisi Mitigasi Risiko OJK Triwulan III-2017
127	Grafik IV - 3	Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner
128	Grafik IV - 4	Statistik Pengunjung <i>Website</i> OJK
128	Grafik IV - 5	<i>Tone</i> Pemberitaan Triwulan III-2017
129	Grafik IV - 6	Kunjungan Institusi Triwulan III-2017
130	Grafik IV - 7	Statistik OJK TV Triwulan III-2017
131	Grafik IV - 8	Realisasi Anggaran
134	Grafik IV - 9	Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner

DAFTAR GAMBAR

140	Gambar IV - 1	Tampilan Majalah Integrasi Triwulan III-2017
-----	---------------	--



Ringkasan
Eksekutif



Ringkasan Eksekutif

TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA DAN INDONESIA

Kondisi perekonomian global selama triwulan III-2017 masih diwarnai oleh ketidakpastian. Indikator-indikator ekonomi di negara-negara maju maupun berkembang menunjukkan sejumlah perkembangan positif, namun belum pada level yang solid. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh perekonomian Amerika Serikat (AS) yang mengalami pemulihan tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dan stabilnya *Personal Consumption Expenditures*. Kinerja Perekonomian Zona Euro juga mencatatkan perkembangan positif seiring dengan kebijakan moneter yang akomodatif, penurunan tingkat pengangguran, dan stabilnya tingkat inflasi. Pada Zona Asia, perekonomian Jepang terus menunjukan pemulihan tercermin dari beberapa indikator antara lain tingkat inflasi mencapai tingkat tertinggi dan meningkatnya kinerja ekspor. Sejalan dengan perekonomian Jepang, perekonomian Tiongkok juga mengalami pemulihan yang tercermin dari pertumbuhan ekspor dan impor sehingga neraca perdagangan mulai menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2017 membaik dan mencapai titik yang lebih tinggi yaitu 5,06%. Neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus

sebesar USD3,21 miliar didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat signifikan. Sementara itu, tingkat inflasi terpantau melunak namun masih berada dalam kisaran target yaitu sebesar 3.72% (yoy). Terjadinya deflasi dipengaruhi oleh komponen *volatile food*. Sejalan dengan ketidakpastian yang mewarnai perekonomian global, sektor riil dalam negeri juga belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, pertumbuhan penjualan semen, dan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor.

Pasar keuangan domestik terpantau menguat di mana IHSG tercatat tumbuh sebesar 1,22% (*qto*), sejalan dengan arah penguatan indeks-indeks saham regional. Sejalan perkembangan tersebut, pasar surat utang dalam negeri melanjutkan tren penguatan. Arah penguatan pasar SBN juga diiringi oleh peningkatan aksi beli investor nonresiden. Investor nonresiden membukukan *net buy* di pasar SBN sebesar Rp48,8 triliun. Meskipun menguat, investor nonresiden pada triwulan ini membukukan *net sell* yang cukup signifikan yaitu Rp28,1 triliun di pasar saham. Sejalan dengan peristiwa tersebut, nilai tukar juga mengalami pelemahan sebesar 1,09% secara (*qto*).

TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN

Untuk mendukung terwujudnya misi OJK yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Selama periode laporan OJK melakukan beberapa inisiatif antara lain:

1. Penerbitan Peraturan Tentang Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen OJK pada program pemerintah untuk lebih memberdayakan pelaku usaha skala kecil dan menengah serta mempermudah akses Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah untuk memanfaatkan Pasar Modal menjadi alternatif pendanaan bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah selain melalui perbankan.
2. *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT). Pengembangan sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) memasuki tahap III berupa penyempurnaan fitur-fitur aplikasi SIPT antara lain penambahan modul berisi kumpulan data dan rasio keuangan yang menjadi fokus utama *enhancement* SIPT. Tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi SIPT modul data dan rasio keuangan ini antara lain meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan, menciptakan keseragaman (standarisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan mengoptimalkan pengawasan dalam menganalisis kondisi konglomerasi keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.
3. Sosialisasi Pasar Modal Terpadu di Makassar dan Bali. Selama periode laporan, sosialisasi Pasar Modal Terpadu dilaksanakan di STIEM Bongaya Makassar dan Politeknik Negeri Bali. Dari hasil survei, tercatat 98% peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal. Adapun rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, yaitu FGD Wartawan dan Seminar Pasar Modal.
4. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI). Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, OJK membentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian.

5. *Outreach* Program Keuangan Syariah

Edukasi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi NTB. Kegiatan dihadiri oleh 126 peserta dengan materi yang disampaikan mencakup Perencanaan Keuangan Bisnis Syariah, Kewirausahaan, dan pengenalan produk/layanan jasa keuangan serta materi KUR Mikro iB, Reksa Dana Syariah, dan tabungan emas.

6. Peluncuran *e-Book* “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” tingkat SMA dan Buku Seri Literasi Keuangan Segmen Profesional dan Pensiunan

OJK meluncurkan *e-book* “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” tingkat SMA serta buku praktis segmen pensiunan dan segmen profesional. Kegiatan ini diikuti oleh 167 orang yang berasal dari perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), asosiasi sektor jasa keuangan, anggota kelompok kerja (Pokja) edukasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, Direktorat Jenderal Pajak, Bappenas dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) serta rekan-rekan relasi media baik cetak maupun elektronik.

Selain menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan serta edukasi dan perlindungan konsumen, OJK senantiasa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan menandatangani MoU dengan Universitas Udayana dengan tema kerja sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Pengembangan *Bali Centre for Sustainable Finance*. OJK juga melakukan hubungan domestik dengan menyelenggarakan 25 kegiatan kelembagaan yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain: *Focus Group*

Discussion (FGD) mengenai perkembangan kondisi sektor jasa keuangan di Indonesia pada Semester II-2017 dan sosialisasi program kerja ADK OJK periode 2017-2022, peran OJK menghadang laju investasi bodong, program pengembangan keuangan guna menggerakkan ekonomi daerah, UKM dalam Spirit Nawacita, Deklarasi Wirausaha Muda, serta sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain. Terkait dengan implementasi *ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF), OJK telah menunjuk salah satu Bank BUMN sebagai kandidat *Qualified ASEAN Banks (QABs)* Indonesia.

Terkait dengan implementasi manajemen strategi, OJK memiliki siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK), di mana pada periode laporan OJK berada pada tahap keempat untuk periode 2017 yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja semester I-2017 melalui pengisian capaian masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Pada periode yang sama, Siklus MSAK OJK juga memasuki tahap pertama untuk periode 2018 yaitu penyusunan *Destination Statement* OJK 2017-2022 serta Peta Strategi OJK 2018. Untuk mendukung pengembangan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK mengembangkan beberapa sistem informasi antara lain pengembangan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), Sistem *Monitoring* Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN), dan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM) serta Sistem Informasi Perbankan.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada media terhadap perkembangan sektor keuangan dan berbagai aspek kebijakan di sektor keuangan, OJK menyelenggarakan 23 siaran pers dan empat jumpa pers. OJK juga menerima 15 kunjungan instansi dengan total 1.002 peserta. Selain itu, OJK terus memanfaatkan saluran komunikasi terbarunya yaitu OJK TV dengan memproduksi 22 liputan yang terdiri dari 18 liputan OJK *Wide* dan 4 liputan di bidang Pasar Modal. Ulasan lengkap mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OJK dalam mewujudkan visi OJK dijabarkan dalam buku Laporan Triwulanan III-2017.

Dukungan OJK terhadap Program Prioritas Pemerintah

OJK melaksanakan sejumlah Program dalam rangka mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah. Sampai akhir triwulan III-2017 ini, program-program tersebut menunjukkan perkembangan positif.

PROGRAM JANGKAU, SINERGI DAN GUIDELINE (JARING)



Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan 15 bank partner dan Konsorsium lembaga pembiayaan. Penyaluran kredit program JARING tumbuh **2,37% (qtq)** menjadi **Rp26,7 triliun** dan NPL gross 2,29%

ASURANSI KERANGKA KAPAL

Asuransi yang mewajibkan nelayan mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan ganti rugi. Realisasi jumlah kapal yang dicover asuransi penyingkiran kerangka kapal menjadi **3.577 kapal**.



ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

Program perlindungan dan pemberdayaan petani untuk meminimalkan dampak negatif perubahan iklim dan gangguan serangan organisme yang menyebabkan gagal panen pertanian. Jumlah lahan pertanian yang terdaftar meningkat **24,77% (qtq)** menjadi **988.232,28 (ha)** atau **90,59%** dari target **1 juta Ha**



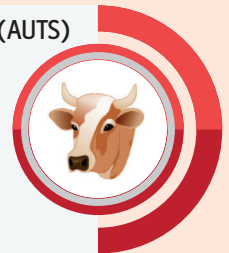
EFEK BERAGUN ASET - SURAT PARTISIPASI (EBA SP)

EBA-SP merupakan Efek Beragun Aset yang diterbitkan oleh Penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama. Sampai triwulan III-2017, terdapat **4 KIK** dengan dana kelolaan sebesar **Rp2,36 triliun**.



ASURANSI USAHA TERNAK SAPI (AUTS)

Program AUTS adalah program pemberian ganti rugi kepada peternak apabila terjadi kematian pada sapi ternak. Jumlah sapi yang tercover AUTS adalah **53.706 ekor sapi** atau **44,76%** dari target **120 ribu** ekor sapi di 26 Provinsi



LAYANAN KEUANGAN MIKRO (LAKU MIKRO)

Layanan terpadu dengan proses yang sederhana, cepat, akses mudah, dan harga terjangkau. Realisasi Laku Mikro adalah total rekening SiPintar sebanyak **1.024.556** dengan jumlah outlet sebanyak **9.015**



LAKU PANDAI

Kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan pihak lain dan didukung penggunaan sarana teknologi informasi. Jumlah agen Laku Pandai mencapai **428.852 agen**. Jumlah dana dan nasabah tabungan yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar **Rp1.26 triliun** dan **11.808.868 nasabah**



SimPel
Simpanan Pelajar

JUMLAH BANK 279 BANK

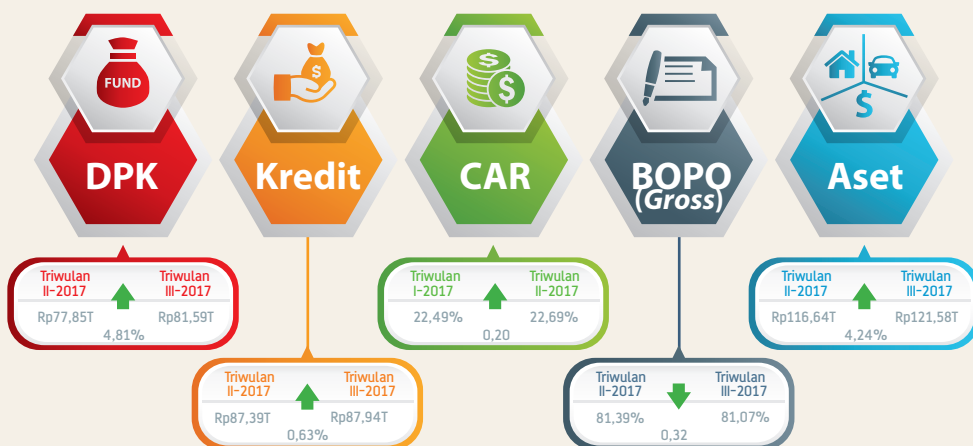
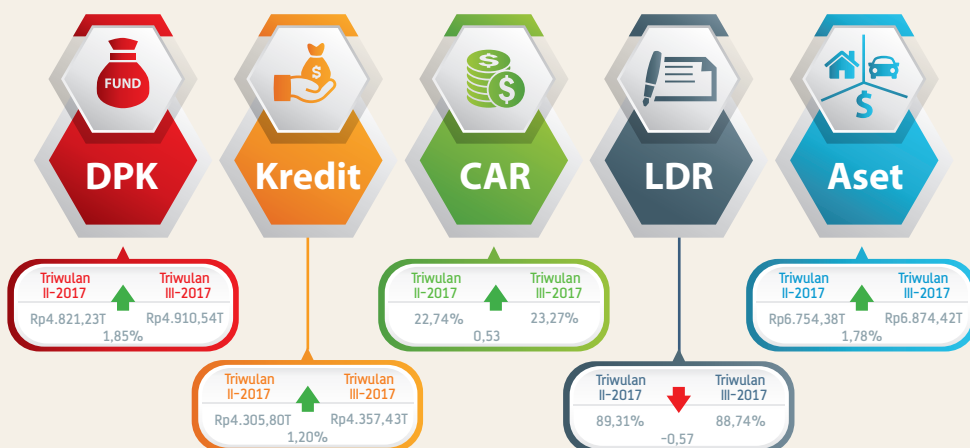
JUMLAH REKENING 6.794.842

NOMINAL RP1,05 TRILIUN

JUMLAH PERJANJIAN KERJA SAMA 148.222



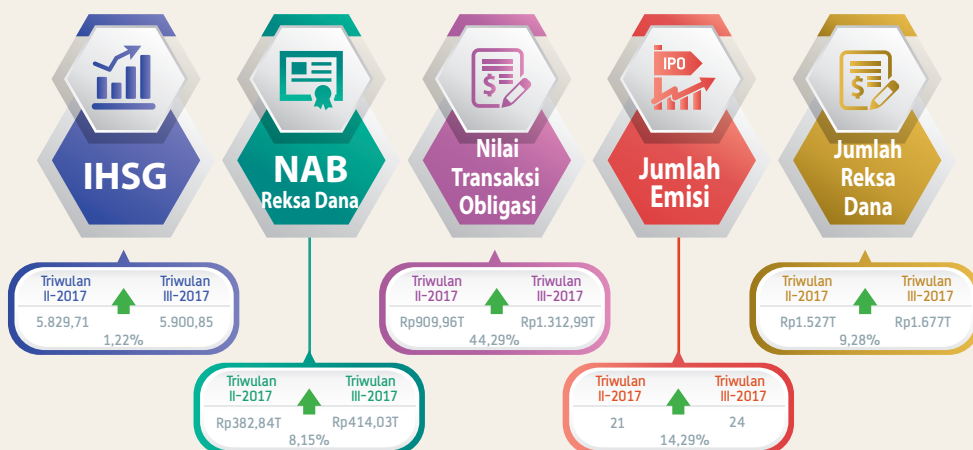
Bank Umum Konvensional



BPR

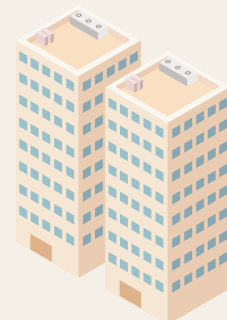
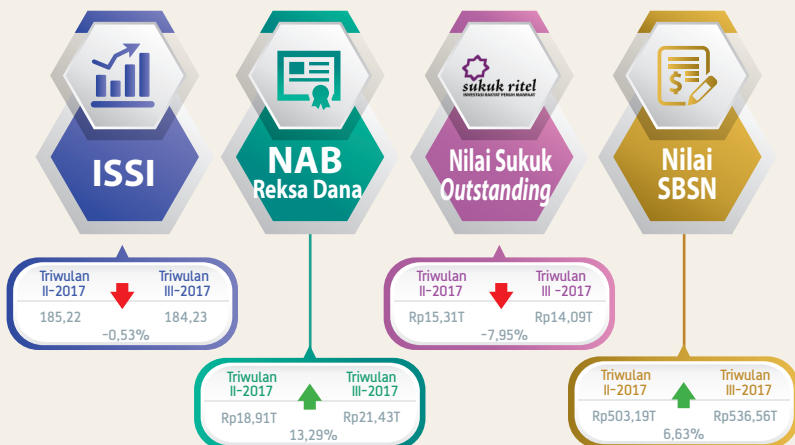
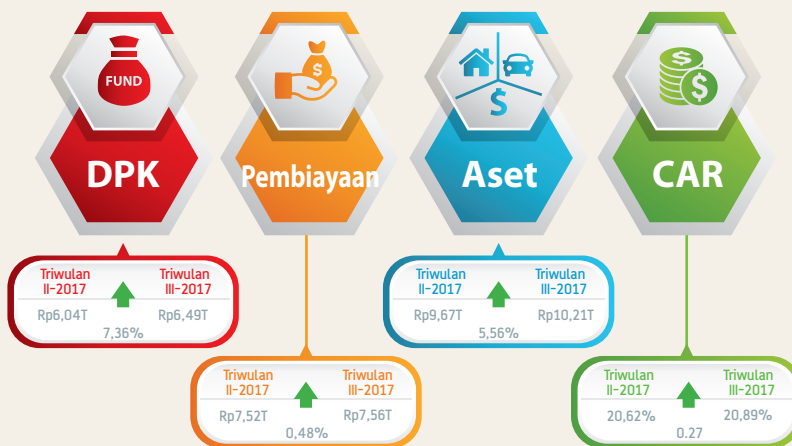
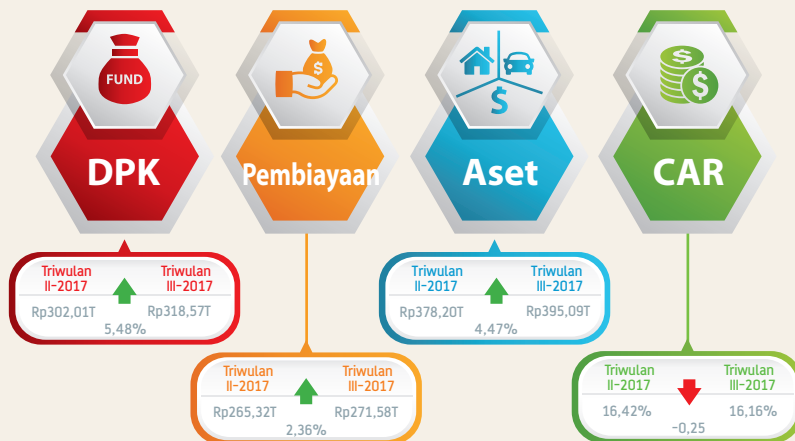


Pasar Modal



IKNB

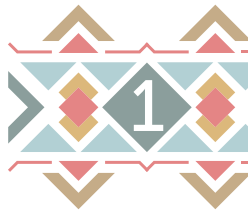
*) Aset IKNB termasuk di dalamnya Aset IKNB Syariah





Tinjauan
Industri
**Sektor Jasa
Keuangan**

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan



1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

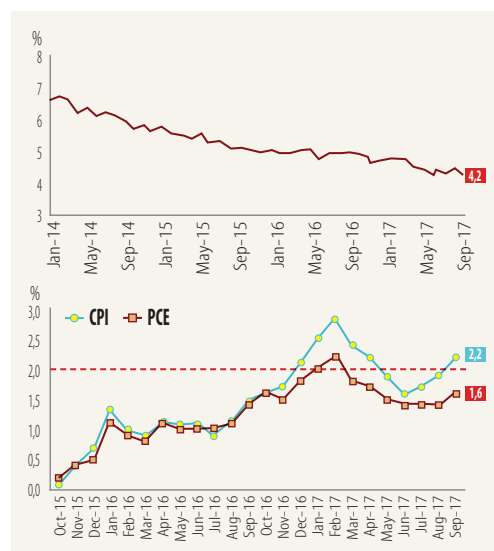
1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Sepanjang triwulan III-2017, indikator-indikator ekonomi di negara-negara maju maupun berkembang menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor risiko yang perlu dicermati, antara lain terkait perkembangan kebijakan moneter negara-negara utama, ketegangan geopolitik, dan pergerakan harga komoditas dunia.

Pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada triwulan III-2017 terpantau masih berlanjut. Tingkat pengangguran melanjutkan kecenderungan menurun, dan tercatat pada level 4,2% per September 2017. Tingkat inflasi kembali menunjukkan kecenderungan meningkat dan tercatat sebesar 2,2% yoy pada September 2017, didorong oleh kenaikan harga energi seiring penguatan harga komoditas dunia. Tingkat *Personal Consumption Expenditures* juga kembali meningkat dan tercatat sebesar 1,4% yoy per September 2017.

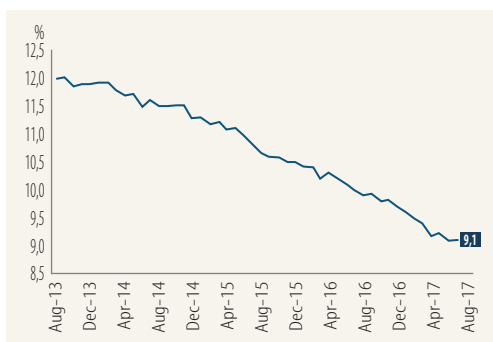
Pada rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC) bulan September 2017, *The Fed* mempertahankan *Fed Funds Rate* pada kisaran 1,00%-1,25%. Namun demikian, mempertimbangkan perbaikan pada data ketenagakerjaan, pada rapat tersebut *The Fed* memberikan sinyal akan menaikkan *Fed Funds Rate* pada FOMC Desember 2017. Selain itu, *The Fed* juga mengumumkan akan segera memulai normalisasi neraca secara bertahap dengan melepas surat berharga pada Oktober 2017.

Grafik I - 1 Tingkat Pengangguran dan Inflasi Amerika Serikat

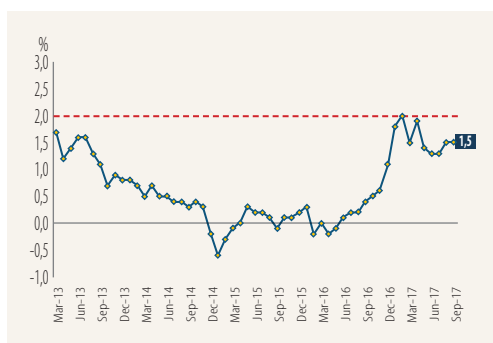


Di Zona Euro, perekonomian mencatat perkembangan positif seiring berlanjutnya kebijakan moneter yang akomodatif. Tingkat pengangguran berada pada level terendah sejak 2009 yaitu 9,1% di Agustus 2017. Selain itu, tingkat inflasi Zona Euro juga sejalan dengan estimasi pasar yaitu stabil 1,5% di Agustus 2017. Seiring dengan relatif membaiknya perkembangan ekonomi Eropa, ECB mulai mempertimbangkan untuk kebijakan *tapering* terhadap stimulus moneter.

Grafik I - 2 Tingkat Pengangguran Zona Euro



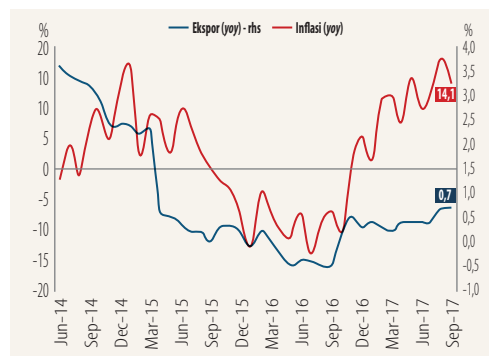
Grafik I - 3 Tingkat Inflasi Zona Euro



Di Jepang, beberapa indikator perekonomian mulai menunjukkan perbaikan. Beberapa data perekonomian melanjutkan tren yang positif, di antaranya tingkat inflasi dan kinerja ekspor. Tingkat inflasi menunjukkan perkembangan yang baik dan mencapai titik tertingginya sepanjang tahun pada 0,7% (yoy) di September 2017. Namun demikian, Bank Sentral Jepang

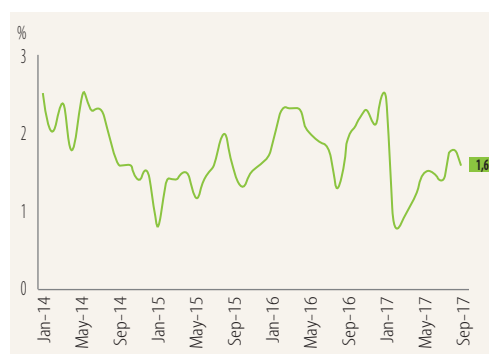
(BoJ) masih cenderung berhati-hati dalam pengetatan kebijakan moneter. BoJ masih mempertahankan suku bunga acuan pada level -0,1% dan tetap melanjutkan pembelian surat berharga hingga mencapai JPY80 triliun.

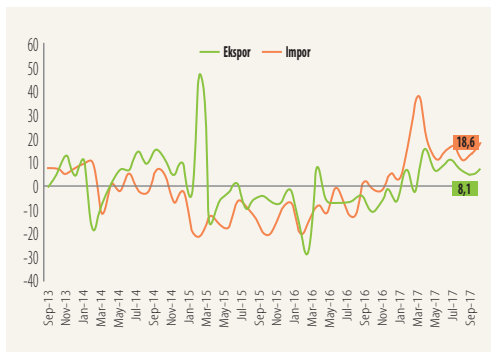
Grafik I - 4 Tingkat Inflasi dan Ekspor Jepang



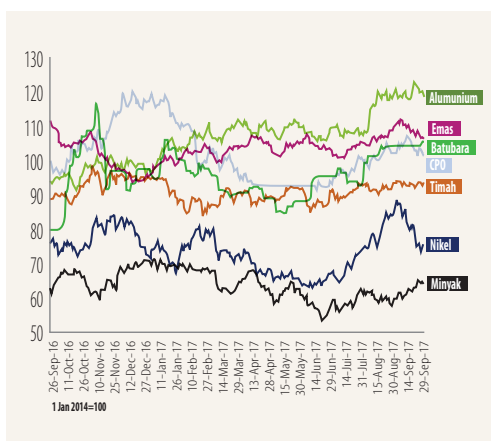
Sementara itu, pemulihan ekonomi Tiongkok pada triwulan III-2017 terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 tercatat sebesar 6,8% yoy, dibandingkan 6,9% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, tingkat inflasi tercatat sebesar 1,6% yoy pada September 2017, meningkat dibandingkan 1,5% pada Juni 2017. Sejalan dengan perbaikan tersebut, pertumbuhan ekspor dan impor Tiongkok kembali menunjukkan tren peningkatan, demikian juga dengan sektor manufaktur negara tersebut yang mencatat kinerja positif.

Grafik I - 5 Tingkat Inflasi Tiongkok



Grafik I - 6 Kinerja Eksternal Tiongkok


Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global pada triwulan III-2017, harga komoditas dunia secara umum mencatat penguatan. Kenaikan harga paling besar terjadi pada batubara, yang mencatat penguatan sebesar 10,5% *qta*. Penguatan harga batubara ini dipicu oleh meningkatnya permintaan batubara oleh Tiongkok. Sementara itu, harga minyak dunia mencatat kenaikan sebesar 10,4% *qta*, yang juga didorong oleh meningkatnya permintaan seiring perbaikan ekonomi global.

Grafik I - 7 Perkembangan Harga Komoditas Dunia


IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 sebesar 3,6%, lebih tinggi dari proyeksi Juli 2017 (3,5%) dan realisasi tahun 2016 (3,2%). Revisi ke atas proyeksi pertumbuhan global ini terutama didorong oleh optimisme membaiknya perdagangan dunia. Perdagangan dunia diproyeksikan meningkat sebesar 3,6% di 2017, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 2,4%.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2017 didorong oleh peningkatan investasi, perdagangan, dan sektor manufaktur yang didukung oleh membaiknya keyakinan pasar. Namun, dalam laporan tersebut IMF menyampaikan kekhawatiran akan masih rendahnya inflasi di negara-negara berkembang serta tekanan dari ketegangan geopolitik yang perlu diwaspadai. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang berbasis komoditas diperkirakan relatif stagnan sejalan dengan harga komoditas dunia yang masih relatif rendah pada tahun 2017.

Tabel I - 1 Proyeksi IMF dalam *World Economic Outlook* Oktober 2017

Negara/Region	2016	Proyeksi 2017		Proyeksi 2018	
		Oktober	Juli	Oktober	Juli
Dunia	3,2	↑ 3,6	3,5	↑ 3,7	3,6
Advanced Economies	1,7	↑ 2,2	2,0	↑ 2,0	1,9
Amerika Serikat	1,5	↑ 2,2	2,1	↑ 2,3	2,1
Zona Euro	1,8	↑ 2,1	1,9	↑ 1,9	1,7
Jepang	1,0	↑ 1,5	1,3	↑ 0,7	0,6
Emerging Markets	4,3	4,6	4,6	↑ 4,9	4,8
Non Komoditas					
Tiongkok	6,7	↑ 6,8	6,7	↑ 6,5	6,4
India	7,1	↓ 6,7	7,4	↑ 7,4	7,1
Komoditas					
Indonesia	5,0	↑ 5,2	5,1	5,3	5,3
Brazil	-3,6	↑ 0,7	0,3	↑ 1,5	0,3
Russia	-0,2	↑ 1,8	1,4	↑ 1,6	1,4
Malaysia	4,2	↓ 5,4	4,5	↑ 4,8	4,7

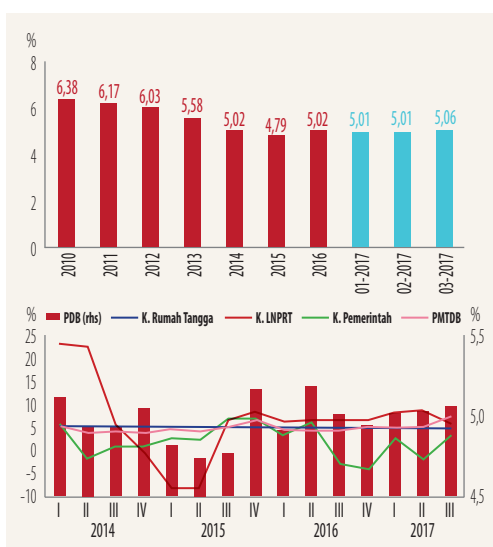
1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Stabilitas makroekonomi domestik sepanjang triwulan III-2017 secara keseluruhan relatif terjaga, dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas level 5%. Tingkat inflasi relatif rendah, sementara kinerja perdagangan eksternal terpantau positif. Kinerja sektor riil domestik masih berada pada level moderat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2017 mencapai 5,06% yoy, lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya (5,01%). Meningkatnya pertumbuhan ini terutama didorong oleh meningkatnya kinerja investasi

dan ekspor, disertai kinerja konsumsi yang relatif terjaga. Membaiknya kinerja investasi turut didorong oleh berlanjutnya proyek-proyek infrastruktur Pemerintah. Sedangkan dari sisi kinerja eksternal, perbaikan ekspor didorong oleh membaiknya harga komoditas seperti batubara dan minyak sawit, seiring meningkatnya permintaan dari negara-negara mitra dagang utama. Sementara itu, kinerja konsumsi Pemerintah menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya belanja Pemerintah, sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

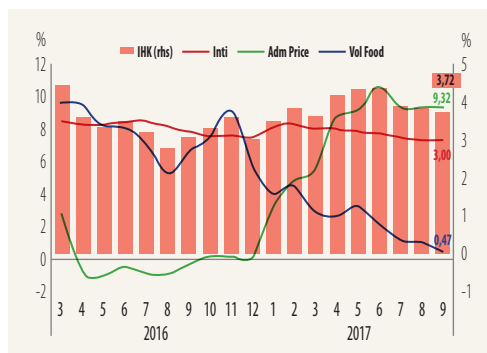
Grafik I - 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan PDB Indonesia



Tingkat inflasi menunjukkan tren penurunan pada triwulan III-2017, namun masih berada dalam kisaran target $4 \pm 1\%$. Per September 2017, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,72% yoy, lebih rendah dibanding posisi Juni 2017 yang sebesar 4,37% yoy. Terjadinya deflasi pada triwulan III-2017 ini terutama dipengaruhi oleh komponen *volatile food*. Sementara itu, tingkat inflasi inti (*core inflation*) juga belum menunjukkan peningkatan berarti. Sejalan dengan penurunan tingkat inflasi, Bank Indonesia menurunkan suku

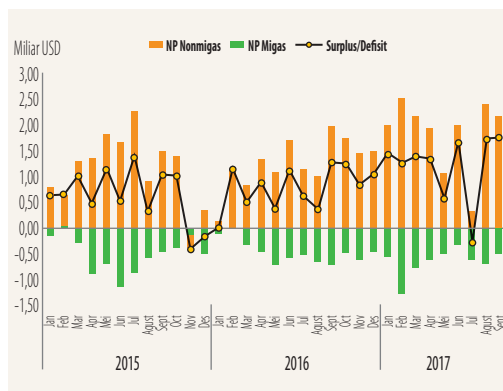
bunga acuan *7-Day Reverse Repo Rate* sebanyak dua kali pada triwulan III-2017, terakhir pada level 4,25%.

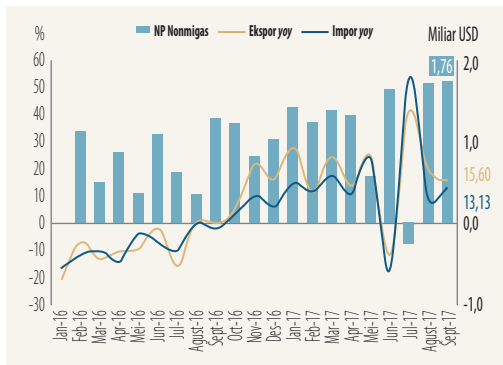
Grafik I - 9 Tingkat Inflasi Indonesia



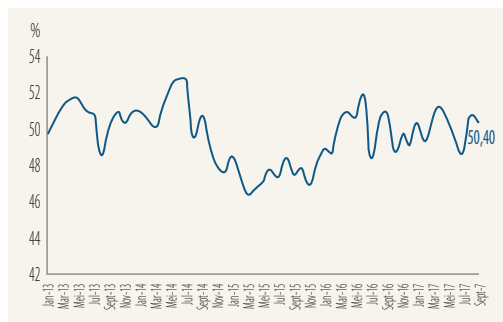
Pada kinerja perdagangan eksternal, neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus sebesar USD3,21 miliar pada triwulan III-2017, yang didorong oleh surplus dari neraca perdagangan nonmigas yang meningkat signifikan. Adapun pertumbuhan ekspor dan impor menunjukkan cenderung stabil pada triwulan laporan, dan per September 2017 masing-masing tercatat sebesar 15,50% dan 13,13% yoy. Kinerja neraca perdagangan ke depan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan global.

Grafik I - 10 Neraca Perdagangan Indonesia



Grafik I - 11 Pertumbuhan Ekspor-Impor Indonesia


Kinerja sektor riil dalam negeri masih berada pada level yang moderat dan belum terdapat perbaikan signifikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti *Purchasing Manager's Index* (PMI) manufaktur, pertumbuhan penjualan semen, dan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor. Relatif lemahnya permintaan barang dan jasa ini turut dipengaruhi oleh faktor persepsi dan ekspektasi konsumen serta faktor daya beli konsumen.

Grafik I - 12 Tingkat PMI Manufaktur Indonesia


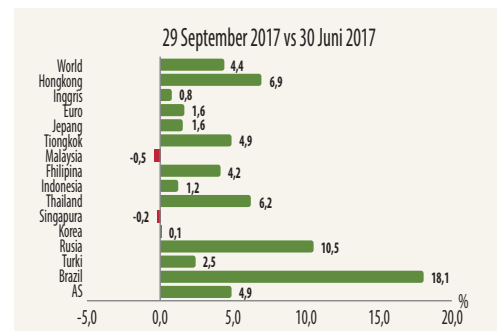
1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

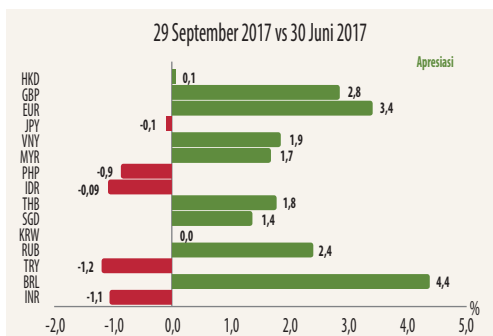
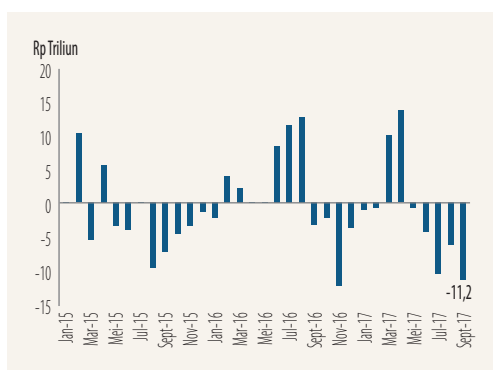
Di tengah perkembangan ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, pasar keuangan domestik pada triwulan III-2017 secara umum masih melanjutkan penguatan, dengan volatilitas pasar yang terpantau relatif rendah. Investor nonresiden juga masih membukukan *net buy* di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Perkembangan pasar keuangan sepanjang triwulan III-2017 dipengaruhi oleh faktor dari eksternal seperti meningkatnya tensi geopolitik dan rencana pengetatan kebijakan moneter beberapa negara perekonomian utama. Namun demikian, pasar keuangan domestik masih meneruskan penguatan seiring dengan sentimen positif dari pemberian *investment grade* Indonesia oleh S&P dan kebijakan moneter yang akomodatif terhadap pertumbuhan investasi.

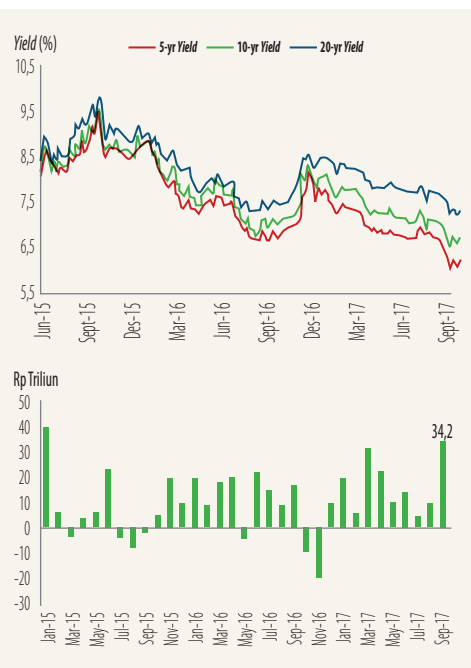
Pada triwulan III-2017, IHSG mencatatkan pertumbuhan sebesar 1,22% (*qtq*), sejalan dengan arah penguatan indeks-indeks saham regional. Meskipun menguat, investor nonresiden pada triwulan ini membukukan *net sell* yang cukup signifikan yaitu Rp28,1 triliun di pasar saham. Aksi jual oleh investor nonresiden di pasar saham domestik telah terjadi sejak Juni 2017 dan berlanjut hingga triwulan laporan. Aksi jual nonresiden ini terjadi seiring perkembangan isu global, di mana bank sentral di beberapa negara utama mulai memberikan sinyal pengetatan kebijakan moneter. Namun demikian, tekanan terpantau relatif moderat dan pasar saham masih bergerak menguat ditopang oleh masuknya investor domestik.

Nilai tukar Rupiah mengalami pelemahan sebesar 1,09% secara *qtq*. Pelemahan ini seiring dengan berkembangnya isu eksternal berupa pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed, dan pada periode yang sama Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 *bps* sebanyak dua kali.

Grafik I - 13 Perkembangan Indeks Saham Global dan Regional


Grafik I - 14 Perkembangan Nilai Tukar Global dan Regional

Grafik I - 15 Net Buy/Sell Nonresiden di Pasar Saham


Sejalan dengan perkembangan tersebut, pasar surat utang dalam negeri masih melanjutkan tren penguatan pada triwulan III-2017. Imbal hasil (*yield*) SBN turun rata-rata sebesar 42 bps. Arah penguatan pasar SBN ini juga diiringi oleh peningkatan aksi beli investor nonresiden. Investor nonresiden membukukan *net buy* di pasar SBN sebesar Rp48,8 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (*net buy* Rp37,9 triliun).

Grafik I - 16 Perkembangan Yield dan Net Buy/Sell Nonresiden di SBN


1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan III-2017, kondisi ketahanan BUK cukup solid tercermin dari CAR yang mencapai 23,27%. Kuatnya permodalan tersebut didorong oleh meningkatnya rentabilitas (ROA) menjadi 2,48% serta meningkatnya efisiensi yang tercermin dari penurunan rasio BOPO menjadi 78,71%. Aset, Kredit, dan DPK BUK juga tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, risiko kredit terjaga dengan menurunnya NPL *gross* dan NPL *net* masing-masing menjadi 2,87% dan 1,23%.

Tabel I - 2 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2016		2017		Δ qtg		Δ yoy	
	Juni	Septem-ber	Juni	Septem-ber	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan III-2016	Triwulan III-2017
Bank Umum Konvensional								
Total Aset (dalam miliar rupiah)	6.146.653	6.223.751	6.754.376	6.874.442	↑ 2,78%	↑ 1,78%	↑ 4,72%	↑ 10,45%
Kredit (dalam miliar rupiah)	4.010.165	4.040.397	4.305.803	4.357.435	↑ 2,72%	↑ 1,20%	↑ 6,18%	↑ 7,85%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	4.397.620	4.405.603	4.821.228	4.910.543	↑ 2,50%	↑ 1,85%	↑ 2,51%	↑ 11,46%
- Giro (dalam miliar rupiah)	1.055.331	1.047.140	1.165.754	1.171.457	↑ 3,73%	↑ 0,49%	↓ -3,44%	↑ 11,87%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	1.366.924	1.370.365	1.489.947	1.507.306	↑ 4,54%	↑ 1,17%	↑ 11,11%	↑ 9,99%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	1.975.364	1.988.098	2.165.527	2.231.780	↑ 0,52%	↑ 3,06%	↑ 0,41%	↑ 12,26%
CAR (%)	22,56	22,60	22,74	23,27	↓ (14)	↑ 53	↑ 198	↑ 67
ROA (%)	2,31	2,38	2,47	2,48	↓ (3)	↑ 0,2	↑ 7	↑ 10
NIM (%)	5,59	5,65	5,35	5,34	↓ (3)	↓ (2)	↑ 33	↓ (31)
BOPO (%)	82,23	81,02	79,00	78,71	↓ (115)	↓ (29)	↓ (80)	↓ (230)
NPL Gross (%)*	2,95	3,04	2,90	2,87	↓ (8)	↓ (9)	↑ 42	↓ (17)
NPL Net (%)	1,39	1,37	1,35	1,23	↑ 6	↓ (11)	↑ 11	↓ (14)
LDR (%)	91,19	91,71	89,31	88,74	↑ 19	↓ (57)	↑ 317	↓ (297)

Ket : ↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik
↓ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik
↑ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

* NPL gross merupakan rasio yang digunakan untuk menilai risiko kredit sebelum dikurangi Cadangan Kerugian Penurunan Nila (CKPN). Rasio ini mengukur porsi kredit bermasalah terhadap total kredit perbankan.

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, September 2017

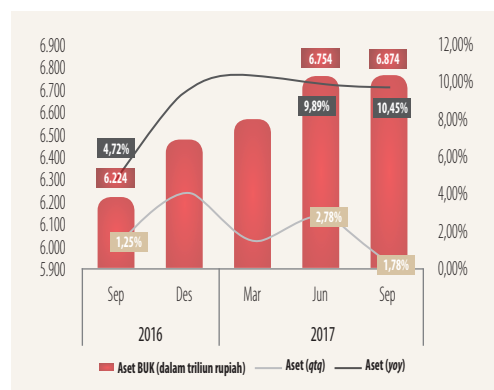
A. Aset

Total aset BUK pada triwulan III-2017 tumbuh 10,45% (yoy), meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 4,72% (yoy). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kredit sebagai komponen aset terbesar. Dari sisi pasiva, peningkatan pada DPK dan modal juga turut mempengaruhi meningkatnya aset.

Sementara secara triwulan, aset tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya atau hanya tumbuh 1,78% (qtq) yang salah satunya dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan DPK.

Secara umum, aset perbankan Indonesia terindikasi memiliki tingkat konsentrasi yang cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari *Concentration Ratio* (CR) aset 4 BUK terbesar yang mencapai 47,84%. Sementara itu, *Concentration Ratio* (CR) aset 20 BUK terbesar bahkan mencapai 79,28% dari aset perbankan.

Grafik I - 17 Perkembangan Aset BUK



Sumber: SPI, September 2017

Tabel I - 3 Tingkat Konsentrasi Aset BUK

Tahun	Aset	
	CR4 (%)	CR20 (%)
2014	45,94	79,70
2015	46,24	79,47
2016	48,18	80,14
Triwulan I-2017	47,52	79,37
Triwulan II-2017	47,96	79,42
Triwulan III-2017	47,84	79,28

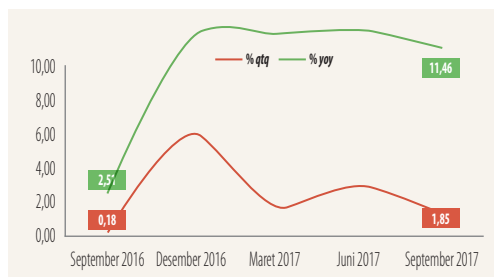
Sumber: OJK, olah

B. Dana Pihak Ketiga

Di tengah tren penurunan suku bunga, DPK BUK tumbuh 11,46% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 2,51% (yoy). Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh masuknya dana program *tax amnesty* tahap I dan tahap II pada triwulan IV-2016. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya pertumbuhan deposito dan giro dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 12,26% (yoy) dan 11,87% (yoy). Sementara tabungan tumbuh melambat sebesar 9,99% (yoy).

Sementara secara triwulanan, DPK tumbuh melambat sebesar 1,85% (qtq) dibandingkan triwulan II-2017 yang tumbuh 2,50% (qtq). Melambatnya DPK tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor *seasonal* pasca Hari Raya dan liburan.

Grafik I - 18 Tren Pertumbuhan DPK



Sumber: SPI, September 2017

C. Kredit

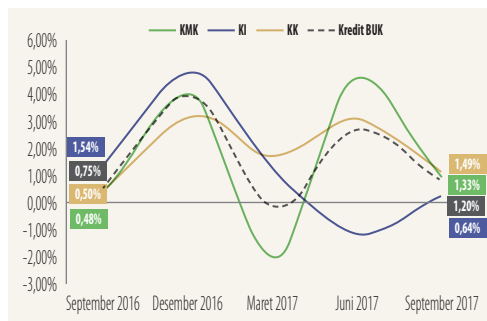
Penggunaan dana bank sebagian besar disalurkan untuk kredit yang umumnya diberikan kepada pihak ketiga non bank. Pada triwulan III-2017, kredit BUK tumbuh 7,85% (yoy), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (6,18%, yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, KK dan KMK tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masing-masing 9,78% (yoy) dan 8,04% (yoy). Namun demikian, penyaluran KI melambat dari tahun sebelumnya 8,70% (yoy) menjadi 5,43% (yoy). Perlambatan tersebut mengindikasikan masih tertahannya ekspansi

usaha ditengah pertumbuhan ekonomi domestik yang belum solid.

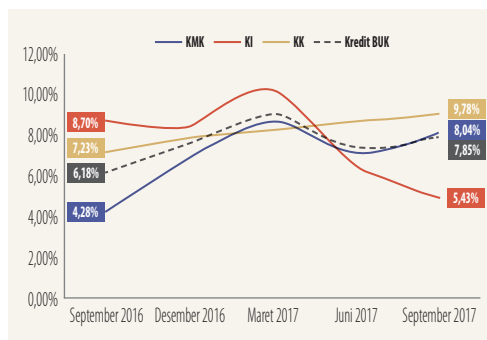
Secara triwulanan kredit tumbuh 1,20% (qtq), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,72% (qtq). Hal tersebut dipengaruhi oleh masih minimnya pencairan kredit baru yang tercermin dari meningkatnya *undisbursed* loan sebesar 4,00% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,44% (qtq).

Grafik I - 19 Tren Pertumbuhan Kredit (qtq)



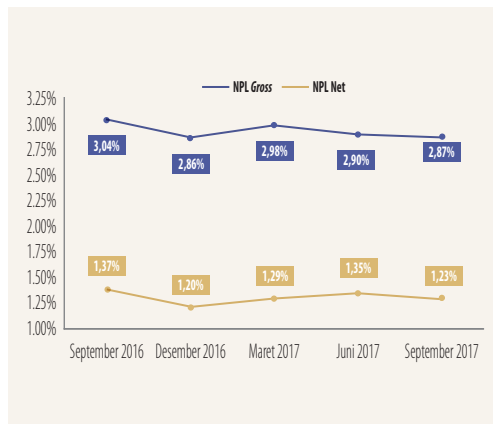
Sumber: SPI, September 2017

Grafik I - 20 Tren Pertumbuhan Kredit (yoy)

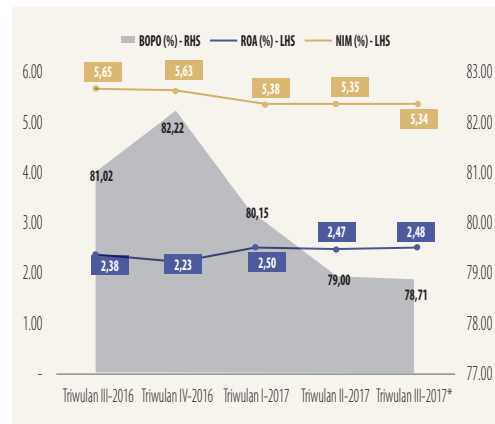


Sumber: SPI, September 2017

Di tengah meningkatnya pertumbuhan kredit, kualitas kredit juga menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. NPL *gross* BUK turun 17 bps (yoy) menjadi 2,87% dibandingkan tahun sebelumnya 3,04%. Selain itu, pencadangan yang dilakukan oleh bank juga memadai sehingga NPL *net* relatif rendah sebesar 1,23%. Dari ketiga jenis penggunaan, KMK dan KI memiliki NPL tertinggi sebesar 3,41% dan 3,10%, namun masih terjaga dibawah *threshold* 5%. Sementara itu, NPL KK masih cukup rendah sebesar 1,75%.

Grafik I - 21 Tren NPL (%)


Sumber: SPI, September 2017

Grafik I - 22 Tren Rentabilitas dan Efisiensi


Sumber: SPI, Agustus 2017

D. Rentabilitas

Rentabilitas BUK pada triwulan III-2017 meningkat 10 bps (yoy) dengan ROA sebesar 2,48% yang di dorong oleh meningkatnya laba sebesar 14,59% (yoy). Selain itu, efisiensi BUK juga meningkat yang tercermin dari turunnya rasio BOPO sebesar 230 bps (yoy) menjadi 78,71% yang turut mendorong meningkatnya rentabilitas. Peningkatan efisiensi didukung oleh meningkatnya pendapatan operasional serta turunnya beban non bunga yang utamanya berasal dari penurunan penyusutan/amortisasi

dan penurunan kerugian transaksi *spot* dan derivatif.

E. Permodalan

Pada triwulan III-2017 kondisi permodalan BUK masih solid tercermin dari CAR yang naik 67 bps (yoy) menjadi 23,27%. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya tambahan modal disetor dan kenaikan laba sehingga mendorong pertumbuhan modal BUK sebesar 11,69% (yoy) yang lebih tinggi dari pertumbuhan ATMR sebesar 8,46% (yoy).

Tabel I - 4 Kondisi Umum BPR

Rasio	2016		2017		qtq		yoy	
	Juni	Septem-ber	Juni	Septem-ber	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan III-2016	Triwulan III-2017
Total Aset (dalam miliar rupiah)	105.867	108.921	116.640	121.583	▲ 1,54%	▲ 4,24%	▲ 11,75%	▲ 11,62%
Kredit (dalam miliar rupiah)	79.764	80.083	87.389	87.938	▲ 3,62%	▲ 0,63%	▲ 7,82%	▲ 9,81%
Dana Pihak Ketiga (dalam miliar rupiah)	70.238	72.756	77.853	81.597	▲ 0,83%	▲ 4,81%	▲ 13,54%	▲ 12,15%
- Tabungan (dalam miliar rupiah)	20.723	22.013	23.389	24.892	▼ -0,89%	▲ 6,43%	▲ 14,20%	▲ 13,08%
- Deposito (dalam miliar rupiah)	49.516	50.743	54.465	56.705	▲ 1,59%	▲ 4,11%	▲ 13,26%	▲ 11,75%
NPL Gross (%)	6,19	6,58	6,93	7,00	▲ 25	▲ 7	▲ 53	▲ 42
NPL Net (%)	4,51	4,17	4,59	5,17	▼ (30)	▲ 58	▲ 37	▲ 100
ROA (%)	2,62	2,58	2,61	2,56	▼ (15)	▼ (5)	▼ (15)	▼ (2)
LDR (%)	79,67	77,71	79,03	76,59	▲ 203	▼ (244)	▼ (263)	▼ (112)
CR (%)	14,85	15,93	15,10	17,14	▼ (15)	▲ 204	▲ 2	▲ 121
BOPO (%)	82,33	82,04	81,39	81,07	▲ 58	▼ (32)	▼ (23)	▼ (97)
CAR (%)	22,17	22,45	22,49	22,69	▼ (123)	▲ 20	▲ 113	▲ 24

Ket : ▲ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak baik ▼ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak kurang baik
 ▲ Menunjukkan penurunan pertumbuhan dan berdampak baik ▼ Menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan berdampak kurang baik

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, September 2017

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

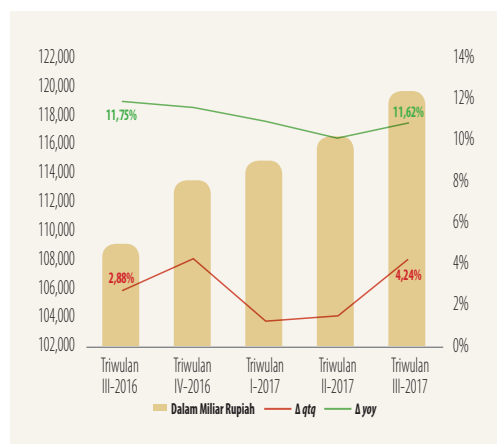
Pada triwulan III-2017, industri BPR menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan pertumbuhan kredit yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan perbaikan tingkat efisiensi, meskipun masih dibayangi dengan peningkatan risiko kredit.

A. Aset

Aset BPR pada triwulan III-2017 tumbuh 11,62% (yoy) atau 4,24% (qtq) menjadi Rp121,58 triliun. Pertumbuhan aset salah satunya dipengaruhi oleh meningkatnya DPK BPR. Di samping itu, fungsi intermediasi BPR masih cukup baik tercermin dari peningkatan penyaluran kredit.

Berdasarkan lokasi, aset BPR mayoritas berada di Pulau Jawa (56,67%) dengan Jawa Tengah memiliki porsi terbesar yaitu 22,39%. Dilihat dari pertumbuhannya, aset BPR di Maluku Utara tumbuh tertinggi sebesar 66,53% (yoy), meskipun memiliki porsi yang sangat rendah yaitu hanya 0,08% dari total aset BPR. Sementara itu, peningkatan nominal aset BPR tertinggi berada di Jawa Tengah yang tumbuh 12,97% (yoy).

Grafik I - 23 Tren Aset BPR



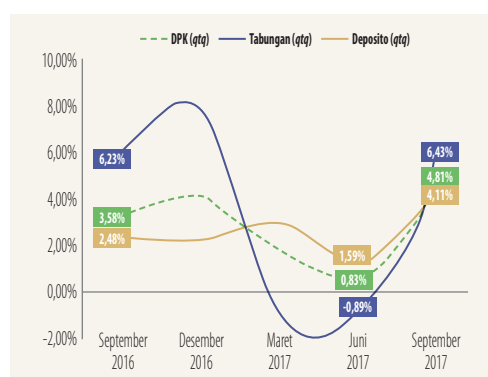
Sumber: SPI BPR, September 2017

B. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK BPR pada triwulan III-2017 tumbuh 12,15% (yoy) menjadi Rp81,60 triliun, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III-2016 sebesar 13,54% (yoy). Perlambatan antara lain tercermin pada melambatnya deposito dan tabungan yang masing-masing hanya tumbuh 11,75% (yoy) dan 13,08% (yoy).

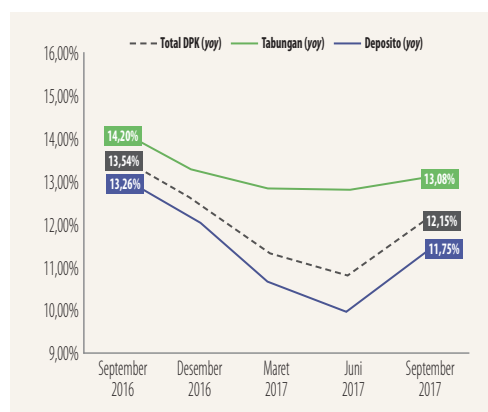
Sementara secara triwulan, DPK BPR tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya yaitu sebesar 4,81% (qtq) dengan pertumbuhan tabungan dan deposito masing-masing sebesar 6,43% (qtq) dan 4,11% (qtq). Deposito masih merupakan komponen DPK tertinggi dengan porsi 69,49%, diikuti tabungan sebesar 30,51%.

Grafik I - 24 Tren Pertumbuhan DPK (qtq)



Sumber: SPI BPR, September 2017

Grafik I - 25 Tren Pertumbuhan DPK (yoy)



Sumber: SPI BPR, September 2017

C. Kredit

Penyaluran kredit BPR pada triwulan III-2017 tumbuh 9,81% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,82% (yoy). Penyaluran kredit BPR sebagian besar disalurkan untuk tujuan konsumsi yang tercermin dari porsi KK sebesar 48,46%. Pertumbuhan KK meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,81% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh KI dan KMK masing-masing sebesar 14,97% (yoy) dan 10,13% (yoy).

Peningkatan kredit produktif BPR juga tercermin pada meningkatkan kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh moderat sebesar 8,98% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan kredit BPR tertinggi terdapat pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu sebesar 34,83% (yoy), meskipun hanya memiliki porsi 0,17% terhadap total kredit BPR.

Tabel I - 5

Kredit BPR Berdasarkan Jenis Penggunaan

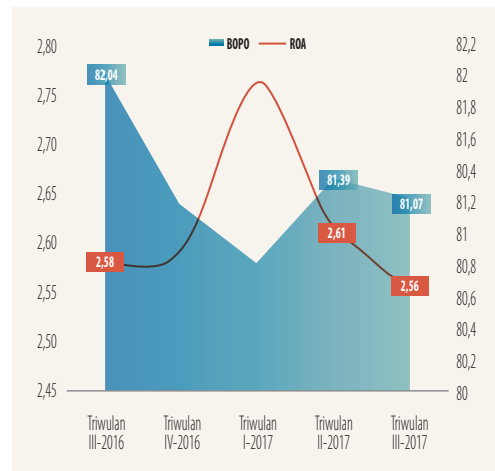
Jenis Penggunaan	2017		Porsi	Δ qtq		
	Juni	September		Triwulan III-2017	Triwulan III-2016	Triwulan III-2017
Modal Kerja	38.967	39.116	44,56%	3,38%	5,76%	10,13%
Investasi	6.107	6.183	6,98%	1,25%	14,75%	14,97%
Konsumsi	42.315	42.639	48,46%	0,76%	8,84%	8,81%
Total	87.389	87.938	100%	0,63%	7,82%	9,81%

Sumber: SPI, September 2017

D. Rentabilitas

Rentabilitas BPR pada triwulan III-2017 relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercermin dari ROA sebesar 2,56%. Hal tersebut didukung oleh peningkatan efisiensi BPR yang tercermin dari penurunan BOPO sebesar 97 bps (yoy) menjadi 81,07% serta meningkatnya laba sebesar 11,01% (yoy).

Grafik I - 26 ROA dan BOPO BPR



Sumber: SPI, September 2017

E. Permodalan

Permodalan BPR masih terjaga dengan CAR sebesar 22,69%, meningkat 24 bps dari September 2016 sebesar 22,45%. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya laba dan modal disetor sehingga turut memperkuat permodalan BPR. Tingginya permodalan BPR tersebut relatif memadai untuk menyerap risiko yang dihadapi.

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Porsi kredit UMKM tercatat sebesar 18,63% dari total kredit perbankan. Porsi tersebut sudah mencapai target minimal 15% terhadap total kredit pada akhir 2017. Berdasarkan sektor ekonomi, sebagian besar kredit UMKM terkonsentrasi pada sektor perdagangan besar dan eceran (52,87%), diikuti oleh industri pengolahan (10,62%), serta pertanian, perburuan dan kehutanan (8,86%). Pada triwulan III-2017, kredit UMKM tumbuh 8,23% (yoy), melambat dari tahun sebelumnya sebesar 9,30% (yoy). Perlambatan utamanya terdapat pada sektor perdagangan besar dan eceran yang hanya tumbuh 5,73% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,33% (yoy).

Tabel I - 6 Konsentrasi Penyaluran UMKM

Sektor Ekonomi	Nominal (dalam miliar rupiah)			Porsi		Δ <i>qtq</i>		Δ <i>yoy</i>	
	September 2016	Juni 2017	September 2017	Juni 2017	September 2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017*	Triwulan III-2016	Triwulan III-2017*
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan									
Baki Debet	64.040	73.104	74.983	8,80%	8,86%	7,54%	2,57%	9,58%	17,09%
NPL	2.720	2.693	2.562	3,68%	3,42%	-6,88%	-4,86%	6,49%	-5,81%
Industri Pengolahan									
Baki Debet	79.206	89.894	89.868	10,82%	10,62%	6,83%	-0,03%	4,82%	13,46%
NPL	3.456	3.408	3.278	3,79%	3,65%	-3,62%	-3,81%	23,42%	-5,16%
Perdagangan Besar dan Eceran									
Baki Debet	423.225	443.403	447.458	53,37%	52,87%	2,27%	0,91%	12,33%	5,73%
NPL	17.930	19.395	18.895	4,37%	4,22%	1,41%	-2,58%	7,58%	5,38%
Lainnya									
Baki Debet	215.435	224.400	233.985	27,01%	27,65%	4,99%	4,27%	5,31%	8,61%
NPL	10.028	12.220	12.173	5,45%	5,20%	-0,29%	-0,38%	-3,15%	21,39%
Baki Debet UMKM	781.906	830.801	846.294			3,93%	1,86%	9,30%	8,23%
NPL UMKM	34.134	37.716	36.908	4,54%	4,36%	-0,24%	-2,14%	5,43%	8,13%

Ket: Shaded area merupakan rasio NPL

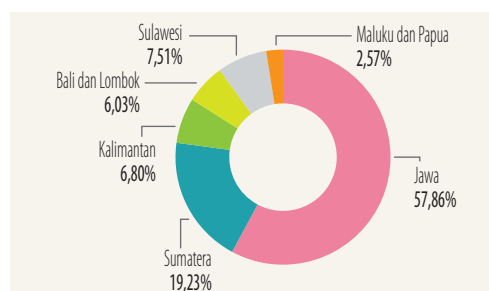
Sumber: SPI, September 2017

Sementara itu, penyaluran kredit UMKM pada sektor industri pengolahan dan pertanian menunjukkan peningkatan masing-masing tumbuh 13,46% (*yoy*) dan 17,09% (*yoy*).

Sementara secara triwulan kredit UMKM tumbuh 1,86% (*qtq*) menjadi Rp846,3 triliun, melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,93% (*qtq*). Melambatnya kredit UMKM pada triwulan berjalan utamanya dipengaruhi oleh perlambatan pada sektor perdagangan besar dan eceran yang hanya tumbuh 0,91% (*yoy*).

Secara spasial, sebagian besar kredit UMKM masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, di mana total porsi kredit UMKM lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) yaitu 58,00%. Sementara itu, kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) hanya sebesar 22,91%, meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 22,67%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur antara lain disebabkan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, jumlah *bankable entrepreneurs* yang relatif terbatas, serta jangkauan bank yang lebih terbatas karena infrastruktur yang kurang memadai.

Grafik I - 27 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah



Sumber: SPI, September 2017

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh BUMN (56,25%) dan BUSN (34,92%). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kredit UMKM BPD dan BUMN tumbuh tinggi masing-masing sebesar

Tabel I - 7 Kredit UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)

Kelompok Bank	Baki Debet (dalam miliar rupiah)		Porsi	Δ <i>qtq</i>		Δ <i>yoy</i>	
	Juni 2017	September 2017		Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan III-2016	Triwulan III-2017
BUMN	472.057	476.057	56,25%	3,99%	0,85%	19,75%	10,16%
BPD	60.133	66.444	7,85%	5,67%	10,50%	9,66%	17,12%
BUSN	290.937	295.490	34,92%	3,33%	1,56%	-1,17%	6,01%
KCBA dan Campuran	7.673	8.286	0,98%	9,72%	7,99%	-31,03%	-42,06%
Total UMKM	830.801	846.294	100%	3,93%	1,86%	9,30%	8,23%

Sumber: SPI September 2017

17,12% (yoy) dan 10,16% (yoy). Sementara kredit UMKM pada kelompok KCBA dan Bank Campuran turun 42,06% (yoy) yang antara lain dipengaruhi oleh mergernya satu bank KCBA menjadi kelompok bank BUSN Devisa.

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Terdapat enam sektor lapangan usaha yang menjadi fokus pemerintah, yaitu sektor pertanian, perikanan, pertambangan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta industri pengolahan. Keenam sektor ini dianggap krusial

bagi perekonomian Indonesia, karena selain mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sektor-sektor ini juga dapat menciptakan dampak lanjutan bagi aktivitas di sektor ekonomi lainnya dan menjadi kontributor yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari keenam sektor di atas, sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan besar dan eceran merupakan sektor ekonomi lapangan usaha yang paling banyak menerima kredit perbankan dengan porsi masing-masing sebesar 17,43% dan 18,84%, sementara sektor ekonomi bukan lapangan usaha yaitu sektor rumah tangga memiliki porsi 23,13% terhadap total kredit.

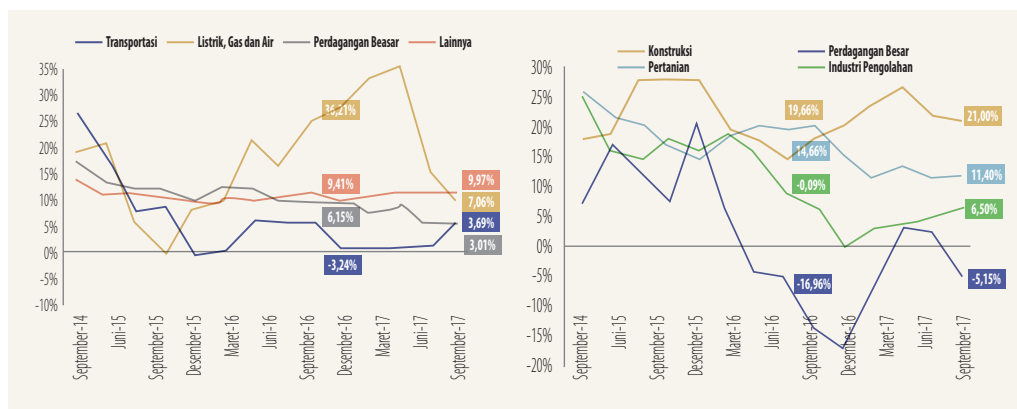
Tabel I - 8 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi (%)

No.	Sektor Ekonomi	Kredit (dalam triliun rupiah)			Δ <i>qtq</i> Triwulan III-2017	Δ <i>yoy</i> Triwulan III-2016	Δ <i>yoy</i> Triwulan III-2017	Porsi
		September 2016	Juni 2017	September 2017				
Lapangan Usaha								
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	272,95	296,65	304,07	2,50%	14,66%	11,40%	6,69%
2	Perikanan	9,39	10,29	10,42	5,14%	12,52%	11,02%	0,23%
3	Pertambangan dan Penggalian	116,09	122,47	110,11	-10,09%	-16,96%	-5,15%	2,42%
4	Industri Pengolahan	743,52	784,68	791,85	0,91%	-0,08%	6,50%	17,43%
5	Listrik, Gas, dan Air	121,52	127,07	130,10	2,83%	29,32%	7,06%	2,86%
6	Konstruksi	205,04	234,15	248,10	5,96%	19,66%	21,00%	5,46%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	831,02	845,29	856,05	1,27%	7,13%	3,01%	18,84%
8	Penyediaan Akomodasi dan PMM	92,39	96,72	95,86	-0,89%	12,75%	3,76%	2,11%
9	Transportasi	168,31	173,98	174,53	0,31%	-3,62%	3,69%	3,84%
10	Perantara Keuangan	176,86	212,05	208,69	-1,58%	9,23%	18,00%	4,59%
11	<i>Real Estate</i>	200,84	211,33	215,65	2,04%	13,22%	7,37%	4,75%
12	Administrasi Pemerintahan	14,54	22,19	23,00	3,62%	18,75%	58,16%	0,51%
13	Jasa Pendidikan	8,48	9,25	9,53	3,06%	12,78%	12,37%	0,21%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,18	17,45	17,64	1,11%	13,77%	9,02%	0,39%
15	Jasa Kemasyarakatan	56,89	60,22	62,17	3,24%	-7,47%	9,27%	1,37%
16	Jasa Perorangan	2,58	2,68	2,65	-1,19%	-2,21%	2,40%	0,06%
17	Badan Internasional	0,10	0,16	0,16	-2,88%	0,62%	58,45%	0,00%
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	10,14	3,25	3,07	-5,52%	-10,80%	-69,72%	0,07%
Bukan Lapangan Usaha								
19	Rumah Tangga	955,44	1.034,25	1.051	1,62%	7,81%	10,00%	23,13%
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	210,09	227,04	228,98	0,85%	8,64%	8,99%	5,04%
Total Industri		4.212,38	4.491,64	4.544	1,17%	6,47%	7,86%	100,00%

Sumber: SPI, September 2017

Grafik I - 28

Pertumbuhan Kredit Menurut Sektor Ekonomi (yoy)



Sumber: SPI, September 2017

Di tengah pertumbuhan kredit yang stagnan, kredit ke sektor konstruksi tumbuh relatif tinggi sebesar 21,00% (yoy), tumbuh lebih cepat dibanding triwulan III-2016 sebesar 19,66% (yoy). Tingginya kredit pada sektor konstruksi sejalan dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur pemerintah yang utamanya didorong oleh kredit untuk bangunan jalan tol yang tumbuh 46,62% (yoy) menjadi Rp36,00 triliun. Selain itu, swasta juga turut andil yaitu kredit konstruksi gedung yang tumbuh 16,69% (yoy) menjadi Rp112,05 triliun.

Kredit sektor pertanian tumbuh 11,40% (yoy), sedikit melambat dibanding triwulan III-2016 yang tumbuh 14,66 (yoy). Porsi kredit terbesar sektor pertanian berada pada subsektor Buah-buahan, Kelapa Sawit dan Rempah-rempah sebesar 78,24% dari total kredit pertanian. Dalam meningkatkan akses keuangan bagi petani, OJK mengeluarkan PROGRAM AKSI Pangan (Akselerasi-Sinergi-Inklusi Keuangan untuk Dukong Kedaulatan Pangan) sejak Maret 2017. Pemerintah juga melakukan beberapa program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR); Kredit Ketahanan Pangan dan Energi; Kredit Usaha Pembibitan Sapi dan Kredit Pengembangan Energi Nabati yang bertujuan memberdayakan para petani.

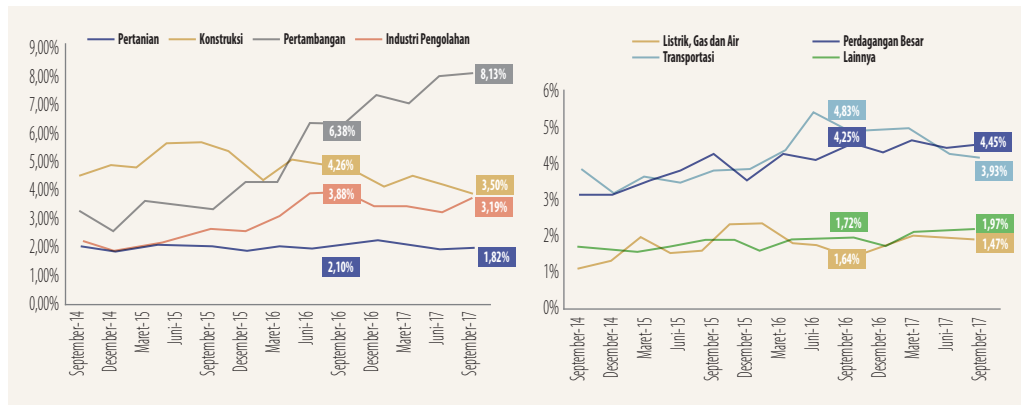
Kredit sektor perdagangan besar dan eceran masih dalam tren perlambatan yaitu tumbuh

3,01% (yoy), melambat tajam dibanding triwulan III-2016 yang tumbuh sebesar 7,13% (yoy). Perlambatan kredit sektor perdagangan besar dan eceran antara lain disebabkan korporasi yang cenderung menahan ekspansi usahanya di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global dan domestik. Hal ini tercermin dari *undisbursed loan* pada sektor ini yang tumbuh relatif tinggi sebesar 9,44% (yoy), dibanding tahun sebelumnya yang turun 2,13%.

Sektor industri pengolahan/manufaktur merupakan penerima kredit perbankan kedua terbesar setelah sektor perdagangan. Kredit ke sektor ini tumbuh 6,50% (yoy), membaik setelah pada triwulan III-2016 menurun 0,08% (yoy). Kredit ke sektor ini didominasi oleh subsektor industri makanan dan minuman disusul dengan subsektor industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang memiliki porsi masing-masing 21,15% dan 13,18% terhadap total kredit industri pengolahan.

Kredit ke sektor pertambangan masih terkontraksi meskipun proses pemulihan harga komoditas global mulai membaik. Kredit ke sektor ini turun 5,15% (yoy), namun sudah lebih baik dibandingkan triwulan III-2016 yang turun 16,96% (yoy). Masih terkontraksinya sektor ini utamanya didorong oleh penurunan kredit pada subsektor pertambangan batubara yaitu turun 20,05% (yoy).

Grafik I - 29 NPL Gross Sektor Ekonomi



Sumber: SPI, September 2017

Risiko kredit industri perbankan pada triwulan III-2017 sedikit membaik yang tercermin dari turunnya NPL *gross* menjadi 2,93% (Triwulan III-2016=3,10%). Perbaikan NPL terdapat pada beberapa sektor antara lain pada sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi dan transportasi. Di tengah pertumbuhan kredit yang relatif tinggi, sektor konstruksi memiliki NPL yang juga relatif tinggi sebesar 3,50%, namun menurun dibanding triwulan III-2016 sebesar 4,26%. NPL sektor pertambangan juga masih dalam tren kenaikan menjadi 8,13%, lebih tinggi dibanding triwulan III-2016 sebesar 6,38%.

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

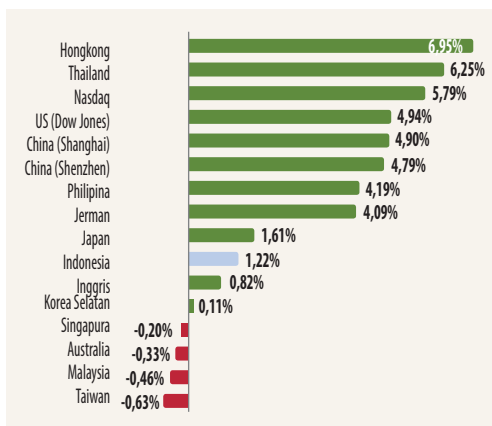
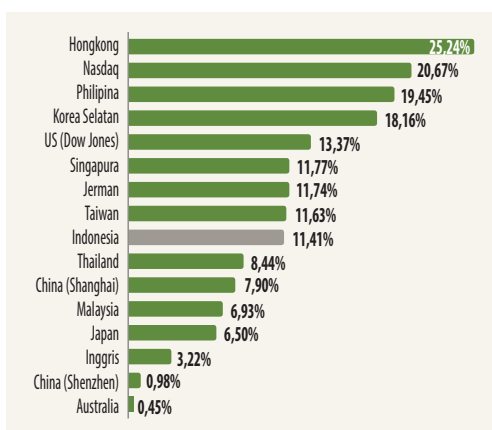
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan akhir triwulan III-2017 berada pada posisi 5.900,85 atau mengalami kenaikan sebesar 1,22% jika dibandingkan dengan posisi triwulan II-2017. Secara regional perkembangan indeks selama triwulan III-2017, IHSG menempati peringkat kesepuluh setelah Jepang. Perdagangan Efek pada triwulan III-2017, berdasarkan nilai dan volume transaksi didominasi oleh investor lokal. Adapun perilaku

investor asing pada periode ini menunjukkan adanya *outflow (net sell)* di pasar saham yaitu sebesar Rp28,11 triliun (*ytd* Rp10,73 triliun).

Faktor domestik yang mempengaruhi kinerja Pasar Modal di antaranya BI 7-days Repo Rate yang turun sebesar 25 bps ke level 4,50%, dengan suku bunga *Deposit Facility* turun di level 3,75% dan *Lending Facility* turun di 5,25%. Selain itu ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak berubah yaitu 5,1% (*yoy*) pada 2017 dan 5,3% (*yoy*) pada 2018.

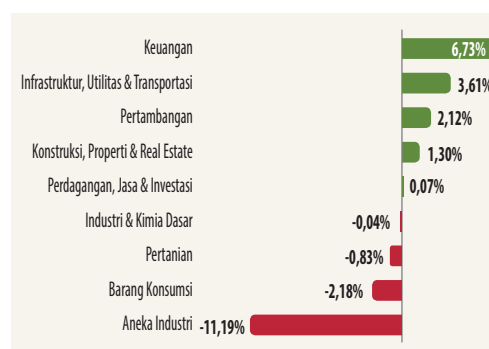
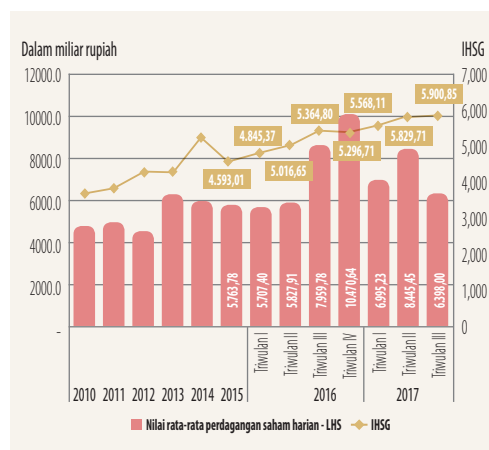
Faktor eksternal dipengaruhi oleh keputusan The Fed untuk mempertahankan target *Fed Funds Rate* (FFR) pada level 1% - 1,25% pada FOMC Meeting September. Bank of Japan terus melakukan stimulus perekonomian dengan mempertahankan suku bunga acuannya pada level -0,1% dan melanjutkan pembelian *Japanese Government Bonds* (JGB) hingga mencapai *outstanding* JPY80 triliun per tahun dengan target *yield* JGB 10 tahun sekitar 0%. Faktor lainnya yaitu S&P menurunkan *credit rating* Tiongkok 1 notch dari AA- menjadi A+.

Adapun Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menunjukkan pelemahan sebesar Rp145,- atau 1,09% dari Rp 13.325,-/USD menjadi Rp 13.470,-/USD dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 30 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*qtd*)**Grafik I - 31** Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*ytd*)

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami kenaikan sebesar 1,58% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi Rp 6.473,35 triliun. Rata-rata nilai, volume, dan frekuensi perdagangan per hari mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp2.047,45 miliar (-24,24%) menjadi sebesar Rp6.397,99 miliar, penurunan sebesar Rp2.662,59 juta (-24,12%) menjadi sebesar Rp8.374,36 juta dan penurunan sebesar 9 kali (-3,09%) menjadi 292 kali transaksi. Secara regional, IHSG menempati posisi kesepuluh setelah Jepang dengan pertumbuhan sebesar 1,22% (*qtd*) dan 11,41% (*ytd*).

Sebagian besar kinerja indeks sektoral pada triwulan III-2017 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan tertinggi terdapat pada indeks sektor keuangan sebesar 6,73%. Sementara itu, indeks yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada indeks aneka industri sebesar -11,19%. Peningkatan indeks pada sektor keuangan dipengaruhi oleh penurunan BI 7-days RR dan adanya rencana dari Himpunan Bank-Bank Negara untuk menurunkan suku bunga deposito "special rate" secara bertahap. Penurunan pada sektor aneka industri disebabkan oleh penurunan penjualan mobil.

Grafik I - 32 Perkembangan Indeks Industri (*qtd*)**Grafik I - 33** Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

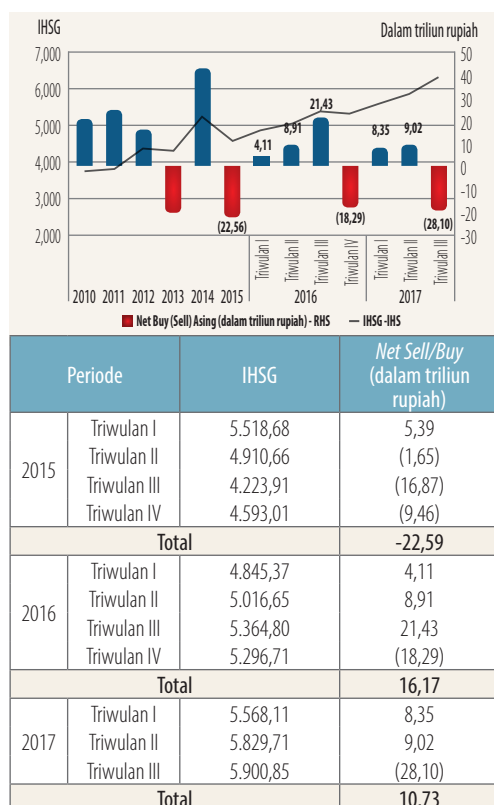
Tabel I - 9

Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Indikator (Rata-rata harian)	2016				2017		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Nilai Perdagangan Saham Harian (dalam miliar rupiah)	5.707,40	5.827,91	7.959,78	10.470,64	6.995,23	8.445,45	6.397,99
Investor Asing (dalam miliar rupiah)							
Beli	2.682,89	2.528,81	3.451,13	2.596,91	2.411,95	3.365,73	2.167,99
Jual	2.615,57	2.387,30	3.087,85	2.860,15	2.227,32	3.195,46	2.621,32
Investor Domestik (dalam miliar rupiah)							
Beli	3.024,52	3.299,11	4.508,65	7.900,73	4.583,28	5.079,71	4.230,00
Jual	3.091,84	3.440,61	4.871,92	7.610,49	4.717,91	5.249,99	3.776,68
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	236.976	242.989	282.768	294.098	336.568	301.152	291.847

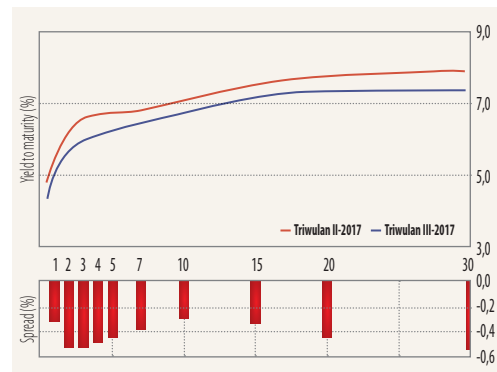
Selama triwulan III-2017 transaksi investor asing membukukan *net sell* sejumlah Rp28,10 triliun dan secara tahunan membukukan *net sell* sebesar Rp10,73 triliun.

Grafik I - 34 Perkembangan IHSG dan Net Asing



Grafik I - 35

Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)



Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi Pemerintah menunjukkan *trend* penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor turun sebesar -41,6 bps. Rata-rata *yield* tenor pendek, menengah, dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar -48,3 bps, -41,2 bps, dan -40,5 bps.

Tabel I - 10

Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Utang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan II-2017			Triwulan III-2017		
	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)	Volume (dalam triliun rupiah)	Nilai (dalam triliun rupiah)	Frekuensi (Kali)
Obligasi:						
- Korporasi	68,47	68,61	6.386	89,03	89,35	8.360
- SBN	814,57	841,36	45.205	1.175,89	1.223,64	71.244
Total	883,04	909,96	51.591	1.264,93	1.312,99	79.604
Repo	60,76	60,54	248	83,02	83,54	421

Secara total, aktivitas perdagangan Obligasi Pemerintah pada triwulan III-2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada triwulan II-2017. Volume perdagangan obligasi pemerintah mengalami peningkatan sebesar +44,36% menjadi Rp1.175,89 triliun. Nilai perdagangan juga mengalami peningkatan 45,44% menjadi Rp1.223,64 triliun dan frekuensi transaksi juga mengalami peningkatan 57,6% menjadi 71.244 kali.

Adapun aktivitas perdagangan Obligasi Korporasi pada triwulan III-2017 juga

mengalami peningkatan dibandingkan dengan pada triwulan II-2017. Volume perdagangan mengalami peningkatan +30,03% menjadi Rp89,03 triliun. Nilai perdagangan meningkat +30,24% menjadi Rp89,35 triliun dan frekuensi perdagangan meningkat +30,91% menjadi 8.360 kali.

1.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek

Tabel I - 11 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	34
2	Penjamin Emisi Efek *)	4
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	86
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3
Total		129

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek

Pada triwulan ini tidak terdapat penerbitan izin baru atau peningkatan izin usaha Perusahaan Efek (PE), namun terdapat satu pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, sehingga jumlah PE yang terdaftar di OJK tetap 129 PE. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, OJK mencatat pelaporan pembukaan sejumlah 28 lokasi selain Kantor Pusat dan penutupan sejumlah 7 lokasi selain Kantor Pusat selama triwulan III-2017

Tabel I - 12 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2017	2017
	s.d Triwulan II	s.d Triwulan III
Jumlah lokasi selain Kantor Pusat	678	699

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, pada periode laporan OJK telah menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 217 izin dengan rincian 197 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 20 Izin Wakil Penjamin Emisi

Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 9.366 WPPE dan 2.052 WPEE.

Tabel I - 13 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II 2017		Triwulan III 2017		Izin Total s/d Triwulan III	Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	181	108	224	197	401	9.366
WPEE	11	8	21	20	34	2.052
Total	192	116	245	217	435	11.418

Selama periode laporan, OJK menerbitkan 352 perpanjangan izin dengan rincian 322 perpanjangan izin WPPE dan 30 perpanjangan izin WPEE sehingga secara total OJK telah menerbitkan 5.264 perpanjangan izin dengan rincian 4.577 perpanjangan izin WPPE dan 687 perpanjangan izin WPEE

Tabel I - 14 Proses Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan II 2017		Triwulan III 2017		Izin Total s/d Triwulan III	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin		
WPPE	191	94	132	89	322	4.577
WPEE	7	7	10	10	30	687
Total	198	101	142	99	352	5.264

Pada periode laporan, OJK menerima 266 dokumen perizinan dengan rincian 193 dokumen permohonan izin WPPEP dan 73 permohonan WPPEPT. OJK juga menerbitkan 209 izin WPPEP dan 55 untuk izin WPPEPT. Sehingga sampai periode laporan total izin WPPEP sebanyak 249 dan WPPEPT sebanyak 57.

Tabel I - 15 Proses Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas

Jenis Izin	Triwulan II 2017		Triwulan III 2017		Izin Total s/d Triwulan III	Total
	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin		
WPPEP	333	21	193	209	249	249
WPPEPT	29	2	73	55	57	57
Total	362	23	266	264	306	306

1.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Kinerja Reksa Dana menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana pada triwulan III-2017 meningkat sebesar Rp31,19 triliun (8,15%) menjadi Rp414,03 triliun. NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap menunjukkan kenaikan jumlah NAB terbesar yaitu Rp7,99 triliun (9,58%) dibandingkan dengan triwulan II-2017, diikuti oleh Reksa Dana Saham sebesar Rp7,07 triliun (6,54%), Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp6,52 triliun (14,30%), Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp4,98 triliun (5,28%), Reksa Dana Syariah sebesar Rp2,52 triliun (13,33%), Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,95 triliun (95%), Reksa Dana Campuran sebesar Rp0,66 triliun (2,75%) dan ETF sebesar Rp0,5 triliun (6,72%).

Tabel I - 16 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2016 (dalam triliun rupiah)		2017 (dalam triliun rupiah)		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
RD Pasar Uang	30,51	28,54	40,89	45,59	52,11
RD Pendapatan Tetap	68,67	69,56	76,54	83,44	91,43
RD Saham	101,89	113,10	109,73	108,16	115,23
RD Campuran	22,16	21,05	22,75	24,00	24,66
RD Terproteksi	75,40	84,92	88,86	92,29	99,27
RD Indeks	0,51	0,60	0,87	1,00	1,95
ETF	5,49	6,06	7,46	7,44	7,94
RD Syariah*	12,09	14,91	17,31	18,91	21,43
Total	316,72	338,75	364,42	382,84	414,03

*) termasuk ETF Saham Syariah

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 2,44% menjadi Rp19,59 triliun pada triwulan III-2017. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami penurunan menjadi 73 RDPT dari sebelumnya 76 RDPT. 73 RDPT tersebut terdiri dari 56 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp16,80 triliun dan 17 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp2,79 triliun.

Tabel I - 17 Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Investasi	2016		2017		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Reksa Dana					
Jumlah	1.347	1.425	1.491	1.552	1.667
Total NAB	316,72	338,75	364,42	382,84	414,03
RDPT					
Jumlah	69	73	77	76	73
Total NAB	19,19	17,64	16,22	20,08	19,59
EBA					
Jumlah	7	7	7	7	8
Nilai Sekuritisasi	1,96	1,79	1,63	1,56	7,32
EBA-SP					
Jumlah	2	3	3	4	4
Nilai Sekuritisasi	0,70	1,70	1,43	2,47	2,36
DIRE					
Jumlah	2	2	3	3	4
Total Nilai	0,56	0,56	0,56	0,59	0,59
KPD					
Jumlah	317	372	372	377	385
Total Nilai	165,62	164,01	177,89	187,09	192,65

*) Dalam triliun Rupiah

OJK menerbitkan dua surat izin KIK-EBA berkaitan dengan proyek infrastruktur, yaitu KIK-EBA Mandiri JSMR01 dan KIK-EBA Danareksa Indonesia Power PLN1. OJK juga menerbitkan satu surat pembubaran Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, sehingga jumlah KIK-EBA menjadi delapan KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp7,32 triliun atau meningkat sebesar 369,63%. OJK menerbitkan satu surat izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat (KIK-DIRE), sehingga jumlah KIK-DIRE menjadi 4 KIK dengan dana kelolaan Rp0,59 triliun.

Adapun selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap berjumlah empat KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp2,36 triliun atau menurun sebesar 4,45% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III-2017, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) meningkat sebesar 2,97% menjadi Rp192,65 triliun. Selain itu, jumlah kontrak KPD juga meningkat sebesar 2,12% menjadi 385 KPD.

OJK sampai dengan triwulan III-2017 telah menerbitkan 333 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I - 18

Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	39
Reksa Dana Campuran	26
Reksa Dana Pendapatan Tetap	39
Reksa Dana Pasar Uang	28
Reksa Dana Terproteksi	166
Reksa Dana Indeks	1
ETF-Pendapatan Tetap	1
ETF-Saham	2
Reksa Dana Syariah Campuran	3
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	5
Reksa Dana Syariah Saham	6
Reksa Dana Syariah Indeks	2
Reksa Dana Syariah Terproteksi	7
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	3
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	1
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	3
ETF-Syariah Saham	1
Total	333

Di samping itu, OJK juga menerbitkan 87 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 83 Reksa Dana Konvensional dan empat Reksa Dana Syariah. Adapun rincian pembubaran Reksa Dana tersebut terdiri dari :

- 54 Reksa Dana Terproteksi terdiri dari 45 Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan sembilan Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan;
- Empat Reksa Dana Campuran terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena diperintahkan oleh OJK;
- 11 Reksa Dana Saham terdiri dari delapan Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, dua Reksa Dana tidak terpenuhinya minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari

berturut-turut;

- Tiga Reksa Dana Pendapatan Tetap terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut dan satu Reksa Dana dibubarkan karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan;
- 11 Reksa Dana Pasar Uang terdiri dari tujuh Reksa Dana Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK, tiga Reksa Dana karena tidak dapat memenuhi minimum dana kelolaan, dan satu Reksa Dana karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut;
- Tiga Reksa Dana Syariah Saham terdiri dari dua Reksa Dana dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK dan satu Reksa Dana dibubarkan karena memiliki NAB kurang dari Rp10 miliar dalam 120 hari berturut-turut.
- Satu Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap dibubarkan karena kesepakatan MI dan BK.

Tabel I - 19

Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

	2016		2017		
	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
Individu					
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.959	3.043	3.136	1.856	1.967
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	21.672	22.271	23.182	23.300	24.149
Penasehat Investasi (PI)	4	4	4	4	4
Institusi					
Manajer Investasi (MI)	84	85	85	87	87
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	30	32	32	34	35
Penasehat Investasi (PI)	2	3	3	3	3

Selama periode triwulan III-2017, OJK memberikan satu Surat Tanda Terdaftar APERD dan tidak menerbitkan izin kepada MI dan PI institusi. Sehingga jumlah MI, APERD dan PI Institusi masing-masing berjumlah 87 MI, 35 APERD, dan tiga PI institusi. Adapun pelaku individu industri Pengelolaan investasi mengalami peningkatan pada WAPERD sebesar 3,64% dan WMI sebesar 5,98% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

1.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan III-2017, jumlah Penawaran Umum mengalami peningkatan sebesar 14% dibanding triwulan III-2016 bersamaan dengan peningkatan nilai emisi Penawaran Umum sebesar 4%. Jumlah emisi Penawaran Umum Perdana Saham mengalami peningkatan sebesar 100%, namun untuk nilai emisi

mengalami penurunan sebesar 73%. Jumlah emisi Penawaran Umum Terbatas mengalami penurunan sebesar 43%, namun terdapat peningkatan nilai emisi sebesar 36%. Jumlah emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang mengalami peningkatan sebesar 27% bersamaan dengan peningkatan nilai emisi sebesar 14%. Jumlah emisi Penawaran Umum Obligasi/Sukuk Tahap I tidak mengalami perubahan, namun terjadi peningkatan nilai

Tabel I - 20 Perkembangan Jumlah dan Nilai Emisi

Jenis Penawaran Efek	Triwulan III 2016		Triwulan II 2017		Triwulan III 2017		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi	Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (miliar rupiah)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (miliar rupiah)				
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO)	3	6.370	18	3.222	6	1.744	-67%	-46%	100%	-73%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/ <i>Rights Issue</i>)	7	7.768	9	44.269	4	10.559	-56%	-76%	-43%	36%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	11	23.802	34	62.378	14	27.062	-59%	-57%	27%	14%
a. Obligasi/ Sukuk + Subordinasi	0	0	7	7.860	0	0	-100%	-100%	0%	0%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	4	6.700	18	35.120	4	8.000	-78%	-77%	0%	19%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	7	17.102	9	19.398	10	19.062	11%	-2%	43%	11%
Total Emisi	21	37.940	61	109.869	24	39.364	-61%	-64%	14%	4%

Tabel I - 21 Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri pada Triwulan III-2017
(dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana	Penawaran Umum Terbatas	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang
1	Perbankan		1.000.265	10.152.000
2	Asuransi dan Pembiayaan	31.000	-	7.611.500
3	Sekuritas dan Investasi		-	
4	Perdagangan		-	
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	1.129.340	-	700.000
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	45.000	3.088.955	
7	Properti dan Perhotelan	309.000	-	
8	<i>Real Estate</i> dan Konstruksi		-	6.532.000
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	45.000	-	
10	Barang Konsumsi	-	1.433.978	
11	Aneka Industri Lainnya	-	-	
12	Industri Dasar	-	-	
13	Industri Logam	-	-	
14	Industri Kimia	184.350	5.035.347	
15	Agrobisnis	-	-	
16	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	2.066.500
	Total	1.743.690	10.558.545	27.062.000

emisi sebesar 19%. Jumlah emisi Penawaran Umum Obligasi/Sukuk Tahap II dst mengalami peningkatan sebesar 43% bersamaan dengan peningkatan nilai emisi sebesar 11%.

A. Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan III-2017, terdapat 13 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak enam Perusahaan telah mendapat surat efektif dan tujuh Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari enam Emiten tersebut sebesar Rp1,74 triliun.

Tabel I - 22 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/ Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (jutaan rupiah)
1	PT Ayana Land International Tbk	Properti dan Perhotelan	31 Jul 2017	309.000
2	PT Emdeki Utama Tbk	Industri Kimia	12 Sept 2017	184.350
3	PT Trisula Textile Industries Tbk	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	25 Sept 2017	45.000
4	PT Kioson Komersial Indonesia Tbk	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	25 Sept 2017	45.000
5	PT Mallaca Trust Wuwungan Insurance Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	29 Sept 2017	31.000
6	PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk	Perhubungan dan Telekomunikasi	29 Sept 2017	1.129.340
TOTAL				1.743.690

B. Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Pada triwulan III-2017, terdapat 11 perusahaan yang menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan empat perusahaan telah mendapatkan Pernyataan Efektif Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp10,56 triliun.

Tabel I - 23 Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/ Perusahaan Publik	Sektor	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (jutaan rupiah)
1	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	Industri Kimia	14 Agt 2017	5.035.347
2	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.	Barang Konsumsi	28 Sept 2017	1.433.978
3	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan	29 Sept 2017	1.000.265
4	PT Siloam International Hospitals Tbk.	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata, dan Perusahaan Jasa Lainnya	29 Sept 2017	3.088.955
TOTAL				10.558.545

C. Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Pada triwulan ini tidak ada Perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Obligasi, empat Perusahaan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi (PUB Obligasi) Tahap I dan 10 Perusahaan

Tabel I - 24 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

PUB Obligasi Tahap I					
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (jutaan rupiah)
1	PT Timah (Persero) Tbk.	Pertambangan dan Kehutanan	Obligasi	19 Sept 2017	1.200.000
			Sukuk Ijarah		300.000
2	PT Pegadaian (Persero)	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	20 Sept 2017	2.500.000
3	PT Bank Mayapada Internasional Tbk	Perbankan	Obligasi	28 Sept 2017	1.000.000
4	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Real Estate dan Konstruksi	Obligasi	28 Sept 2017	3.000.000
Total					8.000.000

Tabel I - 25 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang

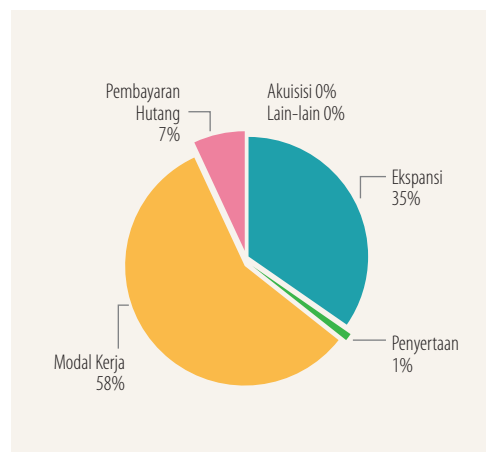
PUB Obligasi Tahap II dst						
No	Emiten/Perusahaan Publik	Sektor	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (jutaan rupiah)
1	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	25 Jun 2015	10-11 Juli 2017	769.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	30 Mei 2016	8 – 10 Agustus 2017	3.222.000
3	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Asuransi dan Pembiayaan	Obligasi	16 Jun 2016	14 – 16 Agustus 2017	720.500
4	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Perbankan	Obligasi	26 Okt 2016	16 dan 18 Agustus 2017	2.000.000
5	PT Bank OCBC NISP Tbk	Perbankan	Obligasi	29 Apr 2016	15-16 Agustus 2017	2.002.000
6	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Perbankan	Obligasi	22 Nov 2016	18 dan 21 Agustus 2017	5.150.000
7	PT Tower Bersama Infrastructure	Perhubungan dan Telekomunikasi	Obligasi	24 Jun 2016	11-13 September 2017	700.000
8	PT Global Mediacom Tbk	Sekuritas dan Investasi	Obligasi	21 Jun 2017	13-14 September 2017	250.000
			Sukuk			150.000
9	PT Utama Karya (Persero)	Real Estate dan Konstruksi	Obligasi	9 Des 2016	19-20 September 2017	3.532.000
10	PT Medco Energi International Tbk	Pertambangan dan Kehutanan	Obligasi	28 Jun 2016	26 Sept 2017	566.500
Total						19.062.000

yang telah melakukan PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp27,06triliun

D. Rencana Penggunaan Dana

Persentase terbesar penggunaan dana Penawaran Umum yang dilakukan di triwulan III-2017 adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 58% atau sekitar Rp22,88triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 35% atau sekitar Rp13,89triliun untuk ekspansi; 7% atau sekitar Rp2,61triliun untuk pembayaran hutang; 1% atau sekitar Rp34,09miliar untuk penyertaan.

Grafik I - 36 Rencana Penggunaan Dana



Tabel I - 26

Rencana Penggunaan Dana Atas EPP yang Melakukan Aksi Korporasi Berdasarkan Sektor Industri

No	Sektor Industri	Ekspansi	Penyertaan	Akuisisi	Modal Kerja	Restruk. Hutang	Lain-Lain
1	Perbankan	-	-	-	11.112.885	-	-
2	Asuransi dan Pembiayaan	-	-	-	5.779.779	1.447.644	-
3	Sekuritas dan Investasi	-	-	-	1.492.485	-	-
4	Perdagangan	-	-	-	-	-	-
5	Perhubungan dan Telekomunikasi	664.892	-	-	277.039	861.841	-
6	Media Massa, Teknologi Informasi, Pariwisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	2.711.049	-	34.092	378.778	-	-
7	Properti dan Perhotelan	-	300.008	-	-	-	-
8	Real Estate dan Konstruksi	4.123.468	-	-	2.394.977	-	-
9	Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	29.937	-	-	12.228	-	-
10	Barang Konsumsi	1.406.016	-	-	-	-	-
11	Aneka Industri Lainnya	-	-	-	-	-	-
12	Industri Dasar	4.956.877	-	-	-	-	-
13	Industri Logam	-	-	-	-	-	-
14	Industri Kimia	-	-	-	175.298	-	-
15	Agrobisnis	-	-	-	-	-	-
16	Pertambangan dan Kehutanan	-	-	-	1.259.737	298.347	-
Total		13.892.240	300.008	34.092	22.883.206	2.607.832	-

(dalam jutaan rupiah)

*Data berdasarkan penggunaan dana setelah dikurangi oleh biaya Emisi

1.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

A. Lembaga Penunjang Pasar Modal Serta Pemingkat Efek

Pada triwulan III-2017, OJK menerbitkan dua Surat Keputusan Pembatalan Persetujuan Sebagai Bank Kustodian Atas Nama *The Hongkong And Shanghai Banking Corporation* dan Atas Nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK adalah sebagai berikut:

Tabel I - 27

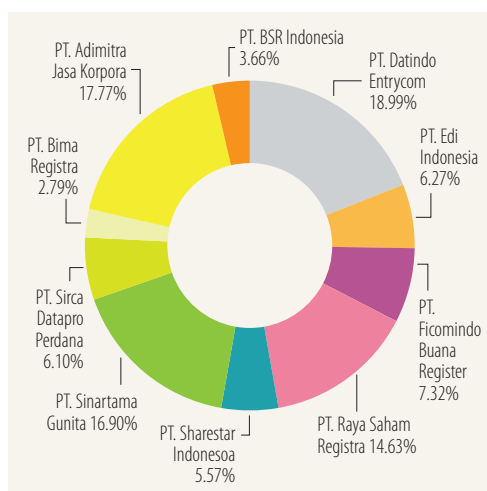
Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2017	2017	Jenis
	Triwulan II	Triwulan III	
Biro Administrasi Efek	10	10	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	20	Surat Persetujuan
Wali Amanat	12	12	Surat Tanda Terdaftar
Pemingkat Efek	2	2	Surat Perizinan
Ahli Syariah Pasar Modal	0	0	Surat Perizinan

B. Biro Administrasi Efek (BAE)

Grafik I - 37

Market Share BAE Berdasarkan Jumlah Klien



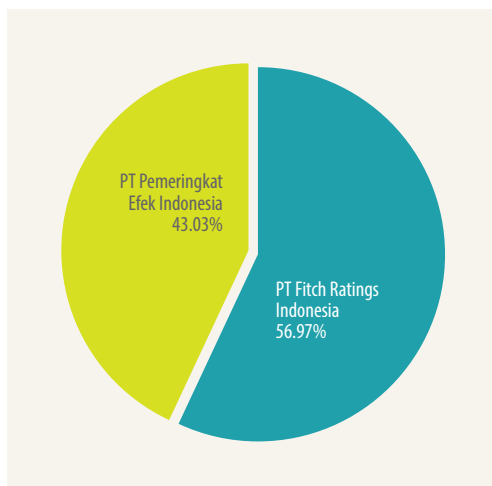
Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE didominasi oleh PT Datindo Entrycom yang mencapai 18.99%, PT Adimitra Jasa Korpora sebanyak 17.77%, PT Sinartama Gunita sebanyak 16.90% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara itu, BAE dengan jumlah

klien paling sedikit adalah PT Bima Registra sebanyak 2,79%, PT BSR Indonesia sebanyak 3,66% dan PT Sharestar Indonesia sebanyak 5,57%.

C. Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan III-2017, total perusahaan yang diperingkat oleh dua Pemeringkat Efek sebanyak 165 Perusahaan atau menurun dibandingkan triwulan II-2017 yaitu sebanyak 179 Perusahaan. Pangsa pasar berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat masing-masing Pemeringkat Efek adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia sebanyak 71 Perusahaan. Selanjutnya PT Fitch Ratings Indonesia sebanyak 94 Perusahaan. Berikut *market share company rating (%)* berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek Triwulan III-2017:

Grafik I - 38 Market Share Company Rating Triwulan III-2017



Dari 165 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 159 Perusahaan masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak enam Perusahaan masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Berikut data lengkap komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade* dan *Non Investment Grade* per triwulan III-2017:

Tabel I - 28 Perusahaan Berdasarkan Hasil Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek	Investment Grade (Perusahaan)		Non Investment Grade (Perusahaan)	
	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
PT Pemeringkat Efek Indonesia	81	66	8	5
PT Fitch Ratings Indonesia	89	93	1	1
Total	170	159	9	6

D. Profesi Penunjang Pasar Modal

Berikut merupakan rangkuman pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal selama periode Triwulan III-2017.

- OJK menerbitkan sebanyak 17 Surat Tanda Terdaftar (STTD) dan empat Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan, terdiri dari:
 - Akuntan : dua STTD
 - Konsultan Hukum : enam STTD
 - Penilai : delapan STTD
 - Notaris : satu STTD
 - ASPM : empat Surat Keputusan Pemberian Izin Perorangan
- OJK menetapkan sebanyak 14 Keputusan Dewan Komisiner terkait pembatalan STTD yang terdiri dari:
 - Akuntan : dua pembatalan STTD
 - Konsultan Hukum : satu pembatalan STTD
 - Penilai : -
 - Notaris : 11 pembatalan STTD
 - ASPM : -
- OJK menerima informasi mengenai Profesi yang meninggal dunia yang terdiri dari:
 - Akuntan : 1 (satu)
 - Konsultan Hukum : -
 - Penilai : -
 - Notaris : -
 - ASPM : -
- Profesi yang melapor telah memasuki usia Pensiun, terdiri dari:
 - Akuntan : -
 - Konsultan Hukum : -
 - Penilai : -
 - Notaris : 2 (dua)

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I - 29 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	
	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
Akuntan	608	607
Konsultan Hukum	717	722
Penilai	210	218
Notaris	1.335	1.323
Penilai Pemerintah	251	251
ASPM	41	45

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerja sama dengan asosiasi telah menyelenggarakan delapan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu kali Pendidikan Dasar, antara lain:

- a. Akuntan
FAPM-IAPI menyelenggarakan sebanyak tiga kali Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu Pendidikan Profesi Dasar pada triwulan III-2017 dengan materi:

Tabel I - 30 Pendidikan Profesi Lanjutan Akuntan Triwulan III-2017

No.	Judul Kegiatan
1	Update Terkini Peraturan dan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Serta Peran Akuntan Publik Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
2	Aspek Legal dan Akuntansi Merger, Akuisisi & Spin Off
3	Ketentuan Terkini dalam Penggunaan Jasa AP dan KAP Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Sektor Pasar Modal Serta <i>Critical Issues IFRS 9</i>
4	Workshop Profesi Akuntan Publik Sektor Pasar Modal - OJK

- b. Konsultan Hukum
HKHPM telah menyelenggarakan PPL sebanyak empat kali pada triwulan III-2017 dengan materi:

Tabel I - 31 Pendidikan Profesi Lanjutan Konsultan Hukum Triwulan III-2017

No.	Judul Kegiatan
1	Diklat Penanganan Bank Masalah Oleh Konsultan Hukum
2	Persaingan Usaha yang Sehat Dalam Jasa Hukum di Indonesia
3	Fungsi Audit Forensik dan Peran Konsultan Hukum
4	Teknik Pelaporan oleh Konsultan Hukum dalam Regim TPPU

- c. Penilai
FPPM-MAPPI telah menyelenggarakan PPL sebanyak satu kali pada triwulan III-2017 dengan materi:

Tabel I - 32 Pendidikan Profesi Lanjutan Penilai Triwulan III-2017

No.	Judul Kegiatan
1	Workshop Penilaian Biological Asset terkait dengan Amandemen IAS 41 (PSAK 69 dan 16)

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Sepanjang Triwulan III-2017, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) bergerak positif. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya total aset IKNB sebesar 4,03% menjadi Rp2.081,33 triliun. Adapun penyumbang terbesar kenaikan aset IKNB adalah pada industri Asuransi Konvensional dan BPJS, Lembaga Keuangan Khusus dan Dana Pensiun.

Tabel I - 33 Total Aset IKNB Konvensional (dalam triliun rupiah)

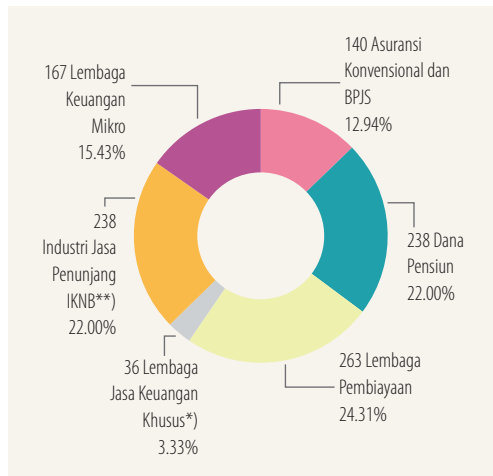
No	Industri	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1	Asuransi Konvensional dan BPJS	912,09	944,58	981,14	1.012,34	1.079,00
2	Dana Pensiun	235,51	238,30	246,80	254,13	258,94
3	Lembaga Pembiayaan*)	489,77	509,22	516,69	532,84	537,17
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus **)	175,57	184,81	193,18	193,77	200,73
5	Industri Jasa Penunjang IKNB ***)	6,81	7,25	7,30	7,30	8,26
6	Lembaga Keuangan Mikro *****)	0,27	0,28	0,29	0,30	0,35
Total Aset		1.820,02	1.884,44	1.945,4	2.000,68	2.084,48

*) Aset Lembaga Pembiayaan termasuk di dalamnya aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

**) Revisi data LKK dengan menambahkan aset PT PNM dan PT Danareksa dan tidak termasuk Lembaga Penjaminan Daerah

****) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB adalah per Semester I-2017

*****) Aset LKM termasuk LKM Syariah

Grafik I - 39
**Komposisi Jumlah Pelaku IKNB
Triwulan III-2017**


*) Data Pelaku IKNB per Agustus 2017

**) Pelaku Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

Sementara itu, bila dilihat berdasarkan jumlah Pelaku, maka industri Lembaga Pembiayaan merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar dengan jumlah sebanyak 263 pelaku, diikuti oleh Industri Jasa Penunjang IKNB, Dana Pensiun, Lembaga Keuangan Mikro, Asuransi Konvensional dan BPJS dan serta Lembaga Jasa Keuangan Khusus.

1.4.1 Perkembangan Perasuransian Konvensional dan BPJS

Sampai akhir periode laporan, aset industri Asuransi dan BPJS tumbuh 6,5% menjadi Rp1.079,00 triliun. Peningkatan aset tersebut seiring peningkatan jumlah investasi yang naik

Tabel I - 34
Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	385,24	395,11	419,50	434,76	486,66
	Asuransi Umum dan Reasuransi	136,70	139,47	140,70	140,34	142,03
	Asuransi Wajib	117,55	120,01	123,01	124,36	126,15
	BPJS	272,60	289,98	297,93	312,89	324,16
	Jumlah	912,09	944,58	981,14	1.012,34	1.079,00
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	334,44	343,27	365,22	378,89	430,14
	Asuransi Umum dan Reasuransi	69,13	69,71	71,80	71,97	75,43
	Asuransi Wajib	92,84	94,28	102,60	103,52	106,13
	BPJS	256,70	273,16	276,52	295,65	307,92
	Jumlah	753,12	780,42	816,14	850,03	919,62
3	Total Pendapatan Premi					
	Asuransi Jiwa	95,71	137,79	35,19	73,79	131,85
	Asuransi Umum dan Reasuransi	54,04	74,93	18,77	37,47	56,39
	Asuransi Wajib	8,69	11,73	2,88	5,74	8,79
	BPJS	84,69	116,28	29,26	61,60	95,13
	Jumlah	243,12	340,73	86,11	178,61	292,16
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	58,65	79,05	20,39	43,93	80,98
	Asuransi Umum dan Reasuransi	23,96	32,61	7,74	15,50	23,60
	Asuransi Wajib	7,18	9,91	2,64	5,21	8,53
	BPJS	63,87	86,80	25,70	52,63	80,11
	Jumlah	153,67	208,37	56,47	117,26	193,22
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	305,01	317,53	336,43	349,37	396,50
	Asuransi Umum dan Reasuransi	84,43	85,86	85,03	84,14	84,32
	Asuransi Wajib	95,16	97,96	99,05	100,24	101,79
	BPJS	36,33	40,56	40,37	44,78	49,23
	Jumlah	520,93	541,91	560,88	578,53	631,84

8,2% menjadi Rp919,62 triliun. Peningkatan investasi terbesar terdapat pada jenis investasi Saham, Surat Berharga Negara (SBN), serta Reksadana. Sementara itu, bila dilihat dari jenis industri asuransi, maka kenaikan nilai investasi terbesar didominasi oleh asuransi sosial (BPJS) dan asuransi jiwa dengan total kenaikan investasi sebesar Rp63,52 triliun

Peningkatan aset dan investasi industri Asuransi dan BPJS didukung peningkatan kinerja industri yaitu dari sisi pendapatan premi yang meningkat sebesar 20,17% (yoy) menjadi Rp292,16 triliun. Komposisi pendapatan premi masih didominasi Asuransi Jiwa dengan porsi sebesar 45,13%, diikuti oleh BPJS sebesar 32,56%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 19,3%, serta Asuransi Wajib sebesar 3,01%.

Sampai dengan periode laporan, terdapat perubahan jumlah pelaku dibanding triwulan sebelumnya, yaitu 140 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 35 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional dan BPJS

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	27	28	28	28	30
	c. Patungan	22	23	23	23	23
	Sub Total	50	52	52	52	54
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	2	2	2	2
	b. Swasta Nasional	58	53	51	51	50
	c. Patungan	15	21	23	23	23
	Sub Total	76	76	76	76	75
3	Reasuransi	5	5	5	5	6
4	BPJS	2	2	2	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	3	3	3	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	136	138	138	138	140

Tabel I - 36

Densitas dan Penetrasi Industri Perasuransian Konvensional dan BPJS

Uraian	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
GDP (dalam miliar rupiah)	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800	12.406.800
Premi Bruto (dalam miliar rupiah)	300.882	323.564	335.199	340.656	371.139
Jumlah Penduduk (juta)	255	257	257	257	257
Penetrasi	2,43%	2,61%	2,70%	2,75%	2,99%
Densitas (dalam ribuan rupiah)	1.179,93	1.259,00	1.304,28	1.325,51	1.444,12

Catatan:

- 1) Angka Premi Bruto merupakan premi bulan September 2017 disetahunkan
- 2) Angka GDP merupakan angka sementara dari Indikator Ekonomi BPS.
- 3) Penetrasi: Premi Bruto/GDP
- 4) Densitas: Premi Bruto/Jumlah penduduk

Selama periode laporan, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi naik sebesar 8,94% menjadi Rp1.444,12. Adapun tingkat penetrasi asuransi yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebesar 2,99% atau naik 0,24%.

Tabel I - 37

RBC Industri Asuransi

Uraian	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017
Asuransi Jiwa	528,8%	497,4%	428,8%	414,0%	491,5%
Asuransi Umum dan Reasuransi	268,6%	266,7%	279,7%	278,6%	294,1%

Sementara itu, Permodalan industri asuransi jiwa masih terjaga dengan rata-rata RBC meningkat menjadi 491,5%, naik 77,5% dibanding periode sebelumnya. Begitu juga dengan RBC Asuransi Umum yang mengalami peningkatan 15,5% menjadi 294,1%.

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan industri Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan yang tercermin dari indikator pertumbuhan aset dan investasi dana pensiun. Sampai dengan periode laporan, terjadi peningkatan aset

Tabel I - 38 Distribusi Aset Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

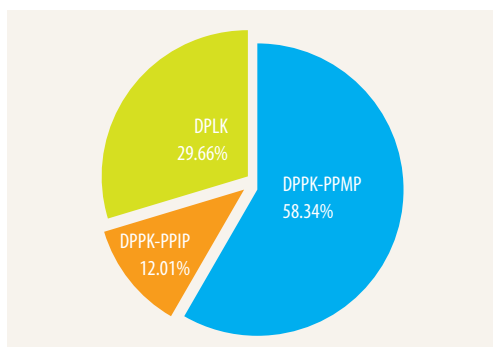
Jenis Program	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
DPPK-PPMP	148,31	147,81	150,49	152,65	152,37
<i>Growth</i>	2,48%	-0,34%	1,81%	1,44%	-0,19%
DPPK-PPIP	26,56	26,65	27,45	28,34	30,91
<i>Growth</i>	3,96%	0,33%	3,00%	3,23%	9,08%
DPLK	60,64	63,84	68,86	73,14	75,66
<i>Growth</i>	6,87%	5,29%	7,86%	6,21%	3,45%
Total Aset (dalam triliun rupiah)	235,51	238,30	246,80	254,13	258,94
<i>Growth</i>	3,74%	1,19%	3,57%	2,97%	1,89%

Tabel I - 39 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun (triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
DPPK-PPMP	141,07	139,87	145,04	146,19	146,73
<i>Growth</i>	3,10%	-0,85%	3,70%	0,80%	0,37%
DPPK-PPIP	25,93	26,07	26,82	27,49	30,20
<i>Growth</i>	3,93%	0,54%	2,87%	2,49%	9,88%
DPLK	59,81	62,83	67,44	71,62	74,59
<i>Growth</i>	7,45%	5,06%	7,34%	6,19%	4,16%
Total Investasi (dalam triliun rupiah)	226,80	228,77	239,30	245,30	251,52
<i>Growth</i>	4,31%	0,87%	4,60%	2,51%	2,54%

Dana Pensiun sebesar 1,89% menjadi Rp258,94 triliun. Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi sebanyak 2,54% menjadi Rp251,52 triliun. Membaiknya nilai IHSG sebesar 71,146 atau naik 1,22% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi faktor utama meningkatnya investasi Dana Pensiun.

Grafik I - 40 Distribusi Investasi Industri Dana Pensiun



Tabel I - 40 Portofolio Investasi Dana Pensiun (triliun Rupiah)

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan				
		III 2016	IV 2016	I 2017	II 2017	III 2017
1	Surat Berharga Negara	52,91	54,33	56,10	57,08	57,70
2	Tabungan	0,26	0,19	0,21	0,19	0,57
3	Deposito <i>On Call</i>	1,45	1,09	1,71	2,04	1,25
4	Deposito Berjangka	56,91	57,35	62,80	65,59	68,34
5	Sertifikat Deposito	0,85	1,07	1,51	1,56	1,57
6	Sertifikat Bank Indonesia	-	0,44	0,004	-	-
7	Saham	29,98	28,71	29,93	30,29	29,60
8	Obligasi	49,08	48,39	48,54	49,18	51,55
9	Sukuk	1,84	1,95	2,12	2,37	2,61
10	Unit Penyertaan Reksadana/	13,87	13,94	14,50	14,59	15,07
11	<i>Medium Term Note</i>	-	0,07	0,13	0,19	0,12
12	Efek Beragun Aset dari KIK EBA	0,51	0,50	0,49	0,56	1,20
13	Unit Penyertaan berbentuk KIK	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12

No.	Jenis Aset Investasi	Triwulan				
		III 2016	IV 2016	I 2017	II 2017	III 2017
14	Kontrak Opsi Saham	-	-	-	-	-
15	Repurchase Agreement	-	-	-	-	-
16	Penempatan Langsung pada Saham	7,58	7,47	7,60	7,77	7,77
17	Tanah	3,35	4,42	4,69	4,75	4,85
18	Bangunan	2,11	1,99	2,08	2,10	2,12
19	Tanah dan Bangunan	5,96	6,70	6,76	6,91	7,06
Total		226,80	228,77	239,30	245,30	251,52

Di antara jenis investasi yang diperkenankan tersebut, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi yaitu Deposito Berjangka (27,17%), Surat Berharga Negara (22,94%), Obligasi (20,50%), dan Saham (11,77%). Selanjutnya, jumlah Dana Pensiun sampai dengan periode laporan adalah 238 pelaku dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I - 41 Jumlah Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
DPPK PPMP	184	180	177	175	170
DPPK PPIP	43	44	43	43	44
DPLK	25	25	25	24	24
Jumlah	252	249	245	242	238

Pada periode September 2017, terdapat satu Dana Pensiun Pemberi Kerja Lembaga Katolik Yadapen yang melakukan perubahan program pensiun dari program pensiun manfaat pasti menjadi program pensiun iuran pasti.

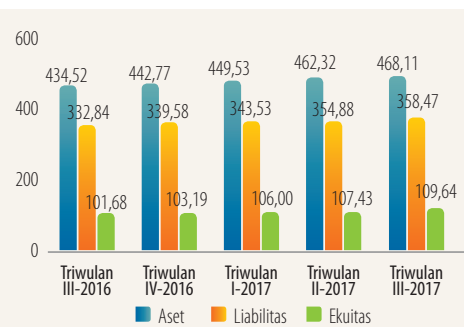
1.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset dan liabilitas Perusahaan Pembiayaan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,25% dan 1,01% dibandingkan triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Pembiayaan juga meningkat sebesar 2,06% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 41

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (triliun rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

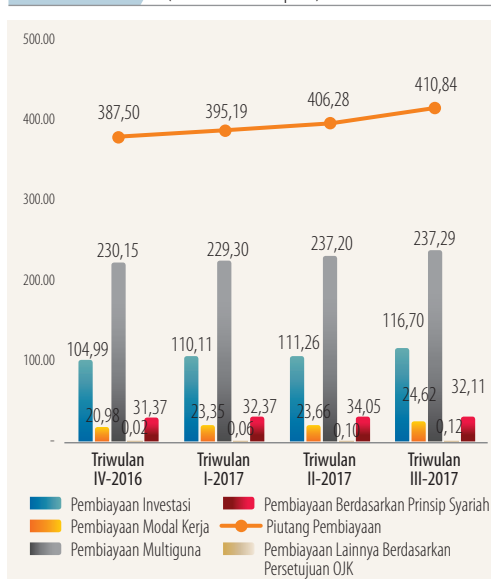
B. Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Selama periode triwulan III-2017 terdapat satu penambahan izin usaha baru dan satu pencabutan izin Perusahaan Pembiayaan sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan pada triwulan III-2017 menjadi 198 perusahaan. Bila dilihat berdasarkan total aset, sebanyak 76 perusahaan pembiayaan menguasai aset industri dengan porsi sebesar 92% sedangkan 122 perusahaan pembiayaan hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

C. Piutang Perusahaan Pembiayaan

Kinerja kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan penyaluran piutang mengalami peningkatan sebesar Rp4,56 triliun atau 1,12% dibandingkan triwulan sebelumnya, dengan komposisi piutang pembiayaan didominasi oleh Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Investasi dengan proporsi masing-masing sebesar 57,76% dan 28,40%. Sementara itu, bila dilihat dari proporsi pembiayaan yang disalurkan berdasarkan sektor ekonomi, maka Sektor Ekonomi Lapangan Usaha mendominasi piutang dengan proporsi sebesar 75,43% (Rp320,26 triliun).

Grafik I - 42 Piutang Perusahaan Pembiayaan
(dalam triliun rupiah)



Catatan: Data sudah termasuk Pembiayaan Syariah

D. Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Tabel I - 42 Indikator Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan

Uraian	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
FAR (%)	87,52%	87,91%	87,88%	87,77%
NPF (%)	3,26%	3,16%	3,47%	3,18%
Gearing Ratio (kali)	3,03	2,98	3,05	3,00

Seiring dengan pertumbuhan piutang pembiayaan, rasio FAR (*Financing to Asset Ratio*) masih terjaga pada rasio 87,77%. Kualitas piutang pembiayaan (NPF) masih berada pada level 3,18% dan *Gearing Ratio* pada periode laporan tercatat 3,00 kali

Tabel I - 43 Piutang Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi (triliun Rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	241,13	250,79	315,30	320,26
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19,40	15,77	19,00	19,12
2. Pertambangan dan Penggalian	19,04	20,11	22,24	22,19
3. Industri Pengolahan	30,43	32,42	35,71	36,39
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	22,02	23,77	21,21	22,07
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	0,30	0,31	0,33	0,34
6. Konstruksi	10,39	11,39	12,90	13,61
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	40,04	46,61	65,47	68,18
8. Transportasi dan Pergudangan	22,09	20,95	24,10	25,04
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	5,13	5,37	9,84	10,02
10. Informasi dan Komunikasi	3,31	3,07	4,04	3,57
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,63	2,84	4,27	4,14
12. Real Estat	1,52	1,80	1,91	1,83
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,27	1,57	2,44	2,41
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	23,38	23,96	36,88	37,30
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,26	3,57	6,90	6,94
16. Jasa Pendidikan	3,10	3,17	4,37	4,71
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,67	7,17	9,01	9,27
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	0,40	0,43	2,05	2,04
19. Kegiatan Jasa Lainnya	17,15	16,95	22,90	20,81
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	9,59	9,56	9,72	9,48
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	0,01	0,01	0,01	0,01
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	159,11	157,15	104,61	104,34
1. Rumah Tangga	53,31	52,75	58,46	56,61
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	105,79	104,39	46,15	47,73
JUMLAH	400,24	407,93	419,91	424,60

Tabel I - 44 NPF Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
A. Sektor Ekonomi Lapangan Usaha	3,85%	3,79%	3,49%	3,20%
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,50%	2,53%	2,46%	2,22%
2. Pertambangan dan Penggalian	7,26%	7,65%	7,17%	6,75%
3. Industri Pengolahan	2,00%	2,59%	2,44%	2,38%
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,03%	0,03%	0,04%	0,11%
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	2,81%	2,69%	2,19%	1,96%
6. Konstruksi	3,09%	3,64%	3,01%	3,13%
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2,02%	2,14%	2,30%	1,76%
8. Transportasi dan Pergudangan	16,97%	15,09%	14,01%	13,32%
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	9,03%	8,46%	5,28%	5,00%
10. Informasi dan Komunikasi	1,83%	1,49%	5,10%	6,52%
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,98%	1,68%	1,81%	1,54%
12. Real Estat	3,75%	4,50%	4,49%	3,72%
13. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1,18%	2,51%	2,26%	1,55%
14. Jasa Persewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	2,20%	2,62%	1,99%	1,73%
15. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,77%	2,05%	1,88%	1,34%
16. Jasa Pendidikan	1,32%	1,88%	1,93%	1,39%
17. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,58%	2,13%	2,51%	1,60%
18. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	1,34%	1,66%	1,13%	1,40%
19. Kegiatan Jasa Lainnya	2,15%	2,40%	2,05%	1,72%
20. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga; Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri untuk Memenuhi Kebutuhan	2,10%	1,58%	1,81%	1,89%
21. Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,47%	0,07%	2,66%	0,64%
B. Sektor Ekonomi Bukan Lapangan Usaha	2,37%	2,15%	3,40%	3,12%
1. Rumah Tangga	1,75%	2,12%	2,37%	2,30%
2. Bukan Lapangan Usaha Lainnya	2,68%	2,16%	4,71%	4,09%
JUMLAH	3,26%	3,16%	3,47%	3,18%

E. Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Seiring dengan peningkatan jumlah piutang pembiayaan, maka berdampak pada laba bersih industri perusahaan pembiayaan yang mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp9,78 triliun pada triwulan III-2017.

F. Jenis Valuta Pinjaman

Dalam rangka mendukung kegiatan bisnis operasional perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan piutang pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan menerima sumber

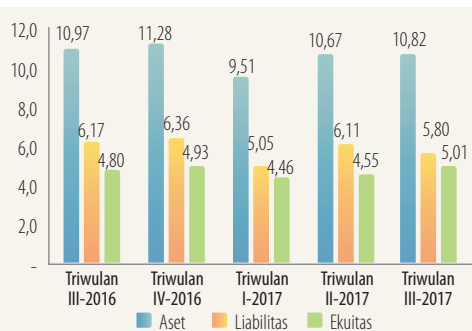
pendanaan yang berasal dari pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri.-Dari jumlah pinjaman sebesar Rp256,18 triliun yang diterima perusahaan pembiayaan pada triwulan III-2017, 54,037% berdenominasi Rupiah, diikuti oleh Dolar AS 35,234%, Yen Jepang 10,727%, dan Dolar Singapura 0,002%. Untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar valas, maka seluruh pinjaman berdenominasi mata uang asing tersebut telah dilakukan lindung nilai (*hedging*).

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

A. Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset dan ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,40% dan 10,12% menjadi Rp10,82 triliun dan Rp5,01 triliun, bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, total liabilitas Perusahaan Modal Ventura turun sebesar 5,09% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp5,80 triliun.

Grafik I - 43 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)



B. Jumlah Perusahaan Modal Ventura

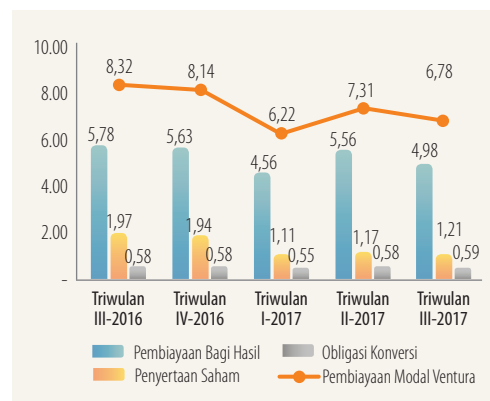
Selama periode triwulan III-2017 terdapat satu penambahan izin usaha baru dan satu pencabutan izin Perusahaan Modal Ventura sehingga jumlah Perusahaan Modal Ventura pada triwulan III-2017 menjadi 63 perusahaan.

C. Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura mengalami penurunan sebesar 7,23% menjadi Rp6,78 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan proporsi pembiayaan/penyertaan terbesar berasal dari pembiayaan bagi

hasil dengan proporsi sebesar 73,41% dari total pembiayaan/penyertaan dengan nilai pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp4,98 triliun. Sementara itu, berdasarkan jenis sektor ekonomi, sektor perdagangan, restoran, dan hotel mendominasi keseluruhan total pembiayaan/penyertaan yang disalurkan industri PMV dengan total pembiayaan/penyertaan sebesar Rp3,04 triliun atau dengan proporsi sebesar 43,64%.

Grafik I - 44 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (dalam triliun Rupiah)



Tabel I - 45 Pembiayaan/Penyertaan Berdasarkan sektor Ekonomi (dalam miliar rupiah)

Sektor Ekonomi	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1. Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	619	658	727	766	730
2. Pertambangan	525	581	538	980	602
3. Perindustrian	470	490	528	575	552
4. Konstruksi	559	505	498	516	493
5. Perdagangan, Restoran, dan Hotel	2.724	2.772	2.874	3.276	3.037
6. Pengangkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	334	286	168	159	153
7. Jasa Pendukung Bisnis	426	319	375	422	537
8. Jasa Sosial dan Masyarakat	994	999	138	160	155
9. Lain-Lain	1.834	1.715	549	633	701
JUMLAH	8.485	8.325	6.397	7.488	6.960

Catatan : Data Pembiayaan sebelum dikurangi pencadangan

D. Rasio Keuangan

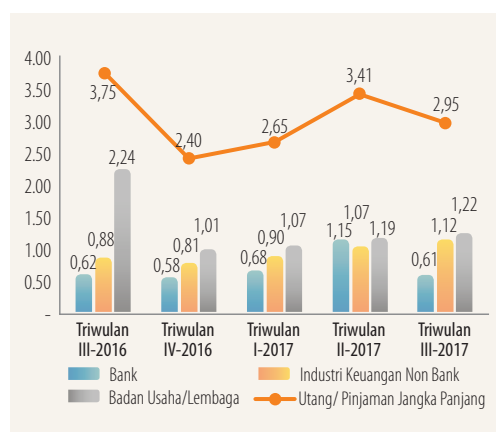
Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 96,49%, 62,66%, 1,70%, dan 3,66%.

- Kenaikan BOPO dari 95,54% pada triwulan II-2017 menjadi 96,49% pada triwulan III-2017 menunjukkan adanya penurunan efisiensi dalam pengelolaan operasional Perusahaan Modal Ventura.
- Terjadi penurunan IFAR dari 68,49% pada triwulan II-2017 menjadi 62,66% Triwulan III-2017. Hal ini disebabkan penurunan jumlah pembiayaan/penyertaan sebesar 7,23% atau dari Rp7,31 triliun menjadi Rp6,78 triliun.
- ROA mengalami penurunan dari 1,72% pada triwulan II-2017 menjadi 1,70% pada triwulan III-2017.
- ROE mengalami penurunan dari 4,03% pada triwulan II-2017 menjadi 3,66% pada triwulan III-2017.

E. Sumber Pendanaan

Total pinjaman yang diterima Perusahaan Modal Ventura pada triwulan III-2017 adalah sebesar Rp2,95 triliun atau turun sebesar 13,61% dibandingkan triwulan sebelumnya.

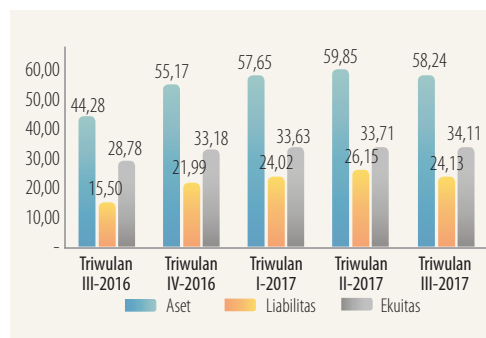
Grafik I - 45 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (dalam triliun Rupiah)



1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pada triwulan III-2017, dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yaitu *Indonesia Infrastructure Finance* (IIF) dan Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memiliki total aset sebesar Rp58,24 triliun dan total liabilitas sebesar Rp24,13 triliun. Total aset mengalami penurunan sebesar 2,70% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah pinjaman yang diberikan turun sebesar 0,87% menjadi Rp35,83 triliun dengan penurunan pinjaman terbesar adalah pada infrastruktur Air Minum yang turun sebesar 30,50% atau dari Rp0,45 triliun menjadi Rp0,31 triliun.

Grafik I - 46 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas (dalam triliun Rupiah)



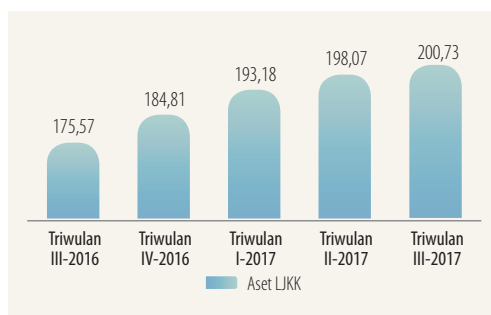
Tabel I - 46 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Infrastruktur (dalam miliar rupiah)

Jenis Infrastruktur	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
Air Minum	0,23	0,31	0,32	0,45	0,31
Jalan	4,38	7,26	8,08	7,53	8,15
Ketenagalistrikan	11,91	12,97	12,98	13,44	13,06
Minyak dan Gas Bumi	1,85	3,14	3,18	3,17	4,64
Telekomunikasi	0,70	1,53	1,53	2,31	3,20
Transportasi	2,72	5,34	5,45	3,18	2,11
Lainnya	5,19	6,93	6,94	6,07	4,36
Total	26,97	37,47	38,47	36,15	35,83

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) meliputi Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Pergadaian, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Danareksa (Persero). Total Aset LJKK naik 1,34% menjadi Rp200,73 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

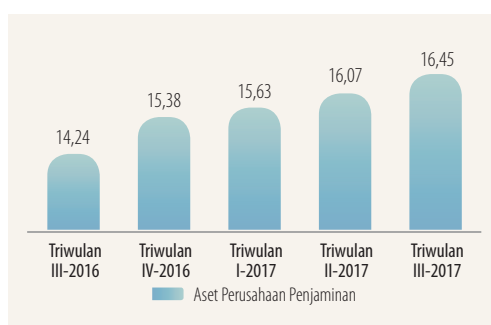
Grafik I - 47 Pertumbuhan Aset LJKK (dalam triliun Rupiah)



A. Perusahaan Penjaminan

Pada periode laporan, tercatat total aset perusahaan penjaminan naik 2,34% menjadi Rp16,45 triliun.

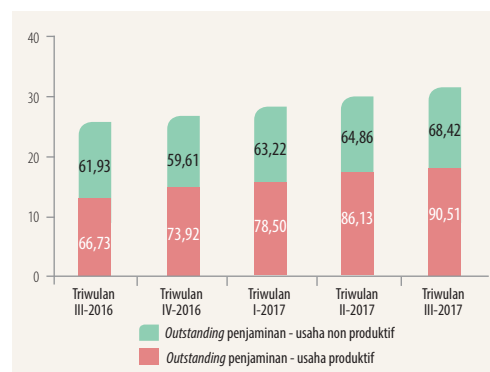
Grafik I - 48 Pertumbuhan Aset Perusahaan Penjaminan (dalam triliun Rupiah)



Kegiatan penjaminan terdiri atas penjaminan usaha produktif dan penjaminan usaha non-produktif. Penjaminan usaha produktif adalah penjaminan yang diberikan kepada usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah sedangkan penjaminan usaha non-

produktif tidak menghasilkan nilai tambah. Pada periode pelaporan, penjaminan yang disalurkan oleh lembaga penjamin lebih didominasi oleh penjaminan usaha produktif. *Outstanding* penjaminan selama triwulan III-2017 naik 5,26% menjadi Rp158,93 triliun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong oleh nilai *outstanding* usaha produktif dan non produktif yang masing-masing meningkat sebesar 5,09% dan 5,49% dibanding dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan *outstanding* penjaminan tersebut seiring dengan misi pemerintah untuk mendorong peningkatan kemampuan akses UMKM melalui penjaminan kredit.

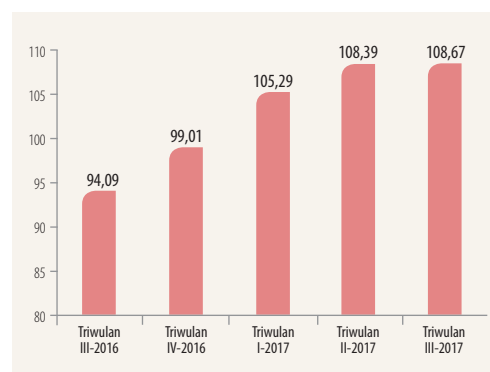
Grafik I - 49 *Outstanding* Penjaminan (dalam triliun Rupiah)



B. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Total aset LPEI naik 0,26% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari Rp108,39 triliun menjadi Rp108,67 triliun.

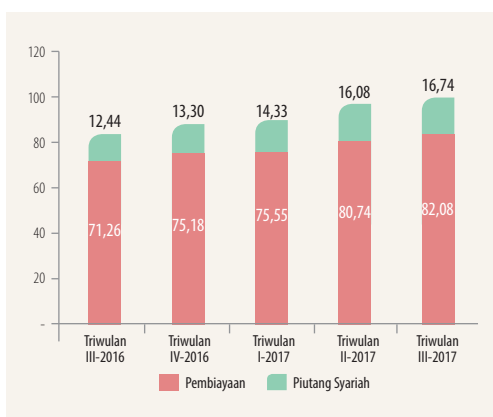
Grafik I - 50 Pertumbuhan Aset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)



Kenaikan aset tersebut seiring dengan naiknya penyaluran pembiayaan dan piutang yang dilakukan oleh LPEI. Sampai dengan periode laporan, LPEI mencatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp98,83 triliun atau naik 2,08%. Kenaikan tersebut terdiri dari naiknya pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar 1,67% dan piutang melalui sistem syariah sebesar 4,13% dari triwulan sebelumnya.

Grafik I - 51

Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Ekspor Indonesia (dalam triliun Rupiah)

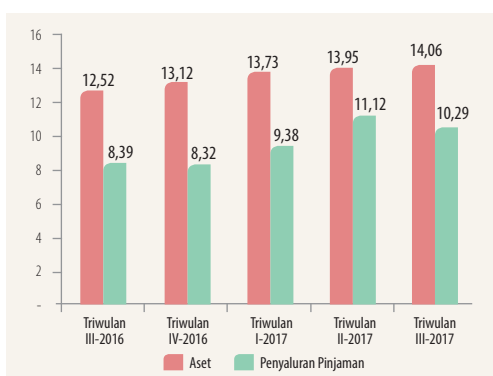


C. Sarana Multigriya Finansial

Aset PT SMF (Persero) pada triwulan III-2017 naik 0,75% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp14,06 triliun. Kenaikan aset tersebut berbanding terbalik dengan nilai pinjaman yang disalurkan yang mengalami penurunan sebesar 7,48% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp10,29 triliun.

Grafik I - 52

Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero) (dalam triliun Rupiah)

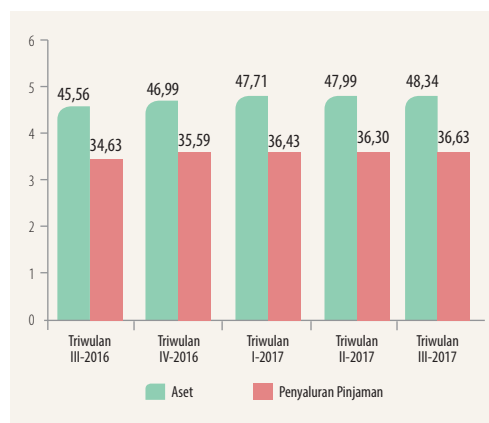


D. Pergadaian

Sampai dengan triwulan III-2017, terdapat tujuh perusahaan pergadaian swasta yang mendaftarkan diri serta empat perusahaan pergadaian swasta yang memperoleh izin dari OJK. Pada periode laporan, total aset pergadaian tercatat naik 0,74% menjadi Rp48,34 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, pinjaman yang disalurkan pergadaian pada triwulan III-2017 sebesar Rp36,63 triliun, atau naik 0,89% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I - 53

Aset dan Outstanding Penyaluran Pinjaman Pergadaian (dalam triliun Rupiah)

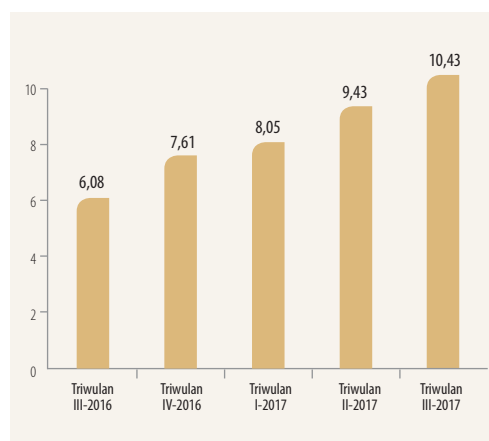


E. PT. PNM (Persero)

Aset PNM pada periode laporan tercatat sebesar Rp10,43 triliun, naik 10,62% dari triwulan sebelumnya.

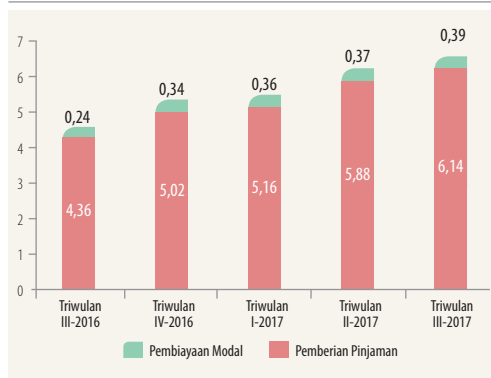
Grafik I - 54

Pertumbuhan Aset PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)



Pada triwulan III-2017, baik pemberian pinjaman maupun pemberian modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 4,37% dan 6,64%.

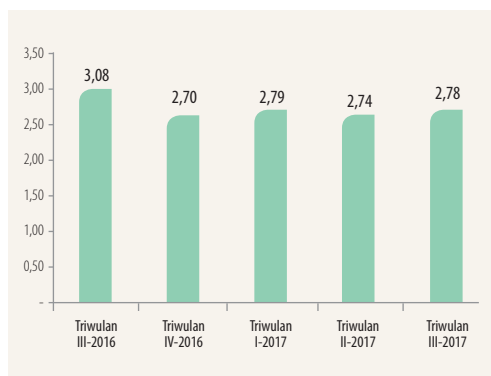
Grafik I - 55 Pertumbuhan Pemberian Pinjaman dan Pembiayaan Modal PT PNM (Persero) (dalam triliun Rupiah)



F. PT Danareksa (Persero)

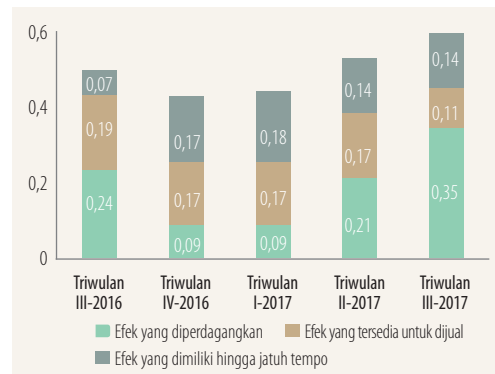
Aset PT Danareksa pada triwulan III-2017 sebesar Rp2,78 triliun, naik 1,29% dari triwulan sebelumnya dan mengalami penurunan 9,89% dari tahun sebelumnya.

Grafik I - 56 Pertumbuhan Aset PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)



Total portofolio efek PT Danareksa pada triwulan III-2017 tercatat sebesar Rp0,60 triliun, naik 12,75% dari triwulan sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan triwulan III-2016, portofolio efek mengalami kenaikan 18,63%.

Grafik I - 57 Pertumbuhan Portofolio PT Danareksa (Persero) (dalam triliun Rupiah)



1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Aset Industri Jasa Penunjang IKNB pada semester I-2017 meningkat 13,15% menjadi Rp8,26 triliun dibandingkan semester sebelumnya. Pendapatan jasa keperantara mengalami penurunan 17,12% menjadi Rp0,92 triliun dibandingkan semester sebelumnya.

Tabel I - 47 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (dalam miliar rupiah)

No.	Jenis Indikator	Semester II-2015	Semester I-2016	Semester II-2016	Semester I-2017
1.	Aset	6,81	7,25	7,30	8,26
2.	Liabilitas	4,84	5,12	5,00	5,78
3.	Modal Sendiri	1,97	2,13	2,30	5,06
4.	Pendapatan Jasa Keperantara	1,14	1,06	1,11	0,92
5.	Laba/ (Rugi)	0,24	0,26	0,21	0,21

*menggunakan data Semester I 2017

Selama periode pelaporan, terdapat pencabutan izin kepada perusahaan jasa penunjang penilai kerugian asuransi IKNB sehingga sampai dengan periode laporan Jumlah Perusahaan Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Penilai Kerugian sampai akhir periode pelaporan adalah 238 perusahaan.

Tabel I - 48 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan II-2016	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017
1.	Pialang Asuransi	169	168	169	169	169
2.	Piala5g Reasuransi	38	40	40	40	42
3.	Jasa Penilai Kerugian Asuransi	27	27	28	27	27
Jumlah		234	235	237	236	238

1.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sampai akhir periode triwulan III-2017 adalah sebanyak 165 LKM dengan 147 LKM Konvensional dan 18 full syariah. Total aset LKM konvensional adalah sebesar Rp304,77miliar.

Tabel I - 49 Jumlah LKM

No.	Jenis Badan Usaha	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1.	Konvensional	75	115	141	147	147
	Koperasi	58	98	124	129	129
	PT	17	17	17	18	18
2.	Syariah	14	14	17	18	18
	Koperasi	14	14	17	18	18
	PT	-	-	-	-	-
Jumlah		89	129	158	165	165

Tabel I - 50 Indikator Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional (miliar Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017	Triwulan III 2017
1.	Aset	211,55	220,38	292,22	317,78	304,77
2.	Liabilitas	136,98	140,27	180,61	200,67	191,30
3.	Ekuitas	74,57	80,11	111,61	117,12	113,47
4.	Pinjaman Yang Diberikan	152,40	158,22	201,55	221,01	213,81
5.	Simpanan	121,51	124,02	157,04	173,25	160,30

1.5 PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS OJK

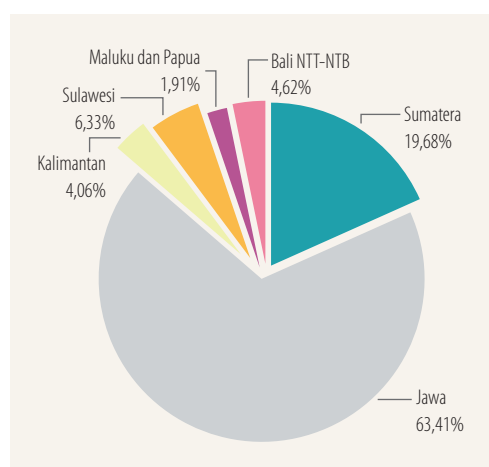
1.5.1 Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

Jumlah agen Laku Pandai pada triwulan III-2017 mencapai 428.852 agen (415.849 agen perorangan dan 13.003 *outlet* badan hukum) yang tersebar di 34 Provinsi dan 512 Kota/Kabupaten. Sementara itu, jumlah dana dan nasabah tabungan berkarakteristik *basic saving account* (BSA) yang berhasil dihimpun masing-masing sebesar Rp1,26 triliun dan 11.808.868 nasabah. Sebagian besar agen Laku Pandai masih terkonsentrasi di pulau Jawa (63,41%),

Tabel I - 51 Realisasi Laku Pandai Triwulan III-2017

Agen Laku Pandai	
Perorangan	Badan Hukum
415.849	13.003
Nasabah Laku Pandai	
Jumlah Rekening	Outstanding Tabungan BSA
11.808.868	Rp1,26 triliun

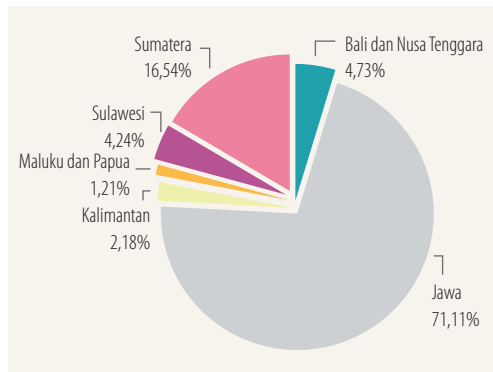
Sumber: OJK, September 2017

Grafik I - 58 Wilayah Penyebaran Agen Laku Pandai


Sumber: OJK

Grafik I - 59

Wilayah Penyebaran Nasabah BSA



Sumber: OJK

sementara sebesar 19,68% tersebar di pulau Sumatera, 6,33% di pulau Sulawesi, 4,62% di pulau Bali-NTB-NTT, 4,06% di pulau Kalimantan, dan sisanya sebesar 1,91% berada di pulau Maluku dan Papua. Tidak jauh berbeda dengan persebaran agen, sebagian besar nasabah BSA juga tersebar di pulau Jawa (71,11%), sementara sebesar 16,54% tersebar di pulau Sumatera, 4,73% di pulau Bali-NTB-NTT, 4,24% di pulau Sulawesi, 2,18% di pulau Kalimantan, dan sisanya sebesar 1,21% berada di pulau Maluku dan Papua.

Selain tabungan berkarakteristik BSA, agen Laku Pandai dapat melayani pengajuan kredit mikro, pembelian asuransi mikro, dan produk/layanan keuangan lainnya seperti uang elektronik sepanjang agen Laku Pandai telah memenuhi klasifikasi tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Laku Pandai. Sampai saat ini telah terdapat satu bank yang memiliki agen yang dapat melayani pengajuan kredit mikro berupa KUR Mikro dan pembelian asuransi mikro, sementara beberapa bank lainnya sedang dalam tahap persiapan untuk dapat memasarkan kredit mikro dan asuransi mikro melalui agen Laku Pandai.

Jaringan agen Laku Pandai yang luas mendorong beberapa kementerian/lembaga untuk memanfaatkannya sebagai pendukung program yang diusungnya seperti Bantuan Sosial Non Tunai dan Inklusi Zakat (*zakat inclusion*) yang memerlukan jangkauan layanan sampai ke daerah pelosok. Selain didayagunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemerintah, agen Laku Pandai dapat dimanfaatkan untuk mendorong penciptaan ekosistem ekonomi digital. Terkait hal ini, beberapa bank penyelenggara telah berencana untuk bekerja sama dengan perusahaan *e-commerce/marketplace*.

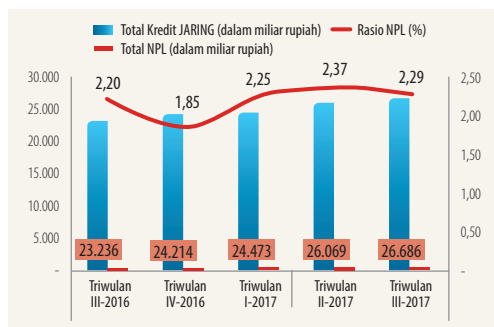
1.5.2 Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING)

Sampai dengan triwulan III-2017, penyaluran kredit program JARING tumbuh 14,85% (yoy) menjadi Rp26,7 triliun. Secara triwulanan, kredit JARING tumbuh 2,37% (qto) melambat dari triwulan sebelumnya (6,52%, qto), namun lebih baik dari triwulan yang sama tahun sebelumnya (2,13%, qto). Perlambatan utamanya dipengaruhi oleh turunnya kredit pada subsektor hulu penangkapan udang dan ikan tuna, sementara terjadi peningkatan penyaluran kredit pada subsektor hulu pengolahan jasa sarana produksi serta perdagangan.

Di tengah melambatnya pertumbuhan kredit JARING, kualitas kredit JARING meningkat yang tercermin dari NPL *gross* yang turun dari triwulan sebelumnya 2,37% menjadi 2,29%. Perbaikan kualitas kredit utamanya terjadi pada subsektor industri pengolahan, perdagangan, dan budidaya. Dengan demikian, secara umum kredit JARING tumbuh baik meskipun masih terbatas, serta diiringi dengan penurunan risiko kredit.

Grafik I - 60

Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING



Sumber: OJK, September 2017

Tabel I - 52

NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim (%)

Kegiatan Usaha	2016	2017	
	Triwulan III	Triwulan II	Triwulan III
Penangkapan	2,77	4,02	4,13
Budidaya	2,63	2,18	2,10
Jasa Sarana Produksi	2,68	5,25	5,34
Industri Pengolahan	1,58	0,91	0,79
Perdagangan	2,11	2,56	2,32
NPL JARING	2,20	2,37	2,29

Sumber: OJK, September 2017

1.5.3 Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Sampai dengan triwulan III-2017, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 6.794.842 dengan volume Rp1,05 Triliun. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjaln antara Bank dan sekolah sebanyak 148.222 PKS.

Dalam rangka penguatan program inklusi keuangan dan sebagai tindak lanjut dari evaluasi program SimPel/SimPel iB khususnya oleh BPR, telah dilaksanakan sosialisasi SimPel/SimPel iB di Surabaya. Total peserta kegiatan

sosialisasi sebanyak 57 orang yang merupakan pengurus DPD dan DPC PERBARINDO serta industri perbankan khususnya BPR/BPRS yang belum menjadi bank peserta SimPel/SimPel iB di wilayah Jawa Timur. Secara umum, BPR/BPRS yang hadir menyatakan bahwa saat ini telah memiliki produk sejenis dengan fitur yang tidak jauh berbeda dengan SimPel/SimPel iB.

1.5.4 Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil

Dana kelolaan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) menurun sebesar 2,44% menjadi Rp19,59 triliun. Selain itu, jumlah kontrak RDPT juga mengalami penurunan menjadi 73 RDPT dari sebelumnya 76 RDPT. 73 RDPT tersebut terdiri dari 56 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp16,80 triliun dan 17 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp2,79 triliun.

1.5.5 Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA SP)

Selama periode laporan OJK tidak menerbitkan izin baru dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP), sehingga jumlah EBA-SP tetap berjumlah empat KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp2,36 triliun atau menurun sebesar 4,45% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

1.5.6 Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

AUTP bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada petani apabila terjadi kerusakan pertanian, serangan hama padi yang menyebabkan gagal panen. Dalam rangka mendukung program pemerintah, OJK terlibat aktif dalam penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian dan Pedoman Pengelolaan Bantuan Premi. OJK juga berperan serta dalam penyusunan

kajian mengenai besaran premi, respon petani membayar premi, dan zona risiko asuransi. Dalam implementasinya, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaku AOTP.

Sampai dengan triwulan III-2017, jumlah lahan pertanian yang terdaftar per September 2017 adalah 988.232,28 (ha) atau 90,59% dari target 1 juta Ha. Jumlah ini meningkat 24,77% dari jumlah lahan pertanian yang diasuransikan pada akhir Juni 2017 sebesar 859.811,38 Ha.

1.5.7 Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Sampai dengan triwulan III-2017 sebanyak 53.706 ekor sapi telah terlindungi oleh AUTS. Realisasi premi sampai triwulan III-2017 adalah sebesar Rp10.741,20 juta dengan rincian premi subsidi (80%) sebesar Rp8.592,96 juta dan premi non subsidi (20%) sebesar Rp2.148,24 juta.

1.5.8 Asuransi Nelayan

Capaian Asuransi Nelayan pada triwulan III-2017, mencapai 223.231 orang nelayan atau 44,65% dari target 500.000 nelayan dan total premi mencapai Rp390.654,25 juta.

1.5.9 Asuransi Kerangka Kapal

Sampai dengan triwulan III-2017, realisasi jumlah kapal yang terlindungi asuransi penyingkiran kerangka kapal (*wreck removal*) meningkat sampai dengan 3.577 kapal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel I - 53

Jumlah Kapal yang Terlindungi Asuransi Penyingkiran Kapal

Bulan	Jumlah Kapal	
	2016	2017
Januari	174	89
Februari	215	177
Maret	216	115
April	323	200
Mei	163	279
Juni	126	197
Juli	74	82
Agustus	151	105
September	167	112
Oktober	182	-
November	164	-
Desember	266	-
Total	2.221	1.356

1.5.10 Program Pembiayaan Ekonomi Kreatif

Dalam rangka meningkatkan Penyaluran Pembiayaan Perbankan pada Sektor Produktif khususnya pada sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM serta mendukung Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia jangka panjang, program pembiayaan ekonomi kreatif tetap dilanjutkan di tahun 2017 dengan target sebesar Rp 6 triliun-Rp 6,5 triliun. Selama triwulan III-2017, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp3,7 triliun.



Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



Penerbitan 24 POJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB

Peluncuran Regulasi Mengenai Penawaran Umum dan Penambahan Modal Perusahaan Kecil dan Menengah



Penyempurnaan Sistem Kliring dan Penyelesaian Pasar Modal melalui C-BEST *Next generation* dan *e-Clears*

Indonesian Banking Expo (IBEX) dengan tema “Transformasi Industri Perbankan terhadap Revolusi Teknologi Digital”

Penandatanganan *MoU* dan *Lol* dengan satu lembaga domestik dan dua lembaga internasional



Sosialisasi Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) di Yogyakarta dan Jakarta

Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Pattimura



Pilot Project Implementasi Pengawasan *Market Conduct* dan *Prudential*

Edukasi keuangan komunitas Ibu Rumah Tangga di Bandung dan Jambi, TKI di Hongkong, penyandang disabilitas di Surabaya, dan UMKM di Bengkulu

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan



2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Bank

A. Pengaturan Bank Umum

Pada triwulan III-2017, OJK menerbitkan dua POJK dan satu SEOJK terkait ketentuan bank umum. Selain itu, terdapat 11 POJK dan enam SEOJK hasil konversi terkait ketentuan Bank Umum. Detail dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*)
Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengembangan standar pengukuran risiko likuiditas berupa kewajiban pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih/*Net Stable Funding Ratio (NSFR)* yang bertujuan untuk mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan Bank mendanai aktivitas dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka

memitigasi risiko kesulitan pendanaan pada masa depan.

2. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Peraturan ini bertujuan untuk mengatur kewajiban LJK, Emiten dan Perusahaan Publik akan penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), publikasi Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan *timeline* penerapan bagi setiap sektor.
3. SEOJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam SEOJK ini mencakup penunjukan, perjanjian kerja dan ruang lingkup, program sertifikasi, pengelolaan administrasi, daftar AP dan KAP pada OJK, independensi AP dan KAP dan Laporan kepada OJK.

4. Ketentuan Konversi

a. POJK

- 1) POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
- 2) POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
- 3) POJK Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
- 4) POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
- 5) POJK Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham
- 6) POJK Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
- 7) POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
- 8) POJK Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank
- 9) POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah
- 10) POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap

Kredit atau Pembiayaan Bank bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam

- 11) POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

b. SEOJK

- 1) SEOJK Nomor 33/SEOJK.03/2017 tentang Persyaratan Bank Umum untuk Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing
- 2) SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit
- 3) SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum
- 4) SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
- 5) SEOJK Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak
- 6) SEOJK Nomor 44/SEOJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

B. Pengaturan BPR

Pada triwulan III-2017, OJK menerbitkan satu SEOJK serta ketentuan hasil konversi masing-masing tiga POJK dan SEOJK terkait ketentuan BPR dan/atau BPRS. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEOJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti
Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 12/

- POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.
2. Ketentuan Konversi
 - a. POJK
 - 1) POJK Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - 2) POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
 - 3) POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
 - b. SEOJK
 - 1) SEOJK Nomor 39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
 - 2) SEOJK Nomor 40/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat
 - 3) SEOJK Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
 2. POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum Pasar Modal syariah dan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan pasar untuk mempercepat pertumbuhan Efek syariah sebagaimana telah tercantum dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019. Dalam peraturan ini, pokok-pokok yang diatur antara lain Efek Syariah yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah (DES), Kewajiban dan Larangan bagi Pihak Penerbit DES serta Kewajiban Dewan Pengawas Syariah dalam penerbitan DES.
 3. POJK Nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA) POJK DINFRA diterbitkan dalam rangka mendukung program Pemerintah RI dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 terkait kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional. Berdasarkan hal tersebut diperlukan inovasi produk investasi baru yang memberikan fleksibilitas bagi Manajer Investasi untuk menyusun portofolio investasi yang dapat menjadi bagian solusi untuk mengurangi keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dalam peraturan ini diatur antara lain pedoman penerbitan, pengelolaan, kontrak dan keterbukaan Dana Investasi Infrastruktur, ketentuan Penawaran Umum dan permohonan pencatatan Dana Investasi Infrastruktur serta Pelaporan dan Pembubarannya.
 4. POJK Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

2.1.2 Pengaturan Pasar Modal

Selama periode pelaporan, OJK menerbitkan enam POJK terkait Industri Pasar Modal, yaitu:

1. POJK Nomor 34/POJK.04/2017 tentang Reksa Dana Target Waktu Peraturan ini bertujuan mengatur mengenai Reksa Dana Target Waktu dapat mengubah komposisi portofolio Efek-nya dari yang mengandung sebagian besar Efek bersifat ekuitas berisiko tinggi perlahan menjadi cenderung konservatif dan berinvestasi sebagian besar pada Efek bersifat utang atau instrumen pasar uang seiring bertambahnya usia Reksa Dana Target Waktu tersebut mendekati tanggal acuan.

Peraturan ini bertujuan mengatur definisi, kriteria dan batasan nilai Penawaran Umum dari Emiten Skala Kecil dan Skala Menengah, Penyederhanaan dokumen Pernyataan Pendaftaran dan standar akuntansi yang digunakan.

5. POJK Nomor 54/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah

Peraturan ini bertujuan mengatur antara lain Pengungkapan kejadian penting sehubungan dengan perkembangan usaha, dan perubahan pemegang saham, *Employee Stock Allocation* dan Penambahan informasi terkait penambahan modal dengan memberikan HMETD.

6. POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017, antara lain mengenai Komitmen Pemegang Saham dan RUPS, Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, Pengendalian Internal, Etika dan Rencana Bisnis serta Pelaporan.

2.1.3 Pengaturan IKNB

Pada triwulan III-2017, OJK menerbitkan peraturan terkait IKNB terdiri dari dua POJK dan lima SEOJK yang telah ditetapkan yaitu:

1. POJK nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian
POJK ini bertujuan untuk menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan perasuransian sehingga dapat memudahkan

pelaku usaha asuransi dan OJK dalam menyusun dan menganalisis laporan. Dari sisi penyampaian laporan, jenis laporan akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data OJK (*e-reporting*) yang berguna untuk kemudahan bagi Perusahaan Perasuransian. Secara garis besar POJK ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum, penyusunan laporan berkala perusahaan perasuransian, penyampaian laporan berkala perusahaan perasuransian, sanksi administratif, ketentuan penutup.

2. POJK nomor 56/POJK.05/2017 tentang Perubahan Kedua atas POJK nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi LKKNB

POJK ini bertujuan untuk memperluas pilihan instrumen investasi SBN kepada LKKNB sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi LKKNB dengan melakukan penempatan investasi pada obligasi, sukuk, efek beragun aset, reksa dana penyertaan terbatas, dan/atau instrumen investasi lainnya yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara, yang penggunaan dananya untuk pembiayaan infrastruktur.

3. SEOJK nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor IKNB

SEOJK ini bertujuan untuk membantu industri di sektor IKNB untuk menerapkan program APU dan PPT berbasis risiko.

Secara garis besar SEOJK ini mengatur mengenai tentang ketentuan umum, penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, pengawas aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, sumber daya manusia dan pelatihan, pelaporan dan penutup.

4. SEOJK nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian *Fraud*, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Laporan Strategi Anti *Fraud* bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah
Secara garis besar SEOJK ini bertujuan untuk mengatur mengenai tentang ketentuan umum, pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti *fraud*, tata cara pelaporan strategi, dan ketentuan penutup.
5. SEOJK nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pergadaian
SEOJK ini bertujuan untuk mengatur tentang ketentuan umum, pendaftaran pelaku usaha pergadaian, izin usaha perusahaan pergadaian swasta, persetujuan, dan pelaporan perusahaan pergadaian.
6. SEOJK nomor 52/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Secara Konvensional
SEOJK ini bertujuan untuk mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian konvensional yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi, kegiatan usaha lain perusahaan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, barang jaminan, nilai minimum perbandingan uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan, tata cara pengembalian uang kelebihan, dan pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha pergadaian konvensional
7. SEOJK nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Penerbitan SEOJK ini bertujuan untuk mengatur tentang ketentuan umum, penggunaan akad dalam pelaksanaan kegiatan usaha pergadaian syariah, kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian syariah yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi, kegiatan usaha lain perusahaan dengan persetujuan OJK, barang jaminan, nilai minimum perbandingan uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan, tata cara pengembalian uang kelebihan, dan pedoman penyelenggaraan kegiatan usaha pergadaian syariah.

Penerbitan Regulasi Penawaran Umum dan Penambahan Modal Perusahaan Kecil dan Menengah

OJK menerbitkan POJK Nomor 53/POJK.04/2017 dan POJK Nomor 54/POJK.04/2017 yang mengatur Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah.

Peraturan ini merupakan bentuk komitmen OJK pada program pemerintah untuk lebih memberdayakan pelaku usaha skala kecil dan menengah serta mempermudah akses Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah untuk memanfaatkan Pasar Modal menjadi alternatif pendanaan selain melalui perbankan.

POJK tersebut mengkategorikan perusahaan sebagai Perusahaan Kecil jika memiliki aset maksimal Rp 50 miliar, Efek yang ditawarkan maksimal adalah Rp 50 miliar, dan tidak dikendalikan oleh Perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 250 miliar. Kemudian dikatakan sebagai Perusahaan Menengah jika Perusahaan memiliki aset dari Rp 50 miliar sampai maksimal Rp 250 miliar, Efek yang ditawarkan maksimal Rp 250 miliar, dan tidak dikendalikan oleh Perusahaan yang memiliki nilai aset lebih dari Rp 250 miliar.

Bentuk relaksasi yang diberikan berdasarkan POJK ini yaitu Perusahaan Kecil menyampaikan laporan keuangan audit untuk satu tahun terakhir, menggunakan SAK ETAP, menghilangkan persyaratan *comfort letter* dan *representation letter*, dan pendapat dari segi hukum dan struktur permodalan mencakup dua tahun terakhir atau sejak berdirinya perusahaan tersebut. Sedangkan relaksasi bagi Perusahaan Menengah yaitu menyampaikan laporan keuangan dua tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari dua tahun, menggunakan SAK, menghilangkan *comfort letter* dan *representation letter* dan pendapat dari segi hukum dan struktur permodalan mencakup dua tahun terakhir atau sejak berdirinya.

Selain melalui penguatan regulasi, OJK juga mendorong pelaku industri, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia untuk mengembangkan program inkubator yang dapat memfasilitasi pelaku usaha menengah dan kecil, termasuk *start-up companies* untuk belajar mengembangkan dan mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari industri pasar modal.

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

A. Penelitian, Pengaturan, dan Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

Pada triwulan III-2017, OJK menerbitkan beberapa *output* terkait pengawasan terintegrasi, yaitu:

1. *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi
Roadmap tersebut disusun dengan tujuan untuk memberikan arah kebijakan, pengembangan sistem/metodologi pengawasan, dan penguatan implementasi pengawasan terintegrasi terhadap Konglomerasi Keuangan (KK), sejalan dengan kebijakan umum pengawasan terhadap Sektor Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015 - 2019. *Roadmap* Pengawasan Terintegrasi 2017-2019 mencakup tiga aspek utama, yaitu:
 - a) Kebijakan Pengawasan Terintegrasi terhadap KK;
 - b) Sistem dan Metodologi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK; dan
 - c) Implementasi Pengawasan Terintegrasi terhadap KK.

2. Kajian terkait Pengawasan Terintegrasi
 - a) Kajian Manajemen Risiko Likuiditas;
 - b) Kajian *Equity Risk (Market Risk)*;
 - c) Kajian Manajemen Permodalan Terintegrasi;
 - d) Kajian Risiko Konsentrasi; dan
 - e) Kajian Risiko Kredit.

B. Profil Konglomerasi Keuangan

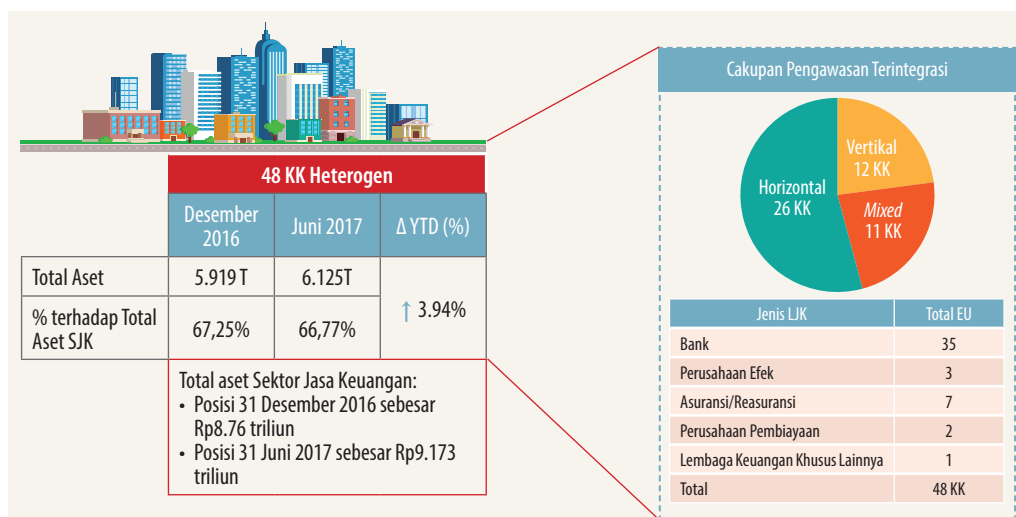
Total aset dari 48 Grup KK pada triwulan II-2017 sebesar Rp6.125 triliun, sedangkan total aset industri jasa keuangan Indonesia sebesar Rp9.173 triliun. Dengan demikian, persentase perbandingan total aset 48 grup KK terhadap total aset industri jasa keuangan cukup signifikan yaitu 66,77%.

2.2.2 Pengawasan Perbankan

A. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Sampai dengan triwulan III-2017, OJK melakukan pemeriksaan terhadap 2.101 kantor bank yang terdiri dari 1.618 Kantor Pusat (KP) dan 483 Kantor Cabang (KC). Dari 2.101 kantor bank tersebut, 569 di antaranya merupakan kantor Bank Umum dan 1.532 kantor BPR dan BPRS. Dibandingkan dengan rencana, realisasi pemeriksaan umum sudah mencapai 95,33%.

Grafik II - 1 Profil Konglomerasi Keuangan



Tabel II - 1 Pemeriksaan Bank Umum

Jenis Bank	Realisasi		
	Triwulan I-III 2017		
	KP	KC	Jumlah Kantor
BUK	116	372	488
BUS	11	20	31
UUS	36	14	50
BPR	1.331	72	1.403
BPRS	124	5	118
Total	1.618	483	2.101

Sumber: OJK

Selain itu, terkait dengan pemeriksaan khusus, OJK telah melakukan pemeriksaan khusus terhadap 302 subjek bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, *join audit*, GCG, teknologi dan informasi, *fraud*, serta penetapan pencabutan. Sementara pemeriksaan khusus untuk Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) telah dilakukan oleh pengawas bersamaan dengan pemeriksaan umum.

Tabel II - 2 Pemeriksaan Khusus Bank

Subjek Pemeriksaan	Triwulan I-III 2017
Suku Bunga	-
Setoran Modal	105
Aktivitas Operasional	132
Teknologi dan Informasi	11
Aktivitas Treasuri	-
<i>Join Audit</i>	2
GCG	2
<i>Fraud</i>	19
Penetapan Pencabutan	1
Pemeriksaan Kesiapan Rencana Bank	-
Devisa	-
Lainnya	30
Total	302

Sumber: OJK

B. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

Sampai dengan triwulan III-2017, produk dan aktivitas baru untuk BUK dan BPR yang telah diterbitkan mencapai 478 produk yang sebagian besar terkait dengan Reksa Dana dan *bancassurance*.

Tabel II - 3 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan

Produk/Aktivitas Baru	Triwulan I-III 2017
Reksa Dana	153
<i>Bancassurance</i>	136
<i>E-Banking</i>	36
Perkreditan/Pembiayaan	20
Surat Berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	21
Pendanaan	17
APMK	11
<i>Structured Product</i>	11
Aktivitas Call Center	1
LC	3
<i>Cash Management</i>	16
Fitur SMS Notifikasi	1
<i>e-Commerce</i>	4
Kepemilikan Logam Mulia	2
<i>Referral Retail Brokerage</i>	-
Lainnya	46
Total	478

Sumber: OJK

C. Penegakan Kepatuhan Bank

- 1) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*)
 Pada triwulan III-2017, terdapat tiga Direksi dan tiga Pejabat Eksekutif bank yang tidak lulus proses *Fit and Proper Existing*. Selain itu, untuk *database track record* (TR), terdapat penambahan 10 pelaku yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pejabat Non Eksekutif untuk pelanggaran yang terjadi pada periode sebelumnya.

Adapun modus yang dilakukan antara lain terkait penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan SOP.

Tabel II - 4 Track Record Tindak Tipibank

Objek Track Record	Jumlah Input TR
Kepala Kantor Perwakilan	0
Direksi	2
Pejabat Eksekutif	1
Non Pejabat Eksekutif	7
TOTAL	10

Sumber: OJK

2) Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Selama triwulan III-2017, terdapat 12 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) pada tujuh kantor bank. PKP tersebut selanjutnya dianalisis dan dikoordinasikan untuk memastikan apakah dapat ditindaklanjuti dengan investigasi.

Sebagai tindak lanjut dari 12 PKP tersebut, telah dilakukan investigasi pada sembilan PKP pada lima kantor bank akan tetapi tidak terdapat PKP hasil investigasi yang dilimpahkan ke satuan kerja penyidikan atau keseluruhannya dikembalikan kepada satuan kerja Pengawasan Bank untuk ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pengawasan.

Tabel II - 5 Statistik Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Tahapan Kegiatan	Triwulan III 2017 (Juli - September 2017)					
	Kantor Bank		Kasus (PKP)		Total	
	BU	BPR	BU	BPR	Kantor Bank	Kasus (PKP)
1. PKP yang diterima dan ditindaklanjuti	3	4	5	7	7	12
2. PKP yang dikembalikan sebelum investigasi	0	0	0	0	0	0
a. Atas dasar analisis tim	0	0	0	0	0	0
b. Atas dasar QA 1	0	0	0	0	0	0
3. PKP yang diinvestigasi	2	3	4	5	5	9
a. Tindak Lanjut dengan Pelimpahan ke DPJK	0	0	0	0	0	0
b. Tindak Lanjut oleh Satker Pengawasan Bank (Pengembalian PKP setelah Investigasi)	0	0	0	0	0	0
4. Pelimpahan kepada Satker Penyidikan	0	0	0	0	0	0

Sumber: OJK

3) Pemberian Keterangan Ahli atau Saksi

Selama triwulan III-2017 terdapat 22 permintaan keterangan ahli, yang berasal dari Kepolisian Negara RI (Polri) sebanyak 20 permintaan keterangan, Kejaksaan RI sebanyak satu permintaan keterangan, dan penyidikan OJK sebanyak satu keterangan. Sementara itu, tidak ada pemberian keterangan oleh saksi.

Tabel II - 6 Pemberian Keterangan Ahli/Saksi

No.	APH	Permintaan		
		Saksi	Ahli	Total
1.	Polri	0	20	20
2.	Kejaksaan RI	0	1	1
3.	Penyidikan OJK	0	1	1
TOTAL		0	22	22

Sumber: OJK

4) Sosialisasi

Selama periode laporan, OJK melakukan sosialisasi kepada industri perbankan dan aparat penegak hukum di Jakarta, Bandung, Jambi, Pontianak, dan Pekanbaru. Kegiatan ini penting agar industri perbankan dikelola oleh bankir-bankir yang *fit* dan *proper* serta apabila ditemukan adanya *fraud* dapat segera diproses guna menimbulkan *announcement effect*.

D. Kelembagaan Bank Umum

1) Perizinan

Pada triwulan III-2017 telah diselesaikan 122 perizinan perubahan jaringan kantor BUK yang terdiri dari pembukaan kantor, penutupan kantor, pemindahan alamat kantor, dan perubahan status. Perizinan tersebut sebagian besar berupa penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) (36,07% - 44 perizinan) dan pemindahan alamat KCP (18,85% - 23 perizinan).

Selain itu, terdapat dua perizinan perubahan nama izin usaha dan satu perizinan perubahan badan hukum. Perubahan nama izin usaha yaitu pada Bank of China menjadi izin usaha atas nama Bank of China (Hongkong) Limited, dan PT Bank Andara menjadi izin usaha atas nama PT Bank Oke Indonesia. Sementara perubahan badan hukum terjadi pada BPD Kaltim menjadi PT BPD Kalimantan Timur.

Tabel II - 7

Perizinan Perubahan Jaringan Kantor BUK*

No	Jenis Kegiatan	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1	Pembukaan Bank Umum		
a.	Kantor Wilayah (Kanwil)	3	1
b.	Kantor Cabang (KC)	3	9
c.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	3	6
d.	Kantor Fungsional (KF)	4	1
e.	Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	Penutupan Bank Umum		
a.	Izin Usaha	-	-
b.	Kantor Perwakilan	-	-
c.	Kantor Cabang (KC)	3	11
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	27	44
e.	Kantor Fungsional (KF)	21	2
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
a.	Kantor Pusat (KP)	1	1
b.	Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
c.	Kantor Cabang (KC)	5	2
d.	Kantor Cabang Pembantu (KCP)	17	23
e.	Kantor Fungsional (KF)	3	-
f.	Kantor Perwakilan Bank	-	-
4	Perubahan Status Bank Umum		
a.	Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	2	4
	- KK menjadi KCP	10	7
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
b.	Penurunan Status Bank Umum		
	- KP menjadi KC	-	-
	- KC menjadi KCP	11	7
	- KCP ke KF/KK	3	1
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan Nama)	-	2
6	Perubahan Badan Hukum	-	1
7	Merger Bank Umum		
8	Izin Bank Devisa	-	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	-	-
Jumlah		117	122

Sumber: LKPBU, September 2017

*)Keterangan: Hanya mencakup perubahan perizinan jaringan kantor di wilayah Jabodetabek

2) Jaringan Kantor

Pada triwulan III-2017, jaringan kantor Bank Umum meningkat 1.583 jaringan kantor menjadi 138.283 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada ATM/ADM yang bertambah 1.588 unit. Sementara itu, pengurangan terbesar terdapat pada KCP dalam negeri yang berkurang 88 kantor.

Tabel II - 8 Jaringan Kantor Bank Umum

Status Kantor	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Perubahan Δ
Kantor Pusat Operasional	51	50	(1)
Kantor Pusat Non Operasional	54	55	1
Kantor Cabang Bank Asing	9	9	-
Kantor Wilayah Bank Umum (Konvensional+Syariah)	175	174	(1)
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	2.890	2.879	(11)
Kantor Cabang (Luar Negeri)	1	1	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	28	27	(1)
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	16.850	16.762	(88)
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-
Kantor Kas	10.680	10.726	46
Kantor Fungsional (Konvensional+Syariah)	1.623	1.578	(45)
Payment Point	1.700	1.758	58
Kas Keliling/Kas Mobil/Kas Terapung	1.530	1.567	37
Kantor di bawah KCP KCBA yang Tidak Termasuk 11,12,13,14 *)	13	13	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	2	-
ATM/ADM	101.700	102.682	1.588
TOTAL	136.700	138.283	1.583

Sumber: LKPBU, September 2017

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor BUK sebagian besar berada di pulau Jawa dengan jumlah sebanyak 87.698 jaringan kantor (63,42%), diikuti pulau Sumatera 22.936 jaringan kantor (16,59%), Sulampua 11.411 jaringan kantor (8,25%), Kalimantan 8.985 jaringan kantor (6,50%), dan Bali-NTB-NTT 7.253 jaringan kantor (5,25%). Peningkatan jumlah jaringan kantor terjadi pada seluruh wilayah dengan peningkatan terbesar berada di pulau Jawa yang bertambah sebanyak 897 jaringan kantor.

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

Pada triwulan III-2017, terdapat 52 pemohon FPT *New Entry* yang lulus mengikuti proses wawancara, terdiri dari 34 Direksi, 17 Dewan Komisaris dan satu PSP/PSPT. Selain itu, terdapat 85 calon pengurus yang mendapat surat keterangan lulus, disertai dengan *carry over* periode sebelumnya.

Tabel II - 9 FPT Calon Pengurus dan PSP Bank Umum

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan (SK) FPT		Jumlah Tidak ditindak-lanjuti	Triwulan III-2017
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus		
PSP/PSPT	1	0	2	0	1	4
Dewan Komisaris	17	0	31	2	11	61
Direksi	34	2	52	5	19	112
Total	52	2	85	7	31	177

E. Kelembagaan BPR

1) Perizinan

Pada triwulan III-2017, terdapat tujuh proses perizinan pendirian BPR (dua izin prinsip dan lima izin usaha), 11 BPR dalam pengawasan khusus dan satu pencabutan izin usaha BPR yang telah diselesaikan. Adapun pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PT BPR Sisibahari Dana yang berlokasi di Tangerang, Banten. Sementara itu, pendirian (izin usaha) BPR baru terdapat di wilayah Sumatera (dua BPR), Papua (dua BPR) dan Madura (satu BPR).

Tabel II - 10 Perizinan BPR

Perizinan BPR	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
Pendirian BPR	-	7
Merger BPR	-	-
BPR dalam Pengawasan Khusus	9	11
Pencabutan Izin Usaha	2	1
Total	11	19

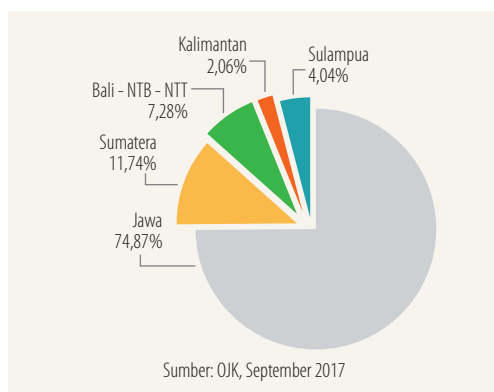
Sumber: OJK, September 2017

2) Jaringan Kantor

Jumlah BPR pada triwulan III-2017 bertambah tiga dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 1.622 BPR. Jumlah jaringan kantor tersebut berkurang satu kantor dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 6.156 jaringan kantor.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih terpusat di wilayah Jawa (74,87% atau 4.609 kantor), diikuti wilayah Sumatera (11,74% atau 723 kantor), wilayah Bali-NTB-NTT (7,28% atau 448 kantor), wilayah Sulampua (4,04% atau 249 kantor), dan wilayah Kalimantan (2,06% atau 127 kantor).

Grafik II - 2 Penyebaran Jaringan Kantor BPR



3) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*New Entry*)

OJK melakukan *FPT New Entry* kepada 582 calon pengurus dan PSP BPR, di mana 523 calon Pengurus/PSP BPR (89,86% dari calon pelamar) mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP, dan 59 calon yang ditolak. Jumlah calon pengurus dan PSP BPR yang lulus tersebut meningkat 70,36% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel II - 11

Daftar Hasil *Fit and Proper Test*
New Entry BPR

New Entry	2017					
	Triwulan II			Triwulan III		
	Lulus	Tidak Lulus	Total	Lulus	Tidak Lulus	Total
Direksi	203	43	246	402	44	446
Komisaris	86	12	98	85	10	95
PSP	18	0	18	36	5	41
Pengurus	0	0	0	0	0	0
Jumlah	307	55	362	523	59	582

Sumber: OJK

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

A. Pengawasan Lembaga dan Transaksi Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Selama periode laporan OJK telah melakukan kegiatan pengawasan transaksi Efek antara lain melakukan *monitoring* terhadap 69 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, di mana tujuh saham telah ditindaklanjuti ke proses penelaahan dan enam saham telah diputuskan untuk di-*discard* setelah dilakukan analisa lebih lanjut mengenai ada tidaknya indikasi pelanggaran, serta 56 saham sedang dilakukan *monitoring*. OJK juga melakukan penelaahan terhadap perdagangan tujuh saham sebagai tindak lanjut dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* di mana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar. Dari saham-saham tersebut, tiga saham sedang dilakukan penelaahan, sementara empat saham telah ditingkatkan ke pemeriksaan teknis.

OJK melakukan pemeriksaan teknis terhadap lima saham sebagai tindak lanjut dari proses penelaahan untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan/

atau perdagangan orang dalam. Dari saham-saham tersebut, satu saham sedang dilakukan pemeriksaan, sementara empat saham telah selesai pemeriksaan.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Selama triwulan III-2017, OJK telah melakukan pengawasan transaksi Surat Utang dan Efek lainnya antara lain melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) bulan Juli dan Agustus berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek masing-masing oleh 19 dan 23 Partisipan. Total frekuensi keterlambatan pelaporan bulan Juli dan Agustus masing-masing sebanyak 776 dan 380 kali. OJK juga melakukan *review alert* pada bulan Juli, Agustus dan September yang menghasilkan 3.948 *alert* Obligasi Pemerintah, 3.358 *alert* Obligasi Korporasi dan 273 *alert* waran. Saat ini sedang dilakukan *monitoring* terhadap empat Obligasi Pemerintah, tujuh Obligasi Korporasi, dan empat Waran. OJK juga sedang melakukan penelaahan atas dua seri Waran. Selain itu juga telah dilakukan analisis terhadap transaksi Repo obligasi bulan Juli, Agustus, dan September 2017.

Selama periode laporan, OJK menerima dan memproses permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh tiga Partisipan yang terdiri dari enam pelaporan. Alasan pembatalan pelaporan tersebut disebabkan oleh kesalahan *input* informasi *securities ID*, informasi *settlement date*, dan *double report*. OJK juga melakukan penelaahan atas laporan bulanan mengenai kecenderungan Pasar Surat Utang dari *Indonesia Bond Pricing Agency* (IBPA). Kondisi pasar Surat Utang pada Agustus bergerak positif dipengaruhi oleh rilisnya posisi

cadangan devisa Indonesia Juli yang menyentuh level tertingginya yakni sebesar US\$127,76 miliar, Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2018 oleh Presiden Jokowi yang dipandang masuk akal oleh pasar dan peluncuran kebijakan paket ekonomi jilid 16 tentang percepatan perizinan usaha.

3) Pengawasan *Self Regulatory Organization*, Lembaga Penilai harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Pada triwulan III-2017, OJK melakukan pengawasan terhadap *Self Regulatory Organization* (SRO), Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE) dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP), dengan melaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan struktur organisasi PT P3IEI.
2. Persetujuan penyesuaian anggaran PT BEI 2017 akibat adanya mekanisme penjualan aset kendaraan Direksi masa jabatan 2015-2018.
3. Penyampaian tanggapan atas Laporan Realisasi Rencana Kerja dan Anggaran PT BEI, PT KPEI, PT KSEI Triwulan II-2017.
4. Penyampaian surat laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP).

4) Pengawasan Perusahaan Efek

OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek telah melakukan beberapa hal antara lain memberikan persetujuan terhadap 23 perubahan susunan direksi, 11 perubahan susunan komisaris, dan tujuh proses persetujuan perubahan pemegang saham. OJK juga memberikan persetujuan atas peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 129 Perusahaan Efek serta Analisis dan pemantauan atas 39 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap 22 Emiten atas pemenuhan nilai MKBD pada saat melakukan kegiatan Penjaminan. Selain itu, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan Perantara Pedagang Efek (LKPPE) yaitu periode Juni 2017 sampai dengan Agustus 2017, di mana terdapat enam Perusahaan Efek yang belum menyampaikan LKPPE dan tiga Perusahaan Efek yang terlambat menyampaikan LKPPE periode Juni dan Juli 2017.

- 5) **Pemeriksaan Kepatuhan Lembaga Efek**
OJK telah menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan PT Bursa Efek Indonesia. Pada periode yang sama, OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Di samping itu, pada periode yang sama juga dilakukan proses penentuan fokus pemeriksaan dan penyusunan program pemeriksaan terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 6) **Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek**
Pada periode triwulan III-2017, OJK telah menyelesaikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap 12 Perusahaan Efek Kantor Pusat. Di samping itu, OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan berdasarkan *risk based approach* anti pencucian uang

dan pencegahan pendanaan terorisme (RBA APU-PPT) terhadap 16 Kantor Pusat Perusahaan Efek.

Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, tiga Perusahaan Efek tidak terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, 11 Perusahaan Efek telah disampaikan Hasil Pemeriksaan. Sementara karena terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan memerlukan tanggapan Perusahaan Efek atas hasil pemeriksaan tersebut, serta dua Perusahaan Efek yang sedang dalam tahap proses penyusunan Hasil Pemeriksaan Sementara.

7) **Pemeriksaan Teknis**

Pada periode triwulan III-2017, OJK telah menyelesaikan satu Laporan Hasil Pemeriksaan atas pengaduan terkait dengan Perusahaan Efek yang diterima pada periode sebelumnya.

B. Pengawasan terhadap Pengelolaan Investasi

Sampai dengan periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi terhadap 34 kantor pusat Manajer Investasi (MI), 22 kantor cabang APERD dan PE APERD, lima Bank Kustodian, satu KIK EBA, dan satu KIK DIRE. Sebanyak 19 MI telah selesai Laporan Hasil Pemeriksaannya (LHP), 11 MI dalam proses finalisasi LHP, dan empat MI masih dalam tahap proses permintaan konfirmasi ke MI.

Pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD dan PE APERD, sebanyak 20 APERD telah selesai LHP-nya dan dua APERD masih

dalam proses permintaan konfirmasi ke APERD. Untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap BK, tiga BK sudah selesai LHP, satu BK dalam proses finalisasi LHP, dan satu BK dalam proses pemeriksaan. Adapun untuk pemeriksaan kepatuhan terhadap satu KIK DIRE, saat ini telah selesai LHP-nya, sedangkan pemeriksaan kepatuhan terhadap satu KIK EBA saat ini masih dalam proses finalisasi LHP.

Pengawasan terhadap pelaku industri pengelolaan investasi juga didukung oleh sistem *E-monitoring* yang digunakan OJK untuk melakukan kegiatan pemantauan transaksi industri pengelolaan investasi.

Dalam rangka aktivitas pengawasan atas laporan berkala, OJK melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi (MI), di mana terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan X.N.1, satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan Agustus 2017, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan X.N.1 bulan September 2017.

OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD setiap bulan. Pada periode triwulan III-2017, terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan MKBD, satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulan Agustus 2017, dan satu MI yang terlambat menyampaikan laporan MKBD bulan September 2017.

C. Pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pengawasan terhadap Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

1. Pengawasan atas berbagai aksi korporasi oleh Emiten dan Perusahaan Publik

Tabel II - 12 Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Aksi Korporasi	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1	Transaksi afiliasi	59	63	53	37	43
2	Transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material	-	-	-	3	1
3	Transaksi material tidak memerlukan RUPS	8	3	11	7	5
4	Transaksi material yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS	3	2	8	10	3
5	Transaksi perubahan kegiatan usaha utama	-	-	1	-	1
6	Pembagian saham bonus	-	-	-	-	1
7	Pembagian dividen berupa kas	14	2	3	30	18
8	Pembagian dividen saham	-	-	-	1	3
9	Laporan <i>buyback</i> saham	3	1	7	-	6
10	Laporan <i>buyback</i> saham dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis	6	4	-	-	-
11	Pembelian kembali Obligasi	-	-	1	-	3
12	Penelaahan terhadap program ESOP/MSOP	-	3	1	1	1
13	Penelaahan atas rencana penggabungan usaha	-	2	-	-	-
14	Penelaahan atas penawaran tender	1	-	2	-	3
15	Penelaahan atas penawaran tender sukarela	-	-	-	-	-
16	Penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD	3	3	2	8	1
17	Penelaahan <i>go private</i>	-	-	-	-	1

2. Pemantauan atas penyampaian laporan berkala Emiten dan Perusahaan Publik

Tabel II - 13 Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik

No	Laporan Berkala	LKT 2017		LKT 2016		LT 2016	
		EPP	%	EPP	%	EPP	%
1	Tepat Waktu	493	81,5%	530	87,7%	497	82,1%
2	Terlambat	28	4,6%	57	9,4%	86	14,2%
3	Belum Menyampaikan	101	16,7%	17	2,8%	22	3,6%
4	Beda Tahun Buku dan Belum Menyampaikan	7	1,2%	1	0,2%	2	0,3%
5	Belum Wajib Menyampaikan	2	0,3%	24	4,0%	23	3,8%

Pada triwulan III-2017 terdapat 121 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. OJK melakukan pemantauan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 153 laporan keterbukaan atas informasi atau fakta material, 31 laporan hasil pemeringkatan efek, 137 hasil RUPS, serta 40 laporan penjabatan Penawaran Umum. Selain itu, OJK juga melakukan rekapitulasi terhadap laporan hutang valas yang disampaikan Emiten dan Perusahaan Publik, dengan jumlah total laporan pada triwulan III-2017 sebanyak 423 laporan dengan tujuan untuk melihat *exposure* hutang valas terhadap Emiten dan Perusahaan Publik. OJK juga sedang melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap tujuh Emiten dan Perusahaan Publik dengan detail sebagai berikut:

- a. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Kepatuhan terhadap PSAK Nomor 22 tentang Kombinasi Bisnis, POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik;
- b. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Kepatuhan terhadap PSAK Nomor 23 tentang Pendapatan, POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- d. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- e. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014

tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- f. Satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- g. Satu Emiten untuk memastikan kelangsungan usaha (proses pailit).

D. Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Sampai dengan triwulan III-2017, OJK melakukan penelaahan atas 91 laporan perubahan data dan informasi Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari 63 laporan dari Akuntan, lima laporan dari Konsultan Hukum, 20 laporan dari Penilai dan tiga laporan dari Notaris. OJK juga melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap dua Biro Administrasi Efek (BAE), dua Perusahaan Pemeringkat Efek (PPE), dua Bank Kustodian (BK), dan satu Wali Amanat (WA). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap terhadap BAE dan PPE telah diselesaikan, sementara untuk BK dan WA masih dalam proses penyusunan. Kegiatan

Monitoring (onsite) sampai dengan triwulan III-2017 telah dilakukan terhadap satu BAE dan satu BK dan Laporan Hasil *Monitoring* (LHM) atas BK dan BAE tersebut telah diselesaikan.

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan (*onsite*) terhadap enam profesi Penilai, dan pemeriksaan insidentil terhadap satu profesi Penilai. Pemeriksaan kepatuhan juga telah dilakukan terhadap tiga Konsultan Hukum di mana LHP telah diselesaikan untuk seluruh kegiatan pemeriksaan dan monitoring terhadap profesi tersebut. Selanjutnya telah dilakukan pemetaan (*mapping*) terhadap tiga Notaris Pasar Modal Sampai dengan akhir triwulan III-2017, OJK telah melakukan pemeriksaan *onsite* terkait pendalaman atas Sistem Pengendalian Mutu (SPM) KAP terhadap sembilan Kantor Akuntan Publik (KAP).

E. Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Sampai dengan triwulan III-2017, jumlah pemeriksaan Pasar Modal yang ditangani oleh OJK yaitu sebanyak 45 pemeriksaan yang terdiri dari:

- a. 18 Pemeriksaan terkait Emiten dan Perusahaan Publik dengan dugaan pelanggaran terhadap antara lain: ketentuan penyajian Laporan Keuangan, ketentuan pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum Efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik, ketentuan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, serta ketentuan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
- b. 25 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap antara

lain: upaya yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan baik mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan Efek, ketentuan pengawasan terhadap wakil dan pegawai perusahaan Efek, serta ketentuan tentang larangan bagi orang dalam dari Emiten untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek

- c. Dua Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi dengan dugaan pelanggaran antara lain: dugaan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi, ketentuan perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, dan ketentuan perizinan wakil manajer investasi.

Sampai dengan triwulan III-2017, terdapat satu pemeriksaan yang ditingkatkan ke Penyidikan.

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

a) Penetapan Sanksi Administratif

Selama periode triwulan III-2017, OJK menetapkan sebanyak 331 sanksi administratif kepada para pelaku industri Pasar Modal, yakni sebanyak:

- 131 sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis, di mana 70 terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan,

dan pengumuman, serta 61 terkait pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan keterlambatan pengumuman.

- 194 Sanksi Administratif Berupa Denda terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan dengan total nilai Sanksi Administratif Berupa Denda yang dikenakan sebesar Rp2.572.440.000,-
- Enam sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar kepada Konsultan Hukum Pasar Modal terkait dengan pelanggaran ketidakikutsertaan Pendidikan Profesi Lanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas penetapan Sanksi Administratif Berupa Denda di 2017, OJK menetapkan 36 Surat Teguran Pertama dan 14 Surat Teguran Kedua terkait dengan keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda.

OJK memproses pengenaan sanksi administratif terkait keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman sebanyak 16 rekomendasi sanksi administratif serta satu rekomendasi atas kasus pelanggaran ketentuan di Pasar Modal selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen selain laporan, dan pengumuman.

b) Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif

Selama periode triwulan III-2017, OJK menindaklanjuti 30 Permohonan Keberatan di mana 15 Keberatan telah ditanggapi dan 15 Keberatan masih dalam proses.

2.2.4 Pengawasan IKNB

A. Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

1) Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada periode triwulan III-2017, OJK melakukan pemeriksaan terhadap delapan perusahaan asuransi umum.

2) Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pada triwulan III-2017 OJK telah menerbitkan 12 LHP yang terdiri dari tujuh LHP Sementara dan lima LHP Final.

3) Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan triwulan III-2017, terdapat 486 rekomendasi yang harus dilaksanakan. Dari jumlah tersebut sebanyak 345 rekomendasi telah dilaksanakan dan total rekomendasi yang masih dalam proses adalah 141 rekomendasi.

4) Penegakan Kepatuhan dan Pengenaan Sanksi

Pada triwulan III-2017, OJK telah mengenakan sanksi peringatan pertama kepada 21 perusahaan, sanksi peringatan kedua kepada tujuh perusahaan, dan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan.

Selain menerbitkan pengenaan sanksi, OJK juga melakukan pencabutan sanksi yang terdiri dari satu surat pencabutan sanksi peringatan pertama dan satu denda administratif. Rincian pengenaan dan pencabutan sanksi peringatan kepada perusahaan adalah asuransi dan reasuransi pada triwulan III-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 14 Penegakan Kepatuhan terhadap Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Penyebab	Pengenaan Sanksi			Pencabutan Sanksi			Denda	Penca- butan
	SP 1	SP 2	SP 3	SP 1	SP 2	SP 3	Admi- nistrasi	Sanksi PKU
Pedoman APUPPT Perusahaan belum lengkap	1	-	-	1	-	-	-	-
Penempatan investasi pada satu pihak yang terafiliasi melebihi batasan	1	-	-	-	-	-	-	-
Terlambat menyampaikan laporan aktuaris tahun 2016	1	-	-	-	-	-	-	-
Belum menyampaikan laporan pelaksanaan penempatan reasuransi/ retrosesi	1	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan tidak memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah direksi tidak memenuhi ketentuan	2	-	-	-	-	-	-	-
Rasio kecukupan investasi tidak memenuhi ketentuan	1	1	-	-	-	-	-	-
Belum menyampaikan laporan keuangan audited, laporan SAP, dan laporan publikasi	1	2	-	-	-	-	1	-
Belum menyampaikan laporan keuangan, dana jaminan dan oerasional	1	-	-	-	-	-	-	-
Belum menyampaikan laporan keuangan, dana jaminan dan oerasional TW II 2017	1	-	-	-	-	-	-	-
Pengaduan Klaim	1	-	-	-	-	-	-	-
Belum memenuhi penempatan wajib investasi dalam bentuk SBN	1	-	-	-	-	-	-	-
Lainya terkait pemeriksaan	8	4	1	-	-	-	-	-
Jumlah	21	7	1	1	0	0	1	0

5) Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

Pada triwulan III-2017, OJK menindaklanjuti pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 49 tindak lanjut berupa surat/nota dinas kepada perusahaan asuransi, pihak pelapor.

6) Kegiatan Lain

Selain kegiatan pengawasan di atas, khusus untuk sektor perasuransian OJK melakukan beberapa kegiatan terkait pengawasan, yaitu:

a. Penatausahaan Dana Jaminan

Pada triwulan III-2017 OJK telah memproses 15 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan.

b. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan

Pada triwulan III-2017 OJK menerima 38 permohonan surat keterangan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan telah diselesaikan seluruhnya.

c. Pengesahan Cadangan

Selama periode triwulan III-2017, terdapat tujuh permohonan pengesahan cadangan premi yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh permohonan tersebut telah dianalisis dan ditindaklanjuti.

B. Pengawasan Dana Pensiun

1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Rekapitulasi penyampaian laporan bulanan Dana Pensiun pada triwulan III-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel II - 15 Penyampaian Laporan Bulanan Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Telah Menyampaikan			Belum Menyampaikan		
	Juli 2017	Agustus 2017	Sep-tember 2017	Juli 2017	Agustus 2017	Sep-tember 2017
Dana Pensiun Pemberi Kerja	213	206	206	18	24	24
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	24	24	0	1	1
Total	238	230	230	18	25	25

Pada triwulan III-2017 adalah laporan keuangan semester I-2017 sebanyak 173 laporan.

2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan III-2017, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap BPJS Ketenagakerjaan dan empat Dana Pensiun.

3) Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung (LHP)

Pada triwulan III-2017, OJK telah menerbitkan sembilan LHP Sementara dan delapan LHP Final Dana Pensiun.

4) Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada triwulan III-2017, OJK telah melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap 12 Dana Pensiun.

C. Pengawasan BPJS Ketenagakerjaan

1) Analisis Laporan (*off-site supervision*)

Selama triwulan III-2017, OJK menerima laporan berkala dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak enam laporan berkala yang terdiri dari dua laporan pengelolaan program Dana Jaminan Sosial periode Juni dan Juli 2017 dan empat laporan keuangan bulanan periode Juli 2017 dan Agustus 2017 masing-masing untuk Badan dan Dana Jaminan Sosial. OJK juga telah melakukan analisis terhadap program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun selama periode tahun 2016 sampai dengan Mei 2017.

2) Pemeriksaan (*on-site supervision*)

Pada triwulan III-2017, OJK telah melaksanakan pemeriksaan langsung dengan jangka waktu pemeriksaan tanggal 31 Juli sampai dengan 31 Agustus 2017. Aspek yang diperiksa

terkait dengan pembayaran manfaat klaim dan perlindungan konsumen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

D. Pengawasan Lembaga Pembiayaan

1) Analisis Laporan Berkala (*off-site supervision*)

Selama triwulan III-2017, OJK melakukan pengawasan *off-site* lembaga pembiayaan dengan cara menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur untuk periode Juni sampai dengan Agustus 2017.

Tabel II - 16 Penyampaian Laporan Bulanan Lembaga Pembiayaan

Jenis Laporan	Terlambat			Tidak Terlambat		
	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017	Juni 2017	Juli 2017	Agustus 2017
LBPP	16	8	9	183	190	189
LBPMV	4	5	4	58	58	59
LBPPI	0	0	0	2	2	2

* LBPP: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan, LBPMV: Laporan Bulanan Perusahaan Modal Ventura, LBPPI: Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Perusahaan yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan bulanan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

2) Pemeriksaan Langsung (*On-site Supervision*)

Pada triwulan III-2017, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 11 Lembaga Pembiayaan, yang terdiri dari tiga Perusahaan Modal Ventura dan delapan Perusahaan Pembiayaan. Pemeriksaan terhadap perusahaan pembiayaan dilakukan dengan menerapkan *Risk Based Supervision* (RBS).

3) Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Perkembangan penyusunan laporan pemeriksaan selama triwulan III-2017, yaitu:

Tabel II - 17 Penerbitan LHP Lembaga Pembiayaan

Kegiatan	Jumlah
LHPLS telah dikirimkan	14
LHPLF telah dikirimkan	16

4) Pemantauan Tindak Lanjut dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pada triwulan III-2017, OJK telah melakukan rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura pada tahun 2016. Kegiatan ini dilakukan agar lembaga pembiayaan yang telah diperiksa melaksanakan rekomendasi dan saran yang telah disampaikan.

5) Perkembangan Penerapan *Risk Based Supervision*

Selama triwulan III-2017, OJK melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan *risk based supervision* (RBS) terhadap delapan Perusahaan Pembiayaan. Sampai dengan batas waktu penyampaian yang ditentukan, terdapat 174 Perusahaan Pembiayaan yang telah menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko, sedangkan sebanyak 26 perusahaan belum menyampaikan.

6) Penanganan Pengaduan

Sampai dengan triwulan III-2017, OJK telah menangani dan menindaklanjuti tiga pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan.

E. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

1) Pendampingan Langsung dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan LKM

Tabel II - 18

**Pendampingan Langsung
Penyusunan Laporan Keuangan
LKM selama Triwulan III-2017**

No	Lokasi	Nama LKM
1	Banjarnegara	1. Koperasi LKM Gapoktan Suka Maju 2. Koperasi LKM Kurnia Tani Cendana 3. Koperasi LKM Tani Utama Kertayasa 4. Koperasi LKM Usaha Murih Kasembadan 5. Koperasi LKMA Gapoktan Tani Asri
2	Kebumen	6. Koperasi LKM Gapoktan Demang Tani 7. Koperasi LKM Gapoktan Sekar Harum 8. Koperasi LKMA Gapoktan Manunggal Tani Kamulyaan 9. Koperasi LKM Karya Makmur 10. Koperasi LKMA Tani Makmur Blater
3	Pekalongan	11. Koperasi LKM Gapoktan Maju Makmur 12. Koperasi LKM Wono Raharjo 13. Koperasi LKM Melati Makmur 14. Koperasi LKMA Gerak Makmur 15. Koperasi LKM Gapoktan Suka Tani 16. Koperasi LKM Gapoktan Rukun Makmur 17. Koperasi LKMA Adi Jaya Makmur
4	Purbalingga	18. Koperasi LKMA Manunggal Lestari 19. Koperasi LKMA Mugi Rahayu 20. Koperasi LKMA Tri Mulya Tani
5	Semarang	21. Koperasi LKMA Gapoktan Sedayu Barokah 22. Koperasi LKMA Gapoktan Novelty Sejahtera
6	Sleman	23. PT BKD Sleman
7	Grobogan	24. Koperasi LKMA Sumber Urip 25. Koperasi LKMA Sari Tani 26. Koperasi LKMA Cakra Tani
8	Jepara	27. Koperasi LKMA Sentana Jaya 28. Koperasi LKMA Panuntun Tani
9	Pandeglang	29. PT LKM Pandeglang Berkah
10	Rangkasbitung	30. PT LKM Rangkasbitung
11	Tangerang	31. PT LKM Artha Kertaraharja
12	Cirebon	32. Koperasi LKMS Gunungjati
13	Majalengka	33. LKMS BMT Talaga
14	Tasikmalaya	34. PT LKM Pancatengah Tasikmalaya
15	Metro	35. Koperasi LKMA Gapoktan Sari Makmur
16	Lampung Selatan	36. Koperasi LKMA Gapoktan Panca Karya
17	Lampung Tengah	37. Koperasi LKMA Mekar Jaya 38. Koperasi LKM Mandiri Sejahtera
18	Tulang Bawang	39. Koperasi LKMA Tunas Mekar Sejahtera 40. Koperasi LKM Agribisnis Sido Jaya Abadi
19	Medan	41. Koperasi LKMS Madani Emas Nusantara

- 2) Asistensi Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
Selama triwulan III-2017, OJK telah melaksanakan asistensi perizinan usaha di tujuh kota atau kabupaten antara lain:

Tabel II - 19

**Pelaksanaan Asistensi Perizinan Usaha
LKM Triwulan III-2017**

No.	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Pekalongan	50 orang
2.	Wonogiri	47 orang
3.	Banjarnegara	31 orang
4.	Sragen	44 orang
5.	Grobogan	67 orang
6.	Magelang	43 orang
7.	Purbalingga	58 orang

- 3) Pelatihan Proses Bisnis dan Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
Selama triwulan III-2017, OJK mengadakan dua kali pelatihan yaitu di Kota Yogyakarta dan Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan pelatihan di Yogyakarta melibatkan 25 LKM dari berbagai kota atau kabupaten di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sementara itu, Pelaksanaan pelatihan di Kota Bandar Lampung melibatkan empat LKM.

F. Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Pada triwulan III-2017 OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap PT Pegadaian, lima perusahaan penjaminan, PT Sarana Multigriya Finansial, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Selain melaksanakan pemeriksaan langsung terhadap perusahaan penjaminan, OJK bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi melaksanakan Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertema “Koordinasi Percepatan Pendirian Jamkrida” dengan mengundang 16 Provinsi yang belum memiliki Jamkrida, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, D.I Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Gorontalo. Hasil dari FGD adalah Komitmen Bersama Pendirian

Jamkrida dari perwakilan 16 provinsi, sebagai berikut:

- 1) Mempercepat Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, dengan menyusun Ranperda tentang Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Penyertaan Modal.
- 2) Menyampaikan Ranperda dan Perda tentang Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah dan Penyertaan Modal kepada Kemendagri, OJK dan Kemenkop.
- 3) Mengusulkan Penyertaan Modal pada PT Jamkrida dan dana operasional pendamping dari APBD.

G. Pengawasan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

Pada triwulan III-2017, pengawasan atas perusahaan jasa penunjang yang telah beroperasi dilakukan dengan:

- 1) Analisis atas laporan keuangan dan laporan operasional Perusahaan Penunjang IKNB berdasarkan penyampaian laporan keuangan semester I-2017 sebanyak 201 perusahaan pialang perasuransian;
- 2) Pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus sebanyak 45 perusahaan yang terdiri dari 36 Perusahaan Pialang Asuransi, enam Perusahaan Pialang Reasuransi, dan tiga Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan telah menerbitkan 33 Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan 16 di antaranya sudah diterbitkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF);
- 3) Mengenaikan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang dilakukan perusahaan jasa penunjang sebanyak 69 sanksi yang terdiri dari 53 Sanksi Peringatan Pertama (SP1), dua Sanksi Peringatan Kedua (SP2), dua Sanksi Peringatan Ketiga (SP3), dan 12 Sanksi Administratif berupa Denda pada triwulan III-2017; serta
- 4) Menindaklanjuti penanganan enam pengaduan yang diterima oleh pengawas jasa penunjang sebanyak enam pengaduan pada triwulan III-2017.

H. Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB

Pada triwulan III-2017, OJK menerima 1.518 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB. Permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB meliputi industri asuransi dan reasuransi, industri dana pensiun, industri lembaga pembiayaan, industri penjaminan, industri pergadaian, dan lembaga pinjam meminjam berbasis teknologi (*peer to peer lending*). Adapun jumlah permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB sampai dengan triwulan III-2017 yang telah diproses oleh OJK sebanyak 4.846. Dari jumlah tersebut, sejumlah 3.957 permohonan dan pelaporan kelembagaan IKNB telah selesai diberikan izin/persetujuan/pencatatan dan 889 permohonan dan pelaporan dimaksud telah ditanggapi serta masih dalam proses

Tabel II - 20

Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB selama Triwulan III-2017

Kegiatan	Permohonan			Selesai	Telah Di-analisis & Ditanggapi*	Dalam Proses Analisis
	Out-standing Triwulan Sebelumnya	Triwulan III-2017	Jumlah			
Pemberian Izin Usaha	78	16	94	41	47	6
Pencabutan Izin Usaha	16	9	25	19	3	3
Likuidasi	15	5	20	11	6	3
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan	20	17	37	15	3	19
Perubahan Kepemilikan/AD/Modal/PS/PDP	284	140	424	247	156	21
Perubahan Nama	11	1	12	11	1	-
Kantor Cabang	469	189	658	492	49	117
Kantor Pemasaran dan Kantor Selain Kantor Cabang	259	137	396	330	14	52
Produk	949	427	1.376	1.272	98	6
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	587	333	920	669	189	62
Pelaporan Pengurus	252	169	421	402	2	17
Pelaporan Syarat Keberlanjutan	261	21	282	271	1	10
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal	70	22	92	90	2	0
Pelaporan Pengangkatan Tenaga Kerja Asing	57	32	89	87	2	0
Total	3.328	1.518	4.846	3.957	573	316

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

analisis. Rincian permohonan perizinan kelembagaan IKNB sampai dengan triwulan III- 2017 disajikan pada tabel berikut:

1) Pemberian Izin Usaha

Selama triwulan III-2017, terdapat enam pemberian izin usaha IKNB, yang terdiri dari dua perusahaan asuransi dan reasuransi, satu perusahaan pembiayaan, satu perusahaan modal ventura, satu perusahaan pergadaian, satu perusahaan *peer to peer lending* (*P2P Lending*). Pada periode yang sama terdapat tiga permohonan izin usaha yang dibatalkan karena melewati batas penyampaian kelengkapan dokumen selama 10 hari kerja. Rincian pemberian izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 21 Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan Kelembagaan dan Produk IKNB sampai dengan triwulan III-2017

IKNB	Permohonan		Total	Sele-sai	Telah Di-tang-gapi*	Proses Analisis
	Out-stand-ing tri-wulan Sebe-lumnya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	4	0	4	3	1	-
Dana Pensiun	1	1	2	-	2	-
Perusahaan Pembiayaan	1	0	1	1	0	0
Perusahaan Modal Ventura	4	0	4	3	1	0
Perusahaan Penjaminan	0	0	0	-	0	0
Perusahaan Pergadaian	20	3	23	10**)	12	1
LPMBTI (P2P Lending)	48	12	60	24***)	31	5
Total	78	16	94	41	47	6

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

**) Termasuk 2 permohonan izin usaha perusahaan pergadaian yang batal.

***) Termasuk 1 permohonan izin usaha perusahaan P2P lending yang batal.

Selama triwulan III-2017, OJK melakukan pemberian enam izin usaha IKNB antara lain sebagai berikut :

Tabel II - 22 Pemberian Izin Usaha IKNB Triwulan III-2017

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Pasar Dana Pinjaman	P2P Lending
2.	PT Kresna Ventura Capital	Perusahaan Modal Ventura
3.	PT Reasuransi Nusantara Makmur	Asuransi Jiwa
4.	PT Asuransi Jiwa Nasional	Asuransi Jiwa
5.	PT Anadana Global Multifinance	Perusahaan Pembiayaan
6.	PT Pegadaian Mitra Kepri	Pergadaian

Terdapat 11 perusahaan pergadaian dan *peer to peer lending/financial technology* (*fintech*) yang diberikan pernyataan terdaftar pada triwulan III-2017, yaitu:

Tabel II - 23 Perusahaan yang diberikan Pernyataan Terdaftar

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Indonusa Bara Sejahtera	P2P Lending
2.	PT Indo Fin Tek	P2P Lending
3.	PT Dynamic Credit Asia	P2P Lending
4.	PT Fintegra Homido Indonesia	P2P Lending
5.	PT Sol Mitra Fintec	P2P Lending
6.	PT Digital Tunai Kita	P2P Lending
7.	PT Progo Puncak Group	P2P Lending
8.	PT Relasi Perdana Indonesia	P2P Lending
9.	PT Igrow Resources Indonesia	P2P Lending
10.	PT Svaraputra Penjuru Vijaya	Pergadaian
11.	PT Pusat Gadai Indonesia	Pergadaian

2) Pencabutan Izin Usaha

Selama periode triwulan III-2017, OJK telah melakukan pencabutan terhadap tujuh IKNB yang terdiri dari satu perusahaan asuransi, empat dana pensiun, satu perusahaan pembiayaan, dan satu perusahaan modal ventura. Rincian pencabutan izin usaha IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 24

Rekapitulasi Pencabutan Izin Usaha IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Sele-sai	Telah Di-tang-gapi*	Proses Analisis
	Out-standing Triwulan Sebelumnya	Triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	2	1	3	2	1	-
Dana Pensiun	6	5	11	10	-	1
Perusahaan Pembiayaan	5	2	7	4**)	1	2
Perusahaan Modal Ventura	2	1	3	2	1	0
Perusahaan Penjaminan	1	0	1	1***)	0	0
Total	16	9	25	19	3	3

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

**) Termasuk 1 pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan yang dibatalkan.

***) Termasuk 1 pencabutan izin usaha perusahaan penjaminan yang dibatalkan.

OJK melakukan pencabutan tujuh izin usaha IKNB pada triwulan III-2017, yaitu:

Tabel II - 25

Pencabutan Izin Usaha IKNB

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri
1.	PT Asuransi Raya	Asuransi Umum
2.	Dana Pensiun Karyawan PT Industri Sandang Nusantara	DPPK PPMP
3.	Dana Pensiun PT Istaka Karya	DPPK PPMP
4.	Dana Pensiun Dok Dan Perkapalan Surabaya	DPPK PPMP
5.	Dana Pensiun Dok Kodja Bahari Group	DPPK PPMP
6.	PT Sarana Sumsel Ventura	Perusahaan Modal Ventura
7.	PT JA Mitsui Leasing	Perusahaan Pembiayaan

Dengan adanya pemberian dan pencabutan izin, maka jumlah IKNB konvensional Sampai dengan triwulan III-2017 jumlah LKJNB konvensional adalah sebagai berikut:

Tabel II - 26

Jumlah Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Konvensional

No	Jenis Industri	Jumlah
I	Asuransi dan Reasuransi *	
1	Asuransi Jiwa	54
2	Asuransi Umum	75
3	Reasuransi	6
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial & BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	2
5	Penyelenggara Asuransi untuk PNS, TNI dan POLRI	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	140
II	Dana Pensiun	
1	DPPK PPIP	43
2	DPPK PPMP	171
3	DPLK	24
	Total Dana Pensiun	238
III	Lembaga Pembiayaan*	
1	Perusahaan Pembiayaan	196
2	Modal Ventura	65
3	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	2
	Total Lembaga Pembiayaan	263
IV	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya*	
1	Perusahaan Penjaminan	21
2	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan / PT SMF	1
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia / Indonesia Eximbank	1
4	Perusahaan Pegadaian / PT Pegadaian (Persero)-Izin usaha	4
5	Perusahan Pegadaian –Pendaftaran	8
6	Penyelenggaraan P2P Lending – izin usaha	1
7	Penyelenggaraan P2P Lending – pendaftaran	21
	Total Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	57
	TOTAL LKJNB (Konvensional)	698

3) Penggabungan, Peleburan (*Merger*), dan Pengambilalihan (Akuisisi)

Selama periode triwulan III-2017, terdapat tujuh permohonan pengambilalihan, namun tidak terdapat permohonan penggabungan dan peleburan. Dengan demikian, sampai dengan triwulan III-2017, proses

penggabungan yang telah diselesaikan adalah antara PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan PT Reasuransi Internasional Indonesia yaitu dengan dicabutnya izin usaha PT Reasuransi Internasional Indonesia. Sementara itu, permohonan pengambilalihan IKNB yang telah diselesaikan sampai dengan periode laporan adalah sebanyak 15 permohonan yang terdiri dari enam perusahaan asuransi dan reasuransi serta sembilan perusahaan pembiayaan. Rincian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan IKNB disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 27

Rekapitulasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah ditang-gapi*	Proses analisis
	Out-standing triwulan Sebelum-nya	triwulan III 2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	5	7	12	6	3	3
Perusahaan Pembiayaan	15	10	25	9	0	16
Total	20	17	37	15	3	19

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

- 4) Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP)

Selama triwulan III-2017, OJK telah menyelesaikan 122 permohonan/pelaporan terkait proses perubahan kepemilikan perusahaan/perubahan anggaran dasar/perubahan pemegang saham/perubahan PDP, termasuk di dalamnya pelaporan penetapan

pengendali serta pemenuhan ketentuan *single presence policy*, di mana seluruhnya disampaikan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dengan demikian, OJK telah menyelesaikan sebanyak 273 permohonan/pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 28

Rekapitulasi Perubahan Kepemilikan Perusahaan/ Perubahan Anggaran Dasar/Perubahan Pemegang Saham/Perubahan PDP IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditang-gapi*	Proses Analisis
	Out-standing triwulan Sebelum-nya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	69	148	217	158	50	9
Dana Pensiun	54	25	79	41	35	3
Perusahaan Pembiayaan	112	14	126	49	71	6
Perusahaan Modal Ventura	32	7	39	10	27	2
Perusahaan Penjaminan	17	5	22	15	1	6
Total	284	199	483	273	184	26

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

- 5) Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran
Selama triwulan III-2017, OJK telah menerima 192 pelaporan terkait kantor cabang perusahaan asuransi dan reasuransi serta lembaga pembiayaan (perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura) yang terdiri dari pembukaan, penutupan, dan perubahan alamat serta empat pelaporan perubahan alamat kantor pusat untuk perusahaan asuransi dan reasuransi dengan rincian pelaporan kantor cabang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II - 29 Rekapitulasi Pelaporan Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Di-tang-gapi*	Proses Ana-lisis
	Out-standing triwulan Sebe-lumnya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi						
- Pembukaan kantor cabang	11	3	14	13	-	1
- Penutupan kantor cabang	2	1	3	3	-	-
- Perubahan alamat	9	6	15	15	-	-
Pencatatan pe-rubahan alamat kantor pusat	11	4	15	12	3	-
Lembaga Pembiayaan dan LJKK						
- Pembukaan kantor cabang	176	53	229	191	15	23
- Penutupan kantor cabang	27	10	37	24	5	8
- Perubahan alamat	226	119	345	234	26	85
Total	462	196	658	492	49	117

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Terkait kantor selain kantor cabang, OJK menerima 396 pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 30 Rekapitulasi Pelaporan Kantor selain Kantor Cabang IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Di-tang-gapi*	Proses Analisis
	Out-standing triwulan Sebelumnya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	113	84	197	189	5	3
Perusahaan Pembiayaan	146	53	199	141	9	49
Total	259	137	396	330	14	52

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

6) Pelaporan Produk

Pada periode triwulan III-2017, terdapat 427 permohonan pelaporan/persetujuan produk. Secara akumulasi sampai dengan triwulan III-2017, OJK telah menyelesaikan sebanyak 1.272 pelaporan/persetujuan produk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 31 Rekapitulasi Pelaporan Produk

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Di-tang-gapi*	Proses Ana-lisis
	Out-standing triwulan Sebe-lumnya	triwulan III-2017				
Pencatatan Nama Lain	13	7	20	20	-	-
Pencatatan Perubahan Produk	254	100	354	339	15	-
Pencatatan Produk Baru	54	18	72	65	7	-
Persetujuan Perubahan Produk	85	22	107	104	3	-
Persetujuan Produk Baru	335	166	501	431	66	4
Persetujuan Bancassurance	208	114	322	313	7	2
Jumlah	949	427	1.376	1.272	98	6

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

7) Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama IKNB

Sampai dengan triwulan III-2017, sebanyak 669 permohonan telah diselesaikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 32

Rekapitulasi Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB

Perusahaan	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditang-gapi*	Proses Analisis
	Out-standing triwulan Sebelum-nya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	154	150	304	274	30	-
Dana Pensiun	147	73	220	179	-	41
Perusahaan Pembiayaan	275	85	360	198	144	18
Perusahaan Modal Ventura	-	23	23	7	14	2
Perusahaan Penjaminan	11	2	13	11	1	1
Total	587	333	920	669	189	62

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap dan menunggu penjadwalan, atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Selama periode laporan, dari sejumlah 669 penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama IKNB yang telah diselesaikan terdapat 591 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya.

Adapun dari 591 permohonan yang telah ditetapkan hasilnya tersebut terdiri dari 289 Direksi/Pengurus, 224 Komisaris/Pengawas (termasuk Komisaris Independen), 33 Pemegang Saham Pengendali dan 45 Aktuaris,

Tenaga Ahli dan Auditor Internal.

- 8) Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB
Selama triwulan III-2017, terdapat 170 pelaporan perubahan pengurus IKNB, disertai dengan sebanyak 252 pelaporan yang merupakan *outstanding* dari triwulan sebelumnya. Dari jumlah dimaksud, sebanyak 393 telah dicatat dan sebanyak 29 sisanya telah ditanggapi dan dalam proses analisis. Rincian pelaporan perubahan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 33

Rekapitulasi Pelaporan Perubahan Pengurus IKNB sampai dengan triwulan III-2017

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Di-tang-gapi*	Proses Ana-lisis
	Out-standing triwulan Sebe-lumnya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	83	28	110	108	2	-
Dana Pensiun	111	66	177	160	-	17
Perusahaan Pembiayaan	58	52	110	110	-	-
Perusahaan Modal Ventura	-	18	18	18	-	-
Perusahaan Penjaminan	-	6	6	6	-	-
Total	252	169	421	402	2	17

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

Tabel II - 34

Rekapitulasi Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama IKNB

Jabatan	Perusahaan Asuransi dan Reasuransi		Dana Pensiun		Perusahaan Pembiayaan		Perusahaan Modal Ventura		Perusahaan Penjaminan	
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
Direksi/Pengurus	105	1	63	7	95	11	3	-	4	-
Komisaris/Pengawas	42	1	57	3	76	4	4	-	7	-
Pemegang Saham Pengendali	21	-	-	-	11	-	-	-	-	-
Aktuaris, Tenaga Ahli, dan Auditor Internal	43	2	-	-	-	16	-	-	-	-
Jumlah	241	4	120	10	182	16	7	-	11	-

9) Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

Pada periode laporan, terdapat 21 pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB disertai dengan sebanyak 261 pelaporan yang merupakan carry over dari triwulan sebelumnya. Rincian pelaporan syarat keberlanjutan pengurus IKNB dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 35 Rekapitulasi Pelaporan Syarat Keberlanjutan Pengurus IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditang-gapi*	Proses Ana-lisis
	Out-standing triwulan Sebe-lumnya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	75	3	78	77	1	0
Dana Pensiun	86	10	96	86		10
Perusahaan Pembiayaan	100	8	108	108	0	0
Total	261	21	282	271	1	10

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB.

10) Pelaporan Tenaga Ahli, Aktuaris, dan Auditor Internal

Selama triwulan III-2017, terdapat 22 pelaporan tenaga ahli yang seluruhnya merupakan tenaga ahli dari perusahaan asuransi. Sampai dengan periode laporan sebanyak 90 pelaporan dan sebanyak 2 pelaporan sisanya telah ditanggapi. Penggunaan tenaga ahli ini merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan asuransi, termasuk aktuaris.

11) Pelaporan Tenaga Kerja Asing

Pada periode laporan, terdapat 32 pelaporan penggunaan tenaga kerja asing dari perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan. Adapun Rincian pelaporan tenaga kerja asing dari masing-masing industri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II - 36 Rekapitulasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing IKNB

IKNB	Permohonan		Total	Selesai	Telah Ditang-gapi*	Proses Ana-lisis
	Out-standing triwulan Sebe-lumnya	triwulan III-2017				
Perusahaan Asuransi dan Reasuransi	46	14	60	58	2	0
Perusahaan Pembiayaan	11	18	29	29	0	0
Total	57	32	89	87	2	0

*) Dalam proses meliputi dokumen yang sudah lengkap atau dokumen telah dianalisis namun terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi oleh IKNB

I. Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

OJK melaksanakan fungsi pelayanan kepada perusahaan dan profesi penunjang IKNB seperti perusahaan Pialang Asuransi, perusahaan Pialang Reasuransi, dan perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Adapun pelayanan tersebut meliputi :

- layanan pemberian dan pencabutan izin usaha;
- perizinan perubahan nama perusahaan;
- persetujuan perubahan kepemilikan;
- persetujuan penambahan modal;
- persetujuan perubahan pengurus;
- pencatatan perubahan alamat kantor;
- persetujuan pembukaan kantor cabang;
- pendaftaran tenaga ahli;
- pendaftaran tenaga kerja asing;
- pendaftaran konsultan aktuaria, akuntan publik, dan penilai yang melaksanakan kegiatan di IKNB;
- pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli dan Tenaga Kerja Asing, serta;
- penetapan kelulusan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali, Tenaga Ahli, dan Tenaga Kerja Asing.

Data permohonan selengkapnya adalah pada tabel berikut.

Tabel II - 37

Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan
Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

No	Jenis Layanan	Permohonan triwulan III-2017 2017	Out- standing triwulan II 2017	Status		
				Sele- sai	Pro- ses*	Batal
1	Pemberian Izin Usaha	0	3	0	3	0
2	Perubahan Nama	1	3	1	3	0
3	Perubahan Kepemilikan	23	39	18	42	2
4	Penambahan Modal	10	11	6	14	1
5	Perubahan Pengurus	22	42	15	45	4
6	Perubahan Alamat	15	14	17	12	0
7	Pembukaan Kantor Cabang	2	2	1	3	0
8	Pendaftaran Tenaga Ahli	12	20	14	18	0
9	Rekomendasi Tenaga Kerja Asing	4	1	4	1	0

Tabel II - 38

Pendaftaran Profesi yang melaksanakan
kegiatan di IKNB

Jenis Profesi	Jumlah Profesi yang Terdaftar pada triwulan III-2017	Total Jumlah Pendaftaran Profesi sampai dengan triwulan III-2017 (per 30 September 2017)
Akuntan Publik	-	241
Konsultan Aktuaria	1	25
Penilai	16	98
Jumlah	17	364

Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengandali, dan Tenaga Ahli. Pada triwulan III-2017, telah dilaksanakan pengujian kemampuan dan kepatutan sebanyak 51 penetapan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II - 39

Jumlah Penetapan Hasil Pengujian Kemampuan
dan Kepatutan (PKK)

Jabatan	Pelaksanaan PKK triwulan III-2017		Jumlah
	Direkome- ndasikan	Tidak Dire- komendasikan	
Pemegang Saham Pengandali	10	-	10
Komisaris	18	-	18
Direksi	22	1	23
Jumlah	50	1	51

Jumlah perusahaan penunjang usaha perasuransian pada triwulan III-2017 adalah 238 perusahaan dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel II - 40

Jumlah Perusahaan Penunjang
Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Perusahaan	Sampai dengan triwulan II-2017	triwulan III-2017		Jumlah
			Pemberi- an Izin	Pencabu- tan Izin	
1.	Pialang Asuransi	169	-	-	169
2.	Pialang Reasuransi	42	-	-	42
3.	Jasa Penilai Kerugian	27	-	-	27
Jumlah		238	-	-	238

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Pengawasan Terintegrasi

A. *Enhancement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan terintegrasi, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) telah memasuki tahap III berupa penyempurnaan fitur-fitur aplikasi SIPT, antara lain penambahan modul berisi kumpulan data dan rasio keuangan yang akan menjadi fokus utama *enhancement* SIPT di tahun 2017. Tujuan utama pengembangan aplikasi SIPT adalah untuk membantu Pengawas Terintegrasi dalam melakukan analisa dan menentukan keputusan terkait Konglomerasi Keuangan. Tujuan spesifik yang ingin dicapai dalam pengembangan aplikasi SIPT modul data dan rasio keuangan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan.
- Menciptakan keseragaman (Standardisasi) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- Mengoptimalkan pengawas dalam menganalisis kondisi konglomerasi keuangan sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan.
- Menyediakan informasi untuk kepentingan penelitian dan pengaturan.

- e) Memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan.
- f) Meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi.

Hingga triwulan III-2017 *enhancement* aplikasi SIPT Tahap III modul data keuangan dan FICOR telah memasuki tahapan *System Integration Testing* (SIT). Setelah selesainya proses SIT, direncanakan akan dilakukan *User Acceptance Test* (UAT).

B. Implementasi Pengawasan Terintegrasi

Pada periode pelaporan, OJK menyelesaikan penyusunan *Integrated Supervisory Plan* (ISP) 2017 terhadap 42 KK yang berada di bawah pengawasan DPTI. ISP bertujuan untuk mempersiapkan seluruh kegiatan/aktivitas pengawasan yang akan dilakukan terhadap suatu KK guna mendukung efisiensi dan efektifitas pengawasan terintegrasi terhadap KK.

OJK juga menyelesaikan penyusunan *Know Your Financial Conglomerate* (KYFC) dan *Integrated Risk Rating* (IRR) posisi Juni 2017 untuk 13 KK yang bertujuan untuk menghasilkan agregasi dari risiko secara keseluruhan atas KK yang digunakan untuk menetapkan peringkat dari KK sebagai gambaran mengenai kondisi usahanya dan menjadi landasan bagi Pengawas Terintegrasi untuk menetapkan strategi dan perencanaan pengawasan terintegrasi.

Sampai triwulan III-2017, OJK telah melaksanakan Forum Panel Pengawasan Terintegrasi (FPPT) terhadap 10 KK yang merupakan bagian dari proses pengendalian Kualitas Pengawasan Terintegrasi melalui *peer review* terhadap input, proses, dan output kegiatan pengawasan KK berdasarkan risiko (*Risk Based Supervision*) agar memenuhi standar kualitas tertentu, antara lain penggunaan informasi secara komprehensif, ketajaman dan kedalaman analisis, signifikansi, kualitas pengambilan kesimpulan atas kondisi Konglomerasi

Keuangan, dan tindakan pengawasan yang dilakukan.

2.3.2 Pengembangan Industri Perbankan

A. Pengembangan Bank Umum

Pada triwulan III-2017, OJK memperkuat proses pengawasan dengan menerbitkan beberapa ketentuan internal panduan Pengawas seiring dengan perkembangan ragam dan kompleksitas bisnis bank. Selain itu, dilakukan juga proses konversi ketentuan Pengawasan Bank menjadi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Proses konversi tersebut perlu dilakukan untuk memperkuat dasar hukum bagi Pengawas Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Seiring dengan semangat penerapan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas di OJK, efisiensi proses pengawasan tetap diutamakan. Hal tersebut tertuang dalam pedoman-pedoman pengawasan yang diterbitkan. Selain itu, evaluasi terhadap pedoman-pedoman yang sudah ada juga tetap dilakukan untuk menghilangkan proses yang redundan atau dapat disederhanakan tanpa mengurangi substansi.

B. Pengembangan BPR/BPRS

Pada triwulan III-2017, sedang disusun dua kajian pengembangan pengawasan BPR yaitu:

1. Kajian *Early Warning System* (EWS)
EWS adalah instrumen yang mendukung pelaksanaan proses pengawasan untuk mendeteksi secara dini adanya perkembangan yang tidak diinginkan atau bahkan membahayakan kelangsungan usaha BPR, yang dapat disebabkan antara lain oleh permasalahan likuiditas, tingginya kegagalan kredit atau kinerja yang buruk. EWS merupakan alat bantu

bagi Pengawas BPR dalam mengambil keputusan pengawasan dan dalam melihat kondisi BPR melalui rasio-rasio yang terdapat dalam sistem EWS.

2. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR untuk Modul Pemahaman Terhadap BPR (KYBPR)

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan BPR berdasarkan risiko khususnya pada tahapan KYBPR, diperlukan suatu sistem Informasi Pengawasan (SIP) BPR. SIP dimaksudkan untuk membantu pengawas BPR serta meminimalisir *human error* dalam penyusunan KYBPR. Selain itu, SIP juga dapat menjadi media penyimpanan dokumen KYBPR yang terstruktur dan terorganisir untuk kesinambungan proses pengawasan serta memudahkan *audit trail*.

2.3.3 Pengembangan Industri Pasar Modal

A. Kajian Pasar Modal

Pada triwulan III-2017, telah selesai disusun satu kajian di bidang Pasar Modal yaitu: Kajian Efek Beragun Aset *Future Cash Flow*. Dalam perkembangannya jenis aset yang disekuritisasi meluas. Aset yang disekuritisasi bukan hanya aset eksisting tetapi juga aset yang belum ada dalam laporan keuangan entitas. Aset yang akan ada ini biasanya berasal dari pendapatan di masa depan disebut "aset masa depan" (*future assets*) atau "pendapatan masa depan" (*future revenue*). Pendapatan masa depan dapat bersifat kontraktual, seperti pendapatan yang berasal dari kontrak jangka panjang penjualan batu bara ke suatu entitas, atau non-kontraktual seperti pendapatan jalan tol dan tiket penumpang. Dalam kajian sekuritisasi aset pendapatan masa depan ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan di antaranya adalah pertimbangan mengenai ketentuan hukum, jenis pendapatan yang dapat

disekuritisasi, metode pengukuran jumlah pendapatan dan standar akuntansi yang sesuai untuk penyajian dalam laporan keuangan. Saat ini perusahaan yang sedang melakukan sekuritisasi pendapatan masa depan adalah PT Jasa Marga Tbk. PT Jasa Marga Tbk mensekuritisasi pendapatan tol masa depannya.

B. Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) di Makassar dan Bandung, Bali

Adapun rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, yaitu FGD Wartawan dan Seminar Pasar Modal di Perguruan tinggi setempat. Di Makassar, seminar dilaksanakan di STIEM Bongaya Makassar di mana dari 91 responden, sebanyak 90 responden atau sebesar 98,90% yang semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal.

Sedangkan di Bali, seminar dilaksanakan di Politeknik Negeri Bali, di mana dari 185 responden, sebanyak 184 responden atau sebesar 99,46% yang semakin paham terhadap produk dan layanan Pasar Modal.

C. Event Lainnya

1. Kompetisi Nasional Games Investasi Pasar Modal - Stocklab tahun 2017 selama triwulan III-2017 telah berlangsung di lima kota yang terdiri dari Makassar, Denpasar, Pontianak, Ambon, dan Jakarta.
2. *Training Of Trainers* StockLab selama triwulan II – 2017 telah berlangsung di 7 Kota yang terdiri dari Lampung, Sumbawa, Jakarta, Denpasar, Pontianak, Makassar dan Pekanbaru.

D. Penguatan Infrastruktur Pasar Modal

Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIPM) yang merupakan koordinasi pengembangan, baik disisi regulasi maupun sistem, antara OJK dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan

Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia guna pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Modal melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan.

Adapun progress dari program TPIPM selama triwulan III-2017 adalah sebagai berikut:

- 1) *C-Best Next Generation*
Pengembangan sistem utama KSEI (C-BEST) guna Mengantisipasi peningkatan jumlah investor dan integrasi aplikasi-aplikasi di luar C-BEST yang selama ini digunakan sebagai pendukung aplikasi C-BEST. Penyelesaian proyek secara keseluruhan telah mencapai 94.97%.
- 2) *Enhancement e-Clears*
Pengembangan arsitektur sistem utama KPEI (*e-CLEARs*) guna mengantisipasi peningkatan kapasitas, performa, fleksibilitas dan kehandalan sistem sistem kliring KPEI. Penyelesaian proyek secara keseluruhan telah mencapai 100%.
- 3) Implementasi *General Clearing Member* (GCM) (Desember 2017)
Implementasi GCM bertujuan memberikan pilihan kepada AB untuk fokus pada bisnis inti (terutama pemasaran) yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pemodal dan meningkatkan likuiditas pasar serta penurunan risiko secara keseluruhan dengan *risk* antara KPEI sebagai CCP dengan GCM. Penyelesaian proyek secara keseluruhan saat ini mencapai 82%.

Selain TPIPM, terdapat Tim Pengembangan Pasar Surat Utang (TPPSU) yang merupakan koordinasi pengembangan pasar Surat Utang antara OJK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia dan PT Penilai Harga Efek Indonesia guna pembenahan untuk memperkuat performa Pasar Surat Utang melalui perbaikan infrastruktur berkelanjutan.

Adapun progress dari program TPPSU adalah sebagai berikut:

- a) *Green Bond dan Green Index*

ACMF sedang menyusun *Asean Green Bond Standard* (AGBS) dengan mengadopsi *International Capital Market Association* (ICMA) *Green Bond Principle*. OJK mendukung penyusunan AGBS dengan mengadopsi ICMA *Green Bond principle* mengingat ICMA *green bond principle* adalah standar internasional.

OJK sedang menyusun peraturan *Green Bond* dan kajian terkait *green index*;
- b) *ASEAN Bond Market Development Scorecard*

Indonesia telah memenuhi aspek transparansi dalam mengadopsi *ASEAN Debt Securities Disclosure Standard* dalam Peraturan POJK Nomor 9/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- c. *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF)

Presiden telah setuju dan terbitkan Prepres No.23/2017 tentang Pengesahan *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi). Berdasarkan Perpres tersebut, saat ini dilakukan proses penyusunan PMK yang menyatakan bahwa *Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF) termasuk ke dalam daftar Institusi yang mendapatkan pengecualian pajak.

d) *Asian Bonds Online (ABO)*

Indonesia Bond Market Guide telah diterbitkan pada 10 Agustus 2017 di website ADB, *website Asian Bonds Online* dan dalam siaran pers OJK dengan link sebagai berikut:

- <https://www.adb.org/publications/asean3-bond-market-guide-2017-indonesia>
- <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Peluncuran-Indonesia-Bond-Market-Guide-2017.aspx>

2.3.4 Pengembangan IKNB

A. Program 1000 Aktuaris

Program 1000 Aktuaris bertujuan untuk mempercepat jumlah aktuaris sehingga perkiraan kebutuhan profesional aktuaris untuk IKNB dapat terpenuhi. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah sosialisasi dan promosi, perkuliahan singkat sertifikasi aktuaris yang bekerja sama dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), serta pendidikan dan pelatihan aktuarial keahlian khusus asuransi umum. Pada triwulan III-2017 terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan terkait Program 1000 Aktuaris, antara lain:

- a. Menyampaikan permintaan bantuan atas pemenuhan kebutuhan tenaga aktuaris OJK dalam rangka pengaturan dan pengawasan di sektor IKNB;
- b. Monitoring kegiatan pada Program 1000 Aktuaris;
- c. Menyampaikan permintaan data mengenai rencana peningkatan jumlah aktuaris di Indonesia tahun 2017-2022 kepada Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia.

Sampai dengan triwulan III-2017, jumlah aktuaris untuk tingkat FSAI adalah sebanyak

256 orang dan 277 untuk aktuaris tingkat ASAI.

B. *Risk Management, Economic Sustainability & Actuarial Science Development in Indonesia (READI)*

Proyek READI bertujuan untuk membangun Indonesia sebagai pusat regional keunggulan dalam ilmu aktuarial dan manajemen risiko, dengan meningkatkan jumlah dan kualitas lulusan ilmu aktuarial Indonesia tersedia untuk bisnis Indonesia, universitas dan lembaga pemerintah, dan untuk memperkuat profesi aktuarial di Indonesia. Selama triwulan III-2017, kegiatan yang telah dilakukan terkait READI adalah menghadiri kegiatan penandatanganan MoU kerja sama antara FMIPA, Universitas Indonesia (UI) dengan Proyek READI dan Prudential Indonesia serta *Launching Program Studi Ilmu Aktuarial FMIPA UI di Depok*.

C. Standar Kompetensi Kinerja Nasional Indonesia Bidang Asuransi (SKKNI)

Dalam rangka mendukung penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dibentuk suatu Tim Perumus dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perasuransian. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait SKKNI selama triwulan III-2017 antara lain:

- a. Menyampaikan usulan anggota Komite Standar Kompetensi, Tim Perumus, dan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perasuransian;
- b. Mengadakan rapat pembahasan dalam rangka pembubaran Tim Kaji Ulang SKKNI Bidang Perasuransian

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Pada triwulan III-2017, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan masih solid sejalan dengan fundamental ekonomi dalam negeri yang terjaga. Kinerja industri jasa keuangan dalam negeri berada pada level yang memadai, dengan profil risiko yang terpantau masih manageable.

2.4.1 Pasar Keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan

OJK menilai bahwa secara umum kondisi sektor jasa keuangan dalam negeri pada triwulan III-2017 masih terjaga. Meskipun perkembangan terkini menunjukkan bahwa *downside risk* eksternal masih berlanjut dan pemulihan sektor riil domestik masih belum solid, indikator lembaga jasa keuangan terpantau memadai dengan kinerja intermediasi yang relatif terjaga.

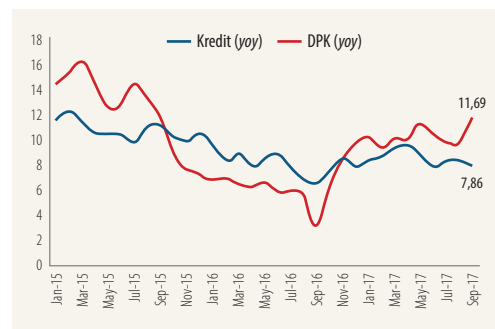
Pada triwulan III-2017, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia kembali mengalami penguatan sebesar 1,22% (*qtd*), dengan *net sell* nonresiden sebesar Rp28,1 triliun. Sepanjang triwulan III-2017 terdapat peningkatan aksi jual oleh investor nonresiden di pasar saham domestik, yang salah satunya dipengaruhi oleh sentimen kenaikan *Fed Funds Rate* yang diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir 2017. Namun demikian, tekanan terpantau relatif moderat dan pasar masih bergerak stabil ditopang oleh masuknya investor domestik. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga kembali mencatatkan kinerja positif dengan mencatat *net buy* nonresiden sebesar Rp48,8 triliun.

Sebagian indikator intermediasi lembaga jasa keuangan pada triwulan III-2017 masih berada pada level moderat, sejalan dengan perkembangan sektor riil domestik yang masih mengalami konsolidasi.

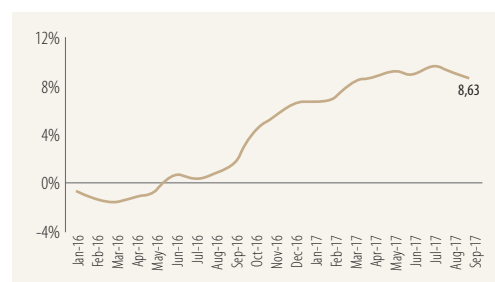
Per September 2017, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 7,85% (*yoy*),

meningkat dibandingkan pertumbuhan per Juni 2017 yang sebesar 7,75% (*yoy*). Sementara itu, piutang pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 8,63% (*yoy*). Dari sisi sumber pendanaan, terdapat perbaikan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang signifikan dan per September 2017 tercatat sebesar 11,69% (*yoy*). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan per September 2017 masih dalam level tinggi sebesar 88,74%.

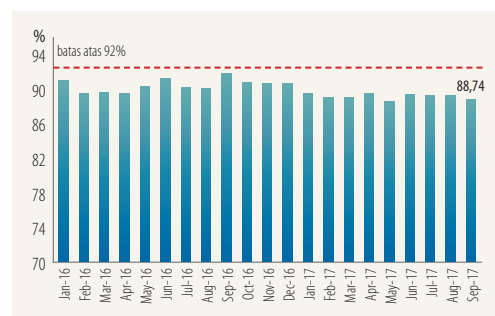
Grafik II - 3 Pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga Perbankan



Grafik II - 4 Pertumbuhan Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan



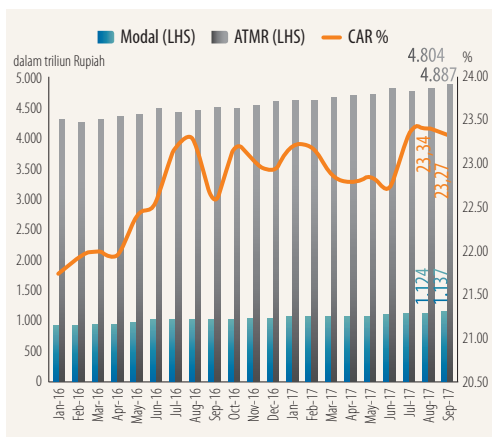
Grafik II - 5 Perkembangan LDR Perbankan



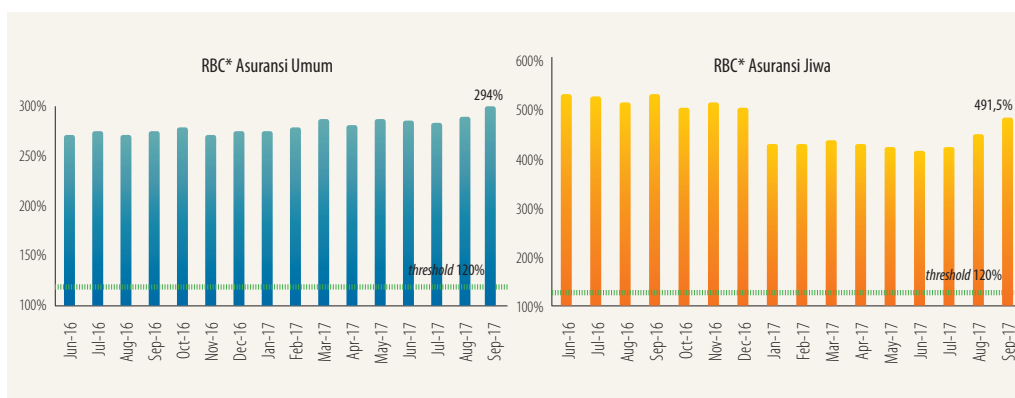
Pemanfaatan pasar modal sebagai sumber pendanaan korporasi terus meningkat. Sampai triwulan III-2017, penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp182,2 triliun. Diperkirakan nilai penghimpunan dana di 2017 akan melebihi capaian di 2016. Dari total penghimpunan dana di pasar modal tersebut, sebanyak 45,03% dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (perbankan dan industri keuangan nonbank), yang menggunakannya terutama untuk pembiayaan modal kerja.

Permodalan industri lembaga jasa keuangan terpantau dalam kondisi yang memadai. Per September 2017, baik *Capital Adequacy Ratio* (CAR) perbankan maupun *Risk-Based Capital* (RBC) industri asuransi umum dan asuransi jiwa berada pada level yang memadai. CAR tercatat sebesar 23,27%, sedangkan RBC asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing tercatat sebesar 294% dan 491,5%.

Grafik II - 6 *Capital Adequacy Ratio (CAR) Perbankan*

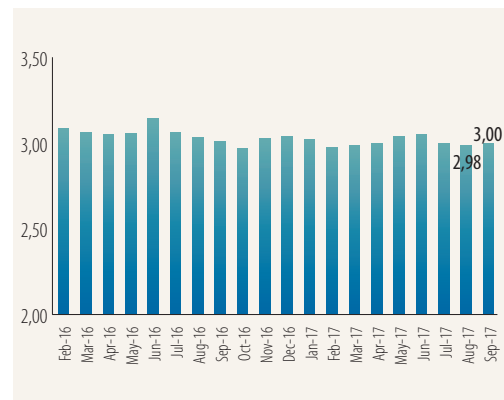


Grafik II - 7 *Risk-Based Capital (RBC) Industri Perasuransian*



Pada perusahaan pembiayaan, *gearing ratio* perusahaan pembiayaan per September 2017 berada pada level 3,00 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum (10 kali). Dengan tingkat *gearing ratio* yang relatif rendah tersebut, industri perusahaan pembiayaan dinilai masih memiliki ruang yang cukup untuk bertumbuh lebih lanjut.

Grafik II - 8 *Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan*

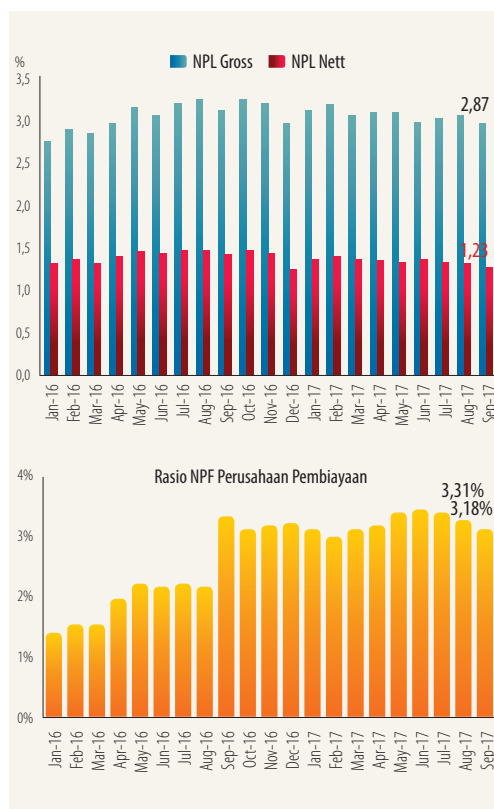


Risiko likuiditas di sektor perbankan relatif rendah, tercermin dari alat likuid yang cukup memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan DPK. Pada akhir triwulan III-2017, rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD) dan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tercatat cukup tinggi, yaitu masing-masing sebesar 105,47% dan 21,90%.

Risiko kredit di lembaga jasa keuangan, khususnya perbankan, terlihat mengalami penurunan pada triwulan III-2017. Rasio kredit bermasalah masih terjaga jauh di bawah

threshold (5%). Per September 2017, rasio *Non-Performing Loan (NPL) gross* dan *net* industri perbankan tercatat masing-masing sebesar 2,87% dan 1,23%. Di industri perusahaan pembiayaan, tingkat *Non-Performing Financing (NPF)* berada pada level 3,18%.

Grafik II - 9 Rasio NPL Perbankan dan NPF Perusahaan Pembiayaan



Dengan tren penguatan pasar keuangan domestik pada triwulan III-2017, risiko pasar lembaga jasa keuangan terpantau masih *manageable*. Di sektor perbankan, Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) per September 2017 tercatat sebesar 1,91%, jauh di bawah *threshold* 20%. Seiring dengan kinerja pasar saham dan pasar surat utang yang menguat, nilai investasi industri perasuransian dan dana pensiun juga melanjutkan tren peningkatan.

2.4.2 Respons Kebijakan

OJK terus memantau perkembangan terkini di perekonomian dan pasar keuangan, baik global maupun domestik, yang berpotensi memengaruhi kondisi sektor jasa keuangan nasional. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait juga diperkuat agar kinerja industri keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Permodalan lembaga jasa keuangan yang sangat memadai menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan masih memiliki ruang yang cukup luas untuk ekspansi intermediasi keuangan. Perbaikan sektor riil dan iklim investasi akan menjadi faktor pendukung peningkatan kinerja intermediasi tersebut. OJK memperkirakan kredit perbankan pada 2017 ini dapat tumbuh dalam rentang 7%-9%, dan diperkirakan akan meningkat pada 2018 mendatang.

Selanjutnya, OJK juga terus memantau perkembangan profil risiko lembaga jasa keuangan, serta memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi risiko. Ke depan, seiring dengan perbaikan kinerja intermediasi serta perbaikan permintaan global maupun domestik, diperkirakan risiko kredit lembaga jasa keuangan akan bergerak ke arah penurunan.

Pasar keuangan domestik masih dihadapkan pada sejumlah *downside risk* yang terutama berasal dari faktor eksternal, antara lain terkait pengetatan kebijakan moneter beberapa negara utama, ketegangan geopolitik, dan masih rendahnya harga komoditas dunia. OJK terus memantau pergerakan pasar dan arus modal investor nonresiden, serta mempersiapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan.

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB)

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan mendorong budaya menabung sejak dini. Program yang diluncurkan pada tanggal 14 Juni 2015 ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Sampai dengan triwulan III-2017, terdapat 279 bank yang menjadi peserta dalam program SimPel/SimPel iB. Jumlah rekening SimPel/SimPel iB mencapai 8.045.226 dengan volume Rp1,63 Triliun. Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah terjalin antara Bank dan sekolah sebanyak 199.819 PKS.

Dalam rangka penguatan program inklusi keuangan dan sebagai tindak lanjut dari evaluasi program SimPel/SimPel iB khususnya oleh BPR, telah dilaksanakan sosialisasi SimPel/SimPel iB di Surabaya. Total peserta kegiatan sosialisasi sebanyak 57 orang yang merupakan pengurus DPD dan DPC PERBARINDO serta industri perbankan khususnya BPR/BPRS yang belum menjadi bank peserta SimPel/SimPel iB di wilayah Jawa Timur. Secara umum, BPR/BPRS yang hadir menyatakan bahwa saat ini telah memiliki produk sejenis dengan fitur yang tidak jauh berbeda dengan SimPel/SimPel iB.

Sistem Informasi Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM (PELAKU)

PELAKU merupakan gerai informasi di kantor OJK di daerah sebagai sarana penyampaian informasi keuangan, penanganan pengaduan, serta peningkatan akses keuangan khususnya sektor UMKM. PELAKU memiliki tujuan antara lain :

1. Menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk memperoleh

informasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) serta produk dan jasa keuangan;

2. Menyediakan sarana bagi konsumen dan masyarakat di daerah untuk menyampaikan informasi, pertanyaan, dan pengaduan di sektor jasa keuangan; serta
3. Fasilitasi dalam rangka pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses ke sektor jasa keuangan.

Sepanjang triwulan III-2017, OJK melakukan implementasi Sistem Informasi PELAKU (SIPELAKU) di Nusa Tenggara Timur (NTT), Solo, dan Tegal.

Kegiatan Pengukuhan dan *Coaching Clinic* TPAKD

Tim percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan program-program TPAKD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal utama seperti karakteristik dan kebutuhan daerah, potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan produk dan layanan jasa keuangan, peningkatan usaha sektor produktif, pengembangan UMKM serta usaha rintisan (*startup business*) lainnya.

Sepanjang triwulan III-2017, telah dikukuhkan TPAKD Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, TPAKD Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, TPAKD Provinsi Gorontalo, dan TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Total seluruh TPAKD saat ini adalah 51 TPAKD dengan perincian 29 TPAKD tingkat provinsi, 15 TPAKD tingkat kabupaten, dan tujuh TPAKD tingkat kota. OJK juga telah melaksanakan tiga kali *coaching clinic* TPAKD, yaitu *coaching clinic* TPAKD Kalimantan Selatan, *coaching clinic* TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara, dan *coaching clinic* TPAKD Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Coaching clinic* dilakukan dalam rangka pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap program kerja TPAKD.

2.5.2 Literasi dan Edukasi Keuangan

Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK)

OJK telah memiliki 41 unit kendaraan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) yang tersebar di seluruh KR dan KOJK seluruh Indonesia. Kendaraan tersebut merupakan salah satu infrastruktur OJK dalam rangka melaksanakan kegiatan edukasi keuangan guna meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data penggunaan SiMOLEK di periode Triwulan III-2017, diketahui bahwa SiMOLEK telah digunakan oleh 199 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan jumlah pengunjung sebanyak 111.833 orang di 681 lokasi.

Edukasi Komunitas

OJK melaksanakan kegiatan edukasi keuangan bagi komunitas seperti Ibu Rumah Tangga di Bandung dan Jambi, TKI di Hongkong, penyandang disabilitas di Surabaya, dan UMKM di Bengkulu yaitu:

1. Edukasi Keuangan melalui Pagelaran Seni Wayang Golek di Bandung
Kegiatan edukasi dihadiri oleh 2000 orang yang terdiri dari masyarakat umum, komunitas pewayangan, penggiat budaya, dan mahasiswa. Materi yang disampaikan adalah pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal yang dimasukkan ke dalam cerita pewayangan.
2. Edukasi Keuangan bagi Perempuan dan Ibu Rumah Tangga di Jambi
Kegiatan dihadiri oleh 132 perempuan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Jambi. Pada kegiatan bertema "Keluarga Sejahtera Berkat Cerdas Kelola Uang" tersebut, peserta menerima materi edukasi keuangan dalam beberapa sesi, yaitu Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan oleh *financial planner*, Pengenalan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT): *Electronic Money* (*e-money*), pengenalan produk/layanan jasa

keuangan dengan materi asuransi jiwa, reksa dana, dan tabungan emas, serta Pengenalan OJK dan Waspada Investasi.

Sebagai pengelola keuangan keluarga, diharapkan materi edukasi tersebut dapat menambah pengetahuan peserta dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan produk keuangan untuk berinvestasi.

3. Edukasi Keuangan bagi TKI dan Panggung Merah Putih di Hongkong
Edukasi Keuangan bagi TKI dan Panggung Merah Putih bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong, Bank Indonesia, dan PUJK. Rangkaian kegiatan tersebut diikuti oleh 2.950 peserta. Tujuan kegiatan dimaksud adalah meningkatkan pemahaman TKI mengenai perencanaan keuangan, meningkatkan *awareness* terhadap iming-iming investasi ilegal, dan meningkatkan penggunaan produk/jasa keuangan sesuai kebutuhan TKI. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong TKI untuk dapat kembali ke tanah air dan membangun usaha. Materi yang diajarkan mencakup OJK dan Waspada Investasi, Perencanaan Keuangan, Kewirausahaan, dan Pengenalan Produk Jasa Keuangan.
4. Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas
OJK melaksanakan edukasi keuangan kepada Anggota dan Pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Komunitas Mata Hati di Surabaya. Kegiatan tersebut diikuti oleh 98 peserta. Peserta kegiatan menerima sesi pengenalan OJK dan Waspada Investasi, materi perencanaan dan pengelolaan keuangan, materi kewirausahaan, dan materi pengenalan produk Kredit Usaha Rakyat dan Laku Pandai. Pada umumnya, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi produk dan jasa keuangan serta kemudahan dalam akses keuangan. Melalui edukasi tersebut, diharapkan peserta memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi keuangan sehingga

dapat meningkatkan pengetahuan dalam penggunaan produk dan jasa keuangan.

5. Edukasi Keuangan kepada Anggota Persatuan Istri Prajurit di Bandung
OJK telah melaksanakan edukasi keuangan bekerja sama dengan Persatuan Istri Prajurit. Materi yang disampaikan adalah materi perencanaan keuangan, materi pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal, serta materi pengenalan produk perbankan kepada 253 anggota Persit. Edukasi tersebut dapat menjadi *multiplier effect* melalui pengajaran kembali kepada ibu rumah tangga di lingkungan sekitarnya.
6. Sinergi Edukasi Keuangan Bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu
OJK bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan kegiatan sinergi edukasi keuangan bagi penyuluh nelayan dan pendamping UMKM di Provinsi Bengkulu. Sebanyak 180 Peserta yang merupakan penyuluh nelayan atau pendamping UMKM di Bengkulu menghadiri kegiatan edukasi keuangan yang terdiri dari materi perencanaan keuangan, pengenalan OJK dan Waspada Investasi Ilegal, kewirausahaan, asuransi nelayan, dan KUR.

Pengembangan Infrastruktur SDM

Dalam rangka pengembangan infrastruktur SDM sebagai agen literasi dan edukasi keuangan, sepanjang triwulan III-2017 OJK melakukan *training of trainer* bagi dosen, guru dan mahasiswa di beberapa kota yaitu:

1. **Training of Trainers (ToT) Dosen Perwakilan Perguruan Tinggi Wilayah Sumatera**
OJK melaksanakan ToT bagi dosen perwakilan perguruan tinggi wilayah Sumatera, Kepulauan Riau dan Pulau Bangka Belitung di Medan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 33 dosen yang mewakili 30 perguruan tinggi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ToT dosen tersebut adalah untuk memperkenalkan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi agar materi dapat disampaikan kepada mahasiswa dan dosen lainnya untuk *multiplier effect* yang lebih luas serta menyelaraskan materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi ke dalam kurikulum mata kuliah dasar di perguruan tinggi.

2. **Training of Trainers (ToT) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di Kota Malang**

OJK bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya telah melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya di Kota Malang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 310 peserta. Peserta edukasi keuangan menerima materi perencanaan keuangan, materi rekasa dana, materi Gerakan nasional Non Tunai, materi Pengenalan OJK dan Waspada Investasi, dan Asuransi Mikro.

3. **Training of Trainers (ToT) Dosen Tingkat Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTB, dan NTT**

OJK melaksanakan Kegiatan *Training of Trainers* Dosen Tingkat Perguruan Tinggi Wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTB dan NTT di Makassar. Kegiatan diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari 30 dosen dari 30 perguruan tinggi di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTB, dan NTT. Peserta ToT menerima materi buku seri literasi keuangan tingkat perguruan tinggi dari para narasumber sebagai berikut: OJK dan Pengawasan Mikroprudensial, Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Industri Jasa Keuangan Syariah, dan Perencanaan Keuangan.

Outreach Program Keuangan Syariah

OJK melaksanakan Edukasi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi NTB. Kegiatan dihadiri oleh 126 peserta dengan materi yang disampaikan mencakup Perencanaan Keuangan Bisnis Syariah, Kewirausahaan, dan pengenalan produk/layanan jasa keuangan serta materi KUR Mikro iB, reksa dana syariah, dan tabungan emas. Selanjutnya, akan dilakukan *monitoring* dan pendampingan peserta selama tiga bulan setelah kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku keuangan dan penggunaan produk dan jasa keuangan.

Peluncuran *e-Book* “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” tingkat SMA dan Buku Seri Literasi Keuangan Segmen Profesional dan Pensiunan

OJK meluncurkan *e-book* “Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan” tingkat SMA serta buku praktis segmen pensiunan dan segmen profesional. Kegiatan ini diikuti oleh 167 orang yang berasal dari perwakilan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), asosiasi sektor jasa keuangan, anggota kelompok kerja (pokja) edukasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen, perwakilan dari Direktorat Jendral Pajak, perwakilan dari Bappenas dan perwakilan dari Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) serta rekan-rekan relasi media baik cetak maupun elektronik.

Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* di Universitas Pattimura dan Seminar bertema Investasi di Pasar Modal Indonesia

OJK bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Galeri Investasi Universitas Pattimura telah melaksanakan kegiatan Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* (GIM) Universitas Pattimura dan Seminar Investasi di Pasar Modal Indonesia. Kegiatan dilanjutkan dengan seminar bertema investasi di pasar modal Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh 155 orang peserta. Materi yang disampaikan mencakup Materi Pengelolaan Keuangan, Materi Waspada Investasi Ilegal, Materi Investasi di Pasar Modal Indonesia, dan Pengenalan Produk Saham.

***Indonesian Banking Expo* (IBEX)**

OJK bekerja sama dengan Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) telah melaksanakan *Indonesia Banking Expo* (IBEX) Tahun 2017 di *Jakarta Convention Center* (JCC). Pelaksanaan IBEX tahun 2017 ini bertema “Transformasi Industri Perbankan terhadap Revolusi Teknologi Digital”. *Booth* OJK sebagai media edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat selama pameran berlangsung telah dikunjungi kurang lebih sebanyak 299 pengunjung. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh *booth* OJK antara lain: kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam bentuk pemberian informasi kepada para pengunjung *booth* melalui berbagai brosur dan *flyer* serta tayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), layanan *Financial Customer Care* (FCC), dan berbagai *games* menarik antara lain penyusunan puzzle SiKAPI Uangmu, kuis pertanyaan berhadiah dan permainan alat peraga SiKAPI Uangmu.

Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama dan Diskusi Terbatas OJK – Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung

Sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan khususnya terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, OJK melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Bersama (SPB) dengan Sekolah Bisnis Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB) di Bandung.

Ruang lingkup kerja sama antara OJK dengan SBM-ITB meliputi Rencana pembentukan Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan (PRLIK), Penyelenggaraan kuliah umum secara reguler, Pelaksanaan FGD, Pelaksanaan Kajian Literasi dan Inklusi Keuangan, serta *Outreach* program melalui *Training for Trainers* (ToT) tematik bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata dan *Training for Communities* (ToC) perencanaan keuangan bagi masyarakat. Kegiatan penandatanganan SPB

Sosialisasi POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan di Surabaya dan di Makassar

Sepanjang triwulan III-2017, OJK menyelenggarakan dua kali sosialisasi mengenai POJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan di Surabaya dan di Makassar. Pelaksanaan sosialisasi di Surabaya diawali dengan konferensi pers oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dan dihadiri 26 wartawan dari media cetak dan elektronik. Jumlah peserta yang hadir dalam sosialisasi ini kurang lebih 270 peserta yang merupakan perwakilan dari industri jasa keuangan, akademisi, dan masyarakat umum di wilayah Jawa Timur serta internal OJK. Dalam sosialisasi ini materi yang disampaikan adalah terkait literasi dan inklusi keuangan.

Sedangkan sosialisasi di Makassar dilaksanakan dengan tema “Kesiapan Industri Jasa Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia” dengan salah satu narasumber yaitu Anggota Komisi XI DPR RI. Sosialisasi ini dihadiri oleh 170 peserta.

Tujuan diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait peraturan POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Literasi dan Inklusi Keuangan, memberikan *awareness* kepada pelaku usaha jasa keuangan tentang pentingnya literasi keuangan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk merubah sikap dan perilaku keuangan masyarakat menjadi lebih baik. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan PUJK dapat melakukan perluasan akses terhadap lembaga jasa keuangan masyarakat melalui berbagai bentuk program dan kegiatan serta inovasi produk dan layanan jasa keuangan.

Focus Group Discussion “Bentuk Pengaturan Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan”

OJK menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Bentuk Pengaturan Mekanisme Penanganan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan” di Bandung. FGD

dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan atas rencana penyusunan RPOJK Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dalam berbagai sudut pandang yaitu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, hukum, ekonomi, dan industri jasa keuangan. FGD dihadiri oleh seluruh perwakilan industri dari sektor perbankan, pasar modal dan IKNB.

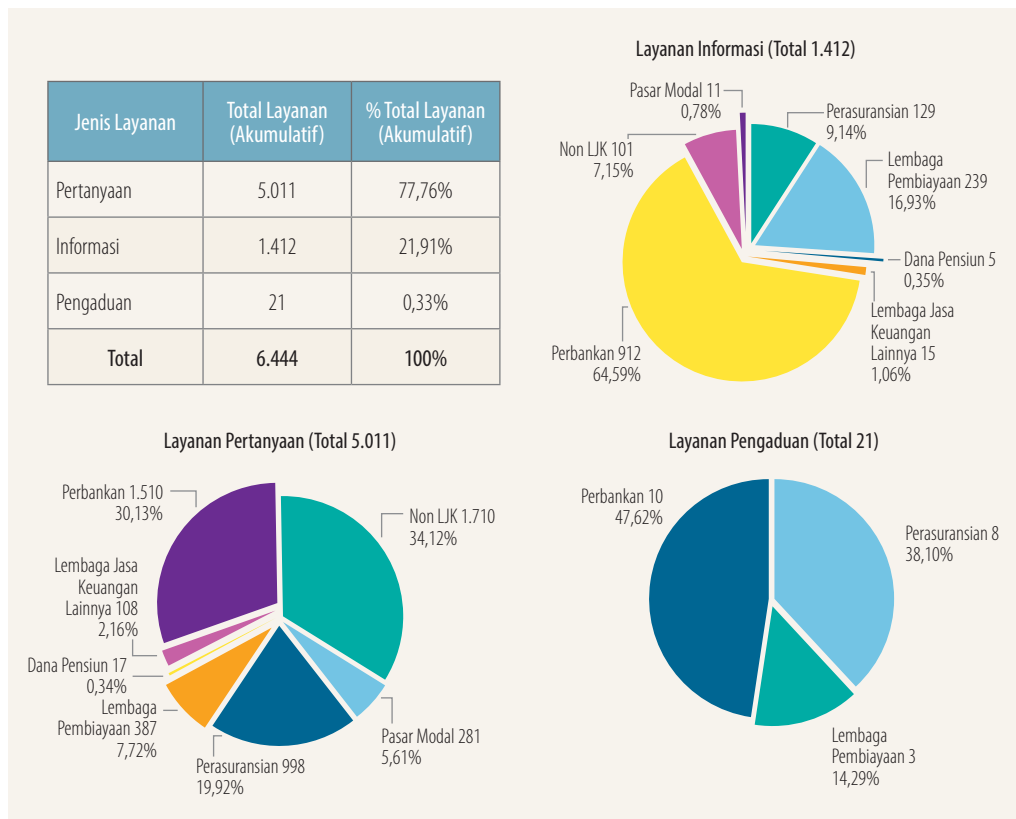
2.5.3 Perlindungan Konsumen

Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) memberikan manfaat bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Pada triwulan III-2017, layanan konsumen OJK menerima 6.444 layanan yang terdiri dari 1.412 informasi, 5.011 pertanyaan dan 21 pengaduan. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 33,6% (1.622 layanan) dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan sektornya, persentase layanan informasi terdiri dari sektor perbankan sebesar 64,6%, sektor IKNB sebesar 27,5%, dan sektor pasar modal sebesar 0,8%, serta lain-lain sebesar 7,2%. Secara substansi, layanan informasi terbanyak pada sektor perbankan terkait Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan yaitu sebesar 34,8%, pada sektor IKNB adalah terkait Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan pada lembaga pembiayaan sebesar 19,3%, dan pada sektor pasar modal terkait Perizinan Profesi dan Jasa Penunjang sebesar 27,2%. Sedangkan pada sektor lain-lain, substansi informasi terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai Pelayanan Non LJK (40,6%) dan Legalitas Perusahaan non LJK (21,8%). Sampai dengan bulan September 2017, tingkat penyelesaian layanan informasi yang diterima selama triwulan III-2017 adalah sebesar 77,9%.

Untuk layanan pengaduan, terdapat 31 layanan yang masuk yaitu pada sektor perbankan, IKNB dan pasar modal. Pada sektor perbankan terbanyak yaitu mengenai Pelaporan Sistem Informasi Debitur. Pada Sektor IKNB terbanyak

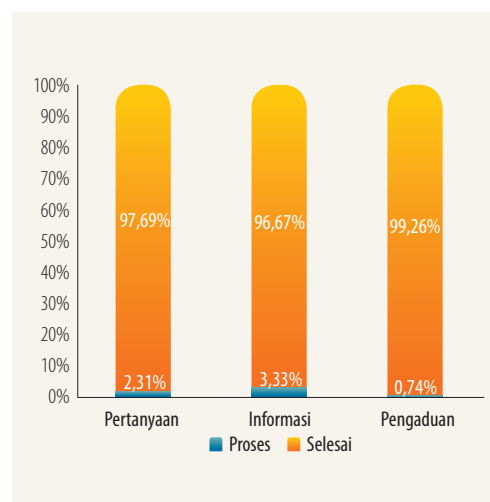
Grafik II - 10 Layanan Per Sektor (Triwulan III-2017)


Sumber: OJK

yaitu mengenai Penolakan Pencairan Klaim, pada sektor pasar modal terdapat pengaduan mengenai Pemindahan Efek.

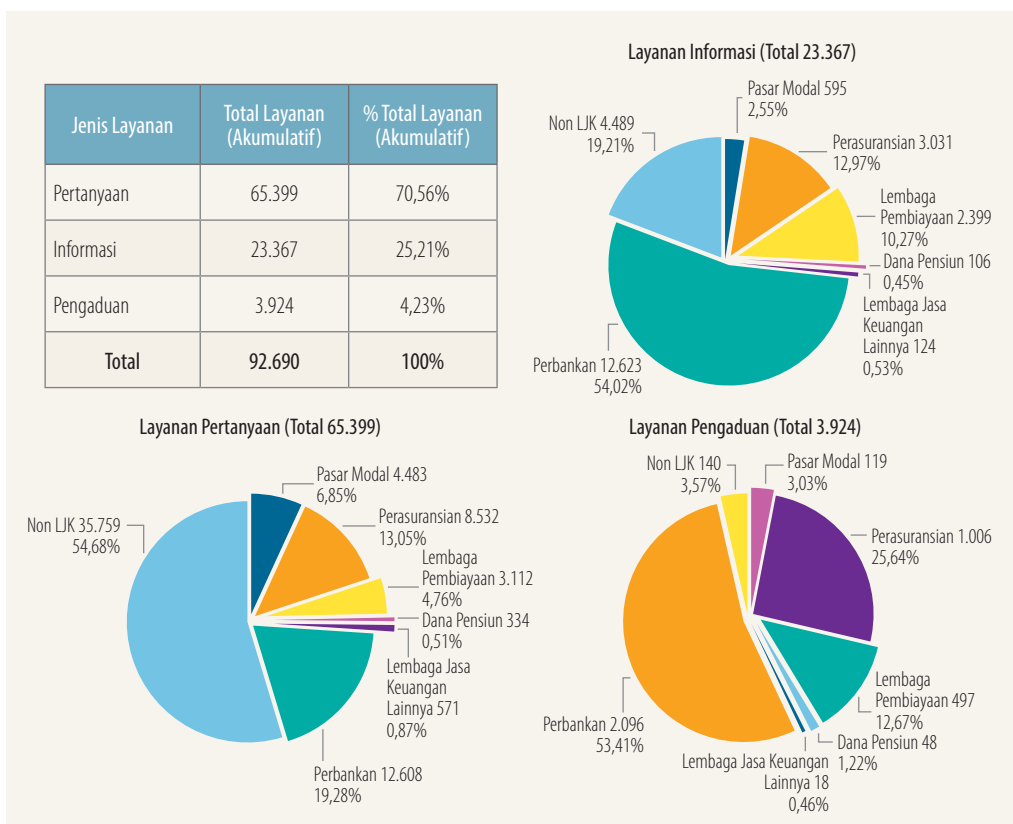
Pada layanan pertanyaan, dari sektor perbankan adalah sebesar 30,1%, sektor IKNB sebesar 30,1%, dan sektor pasar modal sebesar 5,6%, serta kategori lain-lain, yaitu sebesar 34,1%. Pertanyaan terbanyak pada sektor perbankan adalah terkait Peraturan Perbankan sebesar 8,1%, pada sektor IKNB adalah terkait Legalitas LJK dan Produk sebesar 46,2%, dan pada sektor pasar modal terkait Legalitas LJK dan Produk sebesar 22,1%. Pada kategori lain-lain substansi pertanyaan terkait dengan sektor jasa keuangan yang paling banyak disampaikan adalah mengenai Legalitas Non LJK sebesar 65,8%.

Secara akumulatif periode laporan, tingkat penyelesaian layanan informasi adalah sebesar 96,7% (22.589 layanan), layanan pertanyaan sebesar 97,7% (63.890 layanan), serta layanan pengaduan mencapai 99,3% (3.895 pengaduan).

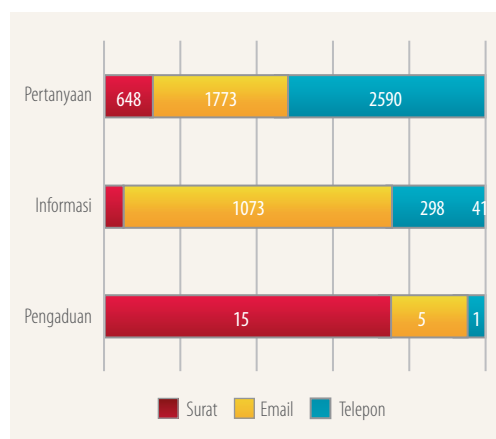
Grafik II - 11 Tingkat Penyelesaian Layanan (akumulasi 2013- Triwulan III-2017)


Sumber: OJK

Guna mempermudah konsumen dan/atau masyarakat dalam mengakses layanan konsumen, OJK menyediakan berbagai kanal penerimaan layanan antara lain melalui media email, telepon maupun surat.

Grafik II - 12 Layanan Per Sektor (akumulasi 2013 - Triwulan III-2017)


Sumber: OJK

Grafik II - 13 Kanal Layanan


Sumber: OJK

Berdasarkan grafik kanal layanan penerimaan triwulan III-2017, layanan pertanyaan, konsumen dan/atau masyarakat lebih banyak

mempergunakan kanal telepon dibandingkan email dan surat. Sedangkan untuk layanan informasi dan layanan pengaduan terbanyak adalah melalui kanal surat.

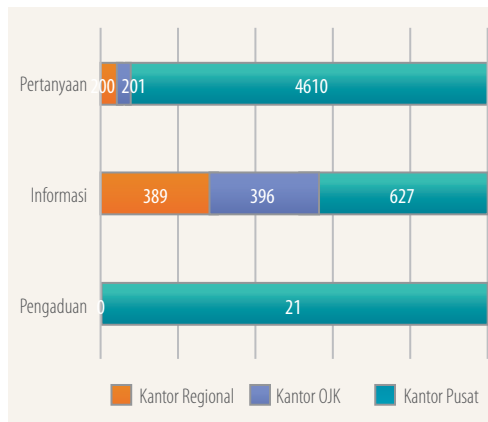
Tabel II - 41 Penerimaan Layanan per *Business Unit*

Penginput	Total Layanan
Kantor Pusat	5.258
Kantor Regional	589
Kantor OJK	597
Total	6.444

Sumber: OJK

Guna meningkatkan aksesibilitas layanan konsumen, OJK memberikan tugas dan kewenangan kepada seluruh Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menerima dan menangani layanan konsumen.

Grafik II - 14 Perbandingan Penerimaan Layanan Berdasarkan Satuan Kerja



Sumber: OJK

Berdasarkan tabel penerimaan layanan, secara total satuan kerja di Kantor Pusat menerima layanan konsumen terbanyak yaitu sebesar 81,6% dari total penerimaan layanan pada triwulan III-2017.

Asistensi Layanan Konsumen OJK

Sepanjang triwulan III-2017, OJK melakukan dua kali asistensi Layanan Konsumen OJK yaitu di Yogyakarta dan di Surabaya. Kegiatan berlangsung dengan sesi pemaparan materi tentang mekanisme dan alur kerja layanan konsumen OJK, penggunaan sistem layanan konsumen OJK serta bedah kasus. Asistensi ini dilakukan dengan tiga tujuan yaitu mensosialisasikan ketentuan penanganan Layanan Konsumen Terintegrasi OJK sesuai Perubahan PDK No.1/PDK.07/2016, mengembangkan kemampuan penanganan dan penyelesaian pengaduan bagi pegawai OJK guna mendukung percepatan penanganan pengaduan serta untuk meningkatkan pemahaman tentang tata cara penggunaan Sistem Layanan Konsumen OJK/CRM.

Sosialisasi Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Sepanjang triwulan III-2017, OJK melakukan sosialisasi Sistem Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI) di Jakarta. Sosialisasi ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang berasal dari PUJK Perbankan, Asuransi,

dan Perusahaan Pembiayaan serta internal OJK. Materi yang disampaikan kepada peserta mencakup latar belakang dan dasar hukum laporan SIPEDULI, pentingnya penyelesaian sengketa di internal PUJK dan penyelesaian sengketa alternatif (LAPS), tata cara penyampaian laporan, batas waktu penyampaian laporan serta manfaat dan tujuan laporan SIPEDULI (Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan). Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada PUJK terhadap pentingnya penyampaian laporan SIPEDULI serta manfaat dan kegunaan laporan tersebut bagi PUJK dan OJK.

Sosialisasi Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK)

Selama triwulan III-2017, OJK melakukan dua kali sosialisasi Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) di Yogyakarta dan Jakarta. Sosialisasi diikuti oleh kurang lebih 100 peserta di Yogyakarta dan 150 peserta di Jakarta. Peserta sosialisasi ini terdiri dari perwakilan PUJK, asosiasi PUJK serta internal OJK. Materi yang disampaikan mencakup visi dan misi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, latar belakang dan dasar hukum, penjabaran 4 pilar utama SPKK yaitu Infrastruktur, Regulasi, *Market Conduct*, serta Edukasi dan Komunikasi. Selain itu, disampaikan juga mengenai target dan strategi tiap-tiap pilar SPKK. Tujuan dari diadakannya sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman bahwa SPKK merupakan salah satu perangkat untuk memastikan agar 5 prinsip perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 terlaksana dengan baik.

Talk Show Perlindungan Konsumen

Sepanjang triwulan III-2017, OJK melakukan *talk show* di radio Sindotrijaya 104,6FM Jakarta dengan tema "Bijak Berinvestasi". *Talk show* ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat lebih paham dan semakin berhati-hati dalam memanfaatkan produk dan jasa keuangan. Materi yang disampaikan dalam *talk show* mencakup tips, kegunaan, dan manfaat produk dan jasa keuangan dalam hal ini adalah produk

dan jasa keuangan untuk berinvestasi. *Talk show* berlangsung selama satu jam dengan sesi tanya jawab aktif yang disampaikan oleh penyiar serta *sharing* pengalaman oleh pendengar radio.

Koordinasi antara Ombudsman dan OJK

Sebagai institusi yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, OJK bersama dengan Ombudsman melakukan pertemuan secara rutin sebagai bentuk pengawasan Ombudsman apabila dalam hal terdapat dugaan maladministrasi dalam pada penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh OJK. Pertemuan ini juga merupakan salah satu tindak lanjut dari kerja sama antara OJK dan Ombudsman dalam rangka melancsar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK dan Ombudsman sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. Dalam pertemuan kali ini OJK dan Ombudsman membahas tentang tindak lanjut penanganan beberapa pengaduan masyarakat selaku konsumen dengan kesimpulan bahwa beberapa pengaduan masyarakat selaku konsumen tersebut telah diselesaikan oleh OJK, sementara sebagian lainnya masih dalam penanganan yaitu proses klarifikasi kepada PUJK dan koordinasi dengan pengawas PUJK yang bersangkutan. Dengan adanya pertemuan rutin antara OJK dan Ombudsman diharapkan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dicegah sedini mungkin.

Investor Alert Portal

OJK melakukan *update* berkala terhadap *list* investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK dalam *Investor Alert Portal* (IAP). Daftar entitas dalam IAP bersumber dari hasil identifikasi dan verifikasi atas informasi dan/atau pertanyaan masyarakat kepada OJK melalui layanan konsumen OJK *Financial Customer Care* (FCC). Di samping itu, IAP juga mencantumkan entitas yang secara resmi telah dihentikan kegiatannya oleh Satuan Tugas Waspada Investasi.

Selama triwulan III-2017 terdapat 10 entitas baru yang diunggah, sehingga sampai dengan September 2017 terdapat 114 entitas telah masuk dalam IAP. IAP dapat diakses melalui *minisite* sikapiuangmu.ojk.go.id atau *mobile apps* Sikapiuangmu yang tersedia di *Playstore* dan *Apple Store*.

IAP merupakan salah satu upaya preventif OJK untuk mencegah potensi kerugian konsumen dan masyarakat akibat praktik investasi yang tidak jelas legalitasnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat dalam menyikapi penawaran investasi dengan keuntungan yang terlalu atraktif dan cenderung tidak masuk akal.

Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan investasi pada entitas yang namanya tercantum dalam IAP tersebut. Selain itu, OJK juga mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait penawaran investasi sejenis melalui telepon 1500-655, email konsumen@ojk.go.id, atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

2.5.4 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Sosialisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

Pada triwulan III-2017, OJK melaksanakan sosialisasi sebanyak dua kali dengan tema "Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagai Forum Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan". Dalam sosialisasi tersebut, OJK menghadirkan narasumber yang berasal dari enam LAPS, akademisi, dan internal OJK yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Peserta yang hadir kurang lebih 160 di Medan dan 250 di Bali yang terdiri dari perwakilan pelaku usaha jasa keuangan, akademisi dan mahasiswa.

Beberapa pokok materi yang disampaikan di antaranya adalah mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Internal Dispute Resolution* (IDR), aspek perlindungan konsumen dalam proses bisnis PUJK, kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan kekuatan hukum putusan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan khususnya LAPS, pengenalan secara umum terkait LAPS, prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa melalui layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, serta sharing kasus yang pernah ditangani oleh LAPS. Sosialisasi berlangsung dengan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan narasumber sehingga diharapkan pemahaman peserta mengenai penyelesaian sengketa dapat meningkat dan dapat mendorong pelaku usaha jasa keuangan untuk menggunakan LAPS sebagai forum penyelesaian sengketa.

Capacity Building Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

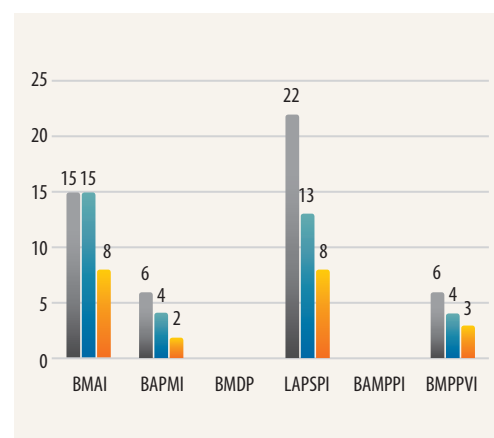
OJK mengadakan satu kali sertifikasi mediator yang dilaksanakan di Medan dan satu kali pelatihan adjudikator dan arbiter di Jakarta. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemberian manfaat balik kepada LAPS agar dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) mediator di daerah dan adjudikator serta arbiter di pusat. Kegiatan *capacity building* sertifikasi mediasi diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Pusat Mediasi Nasional, sedangkan pelatihan adjudikasi dan arbitrase dilakukan oleh Institut Arbiter Indonesia. Peserta berjumlah kurang lebih 20 orang yang terdiri dari akademisi, perwakilan LAPS, dan internal OJK dengan satuan kerja terkait. Mengingat bahwa seluruh LAPS berpusat di Jakarta dan belum memiliki cabang, maka melalui kegiatan sertifikasi mediator ini diharapkan dapat mempermudah akses konsumen di daerah untuk memperoleh layanan LAPS dan LAPS dapat menghemat biaya perjalanan dinas.

Monitoring Laporan Penyelesaian Sengketa oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 54/POJK.07/2016 tentang *Monitoring* Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, LAPS menyampaikan laporan penyelesaian sengketa secara berkala setiap enam bulan sekali paling lambat tanggal 10 Juli dan 10 Januari tahun berikutnya.

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SIPEDULI), LAPS telah menyampaikan laporan penyelesaian sengketa yang dilakukan pada semester I-2017. Selama periode laporan, permohonan penyelesaian sengketa terbanyak diterima oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) yaitu sejumlah 22 permohonan. Selanjutnya, LAPS yang menyelesaikan sengketa terbanyak adalah LAPSPI dan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Hal tersebut sejalan dengan statistik pengaduan yang diterima oleh OJK bahwa pengaduan terbanyak diterima oleh sektor perbankan dan sektor perasuransian, sementara untuk sektor penjaminan dan dana pensiun tidak terdapat pengaduan dan permohonan penyelesaian sengketa kepada kedua LAPS sektor tersebut pada periode pelaporan.

Grafik II - 15 Penyelesaian sengketa LAPS Semester I-2017



2.5.5 Market Conduct

Pilot Project Implementasi Pengawasan Market Conduct dan Prudential

Selama triwulan III-2017, harmonisasi dalam implementasi pengawasan *market conduct* dengan pengawasan *prudential* semakin nyata. Hal ini dibuktikan dengan implementasi pengawasan *market conduct* secara tematik bersama dengan pengawas *prudential* di daerah. Objek pemeriksaan dari pengawas *market conduct* dan *prudential* adalah bank pembangunan daerah.

Target *pilot project* pemeriksaan tematik *market conduct* hingga akhir 2017 sebanyak tujuh bank pembangunan daerah, di mana sampai dengan triwulan III-2017 ini pemeriksaan tersebut sudah terlaksana di lima bank pembangunan daerah. Pemeriksaan tematik *market conduct* mengambil tema tentang “aspek perlindungan konsumen pada perjanjian baku”. Secara umum, pemeriksaan tematik *market conduct* melihat klausula/konten dan format perjanjian baku untuk memastikan kepatuhan bank pembangunan daerah sesuai ketentuan POJK No. 1 Tahun 2013 baik dari aspek kebijakan, implementasi dan evaluasi terhadap perjanjian baku dengan mempertimbangkan *product life cycle*.

Hasil pemeriksaan pengawasan *market conduct* akan ditindaklanjuti oleh OJK dalam bentuk *monitoring* pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan dan diharapkan dapat menjadi pelengkap/komplemen bagi pengawasan industri jasa keuangan secara komprehensif.

Pelaksanaan Asistensi Implementasi Pengawasan Market Conduct

Implementasi pengawasan *market conduct* merupakan upaya memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dalam mewujudkan budaya *treat customer fairly* pelaku usaha jasa keuangan sehingga diharapkan dapat

meningkatkan kepercayaan konsumen dan masyarakat (*market confidence*). Dalam rangka memperoleh pemahaman yang sama di antara pengawas di kantor pusat dan daerah, diperlukan asistensi implementasi pengawasan *market conduct*. Tujuannya adalah untuk mengenalkan dan menerapkan konsepsi pengawasan *market conduct* kepada para pengawas di daerah melalui kegiatan asistensi pengawasan *market conduct* dan *on-site supervision* pelaku usaha jasa keuangan yang ada di wilayahnya.

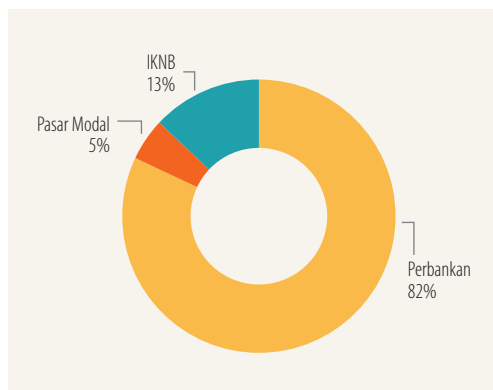
Pelaksanaan kegiatan asistensi implementasi pengawasan *market conduct* direncanakan hingga akhir 2017 di tujuh kantor OJK di daerah. Sampai dengan akhir triwulan III-2017, kegiatan asistensi telah dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara.

Pemantauan Iklan Triwulanan

Melalui Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen (SIPMI), OJK memantau iklan dan penawaran produk dan layanan jasa keuangan. *Monitoring* yang dilaporkan secara triwulanan ini mencakup iklan yang dipublikasikan melalui media cetak nasional dan lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Selama periode laporan, OJK mencatat sebanyak 180 iklan berkaitan dengan produk/jasa keuangan, yang terdiri dari Perbankan sebesar 82% (148 iklan), disusul oleh sektor IKNB sebesar 13% (24 iklan) dan Pasar Modal sebesar 5% (8 iklan). Hal ini diduga karena segmentasi konsumen Perbankan lebih luas, sehingga iklan melalui media cetak dilakukan besar-besaran. Sementara itu, pasar modal cenderung memiliki segmentasi pasar tertentu, sehingga pemasaran pasar modal melalui iklan media cetak konvensional cenderung terbatas. Lima besar produk yang banyak dipasarkan melalui iklan berturut-turut adalah kredit/pinjaman, *e-money*, pembiayaan mobil, Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), dan tabungan.

Grafik II - 16 Persentase Iklan Per Sektor

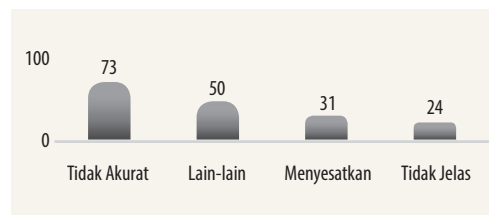


Dari seluruh iklan tersebut, 66% (119 iklan) patut diduga melanggar SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Dugaan pelanggaran terbanyak ditemukan pada iklan Sektor IKNB sebesar 96% disusul Sektor Perbankan sebesar 65%. Dugaan pelanggaran Sektor Perbankan relatif lebih kecil diduga selain karena *awareness* PUJK Sektor Perbankan terhadap implementasi POJK nomor 1 Tahun 2013 dan SEOJK Nomor 12 Tahun 2014 relatif lebih tinggi, juga karena iklannya lebih banyak dan beragam. PUJK Sektor IKNB cenderung menggunakan materi iklan yang sama untuk diiklankan berkali-kali di berbagai media.

Sementara itu, tidak ditemukan dugaan pelanggaran pada Sektor Pasar Modal. Selain keberagaman dan jumlah iklan yang relatif kecil, penerapan *market conduct* di Sektor Pasar Modal diduga juga menjadi salah satu penyebab tingginya *awareness* PUJK Pasar Modal terhadap perlindungan konsumen. Iklan Sektor Pasar Modal bahkan memiliki *disclosure* terkait risiko atas pembelian produk.

Kriteria yang paling banyak dilanggar berturut-turut adalah tidak akurat (41%), lain-lain (28,1%), menyesatkan (17,4%), dan tidak jelas (13,5%).

Grafik II - 17 Kategori Pelanggaran



Dari jumlah pelanggaran per kategori, dapat dilihat bahwa satu iklan cenderung melanggar lebih dari satu kategori pelanggaran. Ketatnya persaingan menyebabkan PUJK cenderung mengklaim produk dan/atau layanannya sebagai yang terbaik dan menjanjikan keamanan, kemudahan, dan lain-lain kepada konsumen tanpa disertai referensi perbandingan yang akurat dari PUJK lain. Padahal, hal ini menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih produk dan harus bisa dipertanggungjawabkan.

2.6 PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan selama periode laporan, OJK secara berkesinambungan berupaya memenuhi infrastruktur baik dari segi sumber daya manusia sesuai dengan formasi efektif, penyempurnaan ketentuan pelaksanaan penyidikan dan perumusan Nota Kesepakatan dan kebijakan di bidang tindak pidana sektor jasa keuangan.

2.6.1 Koordinasi dengan Instansi Terkait

Dalam rangka memperkuat langkah penyidikan dan dalam rangka membangun sistem peradilan pidana yang kredibel, OJK secara aktif menggelar koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait antara lain Kejaksaan RI, LPS, dan PPATK.

2.6.2 Penanganan Perkara

Pada periode pelaporan, berdasarkan kriteria prioritas, OJK menerbitkan 10 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari delapan perkara Perbankan (enam perkara BPR dan dua perkara BPD), satu perkara Pasar Modal dan satu perkara Asuransi. Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK melimpahkan empat berkas perkara perbankan (tiga perkara BPR dan satu perkara BPD) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI dan selanjutnya empat berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI. Atas P-21 tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

2.6.3 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi)

Satgas Waspada Investasi dibentuk mengingat maraknya ajakan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada produk investasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan variasi, jenis dan bentuk serta sasaran yang makin beragam. Kesadaran akan semakin berkembangnya industri jasa keuangan saat ini, menuntut pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat menghasilkan deteksi dini terhadap kegiatan investasi yang diduga telah merugikan banyak masyarakat.

2.6.4 Sosialisasi Satgas Waspada Investasi dan Pembekalan Tim Kerja SWID

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau *focus group discussion* mengenai tawaran penempatan dana dengan janji tingkat keuntungan yang tinggi dan perlu diwaspadai.

Pada periode pelaporan, Satgas Waspada Investasi telah melaksanakan program sosialisasi waspada investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat di tiga kota yaitu Lampung, Mataram dan Yogyakarta.

Selanjutnya di Triwulan III-2017, telah dilaksanakan kegiatan pembekalan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Daerah di Banjarmasin, Kupang, Mataram dan Yogyakarta.

2.6.5 Penanganan Perkara Investasi oleh Satgas Waspada Investasi

Pada periode pelaporan di triwulan III-2017, OJK dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 16 kegiatan usaha yang diduga ilegal. Dengan demikian selama 2017 sudah terdapat 48 Entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya. Selanjutnya yang telah diproses hukum oleh pihak Kepolisian di 2017 adalah sebanyak 12 Entitas.

2.7 PENANGANAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

2.7.1 Pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (pre-MER) Indonesia tahun 2017

Pentingnya pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) 2017 oleh Indonesia memiliki tujuan utama yaitu Indonesia masuk menjadi

anggota *Financial Action Task Force* (FATF) yaitu sebuah badan antar pemerintah yang tujuannya mengembangkan dan mempromosikan kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Organisasi yang berpusat di Paris, Perancis ini sebelumnya pernah mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang rawan pencucian uang dan pendanaan terorisme dan masuk ke dalam daftar hitam. Namun pada Februari tahun lalu, FATF mencabut status *blacklist* tersebut dari Indonesia.

Bahwa bergabungnya Indonesia sebagai anggota FATF adalah penting. Terdapat empat alasan urgensi mengapa Indonesia wajib menjadi anggota FATF, yaitu Pertama, Indonesia adalah satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota FATF, kedua Indonesia perlu berperan aktif secara langsung dalam penyusunan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT), ketiga, Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk menyampaikan penjelasan secara langsung atas penilaian kepatuhan Indonesia atas FATF *Standard* dalam pencegahan TPPU dan TPPT, dan keempat, Indonesia perlu berperan aktif secara langsung atas penilaian kepatuhan suatu negara atas FATF *Standard* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Salah satu poin utama jika ingin bergabung dengan FATF adalah memenuhi *Mutual Evaluation Review* (MER). FATF telah menetapkan 40 rekomendasi yang harus dipenuhi Indonesia jika ingin bergabung dengan FATF. Sebagaimana diketahui oleh FATF, adalah pihak yang mengeluarkan dan menetapkan rekomendasi dan standar internasional di bidang pencucian uang dan pendanaan terorisme yang disebut dengan FATF *Recommendations*.

FATF juga membentuk *Asian Pacific Group* (APG) yang merupakan salah satu dari FATF *Style Regional Bodies* (FSRB), sehingga setiap anggota APG termasuk Indonesia wajib untuk memenuhi rekomendasi FATF dan secara berkala dilakukan penilaian secara *peer-to-peer review* oleh sesama

negara anggota APG terkait pemenuhan rekomendasi-rekomendasi FATF dan efektifitas pelaksanaannya.

Pelaksanaan *On-Site* MER akan dilakukan dengan menghadirkan Tim Evaluator dari *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) pada periode selanjutnya. Nantinya, laporan tersebut akan disampaikan pada kegiatan *APG Plenary* pada Mei 2018, apabila laporan MER baik maka kemungkinan besar Indonesia akan ditetapkan sebagai anggota FATF. Tim evaluator dari APG akan menilai sejauh mana kepatuhan pemerintah terhadap berbagai kegiatan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Terdapat tiga dampak positif apabila Indonesia meraih hasil positif dari penilaian evaluator APG. Pertama, Indonesia akan sejajar dengan negara-negara G-20, kedua, hasil evaluasi yang baik akan mendorong peningkatan *rating investment grade* Indonesia, dan ketiga, memberikan sinyal kuat tentang komitmen Indonesia terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Sebagai rangkaian pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) terhadap Indonesia yang menilai kecukupan peraturan dan ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) terhadap Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) dan *Technical Compliance* (TC) dan menilai efektivitas implementasi atau *Immediate Outcome* (IO) terhadap peraturan dan ketentuan APU PPT yang diterapkan di Indonesia, pada tanggal 12 hingga 15 September 2017 OJK telah melaksanakan kegiatan pre-MER oleh para pihak evaluator yang bertempat terpusat di Gedung Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan dokumen *1st draft technical compliance* (TC) annex Indonesia dan persiapan *on-site visit* MER yang akan dilaksanakan pada bulan November 2017. OJK berpartisipasi aktif dalam lima sesi pertemuan dengan evaluator. Selanjutnya, OJK bersama dengan pelaku sektor jasa keuangan secara intens mempersiapkan pelaksanaan *on-site visit*

tersebut di atas, khususnya pengumpulan data dan dokumen pendukung penerapan program APU PPT.

2.7.2 Penyusunan Laporan *Sectoral Risk Assessment* (SRA)

Sebagai bentuk nyata komitmen Indonesia terhadap implementasi Rekomendasi No. 1 FATF, Indonesia melaksanakan penilaian risiko terhadap TPPU dan TPPT dalam bentuk penyusunan *National Risk Assessment* (NRA) yang telah selesai dilakukan pada 2015. NRA yang telah disusun sangat membantu dalam memetakan risiko pencucian uang yang terjadi di Indonesia, guna mendukung upaya mitigasi risiko yang dituangkan dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Stranas). Salah satu rekomendasi yang cukup penting dalam Stranas ialah perlu dilakukannya penilaian risiko TPPU di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment on Money Laundering* (SRA), termasuk SRA di sektor jasa keuangan.

Kehadiran SRA sektor jasa keuangan merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU. Bagi industri di sektor jasa keuangan, SRA sektor jasa keuangan ini akan sangat membantu kegiatan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU yang dihadapi dalam rangka penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*). Di sisi lain, bagi OJK sebagai pengawas di sektor jasa keuangan, SRA ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based supervision*). Secara umum, bagi industri jasa keuangan dan OJK, SRA sektor jasa keuangan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan skala prioritas terkait pengalokasian sumber daya pada area yang memiliki tingkat risiko TPPU lebih tinggi.

Menindaklanjuti hal tersebut, pada periode pelaporan, OJK melakukan penyusunan SRA sektor jasa keuangan dengan dibantu oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). SRA Sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis sumber ancaman, kerentanan, kecenderungan, dan dampak pencucian uang yang terjadi pada sektor jasa keuangan di Indonesia; dan
2. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko TPPU yang terjadi pada sektor jasa keuangan di Indonesia, mencakup pemetaan risiko menurut jenis profil Nasabah, produk/ layanan perbankan, wilayah, *distribution channel*, dan modus operandi.

Melalui penyusunan SRA sektor jasa keuangan ini, diharapkan dapat dihasilkan *output* yang membantu dalam hal sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat ancaman, kerentanan, kecenderungan, dan dampak pencucian uang yang terjadi pada sektor jasa keuangan;
2. Mengetahui skala prioritas mitigasi risiko TPPU pada sektor jasa keuangan, yang terbagi menjadi risiko TPPU menurut jenis profil Nasabah, produk/layanan perbankan, wilayah, *distribution channel*, dan modus operandi; dan
3. Penentuan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilakukan oleh OJK sebagai LPP dan PJK di sektor jasa keuangan sebagai Pihak Pelapor, dengan melakukan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*).

Penyusunan SRA telah sampai pada tahap analisis yang merupakan kelanjutan dari tahapan identifikasi risiko menggunakan variabel ancaman, kerentanan, dan dampak. Dalam tahapan ini dilakukan analisis risiko yang teridentifikasi guna memahami sifat, sumber, kemungkinan, dan konsekuensi dalam rangka menetapkan nilai relatif untuk masing-masing risiko.

2.7.3 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester I-2017

Sebagai bagian pertanggungjawaban OJK sebagai LPP dalam pelaksanaan pengawasan program APU PPT, OJK telah menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Program APU PPT Sektor Jasa Keuangan Semester I-2017. Laporan ini menggambarkan hasil pengawasan program APU PPT secara historis untuk Sektor Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB, yang mencakup juga data statistik terkait hasil pengawasan program APU PPT terhadap PMPJ dan kewajiban pelaporan (TKM, TKT, dan TKL), hasil analisis sekaligus rekomendasi dalam rangka penguatan pengawasan APU PPT sektor jasa keuangan. Laporan tersebut dapat menjadi salah satu referensi untuk memperkuat fungsi pengawasan untuk jangka waktu ke depan terhadap penerapan program APU PPT bagi SJK terkait, dan sejalan dengan Rekomendasi 33 FATF, di mana suatu Obligasi negara harus memiliki statistik yang komprehensif terkait hal-hal yang relevan dengan efektivitas dan efisiensi sistem APU PPT.

2.7.4 Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sebagai kelanjutan dari rangkaian program pengembangan kapasitas sumber daya manusia, baik bagi pengawas APU PPT di internal OJK maupun bagi pelaku industri jasa keuangan, dalam periode laporan telah dilakukan beberapa kegiatan pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan maupun *workshop* sebagai berikut:

1. *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko kepada Industri Perbankan, Pasar Modal dan IKNB. Berdasarkan POJK APU PPT, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi, penilaian dan memahami risiko Tindak Pidana Pencucian

Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU dan TPPT). Dalam rangka membantu industri perbankan, pasar modal dan IKNB untuk menerapkan program APU PPT, OJK menyelenggarakan *workshop* pendampingan bagi PJK di tiga sektor jasa keuangan.

Workshop pendampingan memaparkan materi penerapan APU PPT berbasis risiko sekaligus memberikan simulasi dan studi kasus sehingga dapat membantu PJK segera mengimplementasikan ketentuan baru tentang penerapan program APU PPT berbasis risiko secara efektif.

Pelaksanaan *workshop* ini diselenggarakan dalam tiga *batch*, yaitu:

Tabel II - 42

Pelaksanaan *Workshop* Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko

No	Industri	Kuota	Tempat Pelaksanaan
1	Perbankan	50 Peserta	Jakarta
2	Pasar Modal	50 Peserta	Jakarta
3	IKNB	50 Peserta	Jakarta

2. *In-House Training* (IHT) Internalisasi *National Risk Assessment* TPPU/TPPT dan Tindak Pidana Asal Terbesar – Korupsi, Narkotika, dan Perpajakan – dalam Rangka Penguatan Pengawasan Program APU PPT bagi Pengawas SJK kepada Pengawas.

Sebagai tindak lanjut dari Penilaian Risiko Nasional terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (*National Risk Assessment*), OJK menyelenggarakan IHT kepada pengawas di internal OJK di Jakarta, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pengawas sektor jasa keuangan dalam melakukan penilaian terkait risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dari penyedia jasa keuangan.

Dalam IHT tersebut diundang narasumber dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan (DJP) untuk memberikan paparan mengenai tiga tindak pidana asal yang memiliki risiko tinggi terhadap TPPU. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut meliputi 60 pengawas dari seluruh sektor jasa keuangan.

3. Pelaksanaan Program Sertifikasi untuk Pengawas pada Sektor Jasa Keuangan. Program sertifikasi ini merupakan agenda rutin dalam memberikan pembekalan kepada pengawas khususnya materi pengawasan penerapan program APU PPT. Dalam rangka meningkatkan kualitas atau kompetensi dari pengawas APU PPT, OJK merancang sertifikasi level 2 dengan fokus pada pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan dari PJK, antara lain identifikasi transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. Modul program sertifikasi yang disusun ini direncanakan akan dilaksanakan dalam dua *batch* di Oktober 2017.
4. Sosialisasi Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Pada periode laporan ini, OJK melakukan sosialisasi kepada penyedia jasa keuangan di Yogyakarta, Makassar, dan Bandung.

2.8 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Sesuai dengan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan OJK sebagai lembaga negara tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Kedudukan OJK juga tidak sama dengan Kementerian, mengingat kedudukan OJK yang berada di luar pemerintahan. Adapun status dan kedudukan khusus tersebut diperlukan agar OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang independen. Walau demikian, OJK tetap memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar lembaga dengan DPR, BPK, Pemerintah, BI, LPS, serta pihak lainnya.

2.8.1 Kerja sama Domestik

OJK secara aktif mengadakan koordinasi antar lembaga dengan tujuan menjalin kerja sama strategis yang dapat mendukung pencapaian OJK di masa mendatang. Selama periode triwulan III-2017, OJK telah melakukan penandatanganan kerja sama domestik sebagai berikut:

Tabel II - 43

Hubungan Kerja Sama Domestik OJK

Tanggal	Kerja sama Domestik	Ringkasan Kerja sama
12 Juli 2017	Nota Kesepahaman dengan Universitas Udayana	Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Pengembangan <i>Bali Centre for Sustainable Finance</i>

Di samping penandatanganan kerja sama antar lembaga, OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 25 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan mencakup antara lain *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai perkembangan kondisi sektor jasa keuangan di Indonesia pada Semester II-2017 dan sosialisasi program kerja ADK OJK periode 2017-2022, peran OJK menghadang laju investasi bodong, program pengembangan keuangan guna menggerakkan ekonomi daerah, UKM dalam Spirit Nawacita, Deklarasi Wirausaha Muda, pendampingan kunjungan kerja DPR serta sosialisasi mengenai peran, fungsi, dan kinerja OJK bekerja sama dengan lembaga lain.

2.8.2 Kerja sama Internasional

a. Penyelesaian Negosiasi dalam rangka Peningkatan Komitmen Jasa Keuangan di ASEAN

Dalam rangka mendukung kebijakan dan pelaksanaan tugas OJK, diperlukan peningkatan komitmen perbankan dalam paket perundingan jasa keuangan dalam lingkup ASEAN (*ASEAN Banking Integration Framework*) serta paket komitmen jasa keuangan lainnya (apabila ada), dilihat dari proses yang dilaksanakan dalam paket perundingan jasa keuangan lingkup ASEAN. Pada periode triwulan III-2017, telah tercapai beberapa hal yaitu :

proses negosiasi ABIF antara OJK dan negara-negara ASEAN sedang berlangsung, berikut laporan singkat perkembangannya:

- OJK dan *Bank Negara Malaysia (BNM)*
Penunjukan Bank Mandiri sebagai kandidat *Qualified ASEAN Banks (QABs)* Indonesia di Malaysia oleh Ketua OJK, sebagai implementasi *Bilateral Agreement* ABIF OJK dan BNM.
- OJK dengan *Monetary Authority Singapore (MAS)*
OJK, bersama delegasi RI BI dan BKF, telah melakukan *Bilateral Meeting* untuk membahas negosiasi ABIF Indonesia dan Singapura pada sela pertemuan WC-FSL ke-55 di Medan.

b. Keterwakilan Posisi OJK Dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional

Terdapat beberapa posisi (*stand point*) OJK yang dapat diterima sebagai posisi RI dalam Forum Perdagangan Jasa Internasional.

Pada periode pelaporan, terdapat lima jenis perundingan yang telah dilaksanakan di mana, posisi OJK telah diajukan dan diterima sebagai posisi Indonesia

- i. Perundingan *Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*.
Pada triwulan III-2017, OJK sebagai *lead negotiator* perundingan putaran ke-8 IA-

CEPA, di mana keseluruhan posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia.

- ii. Perundingan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*.

Pada triwulan III-2017, posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia untuk sektor jasa keuangan terkait implementasi IJ-EPA pada sektor jasa keuangan Indonesia. Selain itu OJK meminta Kemendag agar informasi terkait peraturan penjamin simpanan bagi bank asing di Jepang pada pertemuan pembahasan *Schedule of Specific Commitments* mengingat terdapat bank asal Indonesia yang beroperasi di Jepang.

- iii. Perundingan *ASEAN Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL)*,
Pada triwulan III-2017, posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia pada perundingan WCFSL ke-55.

- iv. Perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*,
Posisi OJK telah diterima sebagai posisi Indonesia pada perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-18 Sub-Working Group on Financial Services (SWG-FIN)* ke-10.

- v. Indonesia *European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)*.
Posisi OJK diterima sebagai posisi Indonesia terkait *Section Financial Services* di bawah *Chapter Regulatory Framework* pada *Draft Text: Title of Investment and Trade in Services IEU-CEPA*.

c. Pemenuhan kewajiban OJK terhadap *international standard setting bodies* dan lembaga internasional lainnya, antara lain:

Selama periode pelaporan, partisipasi OJK pada forum internasional antara lain:

- i. Penyampaian tanggapan atas *Draft AMRO Annual Consultation Report and Press release*;
- ii. Penyampaian tanggapan atas survei *World Bank Group* terkait *Institutional Investors in Infrastructure (IIF)* di Indonesia;
- iii. Penyampaian Kuesioner OECD terkait *ASEAN SME Policy Index 2018* dan konfirmasi

- tanggapan dalam National Validation;
- iv. Tanggapan OJK atas Survei *Financial Stability Institute (FSI)* mengenai *Organizational Arrangements for Financial Sector Regulation and Supervision*

d. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan international counterparts, antara lain:

Pada triwulan III-2017, terdapat beberapa kegiatan:

- a. Menghadiri Undangan dari *Bank of Thailand* sebagai narasumber dalam rangka *Sharing Financial Sector Assessment Program* Indonesia kepada *Stakeholder Bank of Thailand*;
- b. *Courtesy Visit* dari *World Bank Practice Manager of Finance and Market Global Practice for the World Bank for East Asia Pacific Region*. Pertemuan membahas dukungan *World Bank* kepada OJK melalui *Program Financial Sector Stability, Financial Sector Diversification, Financial Inclusion*;
- c. *Southeast Asia, The Asian Development Bank*, topik pembahasan dalam pertemuan yaitu kerja sama Keuangan Digital, Pengembangan Pengawasan Perbankan, Non Bank dan Inklusi Keuangan;
- d. Kunjungan *American Chamber of Commerce* untuk membahas beberapa hal terkait POJK reasuransi dan revisi peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 mengenai *data center*;
- e. *Courtesy Visit Lead Advisor, Financial Sector, Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)*. Pertemuan membahas kerja sama OJK dan AIPEG dalam *Risk-based Supervision Project*, Pengembangan Pasar Modal, Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Keuangan Digital.
- f. OJK - *Asian Development Bank (ADB) International Seminar, Navigating Financial Stability in an Evolving Global Economic System*.

2.9 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Sepanjang triwulan III-2017, OJK melanjutkan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,

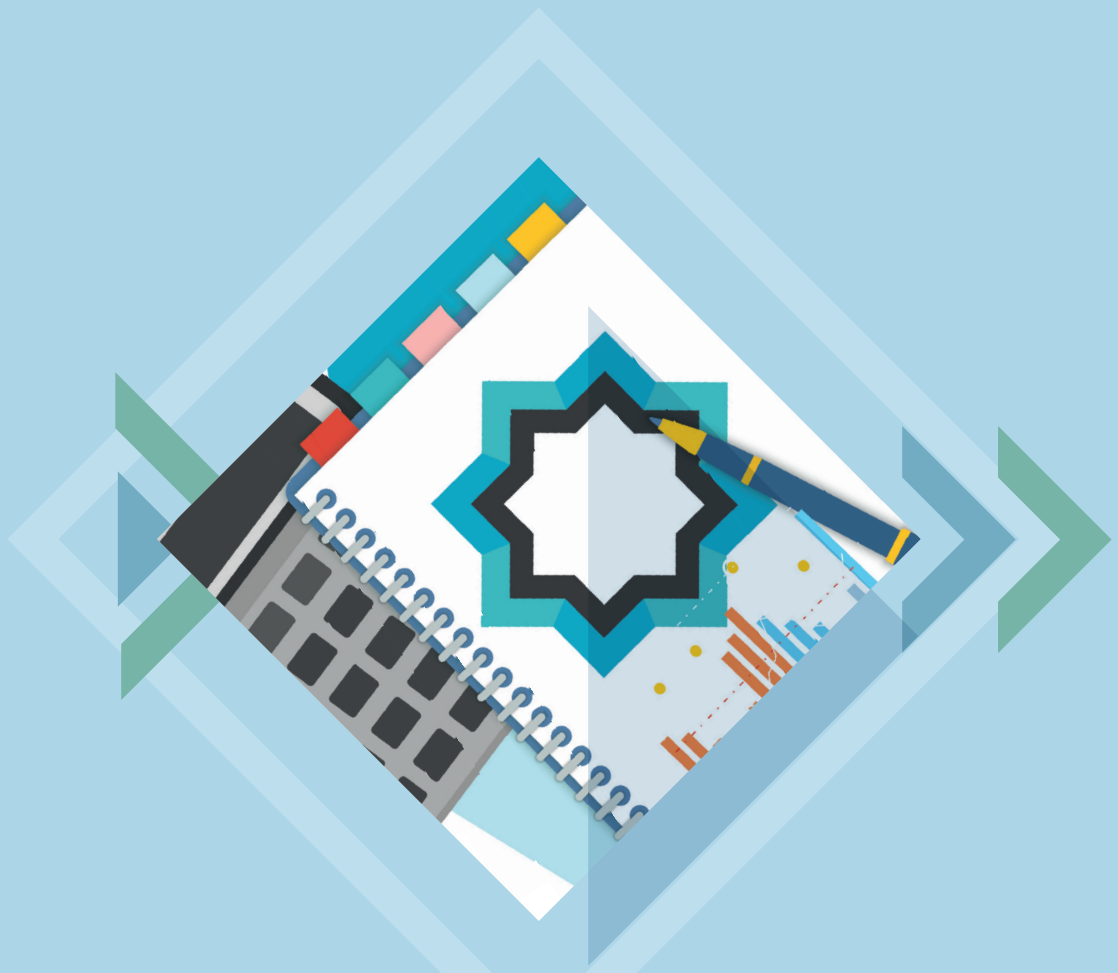
termasuk melalui wadah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Untuk menindaklanjuti kesepakatan pada Rapat KSSK triwulan sebelumnya, pada triwulan III-2017 telah dilakukan serangkaian rangkaian persiapan penyelenggaraan simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang melibatkan pejabat dan pegawai dari keempat lembaga anggota KSSK (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan). Simulasi pencegahan dan penanganan krisis tersebut telah diselenggarakan di Lembaga Penjamin Simpanan. Simulasi dimaksud dilaksanakan secara *full dress* dengan dihadiri oleh seluruh anggota KSSK beserta para pejabat terkait dari masing-masing lembaga.

Fokus simulasi tahun ini adalah menguji penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) beserta peraturan pelaksanaannya terkait dengan resolusi bank. Hasil evaluasi pelaksanaan simulasi menunjukkan peningkatan efektivitas koordinasi dan pengambilan keputusan dalam rangka penanganan bank bermasalah. Selanjutnya, simulasi juga menghasilkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penanganan bank bermasalah.

Pada Rapat KSSK triwulan III-2017 telah disimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan pada triwulan III-2017 berada dalam kondisi normal. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian atas perkembangan moneter, fiskal, makroprudensial, sistem pembayaran, pasar saham, pasar SBN, perbankan, industri keuangan nonbank, dan penjaminan simpanan. Namun, KSSK tetap mencermati sejumlah potensi risiko, baik yang berasal dari eksternal maupun domestik.

Selain pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanganan krisis, dalam Rapat KSSK tersebut juga dibahas mengenai kesiapan operasionalisasi Sekretariat KSSK yang ditargetkan untuk dapat efektif beroperasi mulai tahun 2018.



Tinjauan Industri
dan Operasional
Sektor Jasa
Keuangan Syariah



Pengembangan



Penerbitan 1 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur Pengawasan Perbankan, Pasar Modal dan IKNB Syariah

Pilot Project Pokja Pertanian Organik 2017

Proyek Pendirian World Islamic Investment Bank (WIIB)

Kajian Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian

Event



Islamic Financial Services Board

Training of Trainers (ToT) Perbankan Syariah Bagi Tenaga Pengajar dan Mahasiswa Pascasarjana di Banjarmasin

Sosialisasi Asuransi Syariah di Yogyakarta.

Workshop Asuransi Mikro Internasional

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah



3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sampai dengan triwulan III-2017 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan membaiknya indikator-indikator kinerja perbankan syariah. Hal ini tercermin dari meningkatnya aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK) masing-masing sebesar 4,49% (*qtq*), 2,31% (*qtq*), dan 5,52% (*qtq*) menjadi Rp405,30 triliun, Rp279,13 triliun, dan Rp325,06 triliun. Total aset perbankan syariah didominasi aset BUS dan UUS yang sebesar Rp395,09 triliun atau sebesar 97,48% dari total aset perbankan syariah. Sementara itu, aset BPRS sebesar Rp10,21 triliun. Pada triwulan III-2017, pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap aset perbankan nasional berada pada angka 5,57%, meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,42%. Peningkatan pangsa pasar ini dilatarbelakangi meningkatnya pertumbuhan aset beberapa BUS dan UUS pada periode laporan. Pertumbuhan *market size* perbankan syariah tersebut diiringi dengan membaiknya beberapa rasio kinerja lainnya dibandingkan triwulan sebelumnya, seperti kualitas pembiayaan, serta indikator likuiditas. Rasio permodalan, rentabilitas dan

efisiensi cukup stabil meski mengalami sedikit penurunan kualitas dibandingkan periode laporan sebelumnya.

Kualitas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS membaik, NPF *gross* dan NPF *net* masih dibawah *threshold* 5% dengan menurunnya rasio masing-masing sebesar 0,11% (*qtq*) dan 0,09% (*qtq*) menjadi 3,88% dan 2,37%. Sementara itu, kondisi permodalan bank syariah mengalami sedikit penurunan terlihat dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebesar 16,16% atau turun sebesar 26 bps. Rentabilitas perbankan syariah relatif stabil dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 1,41% dan *Net Operating Margin* (NOM) sebesar 1,56%.

Selama triwulan III-2017, OJK mencatat DPK perbankan syariah mengalami peningkatan sebesar 5,52% menjadi Rp325,06 triliun. Peningkatan DPK BUS, UUS, dan BPRS masing-masing sebesar 3,53% (*qtq*), 11,13% (*qtq*), dan 7,36% (*qtq*) menjadi Rp232,35 triliun, Rp86,23 triliun, dan Rp6,49 triliun. Peningkatan didorong oleh pertumbuhan pada tabungan dan deposito masing-masing sebesar 6,22%, 4,21% (*qtq*) dan 6,02% (*qtq*) menjadi Rp38,21 triliun, Rp92,73 triliun dan Rp194,12 triliun. Porsi tertinggi pada DPK adalah deposito sebesar 59,72%, diikuti tabungan sebesar 28,53%, dan giro sebesar 11,75%.

Likuiditas perbankan syariah yang dilihat dari rata-rata bulanan rasio AL/NCD dan AL/

DPK mengalami peningkatan pada periode laporan sebesar masing-masing 7,32% dan 1,14% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi 124,79% dan 22,12%. Selain itu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BUS dan UUS juga mengalami penurunan sebesar 2,60% menjadi 85,25% akibat tingginya pertumbuhan DPK yang dikelola BUS dan UUS melebihi pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan. Nilai rasio FDR tersebut masih dalam *range* (lebih besar dari 80%) yang mengindikasikan ekspansi pembiayaan bank syariah diimbangi dengan sumber dana (*funding*) yang cukup karena bank

memiliki kemampuan likuiditas semakin baik.

OJK mencatat ketahanan perbankan syariah relatif cukup kuat yang diindikasikan oleh tingkat permodalan yang memenuhi persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada periode laporan, CAR BUS mengalami penurunan 26 *bps* menjadi 16,16%, dengan jumlah modal sebesar Rp27,70 triliun. Sementara itu, aset tertimbang menurut risiko (ATMR) BUS sebesar Rp171,38 triliun. ATMR yang dibentuk BUS mengalami penurunan sebesar 1,12% yang sebagian besar dipengaruhi oleh membaiknya kualitas pembiayaan.

Tabel III - 1 Indikator Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017	Pertumbuhan (<i>qtq</i>)	
						Nominal	%
SHARE TOTAL ASET BUS + UUS + BPRS							
Total aset BUS + UUS (dalam Triliun Rupiah)	331,76	356,50	358,74	378,20	395,09	16,89	4,47
Total aset BPRS (dalam Triliun Rupiah)	8,60	9,16	9,42	9,67	10,21	0,54	5,56
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,17	5,34	5,29	5,42	5,57		0,14
BUS + UUS							
DPK (dalam Triliun Rupiah)	263,52	279,33	286,18	302,01	318,57	16,56	5,48
- Giro	29,07	27,97	30,62	35,97	38,21	2,24	6,22
- Tabungan	78,35	85,19	85,84	86,94	90,47	3,53	4,06
- Deposito	156,10	166,17	169,72	179,10	189,90	10,79	6,03
Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	235,01	248,01	250,54	265,32	271,58	6,26	2,36
Jumlah NPF (dalam Triliun Rupiah)	10,14	10,31	10,75	10,59	10,53	-0,05	-0,51
CAR (%) – BUS	15,43	16,63	16,98	16,42	16,16		-0,25
NPF Gross (%)	4,31	4,16	4,29	3,99	3,88		-0,11
ROA (%)	1,04	0,95	1,53	1,49	1,41		-0,07
BOPO (%)	92,83	93,62	88,58	87,13	87,46		0,33
FDR (%)	89,18	88,78	87,55	87,85	85,25		-2,60
Jumlah Bank							
- BUS	13	13	13	13	13	0,00	0,00
- UUS	21	21	21	21	21	0,00	0,00
Jumlah Kantor	2210	2201	2184	2185	2189	4,00	0,18
BPRS							
DPK (dalam Triliun Rupiah)	5,44	5,82	6,02	6,04	6,49	0,44	7,36
Pembiayaan (dalam Triliun Rupiah)	6,45	6,66	7,04	7,52	7,56	0,04	0,48
Jumlah NPF (dalam Triliun Rupiah)	0,68	0,58	0,70	0,81	0,82	0,01	1,27
CAR (%)	20,72	21,73	21,53	20,62	20,89		0,27
NPF Gross (%)	10,47	8,63	9,94	10,71	10,79		0,08
ROA (%)	2,45	2,27	2,29	2,24	2,56		0,32
BOPO (%)	87,91	87,09	85,13	86,50	86,31		-0,19
FDR (%)	118,63	114,40	116,98	124,47	116,49		-7,98
Jumlah Bank	164	166	166	167	167	0,00	0,00
Jumlah Kantor	430	453	454	456	444	-12,00	-2,63

Sumber : Data Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan Syariah, September 2017

Pembiayaan perbankan syariah disalurkan pada berbagai sektor dengan proporsi sebesar 40,59% sektor rumah tangga, sementara sisanya disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif), dengan kontributor terbesar yaitu 11,64% sektor usaha perdagangan besar dan eceran, 7,93% konstruksi, 7,52% industri pengolahan, 7,20% perantara keuangan, dan 4,44% pada sektor *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan. Pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor rumah tangga sebesar 3,78% (*qtq*), yang didorong oleh pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal maupun flat/apartemen yang cukup tinggi (masing-masing sebesar 4,57% (*qtq*) dan 10,97% (*qtq*). Berdasarkan jenis penggunaan, porsi pembiayaan terbesar terdapat pada pembiayaan modal kerja sebesar 35,12%, investasi sebesar 23,33%, dan sisanya disalurkan pada sektor konsumtif. Berdasarkan jenis akad, pembiayaan terbesar disalurkan pada pembiayaan dengan akad Murabahah sebesar 53,89%, diikuti akad Musyarakah sebesar 34,62%, akad Mudharabah sebesar 5,90%, akad Ijarah sebesar 3,26%, akad Qardh sebesar 1,93%, dan akad Istishna' sebesar 0,40%.

Secara umum kualitas pembiayaan, perbankan syariah terus menerus menunjukkan perbaikan dengan menurunnya rasio NPF *gross* dan NPF *net* masing-masing sebesar 0,11% (*qtq*) dan 0,09% (*qtq*) menjadi 3,88% dan 2,37%. Pembiayaan pada sektor konsumtif berada pada posisi 2,04%. Sementara itu, sektor produktif berada pada 5,16%. Berdasarkan akadnya, pembiayaan dengan tingkat risiko tertinggi terdapat pada akad Murabahah dengan NPF *gross* sebesar 4,64%, dan akad Musyarakah sebesar 3,22%.

Pada periode laporan, kinerja rentabilitas perbankan syariah masih tergolong cukup baik, tercermin dari ROA dan NOM yang relatif stabil masing-masing sebesar 1,41% dan 1,56%. Hal ini mengindikasikan masih cukupnya kemampuan bank dalam memperoleh laba.

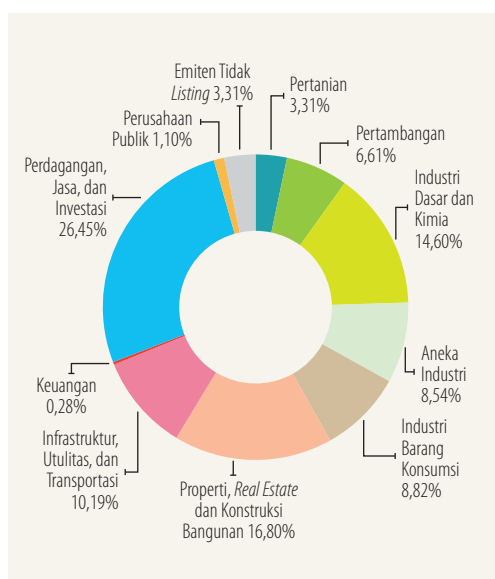
3.1.2 Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

Pada triwulan III-2017 secara umum terjadi penurunan kinerja pada industri pasar modal syariah. Meskipun terjadi kenaikan pada jumlah serta NAB Reksadana syariah, namun terjadi penurunan pada sukuk korporasi beredar baik dalam sisi jumlah maupun nilainya. Penurunan juga terjadi pada ISSI dan JII baik indeks dan kapitalisasinya, hal tersebut dikarenakan saham perbankan yang meningkat paling tinggi pada periode triwulan III-2017 di bursa efek tidak banyak yang masuk ke dalam Daftar Efek Syariah.

A. Perkembangan Saham Syariah

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periode I meliputi 351 Efek jenis Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode I sampai akhir triwulan III-2017, terdapat penambahan 12 saham yang masuk dalam DES yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana saham. Secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES hingga September 2017 berjumlah 363 saham.

Mayoritas Saham Syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebanyak 96 saham (26,45%), sektor Properti, *Real Estate* & Konstruksi sebanyak 61 saham (16,80%), sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 53 saham (14,60%), sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 37 saham (10,19%) dan 116 saham sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III - 1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia

Pada periode laporan, ISSI ditutup pada level 184,23 poin atau menurun sebesar 2,17% dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir September 2017 sebesar Rp3.478,92 triliun atau 53,74% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham, menurun sebesar 0,36% jika dibandingkan kapitalisasi pasar Saham ISSI pada akhir periode triwulan II-2017. Pada periode yang sama, indeks JII ditutup pada level 733,30 atau menurun sebesar 2,17% dibanding akhir periode triwulan sebelumnya. Kapitalisasi JII ditutup pada Rp2.188,06 triliun atau menurun 1,95% dibanding periode sebelumnya.

Tabel III - 2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2012	1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013	1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	1.737.290,98	2.600.850,72	4.872.701,66
2016	2.035.189,92	3.170.056,08	5.753.612,76
2017	Triwulan I	2.106.211,65	3.323.611,39
	Triwulan II	2.231.679,45	3.491.395,41
	Triwulan III	2.188.062,82	3.478.918,47

Tabel III - 3 Perkembangan Indeks Saham Syariah (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2012	594,78	144,99	4.316,69
2013	585,11	143,71	4.274,18
2014	691,04	168,64	5.226,95
2015	603,35	145,06	4.593,01
2016	694,13	172,08	5.296,71
2017	Triwulan I	718,35	5.568,11
	Triwulan II	749,60	5.829,71
	Triwulan III	733,30	5.900,85

B. Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode triwulan III-2017 terdapat penerbitan sebanyak delapan seri Sukuk Korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp 1,15 triliun. Terdapat pula tiga seri Sukuk Korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp318 miliar. Dengan demikian, jumlah *outstanding* Sukuk korporasi menjadi sebanyak 67 seri atau menurun sebesar 5,63% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dari sisi nilai *outstanding* sebesar Rp 14.096 triliun atau menurun sebesar 7,95% dibandingkan triwulan sebelumnya.

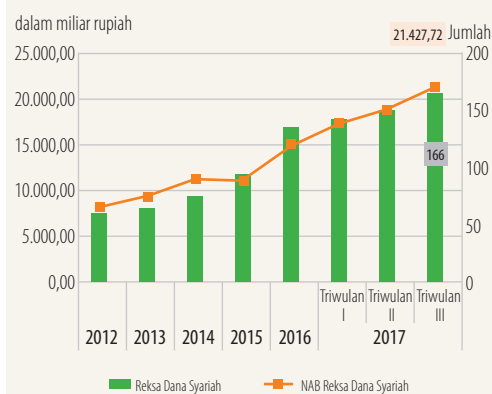
Tabel III - 4 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun	Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah	Total Nilai (dalam miliar rupiah)	Total Jumlah
2012	9.790	54	6.883	32
2013	11.994	64	7.553	36
2014	12.956	71	7.105	35
2015	16.114	87	9.902	47
2016	20.425	102	11.878	53
2017	Triwulan I	20.793	12.134	55
	Triwulan II	21.443	15.314	71
	Triwulan III	21.441	14.096	67

C. Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan III-2017 terdapat 16 Reksa Dana Syariah efektif terbit. Sampai September 2017, total Reksa Dana Syariah yang beredar sebanyak 166 dengan NAB sebesar Rp21,43 triliun atau meningkat 9,93% dari sisi jumlah dan meningkat 13,29% dari sisi NAB dibanding periode sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 9,90% dari total 1.677 Reksa Dana dan 5,18% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp414,03 triliun.

Grafik III - 2 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah



D. Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Sampai akhir September 2017, jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 57 seri, dengan nilai sebesar Rp536,56 triliun.

Tabel III - 6 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*

Tahun	Nilai <i>Outstanding</i> (dalam triliun rupiah)	Total Jumlah <i>Outstanding</i>
2010	44,34	16
2011	77,73	22
2012	124,44	36
2013	169,29	42
2014	206,10	42
2015	296,07	47
2016	411,37	53
2017	Triwulan I	480,29
	Triwulan II	503,19
	Triwulan III	536,56

Tabel III - 5 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Tahun	Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (dalam miliar rupiah)			
	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konvensional	Reksa Dana Total	%
2012	58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013	65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	Triwulan I	142	1.349	9,52%	17.306,90	347.114,82	364.421,72	4,75%
	Triwulan II	151	1.527	9,89%	18.914,54	363.929,69	382.844,23	4,94%
	Triwulan III	166	1.677	9,90%	21.427,72	392.607,61	414.035,34	5,18%

E. Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan triwulan III-2017, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

- Manajer Investasi yang telah mengelola Reksa Dana Syariah berjumlah 47 Manajer Investasi.
- Terdapat lima Manajer Investasi yang telah memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)
- Perusahaan Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi berjumlah 27 Penjamin Emisi Efek
- Terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES
- Bank Kustodian yang telah memperoleh rekomendasi DSN-MUI untuk memberikan layanan syariah berjumlah 14 bank.
- Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan *online* saham berdasarkan prinsip syariah (*online trading* syariah) berjumlah 12 Perusahaan Efek
- Terdapat enam Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi.
- Terdapat 45 pihak yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.

3.1.3 Perkembangan IKNB Syariah

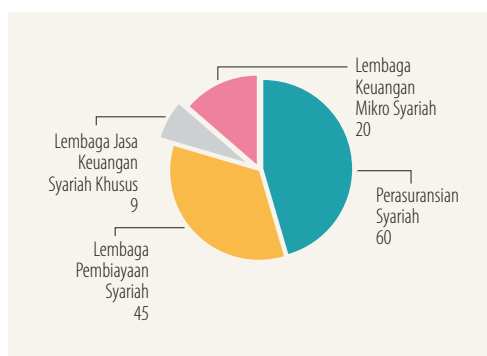
Selama triwulan III-2017, aset IKNB Syariah mengalami kenaikan sebesar 0,98% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp98,57 triliun. Aset industri lembaga pembiayaan syariah masih mendominasi porsi yaitu sebesar 39,98% dari total aset IKNB syariah secara keseluruhan.

Tabel III - 7 Aset IKNB Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Industri	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1	Perasuransian Syariah	32,99	33,24	35,25	37,37	39,41
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	33,90	36,94	37,64	38,78	36,80
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	17,18	18,43	19,61	21,39	22,26
4	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,06	0,06	0,07	0,07	0,10
Total		84,13	88,67	92,57	97,61	98,57

Sampai akhir triwulan III-2017, terdapat 60 perusahaan perasuransian syariah, 45 lembaga pembiayaan syariah, sembilan lembaga jasa keuangan syariah khusus, dan 20 lembaga keuangan mikro syariah. Selama periode laporan, terdapat lima penambahan jumlah entitas IKNB Syariah.

Grafik III - 3 Jumlah Entitas IKNB Syariah



A. Industri Perasuransian Syariah

Pada triwulan III-2017, industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset, investasi, dan kontribusi bruto masing-masing sebesar 5,46%, 3,90%, dan 55,17% menjadi Rp38,66 triliun, Rp33,52 triliun, dan Rp9,56 triliun. Klaim bruto dan kewajiban juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 3,37% dan 8,79% menjadi Rp3,37 triliun dan Rp8,79 triliun

Tabel III - 8 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1	Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	26,87	27,08	28,93	30,42	32,52
	Asuransi Umum Syariah	4,80	4,80	4,91	4,98	5,28
	Reasuransi Syariah	1,32	1,37	1,42	1,96	1,61
	Jumlah	32,99	33,24	35,25	37,37	38,66
2	Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	24,49	24,56	26,28	27,41	28,78
	Asuransi Umum Syariah	3,18	3,16	3,23	3,36	3,54
	Reasuransi Syariah	1,04	1,08	1,12	1,49	1,19
	Jumlah	28,71	28,81	30,63	32,26	33,52
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	6,92	9,49	2,39	4,91	7,60
	Asuransi Umum Syariah	1,61	2,13	0,51	0,95	1,43
	Reasuransi Syariah	0,33	0,41	0,13	0,30	0,53
	Jumlah	8,86	12,03	3,03	6,16	9,56
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,46	3,32	0,85	1,73	2,21
	Asuransi Umum Syariah	0,54	0,76	0,22	0,46	0,68
	Reasuransi Syariah	0,20	0,25	0,09	0,24	0,49
	Jumlah	3,20	4,34	1,16	2,44	3,37
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	3,46	3,45	3,91	4,07	5,37
	Asuransi Umum Syariah	2,65	2,56	2,66	2,66	2,82
	Reasuransi Syariah	0,44	0,46	0,47	0,64	0,60
	Jumlah	6,55	6,47	7,05	7,37	8,79

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledged* dan unit syariah. Sampai akhir periode laporan terdapat 60 perusahaan yang terdiri dari 11 perusahaan asuransi syariah, 46 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah, satu perusahaan reasuransi syariah, dan dua perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah.

B. Industri Pembiayaan Syariah

Pada triwulan III-2017, jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 5,10% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi Rp35,58 triliun.

Tabel III - 9 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar rupiah)

No.	Komponen	Triwulan III-2016	Triwulan IV-2016	Triwulan I-2017	Triwulan II-2017	Triwulan III-2017
1	Kas dan Setara Kas	608,15	643,08	602,17	955,26	833,92
2	Aset Tagihan Derivatif		16,77	-10,27		
3	Investasi Jangka Pendek dalam Surat Berharga					
4	Piutang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah - Neto	29.890,29	33.073,30	33.746,41	34.050,84	31.993,54
5	Penyertaan Modal					
6	Investasi Jangka Panjang dalam Surat Berharga					
7	Aset yang Disewaoperasikan - Neto	125,85	109,00	95,71	111,28	98,05
8	Aset tetap dan Inventaris - Neto	166,61	151,85	144,30	124,20	118,03
9	Aset Pajak Tangguhan	24,48	19,30	23,23	23,57	48,23
10	Rupa-Rupa Aset	1.942,18	1.727,63	1.888,20	2.224,19	2.486,93
	Total	32.757,56	35.740,95	36.489,75	37.489,36	35.578,71

Sampai akhir triwulan III-2017 terdapat 37 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledged* dan 34 perusahaan berbentuk UUS. Pada perusahaan modal ventura syariah, terdapat empat perusahaan berbentuk *full fledged* dan tiga perusahaan berbentuk UUS dengan total aset sebesar Rp1.114,69 miliar. Selain itu, terdapat satu perusahaan pembiayaan infrastruktur unit syariah dengan aset sebesar Rp108,80 miliar.

C. Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus terdiri dari Perusahaan Penjaminan Syariah, kegiatan syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Jumlah perusahaan penjaminan syariah sebanyak empat perusahaan, terdiri atas dua *full fledged* dan dua UUS dengan total aset sebesar Rp885,17 miliar. Aset kegiatan syariah pada PT Pegadaian (Persero) dan LPEI masing-masing sebesar Rp4,85 triliun dan Rp16,53 triliun. Sementara itu, jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah sebanyak 20 perusahaan berbentuk *full fledged* dengan total aset Rp97,71 miliar.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Sepanjang triwulan III-2017, terdapat satu ketentuan yang diterbitkan dan berlaku bagi BUS dan UUS yaitu SEOJK Nomor 49/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Deposito Syariah. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank yang memuat antara lain persyaratan dan karakteristik SDS, persyaratan penerbitan SDS, dan pelaporan SDS.

Selama periode laporan terdapat ketentuan Perbankan secara umum yang diterbitkan dan juga berlaku bagi perbankan syariah, yaitu :

1. POJK Nomor 36/POJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
2. POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
3. POJK Nomor 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak;
4. POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia;
5. POJK Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham;
6. POJK Nomor 41/POJK.03/2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank;
7. POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum;
8. POJK Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank;
9. POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah;
10. POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam;
11. POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum;
12. POJK Nomor 47/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

13. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;
14. SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
15. SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
16. SEOJK Nomor 43/SEOJK.03/2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan Dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
17. SEOJK Nomor 44/SEOJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama triwulan III-2017, OJK menerbitkan satu peraturan terkait dengan peraturan Pasar Modal Syariah yaitu POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri keuangan syariah, khususnya Pasar Modal syariah dengan kebutuhan pengembangan pasar saat ini serta memperkuat kerangka hukum Pasar Modal syariah untuk memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan pasar untuk mempercepat pertumbuhan Efek syariah sebagaimana telah tercantum dalam *Roadmap Pasar Modal Syariah 2015-2019*:

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama triwulan III-2017, OJK menerbitkan satu SEOJK terkait IKNB Syariah yaitu SEOJK nomor 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah. SEOJK ini mengatur ketentuan

pelaksanaan pengendalian fraud, penerapan strategi anti fraud, dan laporan strategi anti fraud bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

A. Pengawasan Bank Syariah

Perkembangan kegiatan usaha yang semakin membaik di triwulan III-2017 telah mendorong peningkatan pertumbuhan pembiayaan menjadi 2,06%. Sejalan dengan perkembangan itu, upaya perbaikan NPF yang terus dilakukan oleh masing-masing BUS, seperti restrukturisasi pembiayaan, hapus buku, dan melakukan litigasi/ upaya hukum, telah cukup efektif dalam mendorong perbaikan kualitas pembiayaan, sehingga NPF *gross (net)* turun dari menjadi 4,49% (2,72%). Perbaikan tersebut sejalan dengan meningkatnya *awareness* BUS terhadap substansi penerapan manajemen risiko kredit, antara lain dengan menyempurnakan kerangka penerapan manajemen risiko kredit yang merupakan bagian dari tindak lanjut *supervisory concern* OJK dalam rangka mendukung pencapaian "industri perbankan yang tumbuh berkualitas".

Kondisi permodalan industri Perbankan Syariah (terutama untuk BUS) sampai dengan triwulan III-2017 secara umum cukup memadai dan berada di atas *threshold* (rasio KPMM minimum 14%), yakni 16,40%. Optimalisasi kegiatan usaha terus dilaksanakan di tiap BUS, antara lain tercermin dari rasio BOPO di triwulan III-2017 telah mencapai 92,03% dan relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 92,26%. Meski demikian, tingginya rasio tersebut secara umum disebabkan struktur

dana BUS yang didominasi oleh dana mahal (deposito), rendahnya *fee based income* yang disebabkan variasi produk terbatas dan jangkauan jaringan kantor bank yang belum optimal.

Terkait hal tersebut, masing-masing BUS telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pendapatan dan biaya, di antaranya, dengan menyempurnakan layanan dan produk, peningkatan efisiensi dan produktifitas karyawan, optimalisasi jaringan kantor dengan mengurangi jaringannya secara bertahap (*network reprofiling*) dan membuka layanan tanpa kantor. Sebagai langkah *supervisory action*, OJK masih menetapkan risiko operasional sebagai bagian dari *primary supervisory concern* OJK (khususnya kegiatan *on-site supervision*) terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur (khususnya IT) yang memadai, kompetensi SDM dan kecukupan pengendalian intern.

Berkenaan dengan profil risiko Perbankan Syariah yang cenderung stabil akibat upaya perbaikan yang dilakukan oleh masing-masing BUS dan didukung oleh efektifitas *supervisory action* OJK dalam menjaga kelangsungan bank, maka *rating* peringkat RBBR di Perbankan Syariah masih sejalan dengan periode sebelumnya (Desember 2016), yaitu tergolong Cukup Sehat. Adapun potensi risiko utama masih berasal dari risiko kredit dan risiko operasional, sehingga *Supervisory Plan* 2017 masih difokuskan pada kedua risiko tersebut. Adapun aspek permodalan dan rentabilitas hanya menjadi *concern Supervisory Plan* pada BUS tertentu.

B. Perizinan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2017 telah dilaksanakan proses perizinan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap tiga calon PSP dan 30 Pengurus Bank Syariah serta proses perizinan terhadap sembilan pengajuan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS)

dengan hasil empat calon Pengurus Bank dinyatakan memenuhi syarat (disetujui) dan dua calon DPS dinyatakan memenuhi syarat (layak). Selanjutnya tiga dokumen calon PSP bank, enam dokumen calon Pengurus Bank Syariah dan dua calon DPS dikembalikan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Hingga akhir triwulan III-2017 terdapat 20 proses perizinan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Bank Syariah dan lima calon DPS yang masih dalam proses penyelesaian.

Di bidang perizinan produk baru, terdapat lima permohonan masuk, di mana satu di antaranya tidak disetujui dan empat permohonan masih dalam proses penyelesaian.

Terkait pengembangan jaringan kantor perbankan syariah, terdapat 53 permohonan jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, penutupan kantor, dan penghentian kegiatan LSB dengan hasil 42 permohonan telah disetujui, satu permohonan dihentikan dan 10 permohonan masih dalam proses penyelesaian.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan akhir triwulan III-2017, terdapat 10 Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES, yaitu:

- a) PT CIMB Principal Asset Management,
- b) PT Manulife Aset Manajemen Indonesia,
- c) PT BNP Paribas Investment Partners,
- d) PT Schroders Investment Management Indonesia,
- e) PT Aberdeen Asset Management,
- f) PT Bahana TCW Investment Management,
- g) PT Mandiri Manajemen Investasi,
- h) PT Maybank Asset Management dan
- i) PT Eastspring Investments Indonesia.
- j) PT Indosurya Asset Management.

Selama periode triwulan III-2017 terdapat satu Pihak Penerbit DES yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan DES periodiknya dan telah diproses pengenaan sanksi.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap 58 perusahaan perasuransian syariah dan menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) serta empat Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) terhadap Perusahaan Perasuransian syariah. OJK juga melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap empat Perusahaan Perasuransian syariah. Terkait dengan pengawasan terhadap Lembaga Pembiayaan dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus, OJK menerbitkan dua LHPLS Perusahaan Pembiayaan Syariah, satu LHPLS Perusahaan Penjaminan Syariah, satu LHPLF Perusahaan Modal Ventura Syariah, satu LHPLF Perusahaan Penjaminan Syariah, serta melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap dua Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan, OJK melakukan pemberian izin pembukaan unit syariah dua perusahaan asuransi, pemberian izin pembukaan 29 kantor cabang unit usaha syariah perusahaan pembiayaan dan tiga kantor cabang unit usaha syariah perusahaan modal ventura, pengadministrasian pengangkatan empat pimpinan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan, dan pemberian izin pembukaan satu kantor cabang perusahaan penjaminan syariah.

Selama triwulan III-2017, OJK melakukan persetujuan atas 31 produk baru asuransi jiwa syariah, tujuh produk baru asuransi kerugian, pencatatan atas perubahan 19 produk asuransi jiwa syariah, dan persetujuan kerja sama pemasaran *bancassurance* atas tiga produk asuransi jiwa syariah. OJK melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap dua direktur perusahaan asuransi syariah, dua komisaris perusahaan asuransi syariah,

satu dewan pengawas syariah perusahaan asuransi syariah, satu dewan pengawas syariah perusahaan modal ventura syariah, satu dewan pengawas syariah perusahaan pembiayaan syariah, dan dua auditor internal dari perusahaan asuransi syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

A. Pengembangan Perbankan Syariah

Selama triwulan III-2017, OJK telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Kajian Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPRS

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip tata kelola pada BPRS, merumuskan aspek-aspek yang perlu dikembangkan dalam rangka implementasi tata kelola organisasi BPRS sesuai dengan volume usaha BPRS serta mengidentifikasi dampak penerapan tata kelola organisasi BPRS yang ideal.

2. Kajian Pembentukan Jakarta *International Islamic Financial Centre* (JIIFC)

kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai bentuk atau desain pusat keuangan syariah internasional yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia. Pada triwulan III-2017 ini, telah diselesaikan penyusunan *draft* kajian pembentukan *Jakarta Islamic Financial Centre* (JIIFC).

3. Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI

Dalam rangka mendorong perkembangan riset keuangan syariah khususnya di kalangan civitas

akademika, OJK bersama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) telah menyelenggarakan kegiatan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI di Surakarta, Jawa Tengah.

Jumlah paper yang masuk dan memenuhi persyaratan administrasi dalam kegiatan *Call for Paper* FREKS XVI sebanyak 205 paper

Berdasarkan hasil penilaian atas paper dan presentasi yang dilakukan, dewan juri memutuskan tiga pemenang untuk kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus dengan judul penelitian sebagai berikut :

Tabel III - 10 Paper Pemenang FREKS XVI Kategori Rekomendasi Jurnal Terindeks Scopus

No	Judul Paper
1	Islamic Social Banking: The Way Forward
2	Study of The Economic Implications of Different Islamic Screening Standards
3	Sharia Banking Dynamics and the Macroeconomic Responses: Evidence from Indonesia

Pada hari kedua FREKS XVI, diselenggarakan sesi Presentasi dan Diskusi 24 Finalis Paper Muda dan Madya. Berdasarkan hasil penilaian atas paper dan presentasi yang dilakukan, dewan juri memutuskan enam pemenang untuk paper kategori Muda dan enam pemenang untuk hasil paper dengan kategori Madya, sebagai berikut :

Tabel III - 11 Paper Pemenang FREKS XVI Kategori Muda dan Madya

No	Judul Paper
Kategori Muda Perbankan Syariah	
1	<i>Income Inequality and Regional Index of Financial Inclusion for Islamic Bank in Indonesia</i>
2	Analisis Struktur Pasar Perbankan Syariah di Indonesia dengan Pendekatan PANZAR – ROSSE Model
Kategori Muda Pasar Modal Syariah	
1	Kinerja Portofolio Saham Syariah dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Saham Syariah di Indonesia
2	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM serta Struktur Infrastruktur Pasar Modal Syariah (Saham) Melalui Integrated Learning System
Kategori Muda IKNB Syariah	
1	Apakah <i>Sharia Fintech</i> Mendukung Kemudahan Bisnis?

2	Kontribusi Zakat terhadap Peningkatan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi
Kategori Madya Perbankan Syariah	
1	Analisis Efisiensi Teknis dan Transmisi <i>Sharia Branchless Banking (SBB)</i> : Upaya Peningkatan Kinerja Serta Daya Saing Perbankan Syariah di Indonesia
2	Implementasi <i>Green Banking</i> Perbankan Syariah dalam Pemanfaatan Limbah Sawit
Kategori Madya Pasar Modal Syariah	
1	Menguak Minat Mahasiswa Indonesia Terhadap Investasi Sukuk
2	<i>Islamic Finance For Blue Economy: Initiating Wakala Sukuk for Fishery Fleet</i>
Kategori Madya IKNB Syariah	
1	<i>Untapped Market of Islamic Pension Fund: Muslim Attitude and Expectation in Indonesia</i>
2	Pengembangan <i>Sharia E – Wallet</i> untuk Meningkatkan Antusiasme Masyarakat Menggunakan Produk IKNB Syariah

4. Kegiatan Kelompok Kerja Pemberdayaan Perbankan Syariah dalam Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia Tahun 2017

Dalam rangka meningkatkan pembiayaan perbankan syariah di sektor strategis terutama sektor pertanian organik, serta sebagai tindak lanjut kegiatan Pokja Pertanian Organik tahun 2016, OJK pada tahun 2017 telah membentuk Pokja Pertanian Organik 2017. Selama triwulan III-2017 dilaksanakan *progress report* terkait *pilot project* yang dilakukan oleh perbankan syariah anggota Pokja Pertanian Organik. Rapat tersebut diselenggarakan pada 20 Juli 2017. Hasil dari rapat tersebut beberapa perbankan syariah telah melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) baik dengan lembaga pendamping anggota Pokja Pertanian Organik maupun non Pokja. Hasil dari rapat tersebut diharapkan bank syariah yang telah melakukan MoU segera merealisasikan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian organik.

5. *iB Research Grant Program 2017*

Sasaran utama dari program ini adalah percepatan pelaksanaan agenda-agenda riset serta untuk mendukung

aktivitas penelitian perbankan syariah yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan peneliti eksternal OJK yang hasil keluarannya bermanfaat untuk mendukung perumusan kebijakan OJK di bidang perbankan dan keuangan syariah. Pada program ini sedang dilaksanakan penelitian oleh penerima *grant* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III - 12 Penelitian oleh Penerima IB Research Grant Program 2017

Judul Penelitian
S1
Pengaruh <i>Adversity Quotient</i> dan Spiritualitas terhadap Kinerja Karyawan
Konsep <i>Crowdfunding</i> Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif <i>Shariah Compliance</i>
S2
Pengembangan Modul Edukasi Literasi Keuangan Islam Untuk UMKM
Capital Buffer Dan Risiko Unik Bank Syariah (Studi Empiris Bank Syariah di ASEAN dan MENA)
S3
Peran <i>Islamic Banking Service Quality</i> (IBSQ) dalam Menciptakan Kebahagiaan Nasabah dan Retensi Nasabah Bank BUMN Syariah yang Dimediasi oleh Kepuasan Nasabah
Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah di Indonesia

6. Kajian Pembentukan APEX IT Company untuk BPRS

Kajian tersebut bertujuan untuk memetakan bagaimana skema/model pengembangan TI bersama bagi BPRS dalam sebuah lembaga pengayom APEX IT Company serta mengidentifikasi dan mengelaborasi isu-isu strategis terkait pengembangan TI bersama tersebut. Pada triwulan III-2017 telah dilaksanakan survei dan diskusi kelompok terarah terhadap beberapa BPRS di wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Lampung, Kantor Regional 2 Jawa Barat, Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, Kantor Regional 4 Jawa Timur, Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara, dan Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk mengidentifikasi kelayakan pembentukan APEX IT Company untuk BPRS. Hasil sementara menunjukkan terdapat kebutuhan BPRS terhadap pembentukan APEX IT Company.

Adapun kegiatan pengembangan pengawasan perbankan syariah yang dilakukan pada Triwulan III 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyempurnakan proses pengawasan bank syariah yang terstandarisasi dilakukan proses penyusunan pedoman, antara lain sebagai berikut :
 - a. Pedoman Pelaksanaan Forum Panel Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko
 - b. Pedoman pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko untuk tahapan pemahaman terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (KYBPRS) dan *Supervisory Plan* BPRS
 - c. Pedoman Pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan risiko untuk tahapan rencana pengawasan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (*Supervisory Plan* BPRS)
 - d. Pedoman Laporan Bulanan BPRS (Lapbul BPRS)
 - e. SOP Pengawasan untuk Bank Umum Syariah
 - f. Pedoman Pemeriksaan berdasarkan Risiko untuk Risiko Imbal hasil dan Risiko Investasi untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
2. Sosialisasi dan Pelatihan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (LSMK BUS UUS) *batch* II dalam rangka meningkatkan pemahaman petugas pelaporan dan meningkatkan kualitas data LSMK yang dihadiri 17 BUS/UUS.
3. *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil *coaching clinic* Pelaporan LSMK

Selanjutnya, kegiatan dari proses *review* kebijakan dan standar serta hubungan kerja sama dengan pihak internasional dalam pengembangan perbankan syariah selama Triwulan III-2017 adalah sebagai berikut :

1. Kajian *Platform Sharing* Perbankan Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mendukung perkembangan industri perbankan syariah terkait dengan kewajiban UUS untuk melakukan *spin-off* pada tahun 2023. Dalam merumuskan kajian *platform sharing* perbankan syariah, telah dilakukan serangkaian *assessment* dan diskusi mengenai dampak *spin-off* dan implementasi konsep *platform sharing* untuk mempertajam analisa

2. Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SNPPK)

SNPPK merupakan salah satu amanat dari pembentukan Forum Koordinasi - Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) yang beranggotakan OJK, BI dan Kemenkeu. Dalam rangka penyusunan SNPPK, OJK berperan sebagai salah satu anggota Tim Teknis yang bertugas menganalisa peran perbankan syariah terhadap pengembangan dan pendalaman pasar keuangan.

3. Proyek Pendirian *World Islamic Investment Bank* (WIIB)

WIIB merupakan suatu proyek pendirian lembaga pembiayaan infrastruktur berbasis syariah yang diinisiasi oleh IDB. Menteri Keuangan telah membentuk Tim Pembentukan WIIB melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 432/KMK.01/2017 tentang Pembentukan Tim Persiapan Jakarta Sebagai Kantor Pusat Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank. Sejak awal 2017, Kementerian Keuangan, OJK dan BI telah melakukan serangkaian pertemuan intensif untuk merumuskan proposal pendirian WIIB yang mencakup usulan model bisnis dan *head of terms* telah disampaikan kepada pihak IDB dan akan dibahas oleh internal IDB.

4. Kerja sama Institusi Keuangan Syariah Internasional

Selama Triwulan III-2017, OJK telah melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga keuangan syariah internasional sebagai berikut :

a. *Islamic Financial Services Board* (IFSB)

OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan acara IFSB khususnya *Member & Industry Engagement Session* yang mengundang *stakeholder* keuangan syariah (industri dan asosiasi terkait). Telah dilakukan serangkaian diskusi terkait penyelenggaraan acara IFSB tersebut yang dihadiri oleh perwakilan dari BI dan OJK

b. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI)

AAOIFI mengirimkan surat mengenai keanggotaan OJK/Ketua DK OJK dalam Board of Trustee AAOIFI. Berdasarkan arahan pimpinan, telah dilakukan diskusi mengenai status keanggotaan dan representasi OJK pada AAOIFI saat ini serta analisis *pros* dan *cons* keanggotaan OJK pada AAOIFI ke depannya yang kemudian disampaikan surat balasan kepada AAOIFI.

5. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah "Bank Wakaf Mikro" di Pondok Pesantren

OJK berperan dalam mengawal dan berkoordinasi dengan LKM Syariah terkait perancangan model bisnis. Selama Triwulan III-2017, OJK telah melakukan survei ke beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa dan menghasilkan konsep model bisnis LKM Syariah berbentuk badan hukum koperasi jasa. LKM Syariah terletak di Pondok Pesantren dengan menggunakan konsep pendekatan kelompok dengan harapan dapat membantu permasalahan ketimpangan dan kemiskinan yang masih terdapat di Tanah Air.

Sampai dengan saat ini, terdapat 9 LKM Syariah sebagai *Pilot Project* yang telah mendapatkan izin usaha LKM Syariah.

6. Kajian Dampak *Multilicense* bagi BPRS
Penerapan ketentuan yang bersifat *one fits for all* bagi industri BPRS dirasakan tidak tepat lagi, karena terdapat kesenjangan (*gap*) aset dan permodalan yang cukup lebar dalam industri BPRS. Terkait hal tersebut, telah dilakukan *review* kajian terkait *multilicense* yang telah disusun dan inventarisasi literatur terkait maupun informasi langsung dari Pengawas BPRS. Saat ini telah dilakukan pengumpulan dan analisis data kondisi serta indikator kinerja BPRS seluruh Indonesia.

B. Pengembangan Produk dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat terhadap perbankan/keuangan syariah, selama triwulan III-2017 telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

1. Pelaksanaan Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah melalui kegiatan *Expo iB Vaganza* dan Keuangan Syariah Fair yang bertujuan untuk meningkatkan *outreach* nasabah keuangan syariah baru antara lain:
 - a. Keuangan Syariah Fair (KSF) Cirebon yang diikuti oleh 10 BUS/UUS, 14 industri dari IKNBS dan 6 industri pasar modal syariah. Dengan perolehan sejumlah 4.770 rekening baru. Adapun tingkat pemahaman masyarakat/pengunjung KSF di Kota Cirebon terhadap produk perbankan syariah mencapai 82% dari total 352 responden.
 - b. *iB Vaganza* Banjarmasin yang diikuti oleh 12 BUS/UUS dan 1 BPRS dengan perolehan sejumlah 3.429 rekening baru. Adapun tingkat pemahaman masyarakat/pengunjung KSF di Kota Banjarmasin terhadap produk perbankan syariah mencapai 88% dari total 304 responden.

2. Olimpiade Perbankan Syariah untuk Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Surabaya yang diikuti oleh sebanyak 36 tim.
3. *Workshop* Perbankan Syariah untuk Guru dan Tenaga Pengajar di Kota Ambon, Maluku.
4. Training of Trainers (ToT) Perbankan Syariah Tenaga Pengajar dan Mahasiswa Pascasarjana di Kota Banjarmasin dengan tingkat pemahaman 77,7%
5. Workshop Bimbingan Teknis Pengadilan Agama tentang Perbankan Syariah di Solo untuk Hakim Pengadilan Agama se Karesidenan Surakarta dan daerah terdekat sekitarnya dari provinsi DIY maupun provinsi Jatim, dengan tingkat pemahaman peserta mencapai 82,73% dan dihadiri peserta sejumlah 66 orang.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

OJK melakukan pengembangan peraturan yang telah disusun selama periode laporan, antara lain:

1. Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian

Kajian Terkait Produk Investasi Syariah Berbasis Pertanian bertujuan mengidentifikasi produk investasi syariah di pasar modal yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan baru di sektor pertanian serta memperluas alternatif pembiayaan bagi sektor pertanian dan sarana investasi untuk investor.
2. Kajian Terkait *Bundling Product* dengan Keuangan Syariah Lainnya

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan pasar modal syariah melalui inovasi produk investasi yang baru serta memberikan alternatif investasi bagi investor.
3. Kajian Terkait Lindung Nilai Syariah dalam Pasar Modal

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi lindung nilai syariah di pasar modal serta melihat aspek ke-syariah-an atas lindung nilai di Pasar Modal dan akad yang memungkinkan digunakan.

4. Kajian Lanjutan terkait Inisiasi UU tentang Efek Syariah

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi muatan isi yang akan dibahas dalam UU tentang Efek Syariah yang akan melengkapi 10 peraturan OJK mengenai pasar modal syariah yang telah ada

5. Kajian Terkait Proses Pernyataan Pendaftaran Efek Syariah

Kajian ini bertujuan untuk menjadi landasan argumentasi mengenai urgensi revisi POJK Nomor 18/POJK/04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan Sukuk, sehingga mendorong pengembangan Sukuk Korporasi melalui penyediaan regulasi yang jelas, mudah dipahami, efisien dan efektif, serta fleksibel. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong perkembangan sukuk, antara lain dengan mendorong BUMN untuk menerbitkan sukuk sebagai alternatif pendanaan dengan menyediakan insentif bagi BUMN dalam penerbitan sukuk dan mengembangkan jenis Sukuk Daerah, Sukuk Perpetual yang belum diatur di Indonesia, baik dalam Peraturan OJK aatau peraturan lainnya.

6. Kajian Lanjutan terkait Materi Pasar Modal Syariah Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan standar nasional materi pengajaran pasar modal syariah dan metode pembelajaran yang tepat dalam materi pasar modal syariah di perguruan tinggi.

7. Kajian terkait Penyusunan Materi Pasar Modal Syariah dalam Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Kajian ini bertujuan untuk sebagai bahan referensi dalam menyusun materi pasar modal syariah dalam PPL bagi ASPM dan menetapkan standar kualifikasi bagi lembaga yang akan menyelenggarakan PPL bagi ASPM.

8. Kajian terkait Perluasan Akses bagi Masyarakat untuk Berinvestasi di Produk Pasar Modal Syariah

Kajian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengembangan pasar modal syariah melalui perluasan akses serta mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk berinvestasi di produk pasar modal syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Beberapa kegiatan sosialisasi dan *workshop* dilakukan untuk mengembangkan IKNB syariah antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pasar Asuransi Mikro Internasional dilanjutkan Workshop Asuransi Mikro di Jakarta.
2. *Training of Trainer/Workshop* Keuangan Syariah Terintegrasi Batch II di Banjarmasin dan Batch-III di Pekanbaru.
3. Keuangan Syariah Fair II 2017" di Cirebon
4. Sosialisasi Asuransi Syariah di Yogyakarta.
5. FGD Peningkatan Kompetensi *Key Person* Perusahaan Pembiayaan Syariah di Jakarta.



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi



4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

OJK memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, siklus MSAK berada pada tahap keempat untuk periode 2017 yaitu evaluasi pelaksanaan *strategy map*, *scorecard*, realisasi RKA dan penilaian kinerja semester I-2017 melalui pengisian capaian masing-masing Satuan Kerja (Satker) pada Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL). Pada periode ini, Siklus MSAK OJK juga memasuki tahap pertama untuk periode 2018 yaitu penyusunan *Destination Statement* OJK 2017-2022 serta Peta Strategi OJK 2018.

Pada periode laporan, OJK melakukan evaluasi *Destination Statement* 2012 – 2017 untuk melihat sejauh mana pencapaian rencana jangka menengah OJK selama periode 2012

– 2017. Selain itu, OJK melakukan analisa lingkungan strategis internal dan eksternal untuk mengetahui tantangan dan hambatan kedepannya dalam mengembangkan sektor jasa keuangan. Untuk mendapatkan arahan strategis dari Anggota Dewan Komisiner, telah dilakukan juga proses *depth interview* kepada seluruh Anggota Dewan Komisiner periode 2017-2022 untuk mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang ingin dicapai selama periode OJK 2017-2022. OJK juga menyelenggarakan *Board Retreat* 2018 yang dihadiri oleh seluruh Anggota Dewan Komisiner dan Deputi Komisiner untuk mendapatkan arahan strategis penyusunan *Destination Statement* 2017-2022, Peta Strategi OJK 2018 dan Inisiatif Strategis 2018

Untuk mendukung proses *monitoring* kinerja, OJK sedang melakukan integrasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO). Dengan integrasi ini, diharapkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU dapat dimitigasi dengan baik. Pengembangan sistem juga dilakukan untuk mempermudah penyusunan Laporan Bulanan internal OJK melalui pengembangan Sistem Informasi Laporan Kegiatan Bulanan.

Sebagai bentuk akuntabilitas lembaga, OJK menerbitkan Laporan Triwulan II-2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan OJK selama periode laporan. OJK juga menerbitkan Laporan Kegiatan Tahunan OJK 2016 yang menginformasikan pencapaian OJK selama 2016 baik dalam mendukung pengembangan sektor jasa keuangan, mendorong SJK dalam mendukung sektor prioritas pemerintah serta pengembangan kapasitas internal.

Grafik IV - 1

Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)



4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2017 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Tangguh, Kontributif dan Inklusif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB) serta melalui pengukuran indeks kesehatan SJK seperti rasio *Capital Adequacy*

Ratio (Perbankan), Perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan/MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB. Selain itu, Sasaran Strategis juga diukur melalui kenaikan Indeks Inklusi keuangan dan tingkat kepuasan *Stakeholder* terhadap kinerja OJK.

2. Mengembangkan SJK yang Kontributif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kontribusi SJK pada sektor prioritas pemerintah, pengembangan *sustainable finance* dan peningkatan kualitas dan peran pelaku SJK.
3. Mengembangkan SJK yang Stabil
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian Penguatan Protokol Manajemen Krisis, tindak pengawasan dalam rangka menciptakan IJK yang *resilient*, tingkat pelayanan perizinan terintegrasi, dan peningkatan kualitas *Surveillance* Sistem Keuangan.
4. Mengembangkan SJK yang inklusif
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui pengembangan produk dan atau layanan keuangan dan mikro, tingkat pelaksanaan program Manfaat Balik kepada IJK dan *Stakeholder*, serta peran OJK terhadap peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.
5. Mendorong Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat pelaksanaan program akselerasi pertumbuhan syariah dan tingkat kualitas pelaksanaan *Outreach* SJK yang terintegrasi.
6. Meningkatkan Pengaturan SJK yang Selaras dan Terintegrasi
Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat penyelesaian penerbitan peraturan yang dapat meningkatkan SJK yang kontributif, stabil dan inklusif

4.2 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN KUALITAS

Implementasi *Combined Assurance* Demi Memperkuat *Governance* OJK

Demi terwujudnya tata kelola yang baik, OJK melakukan beberapa kegiatan penguatan pengendalian internal di OJK dimulai dari pelaksanaan audit internal, pengendalian kualitas, pengelolaan risiko serta penanganan dan pencegahan *anti fraud*. OJK mengimplementasikan *Combined Assurance* untuk memastikan apa yang menjadi tujuan strategis OJK dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selama periode pelaporan, pelaksanaan audit internal telah dilaksanakan dengan sepuluh tema asurans antara lain terkait tema pengelolaan SDM dan organisasi, perencanaan dan pengelolaan anggaran, logistik, sistem informasi, pelaksanaan dan penerapan inisiatif strategis dan IKU, pengawasan terintegrasi, perizinan terintegrasi, pengawasan sektoral, pengaturan terintegrasi dan penyusunan laporan keuangan.

Pada sisi pengendalian kualitas, *reviu* kualitas dilakukan melalui pendekatan analisis berdasarkan enam kategori tema asurans yang telah ditentukan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk mengetahui titik-titik proses bisnis yang diperlukan untuk dilakukan *improvement*. Selama periode pelaporan terdapat dua tema *reviu* kualitas yang menjadi fokus dalam periode pelaporan ini yakni *reviu* laporan keuangan semester I 2017 dan perlindungan konsumen. Sementara itu, dari sisi risiko telah dilaksanakan dua *reviu* penilaian kinerja dan *reviu* penanganan krisis. *Reviu* penilaian kinerja ditujukan untuk menganalisis risiko kritical pada proses penilaian kinerja serta memberikan usulan perbaikan agar proses penilaian kinerja lebih efektif. Sementara itu, *reviu* manajemen krisis ditujukan untuk memastikan efektivitas pengendalian *risk event* protokol manajemen krisis dan juga memberikan usulan penanganan untuk

meningkatkan penanganan pengendalian terkait pencegahan dan penanganan krisis.

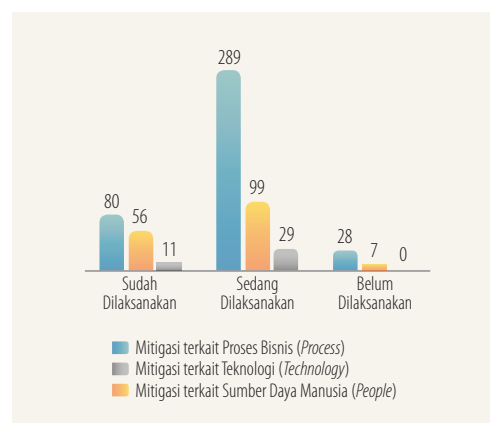
Mitigasi Risiko OJK Triwulan III-2017

Profil Risiko OJK 2017 terdiri dari 17 nama risiko yang telah ditetapkan rencana mitigasinya oleh satuan kerja pemilik risiko. Tiap-tiap risiko memiliki lebih dari satu rencana mitigasi risiko. Pelaporan mitigasi risiko dilakukan dengan mengelompokkan mitigasi ke dalam tiga area besar, yakni:

- Mitigasi terkait Proses Bisnis (*Process*);
- Mitigasi terkait Sumber Daya Manusia (*People*); dan
- Mitigasi terkait Teknologi (*Technology*).

Selama periode pelaporan sebanyak 147 (25%) rincian mitigasi telah dilaksanakan. Sisanya belum dilaksanakan dikarenakan belum jatuh tempo dan perubahan kebijakan. Berdasarkan pengelompokan tersebut, untuk periode Laporan Realisasi Mitigasi Risiko triwulan III-2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Grafik IV - 2 Komposisi Mitigasi Risiko OJK Triwulan III-2017



Control Self Assessment (CSA)

Pelaksanaan CSA OJK *Wide* memiliki tiga tujuan antara lain untuk menilai efektivitas pengendalian internal OJK, menemukan area pengendalian yang masih lemah dan memperbaiki pelaksanaan proses pengendalian internal secara berkelanjutan. CSA OJK *Wide* diikuti oleh 62 responden yang terdiri dari

Deputi Komisioner, Kepala Departemen, Kepala Grup dan Kepala Kantor Regional. Lima komponen pengendalian internal yang dilakukan penilaian meliputi aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian internal. Hasil penilaian pengendalian internal dalam triwulan ini menunjukkan bahwa pengendalian internal OJK cukup efektif. Beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk dilakukan *continual improvement* antara lain pengelolaan sumber daya manusia, akuntabilitas atas tanggung jawab terkait pengendalian internal dan perbaikan kualitas sistem informasi. Dengan optimalnya pengendalian internal OJK diharapkan tata kelola semakin baik dan kinerja OJK dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal.

Program Pengendalian Gratifikasi

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) melakukan beberapa Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di OJK. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh UPG yaitu melakukan pengelolaan laporan gratifikasi. Pada triwulan III-2017 UPG OJK menerima dan mengelola 61 laporan gratifikasi sehingga total laporan gratifikasi yang dikelola UPG sejak 2015 sejumlah 345 laporan. OJK juga melakukan proses *enhancement* Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi "SiPeGa" yang rencananya akan *Go Live* pada Oktober 2017.

Whistle Blowing System

Whistle Blowing System merupakan sarana yang disediakan OJK untuk melaporkan Insan OJK yang diindikasikan melakukan *fraud*. Pada triwulan III-2017, jumlah laporan WBS yang masuk 20 laporan sehingga total laporan yang diterima per 30 September 2017 sebanyak 185 laporan. Jumlah laporan yang sedang ditindaklanjuti (laporan yang berindikasi pelanggaran oleh jajaran OJK dan didukung bukti yang memadai) sejumlah 12 laporan dan laporan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 24 laporan. Pada periode laporan, OJK melakukan *enhancement* pada OJK WBS dan dijadwalkan untuk *Go Live* pada bulan Desember 2017.

Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN berdasarkan jumlah pegawai OJK yang wajib menyampaikan LHKPN pada triwulan III-2017 yaitu 100% dari jumlah pegawai OJK yang wajib menyampaikan LHKPN per 31 Januari 2017. Pada triwulan III-2017, juga telah dilakukan *reminder* untuk aktivasi *e-lhkpn* dan pengelolaan pelaporan LHKPN bagi ADK yang telah memasuki masa akhir jabatan dan ADK serta pegawai yang baru diangkat menjadi pegawai OJK.

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

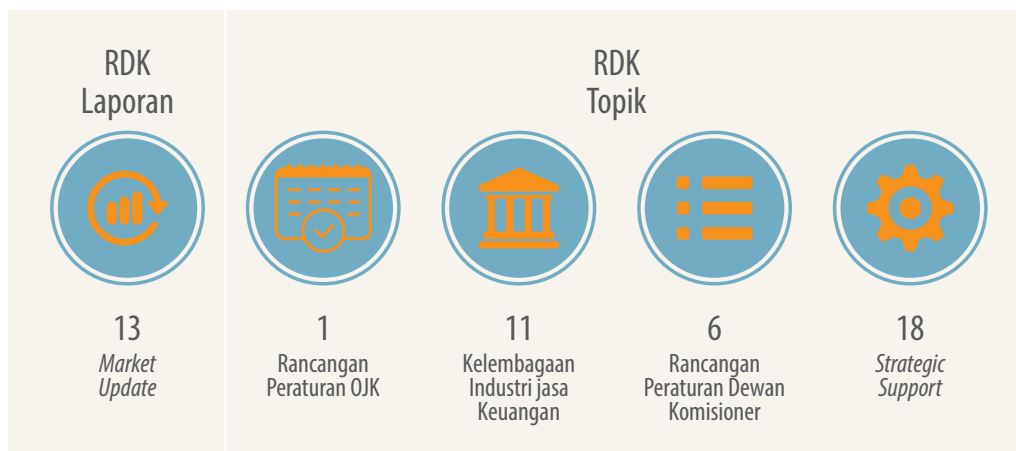
Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Komisioner melaksanakan rapat Dewan Komisioner secara berkala. Rapat Dewan Komisioner (RDK) diselenggarakan dengan prinsip akuntabilitas, bertanggung jawab, wajar, efektif, transparan, dan tata kelola yang baik. RDK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di OJK ini yang diselenggarakan untuk menetapkan kebijakan strategis. Selama triwulan III-2017, RDK diselenggarakan sebanyak 19 kali yang membahas 13 topik yang bersifat laporan dan 36 topik dalam rangka pengambilan keputusan.

Pada triwulan III-2017, terjadi penggantian Anggota Dewan Komisioner (ADK) di OJK melalui Keputusan Presiden RI Nomor 87/P Tahun 2017. Di awal kepemimpinan ADK OJK Periode 2017-2022, ADK OJK menyepakati beberapa komitmen dan arahan yang kemudian diputuskan dalam RDK. Selain itu, sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 21/2011 tentang OJK, RDK telah memutuskan pembagian tugas di antara Anggota Dewan Komisioner.

Sebagai tindak lanjut atas komitmen dan arahan ADK mengenai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di

Grafik IV - 3

Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisiner



OJK tersebut, sejumlah kebijakan strategis telah diputuskan dalam RDK di triwulan III-2017 yaitu perubahan beberapa peraturan di internal OJK seperti aturan mengenai tunjangan dan fasilitas ADK, aturan terkait struktur organisasi di OJK, aturan mengenai penyelenggaraan RDK, dan beberapa aturan internal lainnya. Selain itu, RDK juga memutuskan sejumlah topik *strategic support* yang terkait dengan kebijakan internal OJK seperti pengelolaan SDM di OJK, efisiensi Rencana Kerja dan Anggaran OJK, penyediaan gedung Kantor Pusat OJK, dan penetapan *Destination Statement* OJK tahun 2017-2022.

Selain kebijakan strategis di internal OJK, pada triwulan III-2017 RDK juga memutuskan kebijakan strategis berupa pengaturan di Industri Jasa Keuangan. Sebagai bagian dari upaya OJK dalam mendukung penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, RDK menyetujui Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Perubahan Kedua Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini memperluas instrumen investasi sebagai bagian dari pemenuhan penempatan investasi SBN oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank yaitu

dengan memperhitungkan kepemilikan efek beragunan aset, reksa dana penyertaan terbatas, dan instrumen lainnya yang penggunaannya untuk infrastruktur. RDK juga memutuskan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pengurus di industri perbankan dan non-bank, serta menyetujui pemutakhiran daftar Bank Sistemik sebagaimana amanat Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Selain forum RDK, ADK juga melakukan pembahasan atas materi tertentu untuk memberikan arahan atas pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dalam bentuk forum *Board Seminar*. Selama triwulan III-2017, Dewan Komisiner menyelenggarakan *Board Seminar* sebanyak 18 kali dengan jumlah topik yang dibahas sebanyak 29 materi. Beberapa materi yang dibahas dalam forum *Board Seminar* di triwulan ini adalah mengenai Rancangan POJK. Materi Rancangan POJK wajib dibahas terlebih dahulu dalam forum *Board Seminar* untuk mendapatkan arahan atau perspektif dari Dewan Komisiner dan masukan Satuan Kerja lain di OJK terhadap substansi aturan. Selanjutnya, Rancangan POJK tersebut akan disampaikan kepada industri untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari industri atas substansi aturan.

4.4 KOMUNIKASI

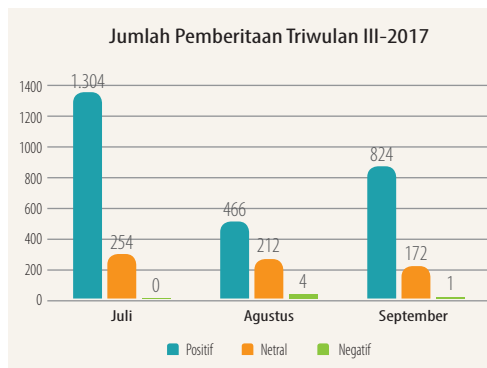
4.4.1 Komunikasi Informasi OJK

Selama periode laporan, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* dan *Youtube*.

Sampai akhir triwulan III-2017, media sosial *twitter* OJK memiliki lebih dari 30.000 *followers*, media sosial *facebook* OJK memiliki lebih dari 24.000 *fans* dan *Instagram* OJK memiliki lebih dari 29.000 *followers*. Terkait pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisis kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisis ini dilakukan melalui *monitoring* terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum pada 22 media cetak, 54 media *online*, 14 stasiun televisi nasional, TV daerah terpilih.

Total pemberitaan selama Juli-September 2017 adalah 3.237 berita dengan rincian proporsi

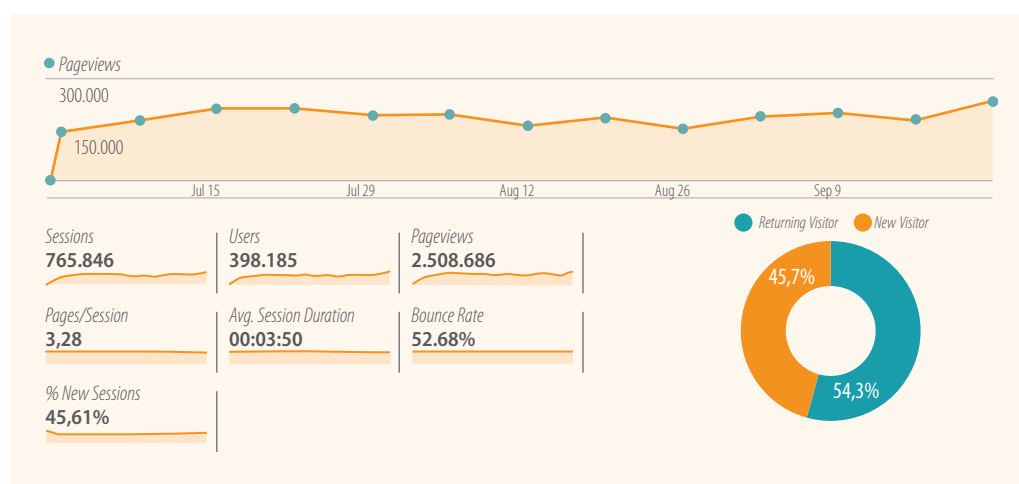
Grafik IV - 5 Tone Pemberitaan Triwulan III-2017



sebesar 2.594 berita positif, 638 pemberitaan netral, dan lima berita negatif yang terdiri dari empat OJK Wide dan satu bidang Pasar Modal. Terkait dengan relasi media, OJK menerbitkan 23 siaran pers yang didominasi oleh OJK Wide sebanyak 15 siaran pers. Penerbitan siaran pers bertujuan untuk mengumumkan program atau kegiatan OJK, peraturan terbaru OJK atau isu lainnya terkait dengan pelaku Industri Jasa Keuangan yang memiliki nilai berita agar dapat dipublikasikan di media massa.

Adapun judul siaran pers yang telah diterbitkan oleh OJK dapat dilihat pada tabel berikut:

Grafik IV - 4 Statistik Pengunjung Website OJK



Tabel IV - 1 Judul Siaran Pers Triwulan III-2017

No	Judul Siaran Pers
1	Aset BPR Tumbuh 10,18 Persen OJK Dorong Pengembangan Produk dan Layanan BPR
2	OJK dan BI Monitor Terganggunya ATM Akibat Permasalahan Satelit Telkom
3	OJK Buka Galeri Investasi <i>Mobile</i> di Ambon
4	OJK Optimalkan Peran Pasar Modal Sebagai Sumber Pembiayaan Infrastruktur
5	Asuransi Mikro Tumbuh Pesat, Premi Naik 80 Persen
6	OJK Luncurkan Buku Literasi Keuangan Untuk SMA Versi Elektronik Serta Buku Literasi Keuangan Bagi Profesional dan Pensiunan
7	Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
8	OJK dan ITB Jalin Kerja sama Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
9	OJK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
10	Dukung Program Pembangunan Berkelanjutan OJK Luncurkan <i>"Bali Center For Sustainable Finance"</i>
11	Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Dinamika Perekonomian Global: OJK-ADB Gelar Seminar Internasional <i>"Navigating Financial Stability In An Evolving Global Economic System"</i>
12	Mahkamah Agung Lantik Anggota Dewan Komisiner OJK Periode 2017-2022
13	OJK Keluarkan Peraturan di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, Pengembangan UKM, Program Keuangan Berkelanjutan dan Pemblokiran Dana Teroris
14	OJK Tingkatkan Efisiensi dan Efektifitas Untuk Laksanakan Fungsi dan Tugas yang Damanahkan Undang-Undang
15	Satgas Waspada Investasi Gandeng Enam Anggota Baru Cegah Investasi Ilegal
16	Penawaran Investasi Ilegal Mengkhawatirkan, Satgas Waspada Tutup 11 Entitas
17	Tindaklanjuti Program Efisiensi, OJK Rampingkan Organisasi
18	Waspada Dugaan Penipuan Memakai Nama Komisiner OJK
19	Nurhaida Dilantik Sebagai Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
20	Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Dalam Kondisi Normal
21	Optimalisasi SDM, OJK Lakukan Pergantian Pejabat
22	OJK Dorong Akademisi Kembangkan Industri Keuangan Syariah: Gelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) XVI di Universitas Sebelas Maret
23	<i>Annual Report Award</i> 2016: Mendorong Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Perusahaan di Indonesia

Selain itu, OJK menyelenggarakan jumpa pers sebanyak empat kali yang terdiri dari tiga OJK Wide dan satu Pasar Modal. Topik jumpa pers triwulan III-2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 2 Jumpa Pers Triwulan III-2017

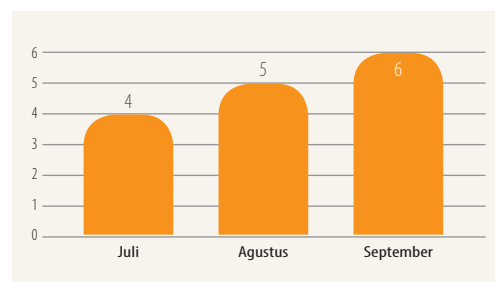
No	Nama Kegiatan
1	Dukung Program Pembangunan Berkelanjutan, OJK Luncurkan <i>"Bali Center For Sustainable Finance"</i>
2	Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Tengah Dinamika Perekonomian Global: OJK-ADB Gelar Seminar Internasional <i>"Navigating Financial Stability in an Evolving Global Economic System"</i>
3	OJK Tingkatkan Efisiensi dan Efektifitas Untuk Laksanakan Fungsi dan Tugas yang Damanahkan Undang-Undang
4	OJK Optimalkan Peran Pasar Modal Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

Sebagai upaya untuk menjaga relasi dan meningkatkan pemahaman media terhadap program dan kebijakan OJK, perkembangan Industri Jasa Keuangan serta membangun opini positif OJK di masyarakat, OJK mengadakan kegiatan pelatihan dan *gathering* wartawan media massa yang dibuka oleh Ketua Dewan Komisiner OJK dengan jumlah peserta sebanyak 59 orang yang terdiri dari 59 media. Pada kegiatan tersebut, OJK memberikan pendalaman materi mengenai isu-isu OJK yang perlu mendapatkan pemberitaan media di masa mendatang.

4.4.2 Kunjungan Instansi

Sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan program edukasi kepada masyarakat terhadap peran dan fungsi OJK, OJK menerima kunjungan masyarakat (institusi, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Permintaan kunjungan dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan kunjungan beserta waktu dan topik yang diinginkan ke email di visitOJK@OJK.go.id.

Grafik IV - 6 Kunjungan Institusi Triwulan III-2017



Selama periode triwulan III-2017, OJK telah menerima 15 kunjungan institusi dengan total 1.002 peserta. Adapun institusi yang melakukan kunjungan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV - 3 Kunjungan Institusi Triwulan III-2017

No	Nama Institusi
1	FEB Islam Univ. Islam Negeri Raden Patah Palembang
2	KSEI Sharia Economic Forum Univ. Gunadarma
3	Universitas Muria Kudus
4	Politeknik Negeri Malang
5	Institute Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor
6	Politeknik Negeri Bali Jurusan Akuntansi
7	Kelompok Studi Pasar Modal Univ. STIKUBANK Semarang
8	Politeknik Negeri Bali Jurusan Administrasi Niaga
9	Perbanas Institute Jurusan Manajemen
10	Politeknik Negeri Bandung Keuangan Syariah
11	Universitas Airlangga Fakultas Ekonomi
12	UIN Raden Intan Lampung Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam
13	Trisakti Business Law Community
14	SMK Negeri 1 Kedawung Cirebon
15	SMK Waskito

4.4.3 OJK TV

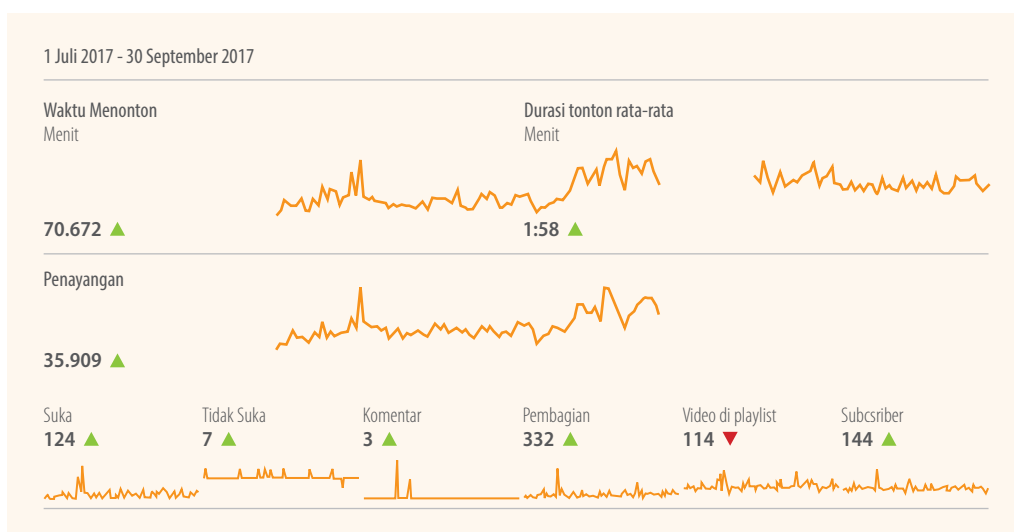
OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program, dan kegiatan OJK yang ditayangkan melalui kanal *Youtube* dengan akun *Jasa Keuangan*. Selama triwulan III-2017, OJK TV memproduksi 22 liputan yang terdiri dari 18 liputan OJK *Wide* dan empat liputan di bidang Pasar Modal. Pada periode tersebut kanal *youtube* *Jasa Keuangan* telah disaksikan lebih dari 35.000 *viewers*.

4.5 KEUANGAN

4.5.1 Anggaran dan Penggunaan

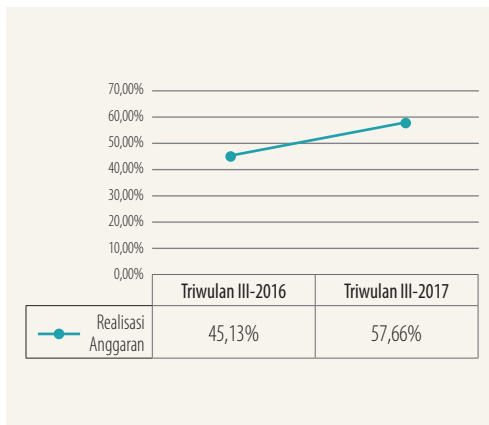
Sebagaimana tahun 2016, Anggaran OJK 2017 sebesar Rp4.371,49 miliar dibiayai dari penerimaan pungutan OJK. Sampai akhir periode laporan, realisasi anggaran OJK sebesar Rp2.520,70 miliar (57,66%), meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi tersebut

Grafik IV - 7 Statistik OJK TV Triwulan III-2017



merupakan indikator bahwa OJK lebih optimal dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kerja yang telah disusun.

Grafik IV - 8 Realisasi Anggaran



4.5.2 Penyempurnaan Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel, OJK secara aktif melakukan penyempurnaan peraturan dan sistem aplikasi keuangan. Sampai akhir periode laporan, penyempurnaan sistem aplikasi Keuangan yang dilakukan antara lain proses penyempurnaan spesifikasi desain aplikasi pengelolaan keuangan yang akan menjadi dasar dalam pembangunan SI-AUTO Tahap 2.

SI-AUTO merupakan aplikasi yang mengintegrasikan empat aplikasi keuangan yaitu Sistem Informasi Penyusunan Anggaran (SIPA), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), Sistem Informasi Revisi Anggaran (SI-VIRA) dan Sistem Akuntansi OJK (SAIKO) serta satu aplikasi penatausahaan aset OJK (SISPUAS). SIAUTO juga melakukan *interface* dengan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), Sistem Manajemen Kinerja (SIMPEL), Sistem Informasi SDM (SIMFOSIA), Sistem Remunerasi OJK (OJK-SAR) dan Sistem yang ada di Bank Persepsi. Dengan pembangunan aplikasi SI-AUTO, diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan OJK, antara lain melalui:

- Peningkatan kehandalan data keuangan;
- Pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan sesuai dengan praktik umum (*best practice*); dan
- Simplifikasi proses bisnis pengelolaan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penganggaran, OJK melakukan penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja atau *Performance Based Budgeting* (PBB) untuk RKA 2018. Implementasi PBB, antara lain melalui penjabaran (*alignment*) antara peta strategis dengan anggaran serta penyusunan kajian awal Standar Biaya dengan menggunakan metode *Activity Based Costing* (ABC).

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan terus mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan tersebut, OJK dari sisi *supporting* khususnya dalam pengelolaan dan penyediaan sistem informasi antara lain mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

4.6.1 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok

• Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Untuk mendukung pelayanan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan publik dalam memantau informasi kredit yang dimiliki debitur serta untuk mendukung LJK dalam mengendalikan resiko kredit yang diberikan oleh debitur maka OJK melakukan pembangunan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Sistem ini terdiri dari *Client Application* dan *Web Application*.

- **Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT)**

Pengembangan SPRINT merupakan aplikasi perizinan berbasis *web* secara *end-to-end solution* dan adaptif, di mana LJK dapat melakukan registrasi perizinan dan pemantauan proses perizinan di OJK secara cepat dan transparan. Aplikasi ini dikembangkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi waktu proses perizinan dan mengurangi frekuensi korespondensi serta memudahkan pihak eksternal dalam memantau proses permohonan perizinan.

Pengembangan SPRINT diutamakan pada modul Obligasi dan Sukuk, Modul Dana Pensiun, Modul Merger Akuisisi Konsolidasi dan Modul Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP).

- **Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)**

Pengembangan SIPT bertujuan untuk membantu pengawas terintegrasi dalam melakukan analisa, menentukan keputusan terkait konglomerasi keuangan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan serta standarisasi pelaksanaan tugas pengawasan. Pengembangan SIPT diutamakan pada modul *Financial Conglomerate Ratio*.

- **Pengembangan Sistem E-Reporting**

Pengembangan sistem *E-Reporting* merupakan aplikasi pelaporan laporan keuangan secara elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disampaikan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK), penyampaian tepat waktu, memudahkan pengawas dalam pengolahan dan analisa data keuangan LJK serta proses monitoring laporan perusahaan. Pengembangan sistem

ini diutamakan pada pelaporan untuk Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan *Self Regulatory Organization* (SRO).

- **Sistem Aplikasi Pengawasan dan Monitoring**

OJK juga mengembangkan sistem aplikasi untuk mendukung tugas pokok pengawasan dan monitoring. Sistem aplikasi yang berada pada tahap pengembangan antara lain (a) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS), (b) Pengembangan Sistem Informasi Penetapan Tarif Premi Asuransi (SIPETIR), (c) Pengembangan Sistem Monitoring Data Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi (SIKARIN), (d) Pengembangan Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM), dan (e) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan. (SIP) untuk modul Laporan Validasi dan Statistik, modul Data Keuangan Syariah, modul Investigasi Perbankan serta Modul *Banking Surveillance Dashboard*.

4.6.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Meningkatkan Kapasitas Organisasi

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dan monitoring, OJK juga mengembangkan aplikasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Sistem aplikasi yang berada pada tahap pengembangan antara lain (a) Sistem Informasi Pelaporan Gratifikasi (SIPEGA), (b) Sistem Informasi Pembuatan Peraturan Perundang-undangan di OJK, (c) Sistem Informasi Akuntansi OJK (SI-AUTO) tahap 2, (d) Pengembangan Aplikasi Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL), (e) Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO) modul *Control Self Assessment* (CSA), (f) *E-Procurement* OJK, (g) *Whistle Blowing System* (WBS).

4.7 LOGISTIK

4.7.1 Penyiapan Gedung Kantor Pusat

Pada triwulan III-2017, fokus OJK dalam periode laporan adalah terkait perencanaan penataan dan instalasi fasilitas kerja untuk gedung kantor pusat baru. Proses penataan dan pemindahan seluruh satuan kerja kantor pusat ke gedung kantor pusat baru sendiri akan dilaksanakan secara simultan sepanjang triwulan IV 2017.

4.7.2 Penyiapan Gedung Kantor Regional/OJK

Di daerah, Kantor Regional dan Kantor OJK yang telah menempati gedung kantor sendiri baik

yang telah merupakan milik OJK, gedung sewa maupun pinjam pakai aset milik pemerintah daerah hingga periode laporan adalah sebanyak 31 Kantor, yakni:

4.7.3 Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

Dari sisi pengaturan kelogistikan, dalam periode laporan telah ditetapkan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan yang sedang dalam tahap finalisasi yakni ketentuan terkait; (1) Sistem Pengamanan OJK, (2) Penghapusan Barang Milik OJK, dan (3) Standar Penanda Interior Kantor, Eksterior Kantor dan Penanda Aset OJK. Untuk teknis penatausahaan aset, akan dilaksanakan *Workshop* Penatausahaan Aset pada periode laporan selanjutnya dengan mengundang seluruh petugas penatausahaan di Kantor OJK pusat maupun daerah, dengan harapan agar output laporan penatausahaan aset akan lebih relevan dan andal sebagai input terhadap Laporan Keuangan OJK.

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Pengembangan Organisasi

Pada 20 Juli 2017, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2022 resmi dilantik usai dilakukan pengucapan sumpah jabatan. Sebagai tindak lanjut dari pelantikan tersebut juga telah dilakukan penetapan pembagian tugas Anggota Dewan Komisiner sebagai pedoman pelaksanaan tugas Anggota Dewan Komisiner yang ditetapkan berdasarkan prinsip kejelasan tanggung jawab pelaksanaan tugas (menghindari tumpang tindih) dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keseimbangan beban kerja. Pembagian tugas tersebut juga menjadi dasar dalam penyesuaian struktur organisasi di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan khususnya pada Bidang Manajemen Strategis 1 dan Bidang Manajemen Strategis 2.

Tabel IV - 4

Kantor Regional dan Kantor OJK yang Telah Menempati Gedung Sendiri

1. Kantor Regional 2 Jawa Barat (Bandung) – <i>Milik OJK</i>
2. Kantor Regional 3 Jawa Tengah & D.I.Y (Semarang)
3. Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Makassar)
4. Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan (Palembang)
5. Kantor Regional 8 Bali & Nusa Tenggara (Denpasar)
6. Kantor Regional 9 Kalimantan (Banjarmasin)
7. Kantor OJK Tasikmalaya (Tasikmalaya)
8. Kantor OJK Prov. D.I.Y (Yogyakarta)
9. Kantor OJK Solo (Solo)
10. Kantor OJK Tegal (Tegal)
11. Kantor OJK Purwokerto (Purwokerto)
12. Kantor OJK Jember (Jember)
13. Kantor OJK Kediri (Kediri)
14. Kantor OJK Prov. Kepulauan Riau (Batam)
15. Kantor OJK Prov. N.A.D (Banda Aceh)
16. Kantor OJK Prov. Sulawesi Tenggara (Kendari) – <i>pinjam pakai</i>
17. Kantor OJK Prov. Sulawesi Tengah (Palu)
18. Kantor OJK Prov. Maluku (Ambon)
19. Kantor OJK Prov. Papua dan Papua Barat (Jayapura)
20. Kantor OJK Prov. Lampung (Bandar Lampung)
21. Kantor OJK Prov. Jambi (Jambi)
22. Kantor OJK Prov. Bengkulu (Bengkulu)
23. Kantor OJK Prov. Nusa Tenggara Timur (Kupang)
24. Kantor OJK Prov. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)
25. Kantor OJK Cirebon (Cirebon)
26. Kantor Regional 5 Sumbagut (Medan)
27. Kantor OJK Prov. Sumatera Barat (Padang)
28. Kantor OJK Prov. Riau (Pekanbaru)
29. Kantor OJK Prov. Sulawesi Utara (Manado) – <i>pinjam pakai</i>
30. Kantor OJK Prov. Kalimantan Barat (Pontianak)
31. Kantor OJK Prov. Kalimantan Timur (Samarinda)

Grafik IV - 9

Gambaran Topik yang Dibahas dalam Rapat Dewan Komisioner



Dengan perubahan jajaran Dewan Komisioner, OJK juga mencanangkan program transformasi yang tertuang dalam Komitmen dan Arahan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022 Mengenai Upaya Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Tugas di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun isi dari Komitmen dan Arahan Dewan Komisioner adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan
2. Optimalisasi peran ADK selaku panutan (*role model*)
3. Penyempurnaan organisasi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia;
4. Efisiensi anggaran dan kegiatan prioritas OJK dalam upaya pencapaian keberlanjutan (*sustainability*) anggaran OJK.

4.8.2 Kebijakan Sumber Daya Manusia

I. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Selama periode laporan, telah diterbitkan tiga kebijakan SDM OJK, dalam bentuk dua Peraturan Dewan Komisioner dan satu Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK), dua Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK) dan satu keputusan Deputi Komisioner, yaitu:

1. PDK tentang Tunjangan Pendukung Operasional, Tunjangan Fasilitas, Asuransi dan Dana Pensiun bagi Anggota Dewan Komisioner;
2. PDK tentang Fasilitas Perjalanan Dinas bagi Anggota Dewan Komisioner;
3. SEDK tentang Sistem pemenuhan SDM.

4. KADK tentang Pola Penetapan Konversi level Jabatan dan jenjang penghasilan bagi Pegawai Penugasan;
5. KADK tentang Standar Penghasilan Tenaga Kerja *Outsourcing* yang melekat pada Anggota Dewan Komisiner;
6. KEP DEPKOM tentang Penetapan Kota Lokasi Penerimaan (*Homepage*) Pegawai.

II. Sistem Informasi

Pada triwulan III-2017, bagian sistem informasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- A. Penyelesaian pengembangan SIMFOSIA
Pengembangan SIMFOSIA telah melaksanakan lelang pengadaan dan diperoleh pemenang pada pengadaan ini.
- B. Implementasi sistem aplikasi OJK-SAR Versi 2.0
Pada periode pelaporan terdapat kebutuhan penambahan dan penyesuaian fitur OJK-SAR Versi 2.0 dengan rincian yaitu:
 - a. Perubahan perhitungan Tunjangan Hari Raya (THR);
 - b. Penambahan fitur pengelolaan dan laporan luran Koperasi Bank Indonesia (KOPERBI);
 - c. Penambahan fitur pengelolaan dan laporan luran Ikatan Pegawai OJK;
 - d. Penambahan fitur pengelolaan dan laporan Biaya Partisipasi Sendiri dan *Excess Claim* penggunaan fasilitas kesehatan;
 - e. Penambahan fitur pengelolaan dan laporan pembayaran pajak secara desentralisasi.
 - f. Penyesuaian tampilan keterangan pada slip penghasilan untuk *grade*, nomor DPLK dan nomor BPJS Ketenagakerjaan;
 - g. Penyesuaian perhitungan bantuan uang duka dan uang janda yang dibayarkan secara bersamaan;

- h. Penyesuaian tampilan sinkronisasi;
- i. Penyesuaian laporan rekening bank; dan
- j. Penambahan fitur laporan dan komponen Koperasi OJK.

- C. Peningkatan kualitas data SIMFOSIA
Dalam rangka peningkatan kualitas data pegawai di SIMFOSIA, OJK telah merekap data pegawai yang masih *null* dan perlu dilengkapi/diperbaiki oleh masing-masing pegawai. Proses melengkapi data dilakukan dengan bekerja sama dengan admin di setiap satuan kerja untuk melengkapi data-data pegawai di masing-masing satuan kerja.

- D. Mengembangkan Smart HR
Sistem Aplikasi *Mobile* Sumber Daya Manusia (*Smart HR*), merupakan sistem Informasi sumber daya manusia berbasis *mobile/smart phone* yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia kepada seluruh pegawai dengan menyediakan layanan data Informasi pegawai dan organisasi yang dapat diakses di mana saja dengan mudah dan cepat menggunakan *smartphone*. Modul yang akan dikembangkan dalam *Smart HR* terdiri dari 8 modul, yaitu:
 - a. *Dashboard*;
 - b. Infografis Organisasi dan SDM;
 - c. Profil Pegawai;
 - d. Pencarian Dana;
 - e. Struktur Organisasi;
 - f. Layanan Cuti dan Ijin;
 - g. Perubahan Status Kehadiran; dan
 - h. Daftar Kebijakan SDM.

4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Pemenuhan Pegawai

Pada triwulan III-2017 telah dilakukan pemenuhan pegawai melalui mutasi, rotasi dan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) dengan pertimbangan :

- a. Terdapat kebutuhan pemenuhan Sumber Daya Manusia di Satuan Kerja yang sangat mendesak karena rasio pemenuhannya sangat jauh dari ideal.
- b. Terdapat kebutuhan optimalisasi SDM serta memberikan kesempatan kepada pegawai lainnya yang berpotensi (regenerasi)

2. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Sehubungan dengan telah dilakukannya mutasi dan penunjukan Kepala OJK Regional dan Kepala OJK, telah dilaksanakan Pelantikan dan serah terima jabatan di Kantor Pusat dan khusus untuk serah terima jabatan Kepala OJK Regional dan Kepala OJK serah terima jabatan dilaksanakan di kantor masing-masing (15 kota). Pelaksanaan serah terima jabatan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisiner serta pejabat pemerintahan setempat seperti Gubernur, Walikota, Kapolda dan pejabat-pejabat lainnya.

4.9 OJK INSTITUTE

OJK Institute berfungsi sejak 2016, secara bertahap mengembangkan infrastruktur OJK *Institute* dalam rangka mewujudkan *center of excellence* di bidang Jasa Keuangan. Pada tahun ini OJK direncanakan akan mendirikan perpustakaan dan galeri sebagai pusat informasi, pendidikan dan pembelajaran industri keuangan Indonesia.

Sejalan dengan tema budaya kerja tahun 2017 yaitu "Bangga Menjadi Insan OJK", program pengembangan SDM difokuskan pada pembentukan karakter dan disusun untuk mendukung sasaran program transformasi OJK 2014 – 2017, dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaannya.

Adapun program pengembangan SDM yang akan dilaksanakan OJK *Institute* selama tahun 2017 meliputi: (1) Program Pengembangan

Kepemimpinan; (2) Program Pengembangan Kompetensi; (3) Program Pendidikan Formal; (4) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (5) Program Internalisasi Kultur; (6) Program Bimbingan; dan (7) Program Penugasan Pegawai.

Di tahun 2017, OJK Institute membuka kesempatan kepada masyarakat dalam hal ini pelajar dan mahasiswa, untuk belajar bekerja di OJK melalui Praktek Kerja Lapangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, tesis dan disertasi.

Selama triwulan III-2017, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh OJK *Institute* adalah sebagai berikut:

4.9.1 Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)

Program yang bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi ini, pada tahun 2017, Penyelenggaraan PPKB mengalami perubahan seiring dengan penyempurnaan model kompetensi kepemimpinan di OJK. Penyelenggaraan Program yang semula hanya bersifat klasikal, sekarang terbagi menjadi tahap *Pre-Training*, *Training* dan *Post Training (assignment)*.

Selama triwulan III-2017, PPKB dilaksanakan sebanyak lima kali yaitu:

- a. PPKB Level Pertama (Kepala Subbagian) Batch 2. Kegiatan klasikal batch 2 Jakarta diikuti oleh 40 peserta.
- b. PPKB Level Madya 1 (Kepala Bagian) Batch 2. Kegiatan batch 2 dilaksanakan diikuti oleh 41 peserta.
- c. PPKB Level Madya 2 (Deputi Direktur), kegiatan klasikal dilaksanakan di Jakarta diikuti oleh 29 peserta.

4.9.2 Program Pengembangan Kompetensi

- a. Program Sertifikasi Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK)
 Pada triwulan ketiga telah diselenggarakan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 1 sebanyak lima *batch* dengan total peserta 200 orang dan Program Sertifikasi Pengawas SJK untuk level 2 sebanyak 1 *batch* dengan total peserta 40 orang.
- b. PPK *Non In-House* Luar Negeri :
 PPK *Non In-House* Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan terkait biaya, kualitas materi dan kualitas penyelenggara pelatihan. Selama triwulan III-2017 tercatat total 31 pegawai telah melaksanakan pengembangan di luar negeri, dengan rincian 30 pegawai untuk pengembangan kompetensi teknis (*hard skill*) dan 1 pegawai mengikuti pengembangan kompetensi kepemimpinan (*leadership*).
- c. PPK *Non In House* Dalam Negeri :
 PPK *Non In House* Dalam Negeri tercatat selama triwulan III-2017 sebanyak 170 pegawai mengikuti program pengembangan kompetensi, yang terdiri dari 113 pegawai telah melaksanakan program pengembangan kompetensi teknis, dan 57 pegawai untuk program pengembangan kompetensi perilaku.
- d. PPK *In-House* Dalam Negeri :
 PPK *In-House* Dalam Negeri selama triwulan ketiga tahun 2017 difokuskan pada peningkatan kompetensi teknis. OJK Institute telah melaksanakan 8 IHT dengan jumlah peserta secara keseluruhan mencapai 474 pegawai.

4.9.3 Program Pendidikan Formal

Program Pendidikan Formal merupakan bentuk pengembangan SDM pada jenjang pendidikan formal yang diberikan kepada pegawai OJK potensial yang telah memenuhi kriteria, baik untuk jenjang pendidikan Strata-2 maupun Strata-3. Selama triwulan III-2017 tercatat 11 orang pegawai untuk skim-1 (beasiswa penuh dari OJK), delapan orang pegawai untuk skim-2 (beasiswa dari pihak lain dengan *top up* fasilitas dari OJK), empat orang pegawai untuk skim-3 (beasiswa dari pihak lain dengan remunerasi dari OJK).

4.9.4 Program Pengenalan Calon Pegawai

Selama triwulan III-2017, telah dilaksanakan program pengenalan calon pegawai sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Calon Staf Otoritas Jasa Keuangan (PCS-OJK) Angkatan III untuk level setingkat Staf dengan jumlah peserta 442 orang
- b. Program Pembekalan Angkatan 1 pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu *batch* 1, dengan peserta 120 orang.
- c. Program Pembekalan Angkatan 1 pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu *batch* 2, dengan peserta 123 orang.
- d. Program Pembekalan Angkatan 2 pada Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, dengan peserta sebanyak 60 orang.

4.9.5 Program Penugasan

Selama triwulan ketiga tahun 2017, OJK Institute telah menugaskan enam pegawai untuk mengikuti program *secondment/attachment* di ASIC, lima pegawai mengikuti program *secondment* di APRA, dan satu pegawai mengikuti program *secondment* di GLOPAC, Japan.

4.9.6 Program Peningkatan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program Manfaat Balik melalui Program Peningkatan Pengembangan Kompetensi SDM Sektor Jasa Keuangan, OJK Institute melaksanakan 15 *workshop* pada triwulan III-2017 yang diselenggarakan dengan jumlah peserta sebanyak 1822 peserta. Beberapa *workshop* yang telah diselenggarakan adalah *Workshop E-Registration* bagi Emiten dan Perusahaan Publik, *Workshop Wakil Perantara Pedagang Efek Bidang Pemasaran*, dan *Workshop Internalisasi National Risk Assessment*.

4.9.7 Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti

PPK persiapan masa purnabakti diberikan untuk meningkatkan kemandirian Pegawai dalam menghadapi masa purnabakti. Pelaksanaan Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti *batch* 2 telah dilaksanakan dan diikuti oleh 39 orang peserta. Modul yang disampaikan yaitu, Psikologi Persiapan Masa Purna Tugas, Spiritual, Kesehatan, Pengelolaan Keuangan, Kewirausahaan dan juga studi ke usaha kecil dan menengah.

4.9.8 Program Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di OJK

Sebagai salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat/pelajar/mahasiswa dalam rangka memberikan kesempatan magang/penelitian di OJK, selama triwulan III-2017, OJK Institute telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 125 pelajar/mahasiswa dan telah membantu mahasiswa yang melakukan penelitian di Satuan Kerja terkait untuk 65 penelitian skripsi/tesis/disertasi

4.10 MANAJEMEN PERUBAHAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi OJK serta *Destination Statement* 2017, OJK menyelesaikan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi pengelolaan inisiatif strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi selama 2017. Sesuai *Roadmap* dan *Action Plan* Program Transformasi Manajemen Perubahan 2014-2017, seluruh kegiatan difokuskan dalam rangka memenuhi tema “Bangga menjadi Insan OJK”, yaitu menjadikan Insan OJK sebagai *Brand Ambassador OJK*.

OJK menetapkan tiga program budaya kerja yaitu Program OJK Melayani, Program OJK Peduli, dan Program OJK Inovatif. Program budaya tersebut dirancang untuk mendukung *Roadmap* OJKway 2017 yaitu menjadikan insan OJK sebagai *brand ambassador* yang bangga terhadap institusinya. Adapun tujuan program OJK Melayani adalah untuk membangun perilaku cepat tanggap dan menerapkan pelayanan prima kepada stakeholders. Program OJK Peduli dicanangkan untuk meningkatkan kepedulian insan OJK terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar melalui kegiatan sosial dan juga sebagai wadah/sarana untuk mengkampanyekan OJK. Program OJK Inovatif mendorong insan OJK untuk membuat terobosan baru, perbaikan proses kerja dan mutu produk satker sehingga menumbuhkan rasa bangga karena dapat memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dan berkontribusi lebih dengan cara menciptakan inovasi-inovasi baru.

4.10.1 Program Budaya

Kegiatan program budaya dan perubahan yang telah berhasil dijalankan selama Triwulan III-2017 adalah:

1. *Change Partner Forum 2017 – Mid Year Review Change Partner Forum* (CPF) merupakan forum komunikasi transformasi melibatkan

insan OJK (dengan jabatan Staf – Deputi Direktur) yang diberikan kepercayaan oleh pemimpin satuan kerjanya untuk menyusun program budaya satuan kerja sesuai dengan nilai-nilai strategis OJK (INPRESIV) dan tema program budaya pada tahun berjalan. Para *Change Partners* dari seluruh satuan kerja OJK dibekali kemampuan (*skill*) teknis dalam mengelola program, *monitoring* dan media komunikasi perubahan.

CPF–Mid Year bertujuan untuk mengevaluasi program budaya semester I-2017 yang telah berjalan, dan penyusunan *action plan OJK Way* untuk periode 2017-2022. *Sharing session* dari perwakilan *Change Partner* juga dilakukan pada CPF dengan topik bagaimana tips dan trik yang efektif dalam menggerakkan Insan OJK di satuan kerja dalam menjalankan program budaya *OJK Way*.

2. *Change Partner* (CP) & Manajer IKU dan Anggaran (MIA) Forum 2017
Kegiatan *Change Partner* & Manajer IKU dan Anggaran Forum 2017 (CP & MIA Forum) diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Ketua Dewan Komisiner OJK periode 2017-2022 terkait program peningkatan efisiensi dan efektifitas organisasi sebagai upaya mendukung komitmen OJK menjadi otoritas yang kredibel dan relevan bagi industri jasa keuangan. Pada forum dimaksud Ketua Dewan Komisiner memberikan arahan tentang urgensi program peningkatan efisiensi dan efektifitas organisasi

4.10.2 Monitoring Program Budaya

Di bidang *monitoring* program budaya, OJK menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya yang telah dilaksanakan, di antaranya yaitu:

1. *Monitoring Program Budaya* 2017: Konsultasi, *Offsite & Onsite Monitoring*
OJK memberikan kesempatan kepada masing-masing satuan kerja untuk melakukan penilaian pelaksanaan program budaya melalui metode *self-assessment* yang didukung bukti-bukti pelaksanaan program budaya. Penilaian dan pengumpulan bukti-bukti tersebut dilakukan Triwulan dengan cara *online* melalui aplikasi *dashboard monitoring system* (ojkway.com) dan dapat diakses oleh seluruh satuan kerja.

Dalam rangka memastikan berjalannya program budaya, OJK bekerja sama dengan pihak eksternal melaksanakan kunjungan langsung (*onsite monitoring*) ke Satuan Kerja di Kantor Pusat maupun Kantor Regional dan Kantor OJK. Pelaksanaan *onsite monitoring* ini untuk mengetahui validitas data laporan *self-assessment* yang disampaikan Satuan Kerja terkait pelaksanaan program budaya. Selain memverifikasi laporan, *onsite monitoring* juga mempunyai fungsi untuk memberikan konsultasi kepada satker yang membutuhkan asistensi atau memiliki isu strategis dalam menjalankan program budaya OJK.

Berdasarkan hasil kalibrasi *offsite* dan *onsite monitoring*, didapatkan nilai Indeks Kinerja Utama (IKU) Budaya Triwulan III 2017 dengan nilai 5,47 secara *OJK-wide*.

2. Survei Budaya OJK 2017
Survei Budaya OJK 2017 telah dilaksanakan pada periode laporan untuk mengidentifikasi tingkat internalisasi nilai-nilai strategis OJK (INPRESIV), dan mengetahui seberapa jauh INPRESIV sudah tumbuh menjadi perilaku bersama serta faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat tumbuhnya nilai-nilai tersebut pada seluruh insan OJK. Total responden Survei Budaya 2017 sebanyak 3,898 insan OJK dengan total pegawai yang mengisi kuesioner sejumlah 3,290 responden (84,4%). Berdasarkan

hasil survey, implementasi nilai INPRESIV (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Inklusif, Visioner) secara OJK-wide sudah mencapai nilai 5,07 dari skala 6 (84,5%) yang berarti bahwa sebagian besar insan OJK telah memahami dan berpegang teguh pada nilai INPRESIV dalam bekerja sehari-hari. Dimensi yang mendapatkan nilai tertinggi pada survei budaya 2017 adalah dimensi nilai Profesionalisme, sedangkan dimensi dengan nilai terendah jatuh pada nilai Visioner.

4.10.3 Media Komunikasi Budaya dan Perubahan

Di bidang media komunikasi budaya, OJK telah melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media kampanye, di antaranya:

1. Penerbitan Majalah Integrasi

Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal OJK yang diterbitkan untuk mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan terkait program perubahan dan budaya serta pencapaian-pencapaian yang telah diraih OJK dalam periode penerbitan. Selama periode laporan, OJK menerbitkan tiga edisi Majalah Integrasi dengan tema "Pemimpin Baru, Semangat Menggebu" dengan ulasan mengenai ADK baru periode 2017-2022, "Kerja Bersama, Bersama Kerja" dengan rubrikasi mengenai semangat HUT RI ke 72, dan "Melanjutkan Langkah Perubahan" dengan fokus pembahasan mengenai efisiensi.

Gambar IV - 1

Tampilan Majalah Integrasi Triwulan III-2017



2. Pesan Anggota Dewan Komisiner

OJK melakukan penyebaran Pesan Ketua Dewan Komisiner dan Pesan Anggota Dewan Komisiner melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK. Pesan yang didistribusikan secara masif tersebut bertujuan mendorong para Insan OJK agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja untuk para pemangku kepentingan, dan juga pesan prioritas kebijakan OJK ke depan.

3. Pengkinian *Screen Saver* Nilai Strategis, Program Budaya, dan Kampanye Efisiensi

Pengkinian *screen saver* yang ditayangkan pada monitor komputer seluruh insan OJK terus dilakukan untuk mengkampanyekan program budaya, nilai strategis dan program efisiensi dengan menarik dan mudah dimengerti

4. Pengembangan Sosial Media OJK

Pada triwulan III-2017 OJK terus menggunakan Media sosial untuk mengkampanyekan nilai-nilai strategis OJK dan menyampaikan program transformasi budaya yang tengah dilaksanakan di OJK.

Akronim

AAJI	: Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
AAS	: Australia Awards Scholarship
AASI	: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
AAUI	: Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
ABIF	: ASEAN Banking Integration Framework
ACIA	: ASEAN Comprehensive Investment Agreement
ACKS	: Aku Cinta Keuangan Syariah
ADK	: Anggota Dewan Komisiner
AFAS	: ASEAN Framework Agreement on Services
AHM	: Anugerah Media Humas
AIMRPK	: Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas
AML	: Anti Money Laundering
APERD	: Agen Penjual Efek Reksa Dana
APRA	: Australia Prudential Regulatory Authority
ASBANDA	: Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASIC	: Australia Securities and Investment Commission
ATIGA	: ASEAN Trade in Goods Agreement
ATISA	: ASEAN Trade In Services Agreement
ATM	: Automatic Teller Machine
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Risiko
AUTP	: Asuransi Usaha Tani Padi
BAE	: Biro Administrasi Efek
BAMPPPI	: Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia
BAPMI	: Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
BAVI	: Badan Arbitrase Ventura Indonesia
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BIN	: Badan Intelijen Negara
BMAI	: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia
BMDP	: Badan Mediasi Dana Pensiun
BMPP	: Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan
BMPPPI	: Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia
BMT	: Baitul Mal Wat Tamwil
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP	: Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOPO	: Beban Operasional Pendapatan Operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPK-RI	: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPR	: Bank Perkreditan Rakyat
BRC	: BPD Regional Champion
BS	: Board Seminar
BSA	: Basic Saving Account
BUK	: Bank Umum Konvensional

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUS	: Bank Umum Syariah
CA	: Combined Assurance
CBRC	: China Banking Regulatory Commission
CDD	: Customer Due Diligence
CFT	: Combating the Financing of Terrorism
CKPN	: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CR	: Cash Ratio
CRM	: Costumer Relationship Management
CTKI	: Calon Tenaga Kerja Indonesia
DCC	: Data Center Collocation
DES	: Daftar Efek Syariah
DFSA	: Dubai Financial Service Authority
DJPU	: Direktorat Jendral Pengelola Utang
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK PPIP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti
DPPK PPMP	: Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DRC	: Disaster Recovery Center
EBA-SP	: Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi
EDC	: Electronic Data Capture
Eduwan	: Edukasi Wartawan
ETP	: Electronic Trading Platform
FAPM	: Forum Akuntan Pasar Modal
FGD	: Focus Group Discussion
FKMM	: Forum Koordinasi Makroprudensial-Mikroprudensial
FKSSK	: Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
FREKS	: Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah
FSA	: Financial Services Agency
FSAP	: Financial Sector Assessment Program
FSC	: Financial Service Commission
FSS	: Financial Supervisory Service
FTA	: Free Trade Agreement
GCG	: Good Corporate Governance
GeNTa PM	: Gerakan Nasional Cinta Pasar Modal
GIZ	: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GMRA	: Global Master Repurchase Agreement
GRC	: Governance Risk and Compliance
HKHPM	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
ICMA	: International Capital Market Association
IDB	: Islamic Development Bank
IFAC	: International Federation of Accountant
IFAR	: Investasi Terhadap Total Aset
IFC	: International Finance Corporation

IFCC	: Integrated Financial Customer Care
IFN	: International Finance News
IFSB	: Islamic Financial Services Board
IGBF	: Indonesia Government Bond Futures
IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
IJEPA	: Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement
IJK	: Industri Jasa Keuangan
IKI	: Indikator Kinerja Individual
IKNB/NBFI	: Industri Keuangan Non Bank/Non Bank Financial Industry
IKU/KPI	: Indikator Kerja Utama/Key Performance Indicators
ILM	: Iklan Layanan Masyarakat
IMF	: International Monetary Fund
INDOBEX	: Indonesia Bond Indexes
IOSCO	: International Organization of Securities Commission
IRR	: Integrated Risk Rating
IS	: Inisiatif Strategis
JARING	: Jangkau, Sinergi, dan Guideline
JII	: Jakarta Islamic Index
JPSK	: Jaring Pengaman Sistem Keuangan
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kemenaker	: Kementerian Ketenagakerjaan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
KI	: Kredit Investasi
KIK	: Kontrak Investasi Kolektif
KK	: Kredit Konsumsi
KKB	: Kredit Kendaraan Bermotor
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KMK	: Kredit Modal Kerja
KOINKU	: Kompetisi Inklusi Keuangan
KOJK	: Kantor OJK
KPD	: Kontrak Pengelolaan Dana
KPJKS	: Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah
KPMM/CAR	: Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio
KPMR	: Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
KPPU	: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha
KPR	: Kredit Pemilikan Rumah
KR	: Kantro Regional
KSEI	: Kustodian Sentral Efek Indonesia
KUB	: Kelompok Usaha Bersama
KYC	: Know Your Customer
KYFC	: Know Your Financial Conglomerates
LAPS	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LAPSPI	: LAPS Perbankan
LAPSPI	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia
LDR	: Loan to Deposit Ratio
LJK	: Lembaga Jasa Keuangan

LJKNB	: Lembaga Jasa Keuangan Non Bank
LKM	: Lembaga Keuangan Mikro
LoI	: Letter of Intent
LoU	: Letter of Understanding
LPEI	: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPHE	: Lembaga Penilaian Harga Efek
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
LTV	: Loan to Value
MCRA	: Market Conduct Risk Assessment
MEA/AEC	: Masyarakat Ekonomi Asean/Asean Economic Community
MI	: Manajer Investasi
MIA	: Manajer IKU dan Anggaran
MoU	: Memorandum Of Understanding/Nota Kesepahaman
MPSJKI	: Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSAK	: Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja
NAB	: Nilai Aktiva Bersih
NIM	: Net Interest Margin
NPF	: Non Performing Finance
NPL	: Non-Performing Loan
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
ORP	: Outreach Program
OSINT	: Open Source Intelligence
PCE	: Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen
PCP	: Pendidikan Calon Pejabat
PCS	: Pendidikan Calon Staf
PCT	: Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
PDN	: Posisi Devisa Neto
PE	: Perusahaan Efek
PELAKU	: Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan Akses Keuangan UMKM
PESTEL	: Politic, Economy, Social, Technology, Environment, and Law
PI	: Penasihat Investasi
PKR	: Pasar Keuangan Rakyat
PM	: Pasar Modal
PMK	: Protokol Manajemen Krisis
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
POKTAN	: Kelompok Tani
PPF	: Program Pendidikan Formal
PPG	: Program Pengendalian Gratifikasi
PPK	: Program Pengembangan Kompetensi
PPKB	: Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang
PPKD	: Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah
PPL	: Program Pendidikan Lanjutan
PPP	: Program Penugasan Pegawai
PSP	: Pemegang Saham Pengendali
PUB	: Penawaran Umum Berkelanjutan

PUJK	: Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Rakerstra	: Rapat Kerja Strategis
RBS	: Risk Based Supervisory
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RDK	: Rapat Dewan Komisioner
REPO	: Repurchase Agreement
RGS	: Risk and Governance Summit
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSS	: Rumah Sehat Sejahtera
Satgas	: Satuan Tugas
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner
SEOJK	: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
SAI	: Sistem Informasi Audit Internal
SID/DIS	: Sistem Informasi Debitur/Debtor Information System
SIELOG	: Sistem Informasi Ekspedisi Logistik
SIMARIO	: Sistem Informasi Manajemen Risiko
SIMFOSIA	: Sistem Informasi Sumber Daya Manusia
SiMOLEK	: Mobil Literasi Keuangan
SimPel	: Simpanan Pelajar
SIMPEL	: Sistem Pengelolaan Kinerja
SIPMI	: Sistem Informasi Pelaporan Market Intelijen
SIPP	: Sistem Informasi Perusahaan Pembiayaan
SISKA	: Sistem Aplikasi Keuangan OJK
SISPANDI	: Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas
SISPUAS	: Sistem Informasi Penatausahaan Aset
SJK	: Sektor Jasa Keuangan
SKM	: Sahat Keuangan Maritim
SKP	: Satuan Kredit Profesi
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLA	: Service Level Agreement
SMES	: Sederhana, Mudah, Ekonomis, dan Segera
SNKI	: Strategis Nasional Keuangan Inklusif
SNLKI	: Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia
SPE	: Sistem Pelaporan Emiten
SPP/WBS OJK	: Sistem Pelaporan Pelanggaran OJK/Whistle Blowing System OJK
SRO	: Self Regulatory Organization
STP	: Straight Through Processing
STTD	: Surat Tanda Terdaftar
SUN	: Surat Utang Negara
SWOT	: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
TKHT	: Tunjangan Kesehatan Hari Tua
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia

TOT	: Training of Trainers
TPHT	: Tunjangan Perumahan Hari Tua
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
UMKM/MSME	: Usaha Mikro, Kecil dan Menengah/Micro, Small, and Medium Enterprises
UU	: Undang-Undang
UU LKM	: Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
UU OJK	: Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
WAPERD	: Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
WBS	: Whistle Blowing System
WCFSL	: Working Committee on Financial Services Liberalisation
WMI	: Wakil Manajer Investasi
WPEE	: Wakil Penjamin Emisi Efek
WPPE	: Wakil Perantara Pedagang Efek
XBRL	: Extensible Business Reporting Language
YKP OJK	: Yayasan Kesejahteraan Pekerja
yoy	: year over year
ytd	: year to date
ZMET	: Zaltman Metaphor Elicitation Technique

